

Membincang Moderasi Beragama

Sebuah Intisari Serial Webinar

Jamhari Makruf, Idris Thaha
Zaenal Muttaqin, Fikri Fahrul Faiz
Febiyana

Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM)

UIN Jakarta

2021

Membincang Moderasi Beragama

Sebuah Intisari Serial Webinar

**Jamhari Makruf, Idris Thaha
Zaenal Muttaqin, Fikri Fahrul Faiz
Febiyana**

**Membincang Moderasi Beragama:
Sebuah Intisari Serial Webinar**

ISBN 978-623-6079-19-5

PENULIS:

Lukman Hakim Saifuddin, Azyumardi Azra,
Komaruddin Hidayat, Alissa Wahid, Siti Ruhaini Dzuhayatin,
Habib Husein Ja'far al-Hadar, Oki Setiana Dewi, dkk.

EDITOR:

Jamhari Makruf, Idris Thaha
Zaenal Muttaqin, Fikri Fahrul Faiz
Febiyana

LAYOUTER:

Ahmad Jajuli

PENERBIT:

PPIM UIN Jakarta
Gedung PPIM, Kampus 2 UIN Jakarta
Jalan Kertamukti No. 5 Cireundeu, Ciputat Timur,
Kota Tangerang Selatan,
Banten 15419

All Rights Reserved

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang.

Tidak dibenarkan memproduksi ulang setiap bagian artikel, ilustrasi,
dan isi buku dalam bentuk apa pun juga.

Pengantar

Ismatu Ropi

Keragaman sosial merupakan karakteristik utama bangsa Indonesia. Selain bahasa, suku, adat istiadat, keragaman juga muncul dalam rupa keyakinan keagamaan masyarakatnya. Suku Jawa, Sunda, Bugis, Minang dan suku-suku lain dengan bahasa dan kultur masing-masing dan keragaman keagamaan (internal keagamaan dan eksternal keagamaan) merupakan bagian dari bukti antropologis karakteristik keragaman tersebut.

Diakui atau tidak, keragaman menghadirkan dua kondisi. Kondisi pertama, keragaman di berbagai aspek menjadi modal sosial positif dalam pembangunan kehidupan sosial masyarakatnya. Keanekaragaman ekspresi kebudayaan memungkinkan Indonesia hadir sebagai sebuah negara yang kaya secara kultural. Kondisi kedua, ``keragaman juga potensial menghadirkan risiko bagi terciptanya konflik sosial yang bisa berakibat pada keruntuhan ikatan sosial itu sendiri.

Kondisi pertama bisa dicapai jika nilai-nilai luhur kerukunan, toleransi, dan penghargaan terhadap perbedaan bisa terus dijaga, dirawat, dan ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakatnya. Sebaliknya, kondisi kedua, bukan tidak mungkin terjadi ketika kesadaran untuk menghargai dan mengapresiasi perbedaan begitu rendah.

Sebagai bangsa yang dikenal cukup dekat dengan kehidupan keagamaan, salah satu sendi sosial yang perlu dijaga adalah sikap penghormatan dan apresiasi di sisi keagamaan. Sikap demikian bisa diterapkan melalui cara-cara yang bisa melindungi keyakinan keagamaan seseorang sekaligus juga mendorong penghormatan dan apresiasi terhadap orang yang berbeda keyakinan dengan dirinya.

Salah satu cara yang ditawarkan kepada masyarakat adalah sikap keberagaman yang moderat dalam konsep moderasi beragama. Sebab

ia mendorong cara beragama yang seimbang dengan menjaga keyakinan keagamaan sekaligus menghargai setiap bentuk perbedaan yang ditemui.

Sejak beberapa waktu terakhir, Kementerian Agama RI sendiri menggaungkan gagasan dan implementasi moderasi beragama. Kementerian menerbitkan buku *Moderasi Beragama* (2019) yang menjadi pedoman dalam mengetahui definisi dan indikator penting moderasi beragama itu sendiri.

Kami sendiri berkeyakinan, moderasi beragama merupakan gagasan yang relevan untuk diterapkan. Salah satu alasannya adalah takdir hidup bangsa Indonesia sebagai bangsa majemuk. Karenanya, sikap penghormatan dan toleransi sudah harus menjadi bagian dari kita.

Alasan lainnya, sebagai umat beragama, tentu saja agama memainkan peran yang penting sekali, tanpa agama, saya kira bangsa Indonesia tidak mempunyai jati diri. Jadi selain kemajemukan, takdir lain bangsa ini adalah bangsa yang meyakini dan mempraktikkan agama.

Selain itu, kita semua merasakan bahwa agama mempunyai dampak yang positif terhadap pembangunan bangsa. Dan, moderasi beragama menjadi hal relevan dalam mengoptimalkan agama sebagai pemberi dampak positif bagi kebangunan bangsa ini.

Demikian beberapa alasan mengapa moderasi beragama menjadi begitu relevan bagi bangsa ini. Moderasi beragama menjadi jalan penting dalam mengkreasikan kerukunan masyarakat untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.

Menyadari pentingnya moderasi beragama sebagai tawaran cara beragama di tengah-tengah keragaman keyakinan keagamaan, Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta mencoba terlibat dengan turut menggali nilai-nilainya melalui diskusi dalam format webinar tentang moderasi beragama yang dilakukan secara berseri.

Webinar kami lakukan dengan menghadirkan sejumlah narasumber. Selain akademisi atau peneliti, para narasumber juga berlatarbelakang menteri dan wakil menteri, para atase pendidikan dan kebudayaan Kedutaan Besar RI, kalangan pesantren, aktivis sosial, politisi, guru, pekerja media, hingga kelompok muda milenial.

Keragaman ini memungkinkan kami bisa menyajikan diskusi tentang moderasi beragama dari berbagai perspektif dan pengalaman. Namun benang merahnya sama, yaitu pentingnya menggali nilai-nilai moderasi beragama untuk kemudian diimplementasikan sebagai cara hidup beragama sekaligus berbangsa di tengah-tengah realitas sosial yang plural.

Alhamdulillah, webinar ini berhasil terlaksana dengan baik hingga 20 webinar, mempertemukan para narasumber dan partisipan dari berbagai latar belakang. Banyak aspek menarik yang disampaikan para narasumber selama diskusi berlangsung. Mulai dari definisi, rujukan teologis, hingga landasan filosofis moderasi beragama yang berhasil digali dari nilai-nilai kebijaksanaan lokal (*local wisdom*) Indonesia.

Mengingat diskusi ini sangat penting, PPIM UIN Jakarta memutuskan untuk menerbitkan presentasi yang disampaikan para narasumber dalam format buku. Guna menjaga kemurnian gagasan masing-masing narasumber, penerbitan ini dilakukan dengan mentranskripsi presentasi untuk kemudian disarikan menjadi sebuah artikel.

Agar benang merah tulisan ini bisa terlihat dari 20-an webinar dengan 60-an lebih narasumber, masing-masing artikel dikelompokkan ke dalam sejumlah bagian. Terdapat sembilan bagian yang menjadi benang merah hasil diskusi para narasumber.

Kesembilan bagian ini adalah konsep tentang moderasi beragama dan perspektif pengalaman masing-masing agama di Indonesia; peran keluarga dan kelompok perempuan dalam mendorong moderasi beragama; pandangan sarjana luar negeri tentang moderasi beragama di Indonesia dan bagaimana moderasi beragama sendiri menjadi bagian diplomasi kebudayaan Indonesia ke sejumlah negara mitra.

Selanjutnya, peran santri, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, dan inovasi pesantren sebagai bagian penting dalam mendorong moderasi beragama; peran dan kerentanan masjid dari infiltrasi sikap keagamaan radikal dan peran organisasi masyarakat Islam dalam mendorong moderasi beragama. Lalu, politik identitas dan polarisasi keagamaan di dunia maya; moderasi di media.

Benang merah lain yang cukup penting adalah perspektif dan peran pemuda dalam mendorong moderasi beragama. Menyusul situasi terkini, benang merah lain yang diangkat jadi bagian buku ini adalah moderasi beragama dalam geliat filantropi dan situasi pandemi. Wassalam.

Ciputat, Juni 2021

Daftar Isi

Pengantar | Ismatu Ropi _____ **iii**

Daftar Isi _____ **vii**

Pendahuluan

Moderasi Beragama dan Pentingnya Peran Bersama _____ **1**

BAGIAN 1

Moderasi Beragama: Konsep, Perspektif, dan Pengalaman Agama-Agama di Indonesia

Mengapa Moderasi Beragama? _____ **11**

Islam Wasathiyah: Moderasi Beragama ala Muslim Indonesia _____ **17**

Radikalisme: Akar dan Penanganannya _____ **21**

Moderasi Beragama: Perspektif Muslim _____ **25**

Moderasi Beragama: Perspektif Hindu _____ **31**

Moderasi Beragama: Perspektif Kristen _____ **35**

Moderasi Beragama: Perspektif Konghucu _____ **39**

BAGIAN 2

Keluarga dan Perempuan dalam Moderasi Beragama

Orang Tua dalam Transmisi Nilai Moderasi Beragama _____ **45**

Peran Keluarga dalam Moderasi Beragama _____ **49**

Homeschooling dan Moderasi Beragama _____ **53**

Moderasi Beragama, Tantangan Intoleransi, dan Peran Perempuan _____ **59**

Moderasi Beragama: Etika Publik untuk Kehidupan Berbangsa _____ **63**

Moderasi Beragama dan <i>Parenting</i> yang Baik_____	67
Meneguhkan Islam Wasathiyah untuk Indonesia yang Majemuk_____	69

BAGIAN 3

Moderasi Beragama Indonesia:

Pandangan Dunia dan Diplomasi Kebudayaan

Islam, Moderatisme, dan Pendidikan_____	75
Muhammadiyah dan Sikap Islam Moderat_____	81
Indonesia dalam Perspektif Tokyo_____	83
Indonesia dan Moderasi Beragama_____	85
Indonesia dan Diplomasi Moderasi Beragama_____	87
Pelajaran Moderasi Beragama dari Thailand_____	91
Diplomasi Moderasi Beragama di Belanda_____	95
Moderasi Beragama dan Diplomasi di Filipina_____	99

BAGIAN 4

Santri, Pendidikan Agama Islam, dan Inovasi Pesantren

Peran Santri dalam Moderasi Beragama_____	105
Ekstremisme dan Daya Lenting Pesantren_____	109
Moderasi Beragama: Warisan Masa Lalu dan Peran Santri_____	115
Pentingnya Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Pendidikan_____	119
Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam_____	123
Pentingnya Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam_____	129
Mengajarkan Toleransi pada Santri_____	133
Implementasi Fikih Sosial bagi Moderasi Beragama_____	137
Pesantren Welas Asih: Inovasi Pesantren di Masa Kini_____	141

BAGIAN 5

Masjid dan Organisasi Masa Islam

Masjid, Buletin Jumat, dan Persebaran Radikalisme_____	149
Implementasi Moderasi Beragama di Masjid: Upaya Dewan Masjid Indonesia_____	155
Merawat Fungsi Pusat Peradaban Masjid_____	159
Kebijakan Moderasi Beragama Pemerintah di Masjid_____	163

Moderasi Beragama, Muhammadiyah, dan Hak Perempuan_____	167
Nahdlatul Ulama dan Moderasi Beragama_____	173
Ulama dan Pandangan Negara Bangsa_____	177

BAGIAN 6

Politik Identitas dan Polarisasi Keagamaan di Dunia Maya

Politik Identitas dan Moderasi Beragama_____	187
Politik Identitas dan Pandangan Wakil Rakyat_____	201
Konservatisme di Media Sosial_____	209
Narasi Keagamaan di Dunia Maya_____	213
Pertarungan Wacana di Media Sosial_____	221

BAGIAN 7

Moderasi Beragama dan Media

Mediatisasi Islam Moderat di Indonesia_____	227
Moderasi Beragama dan Media Online_____	231
Moderasi Beragama Indonesia: Catatan Jurnalis Internasional_____	237
Buletin dan Penyuaaran Moderasi Beragama_____	241
Media Sosial dan Polarisasi Sosial_____	245
Kontestasi Paham Keagamaan di Media Sosial_____	249
Media Sosial untuk Moderasi Beragama_____	253

BAGIAN 8

Moderasi Beragama:

Perspektif dan Peran Pemuda

Menghadirkan Pesan Moderasi di Ruang Digital_____	257
Islam, Perempuan, dan Dialog dengan Realitas Sosial_____	261
Dakwah kepada Muslim Milenial_____	265
Hindari Isu Keislaman Sensitif_____	269
Milenial Katolik dan Moderasi Beragama_____	273
Pentingnya Dialog_____	277
Milenial dan Pesan Damai_____	279
Moderasi Beragama: Warisan Nusantara_____	281
Keragaman adalah Nada-Nada Indah_____	285
Milenial Perlu Kerjasama_____	287
Global Peace Foundation Menyuarakan Moderasi Beragama_____	291

Peran Gema Perdamaian dan Moderasi Beragama_____	295
Peace Leader Indonesia dalam Menyuarakan Moderasi Beragama_____	297

BAGIAN 9

Moderasi Beragama dalam

Filantropi dan Pandemi Covid 19

Geliat Filantropi Islam_____	301
Filantropi Islam: Pengalaman Nahdlatul Ulama_____	305
Memperluas Sasaran Filantropi_____	309
Filantropi Memperkuat Moderasi Beragama_____	313
Religiusitas dan Pandemi Covid 19_____	317
Majelis Ulama Indonesia, Wasathiyah Islam, dan Fatwa-Fatwa Seputar Pandemi_____	323
Mengaktualkan Fungsi Moderasi Beragama_____	329

PENDAHULUAN

Moderasi Beragama dan Pentingnya Peran Bersama

Jamhari Makruf

INDONESIA merupakan negara yang memiliki banyak anugerah yang tak didapat negara-bangsa lain di dunia. Salah satu anugerah tersebut adalah keanekaragaman kehidupan sosial masyarakatnya yang mengambil rupa dalam bentuk pluralitas etnik, bahasa, budaya, dan agama. Pluralitas ini menjadi modal sosial penting dalam mendorong kemajuan hidup berbangsa-bernegara. Tentu saja, kemajuan hidup demikian sangat dimungkinkan dicapai apabila pluralitas tersebut terkelola dengan baik di mana antarkomunitas sosial yang berbeda bisa saling mengisi satu sama lain. Sebaliknya jika tidak terkelola dengan baik, pluralitas sosial justru berpotensi melahirkan konflik sosial yang sangat merugikan kehidupan bernegara-berbangsa sendiri.

Kendati secara keseluruhan relatif mampu mengelola pluralitas yang ada, namun kita tak menutup mata atas adanya rekaman historis tentang sejumlah kegagalan kita dalam merawat pluralitas tersebut. Konflik sosial berlatar etnik dan agama beberapa kali terjadi di sepanjang sejarah perjalanan bangsa ini. Di era reformasi misalnya, kita masih ingat sejumlah konflik sosial berlatar agama meletus di Ambon, Maluku, Poso dan di sejumlah daerah lain yang mengakibatkan banyak korban jiwa (Dave McRae, *A Few Poorly Organised Men: Interreligious Violence in Poso Indonesia*, 2013). Begitu juga beberapa aksi teror seperti pemboman rumah ibadah, diskriminasi atas kelompok minoritas keagamaan, maupun persekusi atas nama penistaan agama (Setara Institute, *Negara Harus Bersikap*, 2010) menggambarkan masih adanya tantangan yang perlu kita hadapi dalam merawat anugerah kemajemukan ini. Situasi akan semakin rumit ketika ideologi keagamaan transnasional juga masuk ke tanah air dan meniupkan semangat homogenitas paham dan praktik keagamaan pada masyarakat agama.

Kondisi demikian pada akhirnya menuntun kita untuk mencari jalan penyelesaian yang memungkinkan masyarakat agama-agama bisa menjalankan kewajiban agamanya dengan tenang dan secara bersamaan memiliki sikap penghargaan terhadap perbedaan. Beberapa waktu terakhir, pemerintah melalui Kementerian Agama RI (Kemenag) menggulirkan pentingnya mengimplementasikan 'moderasi beragama' dalam kehidupan keberagamaan masyarakat agama di Tanah Air. Berbagai forum pertemuan yang dihadiri para akademisi, tokoh agama, birokrasi, para mahasiswa, dan publik lainnya menjadi panggung sosialisasi gagasan tersebut. Bahkan moderasi beragama juga didorong menjadi topik-topik utama kajian akademik serius dalam konferensi akademik maupun publikasi jurnal.

Keseriusan Kemenag juga dilakukan dengan menerbitkan sebuah buku, *Moderasi Beragama* (2019), yang menjadi rujukan utama dalam memahami pengertian dan batasan moderasi beragama. Pada buku ini, Kemenag mendefinisikan moderasi beragama sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengamalan agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik beragama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif). Keseimbangan atau jalan tengah dalam praktik beragama ini dinilai sebagai sebuah keniscayaan untuk menghindarkan masyarakat agama dari sikap berlebihan, fanatik dan revolusioner dalam beragama. Karena posisinya yang berada dalam posisi seimbang, moderasi beragama dipandang sebagai solusi atas eksistensi dua kutub ekstrem dalam beragama, yaitu antara kutub ultra konservatif atau ekstrem kanan di satu sisi dan liberal atau ekstrem kiri di sisi lain (*Moderasi Beragama*, 2019: 18).

Lebih jauh, moderasi beragama juga dinilai sebagai kunci utama dalam mendorong lahirnya toleransi dan kerukunan hidup masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Moderasi beragama menjadi kunci keseimbangan dalam memelihara peradaban dan terciptanya perdamaian, alih-alih mengedepankan sikap berlebihan dalam bentuk ekstrimisme maupun dan liberalisme beragama. Melalui cara tersebut, masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Dan pada masyarakat multikultural seperti Indonesia, moderasi beragama tidak lagi jadi semata pilihan, melainkan sebuah keharusan (*Moderasi Beragama*, 2019: 18).

Dari definisi yang disampaikan Kemenag, kita bisa menyepakati bahwa moderasi beragama diperlukan sebagai cara dan sikap beragama

penuh disiplin namun tetap mengapresiasi perbedaan. Bentuknya bisa dimunculkan dalam praktik keberagamaan yang secara bersamaan menekankan ketaatan beragama dan penghargaan atas perbedaan sekaligus, tidak melakukan pemaksaan, alih-alih bersikap liberal bahkan ekstrim. Dengan demikian, moderasi beragama menjadi jalan bagi kita dalam mengekspresikan paham dan praktik keagamaan di tengah-tengah realitas keberbedaan seperti dengan mudah kita temukan dalam realitas sosial Indonesia maupun belahan dunia yang lebih luas.

Sikap keberagamaan demikian tentu saja merupakan sebuah keniscayaan jika melihat realitas sosiologis-antropologis Indonesia yang menjadi dasar pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan sosial keagamaan kita. Pertama, kita ditakdirkan hidup di Indonesia dan menjadi bangsa majemuk dalam berbagai aspek, baik etnik, bahasa, tradisi, bahkan agama dan kepercayaan. Realitas demikian menjadikan toleransi dan kerukunan menjadi sebuah keharusan bagi kita. Kedua, agama sebagai bagian yang melekat (inheren) dari kehidupan kita. Agama di kalangan kita, masyarakat Indonesia, merupakan bagian tak terpisahkan karena ia memainkan peran yang sangat penting dengan menjadi sumber nilai-aturan dalam kehidupan keseharian.

Ketiga, secara fungsional, agama memiliki peran yang berdampak positif terhadap pembangunan bangsa. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan spiritual individu, agama juga diketahui memiliki fungsi-fungsi yang membangun emosi keagamaan dan kohesi sosial masyarakatnya. Berdasar fungsi ini, maka moderasi beragama menemu relevansi guna merawat dan mengokohkan kerukunan Indonesia. Keempat, kenyataan dunia hari ini dan hari-hari yang akan datang dimana teknologi telah menghubungkan antara satu individu atau komunitas dengan berbagai komunitas lain dari berbagai penjuru dunia menjadikan kehidupan manusia menjadi semakin luas tingkat kemajemukannya. Realitas kemajemukan demikian tentu saja menuntut perlunya sikap keberagamaan yang bijak dalam menyikapi perbedaan.

Pentingnya Peran Bersama

Namun moderasi beragama sebagai cara beragama yang menawarkan jalan tengah antara kesetiaan menjalankan ajaran agama dan penghargaan terhadap perbedaan bukan hanya tanggungjawab satu individu atau satu komunitas saja. Moderasi beragama harus menjadi kesadaran bersama seluruh elemen sosial umat agama-agama, mulai dari para tokoh agama, organisasi massa keagamaan, media,

pemuda, perempuan, dan keluarga. Kesadaran yang mendorong keshalihan beragama di satu sisi sekaligus meniscayakan kebijaksanaan dalam mengapresiasi perbedaan yang mereka temukan sebagai anggota masyarakat yang majemuk.

Pelibatan peran tokoh agama seperti ulama, pendeta, biksu dan lainnya sangat penting mengingat mereka merupakan elemen yang memiliki tingkat kepercayaan masyarakat yang sangat tinggi dibanding lainnya. Hal ini terkonfirmasi dari penelitian PPIM beberapa waktu terakhir yang menyatakan bahwa 70% masyarakat Indonesia percaya pada pendapat ulama tentang isu sosial politik, ekonomi, dan keagamaan. Mereka selalu mempertimbangkan pendapat ulama dalam memutuskan perkaranya. Kepercayaan ini lebih tinggi dibanding kepercayaan mereka pada pejabat pemerintahan atau lembaga birokrasi negara. Dengan peran sentral mereka tentu saja tokoh agama menjadi pihak paling penting dilibatkan dalam penyuaaran sikap moderasi beragama ini.

Sejalan dengan kepercayaan terhadap tokoh agama, peran organisasi-organisasi keagamaan juga tidak kalah penting dalam melakukan pengarusutamaan moderasi beragama. Tokoh agama dan organisasi massa keagamaan merupakan dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Sebab tokoh agama sendiri merupakan elemen penting dalam struktur organisasi massa keislaman. Maka, pelibatan organisasi massa keagamaan seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Mathla'ul Anwar, Persatuan Islam, Nahdlatul Wathan, Konferensi Waligereja Indonesia, Majelis Umat Kristen Indonesia, Persatuan Umat Buddha Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, dan lainnya merupakan sebuah keharusan.

Elemen lain yang dibutuhkan berperan dalam pengarusutamaan moderasi beragama adalah industri media dan para insan yang berkegiatan di dalamnya. Media tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyampaian informasi, hiburan, melainkan juga fungsi edukasi. Berbagai fungsi ini menjadi satu kesatuan penting fungsi yang tidak bisa diabaikan urgensinya bagi masyarakat Indonesia, terutama fungsi informasi dan edukasi. Implementasi moderasi beragama sangat membutuhkan dukungan industri dan pelaku media untuk memberikan informasi yang mendukung pengembangan sikap toleransi sekaligus edukasi yang memperkuat kohesi sosial yang majemuk.

Selain industri dan pelaku media yang bersifat konvensional, harapan yang sama juga disematkan pada industri dan pelaku media baru seperti

digital content creator dalam bentuk digital media dan online media. Sejalan dengan kemajuan teknologi internet, media berkembang maju sehingga memungkinkan masyarakat juga terlibat dalam memproduksi konten-konten media melalui akun media sosial mereka. Media sosial yang sejatinya ditujukan sebagai sarana komunikasi dan hiburan, kini bertambah fungsinya sebagai media informasi dan edukasi. Melihat luasnya peran media baru maka pelibatan para pelaku media baru media sosial dalam ‘membumikan’ moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat juga tak bisa diabaikan.

Pemuda dan generasi milenial adalah elemen sosial lain yang harus diajak terlibat dalam pengarusutamaan moderasi beragama. Pentingnya pelibatan mereka karena masa depan generasi bangsa ini terletak di pundak mereka. Terlebih jumlah mereka akan menyumbang jumlah generasi produktif di masa depan. Badan Pusat Statistik RI (BPS) mencatat, Indonesia bakal menikmati bonus demografi pada dekade 2030-2040 mendatang dimana sekitar 64% penduduk Indonesia masa itu itu mencapai usia produktif. Jangan sampai bonus demografi malah menjadi bencana bangsa. Karena itu perlu dipersiapkan pelibatan mereka sejak dini. Pelibatan mereka juga penting karena merujuk pada survei nasional tentang keberagamaan generasi Z oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) tahun 2017 menemukan paradoks pada sikap keberagamaan mereka. Paradoks demikian menyangkut pergaulan mereka yang melebihi keluasan generasi-generasi sebelumnya didukung perkembangan digital media yang massif, namun di saat yang sama mereka menunjukkan sikap keagamaan yang cenderung eksklusif dan intoleran.

Aktor lain yang tak kalah penting untuk dilibatkan dalam pengarusutamaan moderasi beragama adalah perempuan dan lingkungan keluarga. Dalam struktur keluarga Indonesia, perempuan menjadi sosok pertama dalam pengasuhan anak di usia dini yang menentukan sikap dan mentalitas mereka hingga usia dewasa. Tak hanya pengasuhan, para perempuan kini memiliki peran publik yang setara dengan laki-laki sehingga pelibatan mereka menjadi hal tak bisa dipungkiri. Selain sosok ibu yang mengasuh anak sejak dini, lingkungan keluarga juga sangat menentukan pembentukan karakter anak. Lingkungan keluarga yang terbiasa menjadi menempatkan agama sebagai sumber nilai yang dipraktikkan penuh disiplin dan penghayatan sambil di saat yang sama menumbuhkan budaya apresiasi atas perbedaan menjadi aktor sangat penting dalam penumbuhan moderasi

beragama dari lingkungan paling dasar.

Terakhir, para pendidik maupun aktifis sosial juga tak bisa diabaikan keterlibatannya dalam penyuaaran moderasi beragama. Sebagaimana kita ketahui bersama, dua aktor ini menempati posisi terdepan dalam aktifitas pengajaran maupun penyuluhan masyarakat, baik kurikulum pembelajaran akademik maupun materi pemberdayaan. Dengan posisi mereka seperti demikian, maka pelibatan pendidik dan aktifis sosial menjadi hal tak bisa ditunda-tunda dalam mempromosikan nilai-nilai moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat.

Artikulasi Pesan Moderasi Beragama

Setelah menyepakati pentingnya moderasi beragama dan perlunya melibatkan para aktor di dalamnya, hal penting lain yang perlu kita lakukan adalah mengartikulasikan pesan-pesan moderasi beragama sendiri. Pengartikulasian diperlukan untuk membuktikan betapa signifikannya implementasi moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat yang plural. Merujuk kepada kondisi sosial terkini, terdapat beberapa media penting bagi pengartikulasian pesan moderasi beragama.

Salah satu media penting pengartikulasian pesan moderasi beragama adalah kurikulum dan mata pelajaran pendidikan agama, baik Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Agama Kristen, Pendidikan Budi Pekerti, dan lainnya. Sebagaimana diketahui, agama merupakan aspek yang melekat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Agama menjadi sumber nilai dan norma hukum yang berlaku di tengah-tengah kehidupan keluarga dan masyarakat, sedang kurikulum dan mata pelajaran agama menjadi sarana penting pembelajarannya. Selain menjadi sumber pembelajaran pengetahuan agamanya masing-masing, kurikulum dan mata pelajaran pendidikan agama yang mengapresiasi perbedaan menjadi media utama dalam pesan-pesan moderasi beragama.

Sarana lain dalam mengartikulasikan moderasi beragama adalah aksi filantropi sosial. Pengalaman sejumlah aktor filantropi sosial, baik individu maupun lembaga, membuktikan bahwa aksi-aksi filantropi memainkan peranan signifikan dalam menumbuhkan penghargaan nilai-nilai kemanusiaan tanpa melihat perbedaan latar belakang kelompok sosial sasaran. Hal ini didukung setidaknya oleh dua hal. Pertama, secara lahiriah dan secara konseptual, aksi filantropi harus toleran dan terbuka untuk siapa saja sesuai prinsip *giving* dan karakteristik humanitariannya. Dengan posisinya seperti demikian, filantropi sosial memiliki modal utama dalam memasyarakatkan dan

mempromosikan moderasi beragama di Indonesia. Kedua, sejalan dengan semangat moderasi beragama dalam mengeliminasi potensi konflik komunal yang biasa didorong oleh kemiskinan, sedang secara alamiah lembaga filantropi adalah lembaga yang paling dekat dengan mereka yang kurang beruntung, maka aksi filantropi sosial menjadi medium penting pengartikulasian moderasi beragama.

Sebagai bagian dari komunitas global, tentu saja semangat menumbuhkan ketaatan beragama di satu sisi dan penghargaan perbedaan di sisi lain tidak cukup untuk kita sendiri. Sebab di era global ini, nuansa kehidupan kemanusiaan di satu bagian dunia, apakah diliputi kecurigaan, permusuhan, konflik dan kekerasan atau dipenuhi sikap positif toleransi dan penghargaan akan mempengaruhi nuansa kehidupan kemanusiaan di bagian lain dunia. Terlebih agama sendiri memiliki kekuatan untuk menggerakkan emosi keagamaan masyarakatnya. Untuk itu, semangat moderasi beragama yang bertujuan membumikan sikap saling menghargai perlu disuarakan juga ke masyarakat dunia yang lebih luas. Wassalam.

Bagian 1

**Moderasi Beragama:
Konsep, Perspektif, dan Pengalaman
Agama-Agama di Indonesia**

Mengapa Moderasi Beragama?

Lukman Hakim Saifuddin
Menteri Agama RI 2014-2019

APRESIASI mendalam perlu diberikan kepada Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang menginisiasi topik moderasi beragama sebagai bahan kajian secara serius dan berkelanjutan. Mengapa saya menyebutkan sebagai bahan kajian? Karena moderasi beragama sejatinya harus terus dikaji, didalami, tidak hanya metodologinya, tapi juga konten atau substansinya. Ini untuk mengimbangi kehidupan keagamaan kita yang senantiasa dinamis, senantiasa berubah.

Sejak beberapa tahun terakhir, Kementerian Agama RI menggaungkan gagasan moderasi beragama, dalam berbagai kesempatan. Setidaknya terdapat dua hal mendasar dibalik mengapa gagasan ini digaungkan Kementerian Agama RI, alasan yang bersifat eksternal dan internal.

Pertama, latar belakang eksternal. Hal ini berkaitan dengan situasi global yang mengalami perubahan luar biasa. Dengan globalisasi, kita tidak lagi punya batasan-batasan baik wilayah administratif ataupun wilayah geografis. Melalui globalisasi, kita sudah menjadi warga dunia. Itu artinya, secara langsung atau tidak, kompetisi hidup akan semakin keras, semakin besar, dan semakin tajam; apalagi dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang luar biasa. Jadi, setiap manusia di dunia berada pada posisi yang sama dalam menjalani kehidupannya.

Karena itu, dalam menjalani kehidupan yang semakin kompetitif ini, tidak terhindarkan seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak semestinya. Agama sebagai kumpulan nilai dan norma yang menjadi acuan atau pedoman hidup pun menghadapi tantangannya. Atau, agama diperalat untuk mengagregasi kepentingan-kepentingan para

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama, Islam Wasathiyah, & Kerukunan Bangsa (ke-1) Jumat, 19 Juni 2020.

pihak yang sedang berkompetisi. Itulah kemudian ada istilah politisasi agama. Ini realitas eksternal yang kita hadapi kini.

Kedua, latar belakang internal, konteks keindonesiaan. Bahwa kita ditakdirkan sebagai bangsa yang tidak hanya majemuk, plural, beragam, dalam hal etnis, suku, budaya, dan bahasa tetapi juga agama. Dari sisi keagamaan, bangsa ini bisa dikatakan memiliki aspek spiritualitas yang tak bisa diabaikan, sikap agamis.

Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan perkara agama ke ruang lebih sempit. Sebaliknya, Indonesia juga bukan negara agama tertentu, katakanlah Islam sebagai agama yang memiliki penganut mayoritas. Kendati mayoritas warga negara kita adalah penduduk muslim, bahkan terbesar di dunia, namun Indonesia bukan negara Islam.

Namun, dengan spiritualitas yang melekat dalam kesehariannya, kita bisa mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara agamis. Agama menjadi sumber nilai dan norma yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan keseharian warga negaranya. Tidak hanya di kehidupan bermasyarakat, tapi kehidupan berbangsa dan bernegara. Agama pun menduduki posisi yang luar biasa vital, luar biasa pentingnya.

Dalam konteks Indonesia seperti itu, maka dalam memahami agama sekaligus mengamalkan ajaran-ajarannya kita harus senantiasa menjaga dan memelihara batasan agar tidak terjerumus pada pemahaman atau pengamalan berlebihan, yang lalu lebih dikenal dengan istilah ekstrim. Itulah alasan yang membuat moderasi beragama menjadi sangat penting.

Dengan latar belakang demikian, lantas apa sebetulnya moderasi agama itu sendiri?

Definisi utuh tentang moderasi beragama perlu disampaikan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang tidak perlu. Sebab saat gagasan ini digulirkan, ada pihak yang bertanya mengapa agama harus dimoderasi? Bukankah agama itu ajaran yang datangnya dari Tuhan (baca; Allah SWT) yang pastinya sudah sangat proporsional, moderat, dan tentunya sudah sangat sesuai dengan kemanusiaan kita serta tidak perlu diragukan lagi. Mengapa harus dimoderasi?

Mendefinisikan istilah moderasi beragama memang diperlukan kehati-hatian. Dalam hal ini, istilah moderasi beragama bukan berarti ajaran agamanya yang dimoderasi. Moderasi dalam konteks ini adalah memoderasi cara kita beragama sehingga karenanya istilah yang digunakan adalah “moderasi beragama”, bukan “moderasi agama”.

Pemaknaan demikian sama saja seperti saat kita menggunakan

istilah moderasi Islam. Tentu moderasi dalam konteks ini bukan berarti memoderasi Islamnya karena Islam sendiri tidak perlu dimoderasi lagi. Islam pada dirinya dan dengan sendirinya sudah pasti sempurna. Sebaliknya moderasi Islam yang dimaksud adalah pada konteks cara kita berislam, cara kita memahami Islam, dan cara kita mengamalkan ajaran Islam sehingga tetap berada di koridor yang moderat. Dengan demikian, kita berharap agar moderasi beragama tidak dipahami dalam dalam pemahaman yang terjebak.

Lantas apa tolak ukur, parameter, atau batasan ketika kita mengatakan bahwa pemahaman dan praktik keagamaan kita, keberislaman kita, berada dalam batasan moderat, meski patut kita sadari bahwa pandangan dan pemahaman keagamaan Islam kita sendiri terkotak-kotakkan ke dalam berbagai mazhab pemikiran beragama? Sebaliknya, sampai batasan mana pemahaman dan praktik keagamaan kita sudah keluar batas sehingga dikategorikan ekstrem dan perlu diajak kembali ke jalan tengah?

Di dalam istilah moderasi beragama, kita menemukan dua istilah 'moderasi' dan 'beragama'. Moderasi satu akar dengan istilah 'moderat' yang menjadi lawan dari 'ekstrem'. Moderasi dalam istilah tersebut setidaknya memuat dua prinsip dasar yang perlu selalu dipegang agar kita bersama-sama bisa menjaga pemahaman dan pengamalan keagamaan kita senantiasa moderat.

Pertama, senantiasa adil, karena menjadi moderat berarti dia senantiasa memosisikan diri di tengah. Tidak condong ke kutub ekstrim yang satu, atau kutub ekstrim lainnya. Jadi dia berada di tengah-tengah, penuh dengan keadilan. Adil dalam melihat banyak keragaman pandangan yang ada. *Kedua*, keseimbangan. Moderat itu mensyaratkan adanya keseimbangan.

Mengapa keadilan dan keseimbangan ini diperlukan dalam memahami ajaran agama? Karena kita sama-sama tahu, yang sempurna itu sebagai sebuah ajaran (agama), katakankan Islam sebagai agama yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya ada pada tataran langit, sebagai ajaran yang diturunkan, yang diciptakan, dibuat oleh Allah Yang Maha Sempurna, tentu ajarannya pun sempurna.

Namun saat ajaran itu membumi, diturunkan kepada manusia, agama akan diinterpretasikan, diterjemahkan dan ditafsirkan oleh manusia untuk kepentingan kehidupan mereka.

Sehebat apapun manusia itu, dengan segala penghormatan kita terhadap para ulama terdahulu dan para ahli yang luar biasa, tetap

saja mereka manusia yang memiliki keterbatasannya masing-masing. Mereka memiliki perspektifnya sendiri-sendiri dan titik pijak yang berbeda antara satu dengan yang lain.

Sudut pandang yang berbeda inilah yang menyebabkan, selain keterbatasan pada diri mereka masing-masing, munculnya keragaman tafsir. Karenanya, di antara yang beragam itu perlu dijaga agar mana yang senantiasa bisa kita tolerir sebagai sebuah keragaman pandangan karena masih dalam jalurnya yang moderat dan mana yang sudah berlebih-lebihan. Dengan begitu, tolok ukur moderat tentu banyak sekali. Kita bisa melakukan inventarisasi terhadap apa saja. Sesuai dengan konteks kita, karena tentu tolok ukur ini akan dinamis, sesuai dengan perubahan zaman.

Terkait itu, setidaknya ada beberapa poin yang bisa kita jadikan sebagai parameter moderasi beragama:

Parameter pertama, dengan segala keterbatasan yang saya miliki, saya meyakini Islam itu agama yang memuliakan nilai-nilai kemanusiaan. Karena itu, Islam hadir untuk manusia dengan harapan harkat, derajat, martabat kemanusiaan itu senantiasa terjaga, terpelihara, dan terawat dengan baik. Bahkan nilai-nilai kemanusiaan ini terus dipromosikan, dan dikembangkan sesuai dengan konteksnya.

Untuk itu, ketika didapati adanya paham keagamaan, paham berislam atau tindakan berislam yang justru bertolak belakang dengan nilai-nilai kemanusiaan maka itu sudah berlebih-lebihan, bahkan ekstrim. Misalnya, atas nama Islam, kita merendahkan harkat, derajat, martabat sesama manusia atau bahkan menghilangkan eksistensi keberadaan mereka. Hal ini tentu sudah berlebih-lebihan. Jadi, parameter pertama adalah nilai-nilai kemanusiaan.

Parameter kedua, kesepakatan bersama, konsensus yang dibangun bersama dan harus ditaati. Salah satu prinsip ajaran agama Islam itu adalah keharusan taat pada konsensus. Mengapa konsensus? Karena fitrah manusia itu beragam. Keragaman merupakan *sunnatullah*, kehendak-Nya. Karena kita beragam, dan tentu saja kita terbatas, maka aspirasi yang sangat majemuk ini harus disepakati dalam sebuah konsensus.

Sebagai makhluk sosial, manusia dalam komunitas apapun pasti membangun konsensus bersama. Islam karenanya menekankan bahwa kita harus taat dengan konsensus. Jangankan komunitas yang sangat beragam aspirasinya, untuk rumah tangga yang awalnya hanya diisi dua orang saja dimulai dengan sebuah *akad*, konsensus.

Sekali lagi, kesepakatan merupakan satu hal yang harus senantiasa dipatuhi masyarakat. Karena itu, kalau ada paham atau bentuk pengamalan agama yang atas nama agama, atas nama Islam, namun justru mengingkari konsensus bersama, hal itu dipastikan sudah berlebih-lebihan.

Parameter ketiga, menyangkut ketertiban umum. Sekali lagi, Islam hadir dalam kehidupan manusia agar kemanusiaan itu tetap terjaga, harkat, derajat dan martabatnya. Untuk itu, ketertiban umum menjadi syarat mutlak untuk menjaga kemanusiaan tetap terjaga dengan baik. Tidak boleh ada pemahaman, apalagi tindakan yang atas nama agama tapi justru merusak ketertiban umum.

Islam Wasathiyah: Moderasi Beragama ala Muslim Indonesia

Azyumardi Azra

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

MODERASI beragama seperti digaungkan Kementerian Agama RI, saat menteri Lukman Hakim Saifuddin, dalam perspektif Islam sebetulnya sudah ada, yaitu moderasi Islam. Moderasi Islam sebetulnya bukan istilah yang baru, kendati istilah ini mendapatkan momentumnya ketika Kementerian Agama RI menggaungkan moderasi beragama.

Moderasi Islam atau Islam moderat secara substantif sama dengan Islam wasathiyah yang diskusinya mengemuka pada *High Level Consultation of World Muslim Scholars on Wasatiyyat Islam* di Istana Bogor, 2018. Berdasar diskusi yang melibatkan ulama tingkat dunia disebutkan beberapa karakteristik Islam wasathiyah.

Di antaranya *tawasuth*, sikap keagamaan yang selalu berada di tengah, tidak condong ke kanan, tidak miring ke kiri, tidak ekstrem atas dan ke bawah. Lalu, *tawazun*, yaitu pemahaman dan pengamalan agama yang seimbang baik untuk aspek kehidupan duniawi maupun ukhrawi. Lalu, *muwathanah*, cinta tanah air.

Sebelumnya, pada 1996, Menteri Agama RI Tarmizi Taher sempat mempopulerkan istilah 'moderasi Islam'. Bahkan istilah ini diakomodir dalam berbagai bukunya yang diterbitkan PPIM UIN Jakarta dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia.

Di antara buku yang Menteri Tarmizi tulis adalah *Aspiring for the Middle Path: Religious Harmony in Indonesia* (1997) dan *Menjadi Muslim Moderat: Beragama di Tengah Percaturan Global* (2004). Seperti terlihat dari buku-bukunya, Tarmizi ingin mengembangkan, memperkuat Islam wasathiyah. Itu inti pemikirannya Tarmizi Taher. Namun situasi sosial politik kala itu menjadikan gagasan ini belum bisa berkembang dengan baik.

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama Islam, Wasathiyah, & Kerukunan Bangsa (ke-1) Jumat, 19 Juni 2020.

Moderasi: Tradisi Muslim Indonesia

Terlepas dari penggunaan istilah tersebut, secara substantif moderasi Islam sebetulnya sudah menjadi bagian dari tradisi Muslim Indonesia, baik secara keagamaan maupun kebudayaan di Indonesia ini. Sejak abad ke-17 M, substansi gagasan Islam wasathiyah itu sudah tumbuh dengan ditopang oleh tiga aspek ortodoksi Islam.

Pertama, corak kalamnya yang berorientasi pada paham kalam Asy'ariyah. Dalam literatur pemikiran kalam Islam, pemikiran kalam Asy'ariyah merupakan penengah di antara pemikiran kalam Khawarij yang literal dan Mu'tazilah yang rasional.

Kedua, dari sudut fikih, Muslim Indonesia berorientasi pada pandangan dan praktik fikih bermazhab Syafii. Dalam tradisi fikih, mazhab Syafii merupakan mazhab fikih yang menengahi antara mazhab Maliki, mazhab Hanbali, serta mazhab Hanafi.

Ketiga, dari sudut pandangan dan praktik tasawuf, Muslim Indonesia cenderung mengamalkan ajaran tasawuf 'amali yang dipraktikkan Imam al-Ghazali. Dengan demikian, sejak abad ke-17 M, masyarakat Muslim Indonesia sudah mempraktikkan wasathiyah Islam.

Islam dan masyarakat Muslim Indonesia juga bertemu dalam akar kebudayaan Nusantara yang menekankan nilai-nilai sikap tengahan. Ini sejalan dengan prinsip wasathiyah yang menekankan sikap tengahan.

Di antara nilai dari akar kebudayaan lokal yang ditemukan Islam di bumi Nusantara, terutama Jawa, adalah sikap *tepo seliro* atau *tenggang rasa*. Ini merupakan contoh penting budaya tengahan, tidak enak sendiri.

Saat pandangan dan sikap Islam wasathiyah dan kebudayaan Nusantara bertemu, maka hasilnya adalah umat Islam Indonesia yang wasathiyah, inklusif, dan akomodatif. Puncaknya pertemuan keduanya adalah kontribusi Islam dan kaum Muslim dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila.

Mengutip pernyataan Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Prawiranegara, Pancasila merupakan hadiah terbesar Islam Indonesia untuk kesatuan dan kemerdekaan Tanah Air. Karena itu, kita harus melawan setiap upaya untuk menghilangkan Pancasila.

Merujuk pengakuan Menteri Alamsyah, sangat ironis jika umat Islam sendiri, atau pihak lain, menghilangkan jejak kontribusi yang telah diberikan kepada bangsa ini melalui pandangan dan praktik wasathiyah Islam-nya sejak sebelum kemerdekaan hingga saat ini.

Dengan demikian ke depan, selain memperkuat Islam wasathiyah,

selayaknya umat Islam Indonesia juga memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila yang terbukti telah mampu menampung dan mengakomodasi berbagai keragaman. Bahkan harus disyukuri.

Banyak pihak luar yang terheran-heran dan takjub terhadap realitas sosial kita bahwa tak kurang dari 88% masyarakat Indonesia merupakan Muslim, menjadi umat agama terbesar bangsa ini. Namun di saat yang sama, Indonesia menampilkan realitas berbeda dibanding negara berpenduduk mayoritas Muslim di mana kondisi kehidupan masyarakatnya relatif harmonis dengan berbagai perbedaan sosial di dalamnya.

Bahkan, kendati masyarakatnya mayoritas Muslim, namun Indonesia sendiri tidak mendasarkan asas bernegaranya pada Islam. Islam juga bukan satu-satunya agama resmi negara ini. Bahkan, ideologi bangsa juga secara tegas dan lurus disepakati bersama berdasarkan Pancasila.

Kondisi demikian jauh berbeda bahkan dengan negara-negara Eropa yang berdasarkan agama. Inggris, misalnya, berdasarkan gereja Anglikan. Begitu juga negara-negara lain seperti Skandinavia yang berdasarkan pada ajaran Calvinist dan Lutheran. Dan, hal itu masih berlangsung hingga sekarang.

Karena itu, tidak berlebihan jika kita menempatkan masyarakat Muslim di Indonesia sebagai *ummatan wasathan*. Dalam konteks kehidupan bernegara, Indonesia adalah negara yang unik. Salah satu bentuk keunikannya adalah banyaknya hari raya keagamaan sebagai hari libur nasional sebagai bentuk pengakuan penting.

Bahkan enam agama yang menyumbangkan hari-hari raya keagamaan di tanah air dilayani oleh negara. Pelayanan ini bukan hanya untuk Islam atau Kristen dengan jumlah penganut cukup dominan, melainkan juga agama Khonghucu dengan total jumlah umatnya tak lebih dari 1% dari total penduduk Indonesia.

Di berbagai negara di dunia saat ini, tidak ada satu pun negara di dunia ini yang merayakan Idul Fitri secara resmi sebagaimana Indonesia. Boleh dicari, walaupun umat Islamnya lebih dari 1%, 4%, 5% seperti Amerika atau 3-4% di Prancis, mereka tidak merayakan hari raya keagamaan secara resmi, bahkan tidak mengakui.

Berdasar itu, saat ada yang mempertanyakan ukuran toleransi-intoleransi di Indonesia, maka kita bisa menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara dengan penuh toleransi.

Saya pernah diminta hadir di parlemen Eropa. Mereka mengajarkan

tentang pentingnya toleransi diterapkan di Indonesia. Merespon itu, saya bilang, Indonesia itu lebih toleran. Mana coba berikan contoh satu saja negara di Eropa yang merayakan atau sekadar mengakui hari raya Idul Fitri. Ada tidak? Kalau tidak ada, sambung saya, Anda jangan mengajari Indonesia, jangan mengajari kita soal toleransi. Eropa tidak lebih baik dari Indonesia dalam hal toleransi. Harusnya Anda (Eropa) belajar dari Indonesia.

Mengacu pada realitas itu, maka Islam wasathiyah seperti dipraktikkan oleh Muslim Indonesia tidak diragukan lagi merupakan masa depan Islam. Masa depan Islam itu bukan dengan meletakkan bom dan melakukan berbagai aksi kekerasan lainnya.

Dengan Islam wasathiyah, generasi bangsa ini bisa hidup dan menikmati keleluasaan dalam menuntut ilmu dan berinovasi. Hal yang sangat membanggakan misalnya ketika muncul sebuah produk ventilator yang dihasilkan dari Masjid Salman Institut Teknologi Bandung (ITB). Tentu saja ini merupakan hal luar biasa sebagai sebuah inovasi penting dalam rangka memitigasi pandemi Covid-19, sebuah ventilator berbasis masjid. Hal sama juga dilakukan oleh masjid-masjid di berbagai kampus lain di Indonesia seperti Institut Teknologi Surabaya (ITS), Universitas Indonesia (UI), dan sebagainya.

Jadi, tidak ada kemajuan kecuali dengan Islam wasathiyah yang menawarkan kedamaian, bukan kekacauan apalagi kekerasan. Karenanya, Islam wasathiyah yang mampu menopang kehidupan Muslim dan bangsa Indonesia lebih baik di masa depan perlu terus kita kembangkan dan terapkan.

Radikalisme: Akar dan Penanganannya

Haris Amir Falah dan Ali Fauzi
Mantan Narapidana Terorisme

BERBICARA soal moderasi beragama sebetulnya sama pentingnya dengan memahami radikalisme keagamaan (Islam). Sebab, radikalisme keagamaan menjadi salah satu alasan penting di balik perlunya penerapan moderasi beragama dalam kehidupan keagamaan dan kebangsaan kita. Diskusi terutama difokuskan pada faktor apa saja yang melatarbelakangi kemunculan radikalisme dan bagaimana formulasi tepat dalam mengatasinya.

Sejauh pengalaman kami, tumbuh suburnya radikalisme keagamaan yang berujung pada tindakan kekerasan dan teror mengatasnamakan agama sebetulnya memiliki banyak faktor. Faktor-faktor ini saling berjalanan satu sama lain sehingga tidak heran sikap dan tindakan radikalisme keagamaan juga tetap tumbuh subur. Ini satu hal yang tentu saja membutuhkan perhatian kita bersama.

Salah satu alasan mengapa sikap radikal itu selalu muncul adalah kekosongan pengetahuan agama. Kekosongan ini hadir bersamaan dengan informasi dan pengetahuan keagamaan yang dipompakan oleh suara-suara pengusung gagasan radikalisme keagamaan.

Sejatinya sebagai umat beragama, kita memiliki pengetahuan agama sendiri secara utuh dan memadai. Sebab pengetahuan ini yang nantinya berperan menjadi filter penyaring atas informasi dan wawasan keagamaan yang sebetulnya menyimpang jauh dari pesan Islam.

Di sisi lain, pengetahuan keagamaan dengan kecenderungan radikal yang dipompakan kepada kami memiliki model pemaknaan teks-teks suci keagamaan yang tekstual. Sumber-sumber pengetahuan keagamaan Islam hanya bertumpu pada al-Quran dan Sunnah, tanpa

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama Islam Wasathiyah, & Kerukunan Bangsa (ke-1) Jumat, 19 Juni 2020.

penerimaan terhadap ijtihad ulama seperti ijma dan qiyas.

Pemahaman kandungan al-Quran tidak dilakukan dengan merujuk pada tafsir-tafsir muftakar yang sudah disusun para mufasir terpilih. Bahkan pemaknaan al-Quran sendiri cenderung dengan hanya bertumpu pada terjemahan, dipahami secara tekstual tanpa pernah melihat sisi kontekstualnya.

Kendati menjadikan Sunnah sebagai salah satu rujukan utama, selain al-Quran, pada praktiknya hadis Nabi jarang sekali dijadikan sebagai sumber rujukan. Tentu saja ini menghasilkan pemahaman keagamaan yang sangat rigid dan kaku.

Seiring pemahaman terhadap sumber-sumber keislaman yang cenderung tekstual, maka kami pun memahami dan mempraktikkan keislaman dengan sangat keras (*tasyaddud*). Sikap ini pada gilirannya menjadi sikap dan cara pandang intoleran dalam melihat pemahaman dan praktik keagamaan kaum Muslim lainnya.

Dengan pemahaman keagamaan demikian, orang-orang di lingkungan kami juga tidak memungkinkan mendapatkan pemahaman keagamaan Islam lain sebagai pembandingan. Kita tidak boleh mempelajari ajaran Islam kepada orang-orang di luar kelompok kita.

Selain alasan-alasan bersifat keagamaan, faktor lain yang juga berperan penting dalam penumbuhan semangat radikal-intoleran dalam diri kami adalah ketidakpuasan terhadap pemerintah. Berbagai kelemahan menjadi dasar ketidakpuasan yang pada gilirannya memotivasi kami melakukan tindak-tindakan destruktif dengan tujuan menggulingkan pemerintahan.

Berbagai kekerasan dan teror, seperti penembakan polisi dan teror bom, acapkali kami sambut dengan senang. Tindakan yang belakangan kami sadari sebetulnya malah tidak menguntungkan Islam. Justru sebaliknya, Islam malah dicaci, dihina, dan dimusuhi.

Radikalisme Keagamaan itu Nyata

Bagi sebagian masyarakat, keberadaan berbagai kelompok yang menggerakkan paham dan tindakan radikal dianggap sebagai operasi intelijen, rekayasa aparat keamanan, atau lainnya. Jadi silakan saja masyarakat berspekulasi demikian.

Namun, sejauh yang kami lakukan selama ini, keberadaan kelompok-kelompok pengusung paham dan tindakan radikal ini nyata adanya. Kelompok-kelompok ini hadir dan bergerak di sekeliling kita, melakukan kaderisasi, dan menyiapkan berbagai tindakan teror.

Bersama ratusan orang lainnya, kami direkrut oleh berbagai kelompok ini. Baik yang berafiliasi dengan Jamaah Islamiyah, al-Qaeda, maupun lainnya. Kami dididik di berbagai kamp pelatihan.

Untuk bergabung ke dalam kelompok-kelompok demikian juga bukan perkara mudah. Orang tidak bisa secara instan bisa bergabung. Sebab kelompok-kelompok terkait menerapkan berbagai tahapan yang ketat bagi seseorang yang ingin masuk dan jadi bagian dari organisasi.

Hal ini, misalnya, dilakukan kelompok dengan melakukan doktrinasi pada anggota yang akan direkrut. Doktrinasi diberikan dengan pemberian pengetahuan tentang jihad, hijrah, *al-wala' wal-bara'*, hingga *wujubu iqomatid dawlah* sesuai tafsir dan pemahaman kelompok itu.

Kelompok-kelompok itu sebetulnya memiliki pemahaman yang berbeda-beda. Satu kelompok, misalnya, berpandangan bahwa setiap negara yang tidak berhukum Allah adalah negara kafir dan seluruh penduduknya adalah kafir. Kelompok lain berpendapat negara yang tidak berhukum Allah adalah negara kafir, namun tidak mengkafirkan seluruh penduduknya.

Namun benang merah yang mempersatukan kelompok-kelompok ini sama yaitu menolak Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pancasila. Karenanya bisa dikatakan bahwa kelompok-kelompok ini sangat banyak variannya. Tidak bisa ekstremisme misalnya dialamatkan kepada ISIS (Islamic State in Iraq and Syria) sebab ada juga yang tidak tergabung ISIS namun memiliki sikap dan tindakan yang kurang lebih sama.

Penanganan

Dari apa yang kami paparkan jelas bahwa radikalisme keagamaan yang berujung pada tindakan teror itu nyata adanya. Kelompok-kelompok ini secara sistematis melakukan perekrutan. Faktor-faktor yang melatarbelakangi kemunculannya juga cukup banyak dan saling berkaitan. Dan yang penting, kelompok-kelompok ini juga hadir dalam berbagai varian, tidak tunggal.

Karena itu, kelompok-kelompok ini membutuhkan penanganan yang padu baik dari perspektif, metodologi, dan programnya. Ekstrimisme ini seperti penyakit komplikasi. Butuh penanganan khusus dengan dokter spesialis.

Penanganan hal ini juga memerlukan urun rembug semua pihak. Keterlibatan para ahli, baik tokoh agama dan akademisi, yang betul-betul memahami dan mampu berdialog dengan para individu terpapar

sikap radikal perlu dilakukan.

Mendorong motivasi dari dalam diri seseorang terpapar juga untuk 'berhijrah' dari sikap dan tindakan keberagamaan radikal ke arah sikap dan tindakan keberagamaan yang moderat juga penting. Tentu saja pendekatan manusiawi terhadap para pelaku juga tidak kalah pentingnya.

Moderasi Beragama: Perspektif Muslim

Komaruddin Hidayat

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia

SAAT mendiskusikan moderasi agama dalam sudut pandang Islam, hal pertama yang harus kita sadari adalah Islam dalam berbagai aspeknya tidak lepas dari sumbernya. Al-Quran menjadi sumber utama dalam ajaran Islam. Ia menjadi sumber normatif yang menuntun masyarakat Muslim menjalani kehidupan mereka, termasuk bagaimana ia mendorong mereka menyebarkan rahmat, mengajak pada kebaikan, berlomba dalam berbuat kebaikan, karena Tuhan yang akan mengadili dan menghitung setiap amal manusia. Dengan demikian, dalam al-Quran, Islam sangat menekankan umatnya untuk berbuat kebaikan, menghargai martabat manusia.

Al-Quran secara tegas menyatakan bahwa manusia dengan keragaman bahasa, suku, dan keyakinan agama merupakan desain Tuhan. Untuk itu, Islam sangat keras dan tegas melarang tindak pemaksaan dalam beragama. Hal ini karena paksaan dalam beragama tidak akan mampu melahirkan kesalehan, ketulusan, dan perilaku keberagaman yang otentik. Agama turun dengan semangat memberikan kebebasan bagi manusia untuk tumbuh menjadi pribadi otentik. Dan, pribadi otentik mensyaratkan adanya kemerdekaan dan kemampuan dalam seseorang untuk memilih.

Dorongan berbuat baik dan penerimaan keragaman merupakan hal mendasar yang disampaikan al-Quran. Al-Quran menegaskan bahwa keragaman merupakan bagian dari desain Tuhan. Sebagai sebuah pedoman, al-Quran merupakan sumber mata air yang membentuk aliran sungai yang mengalir dari hulu ke hilir. Al-Quran mengalir ke berbagai ruang dan waktu, hadir dalam berbagai kelok sejarah dan peradaban

■ Disarikan dari Moderasi Beragama dalam Tradisi Agama-agama di Indonesia Series (2), 26 Juni 2020.

umat manusia mengartikulasikan ekspresi ajarannya dalam berbagai bentuk di lanskap sejarah peradaban Muslim di berbagai lintas sejarah dan geografik politik Islam seperti Mesir, Irak, Turki, dan wilayah Islam di Barat era Spanyol selama berabad-abad. Karenanya tak heran Islam hadir dalam banyak sekali mazhab, baik di ranah teologi, filsafat, tasawuf, fikih maupun lainnya. Sebuah kekayaan peradaban luar biasa.

Fakta demikian tak pelak menunjukkan kebebasan yang diajarkan Islam dalam melakukan interpretasi dan kontekstualisasi ajarannya. Misalnya keragaman pada interpretasi ajaran Islam mengenai kehidupan politik-kenegaraan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam Islam teks melahirkan konteks yang sangat beragam. Dari konteks, Islam diinterpretasikan dan direkonstruksi sesuai dengan kondisinya.

Konteks Indonesia

Lalu, bagaimana dalam konteks Indonesia? di Indonesia jelas sekali bahwa sejak awal Islam telah berperan sangat kontributif dengan terlibat langsung dalam menegakkan kemerdekaan, keadilan, dan mengantarkan lahirnya Republik ini. Namun perlu diingat bahwa ketika republik ini terbentuk, umat Islam juga setuju bahwa Indonesia dibangun sebagai sebuah rumah bersama berdasar kondisi masyarakat yang berbineka. Jadi dalam konteks ini, kebinekaan dipahami sebagai desain Tuhan karena realitas sosial Indonesia cukup beragam dan kebinekaan harus dijaga bersama. Pada gilirannya, muncul Bhinneka Tunggal Ika sebagai moto bersama sebagai sebuah bangsa.

Lantas, bagaimana menjaga kebinekaan? Ada dua level penjagaan. Pada level kenegaraan, Pancasila sebagai falsafah hidup ditarik menjadi ideologi negara berbangsa untuk menjaga keberagaman dan mengakomodir sekian banyak mazhab pemikiran, aliran, kepercayaan masyarakat Indonesia. Terkait ini, muncul 'Ketuhanan Yang Maha Esa' sebagaimana tertuang sebagai sila pertama Pancasila. 'Ketuhanan Yang Maha Esa' memberikan suatu refleksi sikap moderat, bagaimana kita (masyarakat Muslim Indonesia) kemudian menghargai agama-agama yang lain.

Walaupun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam (Muslim), tapi Indonesia bukan negara Islam. Ini menunjukkan bahwa di Indonesia masyarakatnya punya tradisi toleransi, inklusivitas, dan sikap moderat dalam hal agama. Pada level praktisnya, sila 'Ketuhanan Yang Maha Esa' adalah kebertuhanan yang melahirkan sikap kemanusiaan. Semangat kebertuhanan yang diekspresikan dengan sikap kasih sayang dan

semangat *rahmatan lil alamin* sehingga diharapkan dapat melahirkan sikap kemanusiaan, menghargai sesama manusia, apapun etis agamanya. Dengan demikian, hal utama dalam hal ini adalah manusia.

Setelah meyakini ketuhanan, maka selanjutnya membangun kemanusiaan. Pihak pertama yang jadi sasaran dalam membangun kemanusiaan tentu saja saudara dan teman terdekat kita, warga negara Indonesia. Kita mencintai mereka (bangsa Indonesia) sebagai kelanjutan cinta kita kepada kemanusiaan dan keberagamaan. Kalau itu terpenuhi, maka kita bisa melaksanakan prinsip musyawarah dengan hikmat kebijaksanaan. Sebab, bagaimana kita bisa ber-musyawarah dengan hikmat kalau kita tidak punya mental prinsip menghargai kemanusiaan. Untuk itu, mari bersama-sama menciptakan keadilan dan kesejahteraan bangsa ini.

Di sini saya merasakan bahwa tradisi semangat keberagaman di Indonesia dalam konteks Islam itu memang telah tumbuh berjalan seiring dengan perjalanan masyarakat Nusantara sampai lahirnya bangsa negara Indonesia. Karenanya, saya melihat, Islam tidak memiliki problem dengan Pancasila karena memang (Pancasila) sejalan dengan spirit moderasi beragama. Dengannya, kita menghargai kebutuhan, sepakat menghargai martabat kemanusiaan, dan sepakat menjaga rumah bersama. Setiap orang membutuhkan rumah. Lebih-lebih di era global sekarang ini ketika terjadi arus balik era globalisasi. Karenanya, menjaga rumah bersama, identitas, saat ini semakin terasa dibutuhkan sehingga saat masuk dalam era global kita merupakan bangsa yang maju, sejahtera, dan penuh keadilan.

Pancasila sebagai ideologi negara dalam pandangan masyarakat Muslim Indonesia sudah final. Hal ini menunjukkan sikap Muslim yang sangat moderat. Penerimaan menegaskan pandangan yang moderat dan tidak ekstrem. Kalau ada yang ekstrem, sepertinya lebih dilatarbelakangi faktor-faktor di luar paham keagamaan, melainkan faktor ekonomi, politik, dan sebagainya. Watak kultural bangsa Indonesia sudah menunjukkan sikap yang sangat moderat. Misalnya di Indonesia, bahasa nasional yang disepakati sejatinya adalah bahasa Melayu yaitu bahasa etnis minoritas, etnis Melayu. Sebaliknya, bahasa dengan jumlah penutur terbanyak seperti bahasa Jawa dan bahasa Sunda tidak menjadi bahasa nasional, namun masyarakat etnik terbanyak ini tetap menerima, tidak merasa dijajah, alih-alih dihinakan. Bahkan di Keraton Yogyakarta, Sri Sultan tetap mempersilahkan tamu-tamunya berkomunikasi dengan bahasa Indonesia, bukan bahasa Jawa.

Melihat hal demikian, kita optimistis bahwa kita memiliki kekuatan bersama untuk beradaptasi dan mengadopsi hal-hal positif. Faktor budaya dan perjalanan politik kebangsaan yang berdampingan dengan sikap keberagaman menampilkan kita sebagai bangsa yang moderat dan inklusif. Sekali lagi, perkembangan berkebangsaan, perkembangan budaya dan juga agama saling mendukung sehingga sikap keberagaman Indonesia itu lebih inklusif, dan seperti ditemukan dalam sebuah survei politik, Islam di Indonesia itu tidak selalu mengental menjadi identitas politik yang dominan. Padahal secara kuantitatif, Muslim merupakan kelompok mayoritas. Namun politik identitas tidak pernah mengental. Ini menunjukkan adanya sikap keberagaman yang lebih terbuka.

Sekarang ini muncul yang namanya generasi hibrid (*hybrid generation*). Kalau kita bertanya pada anak milenial tentang asal usul kita, asli dari mana, etnik apa, tidak relevan lagi sebab penjelasannya bisa panjang. Bisa saja orang tua, kakek nenek, atau moyang kita merupakan etnis lintas budaya dengan memiliki keunggulan. Idealnya, etnis dan budaya unggul akan kembali melahirkan etnis dan budaya unggul. Lagi lagi ini semakin mendukung sikap moderat dalam hubungan sosial bahwa sentimen etnik itu sudah semakin rileks. Sentimen politik keagamaan juga semakin rileks, tidak lagi kental. Sekarang yang semakin menonjol justru bagaimana ekspresi keberagaman itu kembali mempromosikan wasathiyah yang mendorong sikap keadilan seperti ditekankan oleh Islam. Dengan demikian, wasathiyah itu bukan sikap lembek, melainkan keadilan yang sangat ditekankan oleh al-Quran.

Kebencian di Media Sosial dan Kedewasaan Umat Beragama

Seiring kemajuan teknologi informasi, internet telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Dalam perkembangannya, internet menghadirkan berbagai kekayaan bentuk media yang bisa diakses masyarakat dalam menggali informasi dan menggunakannya sebagai media komunikasi. Salah satunya adalah media sosial. Kehadirannya menghasilkan dua sisi berseberangan: kemaslahatan dan kemadaratan. Di antara bentuk kemadaratan media sosial adalah penggunaannya sebagai media narasi kebencian yang berpotensi merusak kehidupan harmonis umat beragama di Indonesia.

Di media sosial, tak jarang ditemukan berbagai bentuk postingan bernada kebencian. Namun kemajuan teknologi informasi, termasuk berkembangnya media sosial di dalamnya, sudah merupakan konsekuensi yang harus hadir dari balik berkembangnya peradaban

kemanusiaan kini. Hal yang bisa dilakukan adalah perlunya sikap kedewasaan dalam menggunakan media sosial, baik saat memproduksi maupun mengakses narasi di dalamnya. Di antara bentuk kedewasaan yang diperlukan adalah kemauan untuk selalu bersikap selektif dalam mengakses informasi yang disampaikan di media sosial. Sikap yang sama juga diperlukan saat kita memproduksi informasi yang dipublikasikan melalui media ini.

Saya kira, masa depan moderasi beragama di Indonesia masih sangat optimistis tumbuh guna menghidupkan Indonesia yang lebih rukun dan harmonis dengan berbagai perbedaan di dalamnya. Kehidupan keagamaan di Indonesia relatif jauh lebih baik dibanding di berbagai negara termaju sekalipun. Di Indonesia misalnya tidak ada masyarakat Kristen yang bersikap fobia terhadap Islam seperti halnya di berbagai belahan dunia lainnya. Masyarakat Kristen terbiasa hidup bertetangga dengan Muslim. Begitu juga sebaliknya. Semua saling mengisi dan menjaga. Bayangkan saja, yang merawat dan menjaga Candi Borobudur dan Candi Prambanan bukan hanya umatnya, melainkan juga Muslim dan masyarakat agama-agama lain di Indonesia. Seandainya kedua bangunan itu dirusak, maka umat Islam sekalipun akan marah dan menentang perusakan tersebut.

Bagi saya, sikap-sikap seperti demikian menunjukkan kedewasaan moderasi beragama di Indonesia, termasuk di kalangan masyarakat Muslim. Saya meyakini masyarakat Muslim Indonesia dan umat beragama lainnya di Indonesia mampu membedakan mana aspek normatif keagamaan, interpretasi budaya, dan politik. Inilah bentuk kesadaran yang harus kita kembangkan sehingga kemudian bisa memperkuat komitmen kita untuk membangun rumah bersama Indonesia. Rumah yang indah dengan pluralitas kekayaan keragamannya. Satu hal yang harus terus kita jaga dan rawat jangan sampai rusak. Jika tidak dirawat bahkan rusak, maka kita sendiri yang akan merugi.

Moderasi Beragama: Perspektif Hindu

I Gusti Ngurah Sudiana

Rektor Institut Hindu Dharma Negeri (IHDN) Denpasar

MODERASI beragama sebetulnya telah memiliki akar yang cukup panjang dalam peradaban Nusantara. Pada saat Nusantara masih berada dalam periode kerajaan-kerajaan, ada dua agama yang berkembang: Hindu dan Agama Buddha. Kedua agama dan umat masing-masing hidup berdampingan membangun kebudayaan Nusantara.

Pujangga Nusantara era Kerajaan Majapahit abad ke-14 M, Mpu Tantular, menggambarkan dengan sangat baik kehidupan Nusantara yang terbangun dari kehidupan berdampingan antara Hindu dan Buddha dalam karyanya *Kakawin Sutasoma*. Berikut gambaran yang disampaikan Mpu Tantular:

*“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wiswa
Bhinnêki rakwa ring apan kena parwanosen
Mangka ng Jinatwa kalawan Siwatatwa tunggal
Bhinnêka tunggal ika tan hana dharma mangrwa.”*

(Kakawin Sutasoma pada pupuh 139 bait 5. Lihat juga T.E Behrend, & Alan H. Feinstein. *Katalog Induk Naskah-naskah Nusantara Volume 1*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1990)

Artinya:

*“Konon Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda.
Mereka memang berbeda, tetapi bagaimanakah bisa dikenali?
Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal
Terpecah belahlah itu, tetapi satu jugalah itu. Tidak ada kerancuan*

■ Disarikan dari Moderasi Beragama dalam Tradisi Agama-agama di Indonesia Series (2), 26 Juni 2020.

dalam kebenaran.”

(Terjemahan Soewito Sutasoma Santoso. *a Study in Old Javanese Wajrayana*. New Delhi: International Academy of Culture, 1975:578)

Informasi yang disampaikan Mpu Tantular, yang kita warisi dari kehidupan rukun antara dua agama, menjadi modal dasar moderasi beragama di Indonesia kini. Keduanya tumbuh di tengah-tengah masyarakat dan dilihat sama-sama memiliki nilai luhur yang dibutuhkan umat manusia.

Lantas, apa modal moderasi beragama yang dimiliki kita, bangsa Indonesia sekarang ini? Modal kita cukup besar, yaitu modal kultural yang sangat baik dan mengakar sebagai modal dasar moderasi beragama. Modal kultural yang kita miliki adalah sikap tenggang rasa, toleransi, persaudaraan dan penghargaan terhadap keragaman. Seluruhnya merupakan nilai fundamental yang telah tumbuh dalam keseharian masyarakat Indonesia, terlebih juga diajarkan oleh seluruh agama yang berkembang di Indonesia.

Pengalaman Hindu di Bali

Berbekal pengalaman Hindu Bali, banyak tradisi keagamaan dan kebudayaan lokal yang bisa dijadikan sebagai modal penting moderasi beragama di Indonesia. Di dalamnya terkandung banyak filosofi, penuh makna bagaimana kita bisa membangun kehidupan damai dan rukun.

Salah satunya *Menyama Braya*. *Menyama* bermakna bersaudara. *Menyama braya* adalah bagaimana membangun sikap bersaudara dengan seluruh masyarakat tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan asal-usul. Konsep ini diterapkan di seluruh masyarakat di Bali. *Menyama* berarti satu sama lain saling bersaudara.

Jika merujuk pada tradisi yang lebih dalam, *Menyama* di dalam kitab Weda diibaratkan sebagai sebuah *vasudhaiva kutumbakam*, bahwa dunia atau kita semua adalah bersaudara. Inilah salah satu tradisi budaya dan keagamaan lokal Bali yang dijadikan pijakan dalam membangun dan merawat kerukunan antarumat beragama. Tradisi demikian memungkinkan agama-agama di Bali bisa menyatu dengan yang lainnya, tanpa ada sekat yang memisahkan baik dari sisi pergaulan, nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagainya.

Nilai hakiki lain yang bisa menjadi dasar moderasi beragama dalam pengalaman Hindu Bali adalah *Tat Twam Asi*, ‘Engkau adalah Aku, Aku adalah Engkau’. Ajaran ini menekankan agar masyarakat tidak boleh

saling menyakiti. Oleh karena itu, Tat Twam Asi menjadi jembatan filosofis bagi masyarakat Bali, terutama masyarakat Hindu di Bali, membangun dan menerapkan moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari.

Sisi lain yang menjadi modal dasar moderasi beragama dari pengalaman Bali adalah bangunan suci dan bangunan untuk pertemuan sosial melambangkan moderasi beragama. Contohnya, Pusat Peribadatan Puja Mandala di Nusa Dua yang menyediakan tempat ibadah bagi umat lima agama, yaitu Mesjid Agung Ibnu Batutah bagi Muslim, Gereja Maria Bunda Segala Bangsa bagi Katolik, Wihara Budhida Guna bagi Buddha, dan Pura Jagatnatha bagi Hindu.

Beberapa bangunan yang dibangun dalam waktu lebih lama juga memuat rumah-rumah ibadah agama-agama dalam satu area, tidak hanya Pura bagi umat Hindu. Diantaranya Pura Batur atau Pura Ulundanu Batur yang juga diperuntukan sebagai rumah ibadah agama Buddha dan Khonghucu.

Begitu juga Pura Negara Gambur Anglayang di Buleleng, Bali. Pura ini bisa disebut sebagai pura pemersatu Nusantara karena memiliki sederet pelinggih dengan simbol masing-masing etnik dan agama di tanah air.

Berbagai bangunan yang menyediakan lokasi peribadatan banyak agama, termasuk menggunakan simbol berbagai etnik dan agama, menunjukkan telah hadirnya praktek moderasi beragama di tengah-tengah masyarakat. Bahkan ini juga menunjukkan bahwa agama-agama memiliki tujuan yang sama yaitu mengkreasikan kebahagiaan, kesejahteraan dan pencapaian tujuan akhir kehidupan bagi umat manusia.

Kehidupan keseharian masyarakat Bali juga menjadi modal penting dalam membangun sikap moderasi beragama. Perbedaan agama tidak menjadi halangan bagi masyarakat Bali untuk hidup dengan saling sapa dan saling berkunjung. Ini terlihat dari tradisi *Ngayah* 'bekerja membantu secara tulus ikhlas' yang terbangun dari hubungan sosial yang baik.

Pada tradisi *Ngayah*, keluarga Muslim akan datang berkunjung dan membantu keluarga Hindu saat menyelenggarakan upacara tertentu. Begitu juga melalui *Ngayah*, keluarga Hindu akan datang dan membantu keluarga Muslim saat menyelenggarakan kegiatannya.

Menariknya dalam tradisi *Ngayah*, mereka akan mendapat bekal masakan berbeda-beda antara Muslim dan Hindu. Masing-masing akan memasak masakannya sendiri-sendiri. Keluarga Hindu memasak sendiri makanannya seperti halnya juga keluarga Muslim.

Namun saat makan tiba, keluarga berbeda agama ini akan kembali untuk melaksanakan kegiatan makan bersama. Kegiatan ini populer

disebut Begibung ‘makan bersama’ dimana keluarga Muslim dan Hindu makan di tempat yang sama. Selain makan, kegiatan Begibung juga diselingi canda tawa yang mengakrabkan hubungan mereka.

Selain tradisi Ngayah, masyarakat Bali juga memiliki tradisi Ngejot yang menambah modal penerapan moderasi beragama di Indonesia. Tradisi ini ditandai dengan saling memberikan makanan antar keluarga dan biasanya dilakukan pada hari-hari raya. Keluarga Hindu misalnya memberikan kepada keluarga Muslim di hari Raya Galungan dan sebaliknya keluarga Muslim memberikan makanan kepada keluarga Hindu di hari raya Idul Fitri. Hingga hari ini, tradisi Ngejot masih terpelihara baik di masyarakat Bali.

Tradisi lokal Bali yang juga menjadi model moderasi beragama adalah keberadaan organisasi Subak, organisasi pengairan sawah di kalangan petani Bali. Kendati bernuansa Hindu, namun organisasi ini terbuka bagi anggota petani berlatarbelakang agama lain seperti Islam. Tidak ada sekat yang memisahkan anggota Subak meski memiliki latar belakang agama berbeda-beda.

Di tengah mayoritas Hindu, Muslim Bali juga bisa hidup dengan menggunakan simbol-simbol kebudayaan lokal. Hal ini bisa dilihat dari Komunitas Muslim di Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng. Anak-anak Muslim menggunakan nama-nama depan khas tradisi Bali seperti Wayan, Made, Ketut, Nyoman dan lainnya sehingga tidak heran bisa ditemukan nama-nama seperti Wayan Abdullah, Made Amir, dan sebagainya. Kendati belajar di madrasah dan menjalankan ritual Islam, namun mereka tetap menggunakan budaya lokal dalam kehidupan sehari-hari.

Deskripsi lain yang menggambarkan akar moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Bali adalah saat berlangsungnya Hari Raya Nyepi. Di hari raya ini, segala aktivitas dihentikan sementara. Jika perayaan Nyepi berlangsung di hari Jumat atau hari Minggu, maka komunitas Muslim dan komunitas Kristen tetap bisa menjalankan kewajiban keagamaan mereka untuk shalat Jumat di Mesjid dan kebaktian di Gereja.

Demikian beberapa contoh bagaimana moderasi tumbuh di tengah-tengah masyarakat Bali. Komunikasi yang dibangun melalui beragam cara, baik tradisi, filosofi lokal, tempat suci dan lainnya memungkinkan masyarakat hidup rukun, harmonis, tanpa terkendala sekat-sekat perbedaan. Tentu saja ini menjadi modal berharga dalam penumbuhan moderasi beragama untuk Indonesia yang lebih luas.

Moderasi Beragama: Perspektif Kristen

Agusthina Christina Kakiay

Rektor Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Ambon

DISKUSI moderasi beragama terus berlangsung akhir-akhir ini dengan tujuan membangun kondisi rukun dan damai guna menciptakan kehidupan kebangsaan lebih baik. Dilihat dari perspektif Kristen, Alkitab memuat banyak konsep yang menjadi akar moderasi beragama dari tradisi Kristiani. Ini bisa menjadi rujukan dalam sikap dan perilaku moderasi beragama kini. Dari banyak konsep yang disebutkan Alkitab, saya menyampaikan tiga konsep saja.

Konsep pertama paling dekat dengan moderasi beragama adalah penguasaan diri. Alkitab menyebut penguasaan diri sebagai perilaku yang lahir dari pertimbangan yang matang, dewasa, dan bertanggung jawab. Dengannya, seseorang bisa mengambil sikap dan tindakan tidak atas dasar pengaruh terlalu ke kiri atau ke kanan. Karenanya, Alkitab mengkategorikan penguasaan diri sebagai bentuk kebajikan yang paling unggul.

Konsep kedua yang juga sering disebutkan dalam surat-surat Alkitab dan dekat dengan prinsip moderasi beragama adalah tanggung jawab dalam menciptakan kerukunan. Di dalam Alkitab disebutkan jika kerukunan hidup menjadi syarat agar suatu komunitas atau bangsa diberkati.

Konsep ketiga di dalam Alkitab dan berdekatan dengan moderasi beragama adalah tanggung jawab semua orang untuk mengupayakan kesejahteraan di mana saja. Teks-teks ini mendukung perilaku moderasi dalam kekristenan di samping banyak teks lain yang berbicara tentang kesetaraan dan penghargaan terhadap manusia.

■ Disarikan dari Moderasi Beragama dalam Tradisi Agama-agama di Indonesia Series (2), 26 Juni 2020.

Peran Gereja di Indonesia

Kristen masuk ke Indonesia setelah melalui sejarah perkembangannya yang panjang dan bersentuhan dengan berbagai budaya. Setelah masuk dan berkembang, Kristen hadir di Indonesia dengan banyak aliran atau denominasi.

Data terakhir Direktorat Jenderal Bimas Kristen Kementerian Agama RI setidaknya ada 323-325 sinode. Ini menjadi gambaran betapa kompleks dan majemuknya aliran-aliran gereja di Indonesia.

Walau demikian, kita bersyukur bahwa aliran-aliran ini sulit untuk dikategorikan liberal, fundamental, konservatif, atau lainnya. Kendati berbeda-beda pada tampilan atau cara beribadah dan sebagainya, sesungguhnya pandangan keagamaan mereka sangat moderat.

Sesungguhnya sangat sulit memilah aliran kekristenan di Indonesia ke dalam berbagai kategori fundamentalis, liberal, atau aliran yang lain. Kesulitan ini tidak lepas dari mereka untuk saling belajar dan saling berbagi ide dan pemikiran. Pada dasawarsa terakhir ini, gereja menekankan pendekatan kontekstualisasi dengan sangat kuat.

Kami di perguruan tinggi teologi juga mengambil langkah sama seperti gereja, menekankan pendekatan kontekstualisasi. Kontekstualisasi menjadi pendekatan sangat dominan pada kurikulum perguruan tinggi Kristen, khususnya bidang teologi Kristen, pendidikan agama Kristen dan sebagainya. Kontekstualisasi menjadi pendekatan yang sangat dominan.

Karena tekanan pada pendekatan tersebut, maka di perguruan tinggi Kristen, kajian-kajian penelitian, artikel maupun tugas-tugas akhir seperti banyak skripsi dan tesis berbicara kontekstualisasi. Kontekstualisasi berarti lintas denominasi dan ini tentu sesuatu yang baik dalam mendukung penguatan moderasi beragama di Indonesia.

Di sisi lain, kendati banyak denominasi, kita bersyukur bahwa Kristen di Indonesia juga membentuk wadah bagi Gerakan Oikumene, suatu gerakan yang mengupayakan Persekutuan Gereja-gereja. Persekutuan ini memberi kontribusi yang sangat baik dan besar terhadap gereja-gereja untuk bersekutu bersama.

Persekutuan ini dinamakan juga Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI). PGI memiliki dokumen Pokok-Pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) yang di dalamnya terdapat pengakuan bahwa gereja-gereja di Indonesia menyadari bahwa kekristenan di Indonesia bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh bangsa Indonesia.

Selain PGI, ada juga Persekutuan Gereja-gereja dan Lembaga-lembaga Injili Indonesia (PGLII) yang mendorong umat Kristiani dan

gereja di Indonesia berpikir dan bekerja bersama untuk Indonesia. Kristen dan gereja tumbuh di tengah bangsa Indonesia dan punya tugas bersama mengupayakan Indonesia yang rukun dan sejahtera.

Pelajaran dari Maluku

Saya berlatarbelakang Maluku memiliki pengalaman pahit dalam konteks moderasi beragama. Kendati saya dan orang-orang Maluku lainnya sulit menilai konflik beragama karena banyaknya kepentingan yang menyelimutinya, namun saya kira kita bisa belajar dari pengalaman pahit itu. Sejarah konflik Maluku menjadi laboratorium bagi umat beragama di Indonesia untuk bersama-sama membangun kebersamaan.

Pasca konflik, banyak kegiatan yang diinisiasi untuk membangun kembali Maluku menjadi kawasan yang lebih damai, toleran, dan moderat seperti halnya Maluku sebelum konflik. Gereja Protestan di Maluku, misalnya, menyatakan diri sebagai Gereja Basudara dan IAIN Ambon menjadi Kampus Orang Basudara. Semua bekerja untuk menjadikan Maluku lebih rukun dan damai.

IAKN Ambon disebut Kampus Harmoni dalam Perbedaan. Meski perguruan tinggi Kristen, tapi di kampus kami juga bekerja beberapa dosen non-Kristen. Bahkan ada mahasiswa juga berlatarbelakang non-Kristen sehingga kami perlu meneguhkan diri sebagai Kampus Harmoni dalam Perbedaan.

IAKN dan IAIN sama-sama berada di bawah payung Kementerian Agama RI. Karenanya, kami mengikat diri dalam hubungan persaudaraan *pela kandung*. *Kandung* dalam tradisi Maluku dipahami sebagai ikatan dua orang dalam satu ikatan saudara kandung. Dengan demikian, IAIN Ambon, perguruan tinggi Islam, dan IAKN Ambon, perguruan tinggi Kristen, mengikat hubungan *pela* sebagai satu saudara.

Saya kira semua mengetahui apa itu *pela kandung*, yaitu suatu kebijaksanaan lokal yang lahir dari keagungan budaya Maluku. Sebuah kebijaksanaan yang mengikatkan seseorang dalam ikatan persaudaraan sejati kendati masing-masing tidak memiliki hubungan persaudaraan karena lahir dari rahim yang sama.

Sebetulnya jauh sebelum konflik terjadi, ikatan antara masyarakat sudah sangat kuat kendati mereka memiliki keyakinan keagamaan berbeda-beda. Masyarakat saling menjaga satu sama lain saat yang lain tengah menjalankan ibadah. Muslim menjaga gereja, sedangkan Kristiani menjaga masjid. Saat berhari raya, baik Idul Fitri dan Natal,

saling berkunjung antara satu sama lain merupakan hal biasa.

Memang konflik telah terjadi, namun kini kita perlu bersama-sama membangun kembali ikatan kuat untuk menjadikan Maluku kembali menjadi kawasan dengan masyarakatnya yang menjunjung tinggi kerukunan dan perdamaian. Cukuplah Maluku menjadi laboratorium bagaimana pentingnya ikatan persaudaraan tetap perlu dirawat dan ditumbuhkan untuk kehidupan kebangsaan yang lebih baik lagi.

Moderasi Beragama: Perspektif Konghucu

Js. Kristan

Founder Generasi Muda Khonghucu Indonesia

MODERASI beragama merupakan sebuah keniscayaan bagi kita. Dengan moderasi beragama, kita bisa menjalankan kewajiban keagamaan, dan di saat yang sama kita bisa memiliki sikap penghargaan dan toleransi terhadap keragaman di sekitar kita. Terlebih Indonesia merupakan negara dengan keragaman di berbagai aspek; sosial, budaya, dan keyakinan keagamaannya. Dengan demikian, jelas bagi kita bahwa moderasi beragama bisa menjadi cara bagaimana kita bisa hidup dan menjalankan keyakinan keagamaan kita sambil di saat yang sama hidup bersama sebagai bagian dari sebuah bangsa.

Konghucu, ajaran agama yang kami yakini dan jalankan, juga menegaskan pentingnya penghormatan terhadap perbedaan. Perbedaan menjadi sebuah keniscayaan. Perbedaan seharusnya memotivasi kita untuk lebih berorientasi bagaimana kita menjadi manusia terbaik, yaitu yang mampu berkontribusi positif pada keluarga, masyarakat, dan negara. Lebih dari itu, perbedaan juga menjadi bekal bagi kita untuk saling melengkapi satu sama lain.

Sebagai seorang Tionghoa, dan kebetulan saya merupakan imam di sebuah Klenteng Konghucu, kami biasanya menyelenggarakan tradisi *Cap Go Meh*. Bagi sebagian besar orang, perayaan *Cap Go Meh* lebih banyak merepresentasikan kebudayaan Tionghoa semata. Padahal sebetulnya tidak. Kami biasanya juga mengadopsi kebudayaan lokal untuk turut memeriahkan dan menjadikannya sebagai bagian dari perayaan masyarakat Indonesia. Pada klenteng yang saya pimpin, misalnya, pembukaan *Cap Go Meh* tidak jarang dibuka dengan *qosidahan* dari saudara-saudara beragama Islam. Ini satu contoh bagaimana

■ Disarikan dari Moderasi Beragama dalam Tradisi Agama-agama di Indonesia Series (2), 26 Juni 2020.

perbedaan justru menambah kemeriahan.

Contoh lain penerimaan hal-hal berbeda namun justru memperkaya adalah penggunaan *Kendang Pencak* dalam arak-arakan dalam *Cap Go Meh*. Alat musik yang biasanya digunakan saudara-saudara dari Sunda ini justru kita gunakan sebagai instrumen musik dalam memeriahkan perayaan *Cap Go Meh*. Dengan demikian, perayaan *Cap Go Meh* tidak selalu menggunakan simbol-simbol Tionghoa. Lokalitas di sebuah daerah turut kami gunakan. Bahkan justru menambah kemeriahan perayaan yang kami lakukan. Lebih dari itu, kami menangkap bahwa perbedaan jika diterima maka akan menghasilkan kemeriahan yang begitu indah.

Tantangan dalam Penerimaan Perbedaan

Penerimaan perbedaan sebagaimana visi moderasi beragama tidak jarang malah menemukan kendala dari kita sendiri. Kecenderungan kita untuk melihat secara formalistik acapkali mengaburkan kita untuk melihat substansi persoalan. Segala sesuatu seringkali kita lihat dari tampilan lahirnya. Inilah yang sepertinya menjadi tantangan yang harus kita selesaikan dalam rangka menumbuhkan sikap hidup moderasi beragama.

Sebagai contoh, ada seorang sahabat yang mengantarkan dua tamunya ke suatu tempat. Satu tamu berasal dari Suriah, berpakaian layaknya seorang Muslim dari Timur Tengah, dan tentu saja menggunakan bahasa Arab sebagai sarana komunikasinya. Satu tamu lainnya adalah seorang Tiongkok, berkomunikasi dengan bahasa Tiongkok dan bahasa Inggris, dan tentu saja memiliki tampilan kulit kuning dan bermata sipit.

Saat tiba di lokasi tujuan, tamu dari Suriah diterima dengan penuh suka cita. Tangannya sibuk menerima salaman dari para murid di tempat tersebut. Tak hanya disalam, punggung telapak tangannya juga dicium para murid. Sambutan berbeda pada tamu asal Tiongkok. Penerimaan para murid biasa saja. Belakangan diketahui, ternyata tamu asal Suriah dengan tampang ke-araban bukan seorang Muslim melainkan seorang Kristen Maronit. Bahkan imam Kristen tersebut. Sedangkan tamu asal Tiongkok sebetulnya seorang imam di komunitas Muslim di negeri asalnya.

Pertanyaannya mengapa bisa begitu? Ini menandakan bahwa kita melihat dan menilai seseorang masih seringkali terjebak pada aspek lahiriahnya, formalitas.

Selain itu, problem yang kita hadapi adalah narasi para tokoh agama

sendiri yang justru bertentangan dengan semangat keberagaman. Para tokoh agama merupakan figur penting dalam kehidupan keagamaan umatnya. Seandainya tokoh agama mampu dan mau menarasikan penghormatan perbedaan, ini merupakan dukungan positif bagi penumbuhan sikap moderasi beragama. Namun bagaimana jika sebaliknya, para tokoh agama justru menyuarakan narasi yang kontradiktif terhadap keragaman? Tentu ini jadi persoalan lain yang harus kita hadapi.

Hal lain yang selalu muncul dan bisa jadi tantangan moderasi beragama adalah politisasi agama untuk motif politik. Pada tahun-tahun politik, narasi yang cenderung mempolitisir agama ini seringkali dimunculkan. Tentu saja ini membuat tajamnya polarisasi sosial dan ujungnya mereduksi semangat moderasi beragama.

Demikian beberapa hal yang bisa menjadi tantangan kita dalam mendorong moderasi beragama. Tantangan yang sejatinya harus dilihat sebagai masalah bersama kita sebagai bagian dari bangsa ini.

Membumikan Makna Bhinneka Tunggal Ika

Selain nilai-nilai positif agama yang mendukung penumbuhan moderasi beragama, sebagai sebuah bangsa kita juga memiliki modal penting. Modal tersebut adalah ideologi Pancasila dan falsafah Bhinneka Tunggal Ika yang lahir dari kebijaksanaan lokal Indonesia.

Sebagai sebuah ideologi, Pancasila menjadi landasan yang menyeluruh bagaimana kita yang berbeda-beda bisa tumbuh bersama-sama, saling menghormati keragaman. Sebab cita-cita kita sebagai sebuah bangsa harus terus diupayakan yaitu kehidupan bangsa yang sejahtera dan maju.

Selain itu, jadikan falsafah Bhinneka Tunggal sebagai cara pandang dan sikap kita dalam memahami dan menghormati keragaman. Jika pemahaman dan penghormatan sudah dicapai, saya yakin Indonesia akan selalu kokoh dan menjadi bangsa besar.

Bagian 2

**Keluarga dan Perempuan dalam
Moderasi Beragama**

Orang Tua dalam Transmisi Nilai Moderasi Beragama

Noor Huda Ismail

Pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian

SAYA awali dari hal kecil terlebih dahulu. Anak-anak itu biasanya tidak terima apabila langsung dilarang-larang. Misalnya dikatakan, “Lu jangan gitu.” Mereka inginnya cerita. Tetapi, sebetulnya bukan hanya anak-anak. Orang dewasa juga tidak berkenan langsung disuruh-suruh seperti itu.

Maka dari itu, cara komunikasi yang saya pilih adalah cerita tentang tema-tema kecil. Misalnya, ketika berbicara tentang terorisme, jangan sampai kita langsung sebar atau menempelkan kampanye di mana-mana, “Jangan terlibat terorisme”, atau “Islam cinta damai.” Karena hal ini terasa berat sehingga bisa mengakibatkan terhambatnya bahkan buntu komunikasi alias tidak menyentuh.

Selama ini saya berupaya melakukan sosialisasi dengan mengandalkan *story* dan refleksi. Makanya, hampir semua karya tulis maupun aktivisme saya selalu tidak memakai perspektif radikalisme tapi lebih perspektif sosialisasi. Misalnya Ph.D saya fokusnya pada maskulinitas, yang temuannya sederhana saja, yaitu *understanding early socialization is far more important than understanding globalized Islam*.

Selama ini mungkin kita selalu membayangkan kalau orang bergabung ke ISIS itu karena ceramahnya Abu Bakar Ba'asyir atau Aman Abdurrahman atau pidatonya Al-Bahgdadi. Tetapi pada kasus Dania, anak yang terlibat masuk dalam ISIS, gadis ini masuk ISIS bukan karena ceramah melainkan awalnya karena *fashion* (gaya hidup). Dia melihat kerudung yang dipakai teman-temannya itu keren sekali. Sehingga di era media sosial sekarang ini, anak bisa rentan digempur berbagai gaya hidup yang bisa jadi awal dari tertariknya pada paham radikal.

■ Bersumber dari presentasi Noor Huda Ismail, Ph.D dalam Webinar *Peran Keluarga dalam Moderasi Beragama*, Jumat, 8 Januari 2021.

Hadirnya Sosok Bapak

Di sinilah pentingnya fungsi maskulin seorang bapak dalam menjaga moderasi Islam dalam keluarga. Karena di dalam al-Quran itu lebih banyak dikisahkan diskusi bapak dengan anak (bukan ibu dengan anak). Misalnya dialog Luqman dengan anaknya, dialog Nabi Ibrahim dialog Ismail putranya, dialog Nabi Yakub dengan putra-putranya, dan sebagainya. Jadi bukan hanya peran ibu yang sangat penting sebagai sekolah pertama tapi juga bapak.

Seorang profesor keagamaan meneliti ribuan orang Kristen dan Yahudi beberapa kali secara rutin dalam rentang lebih dari 5-10 tahun. Salah satu temuannya adalah kenapa di Amerika orang masih mempraktikkan Kristen dan Yahudi, ternyata kuncinya adalah karena peran bapak. Jadi jikalau seorang bapak mempraktekkan Kristen atau Yahudi, maka anak-anaknya pun cenderung demikian. Sehingga terungkap bahwa peran *fatherhood* itu memang sangat penting.

Kembali ke kasus Dania. Dari fashion kemudian dia mendapat paham tertentu dari media sosial. Seharusnya, ketika dia hanya ingin *sharing* ke bapaknya, bapaknya sangat perhatian. Sebetulnya bapaknya merupakan sosok yang baik tetapi menerjemahkan baiknya itu adalah "aku bekerja keras untuk keluargaku."

Tetapi, poinnya adalah bahwa moderasi beragama itu harusnya diperankan oleh bapaknya, yang bisa menjelaskan perspektif utuh Islam secara teks maupun konteks. Karena pemahaman teks dan konteks merupakan dasar yang paling penting dalam memahami Islam. Misalnya karena perbedaan konteks ruang dan waktu maka muncul dua pendapat Imam Syafi'i yang berbeda, yaitu pendapat lama dan pendapat baru. Sayangnya bapak Dania tidak hadir memberikan perspektif demikian.

Bapak Dania adalah tipe bapak baik yang terobsesi dengan hal-hal besar, misalnya piknik, ada piano di rumah, dan sebagainya. Padahal yang diperlukan anak perempuan itu adalah hal-hal yang mungkin oleh laki-laki dianggap tidak mutu, seperti mendengar cerita, canda tawa yang hangat, dan sebagainya.

Hal-hal kecil itu juga yang sering luput dari perhatian negara. Biasanya dalam upaya menangkal terorisme, negara memakai narasi besar misalnya dengan mengatakan, "Ok, kita perlu deradikalisasi." Jadi narasi negara itu narasi agama yang besar dan berat. Padahal yang diperlukan itu adalah *story*. Misalnya "*When I was small*, ketika *gua* kecil, dulu *gua* kayak begini."

Makanya tantangannya adalah orang tua itu sedemikian penting

dalam menjaga moderasi beragama dalam keluarga. Transmisi nilai oleh ayah kepada anak, misalnya dalam *homeschooling*, banyak ditentukan oleh paham keagamaan sang ayah. Ada beberapa ayah misalnya sengaja memilih *homeschooling* karena tidak mau anak-anaknya itu terkontaminasi oleh paham-paham dari luar. Sehingga akhirnya praktek *homeschooling* yang dipraktekkan membentuk paham eksklusif anak. Ini saya ceritakan dalam *Cubs of Caliphate* di YouTube.

Credible Voice

Saya berupaya membuka banyak akses termasuk keluar negeri untuk membuktikan tesis bahwa bagi anak-anak, *exposure is far more important than knowledge its self*. Jadi anak Muslim Indonesia misalnya di Australia bertemu orang *bule* yang bertato tapi baik, dan mendapat pengalaman yang sama misalnya terhadap orang China, Singapura, India dan sebagainya, sehingga dia terbiasa dan menyadari betul bahwa hikmah itu bisa muncul di mana-mana. Sehingga akhirnya ketika dia memutuskan keagamaan itu adalah keagamaan yang humanis.

Untuk itu saya bergerak di *digital literacy*. Gerakan kami hanya tiga. Satu di antaranya adalah gerakan cerita sebagai *credible voice*. Dania itu fungsinya adalah sebagai *credible voice*. Seolah Dania bilang ke dunia, "Aku dulu pernah begitu, jadi kalian jangan salah." *Credible voice* seperti Dania ini penting karena dia itu mampu melawan (anggapan) konspirasi.

Setiap ada kejadian yang berbau terorisme, banyak orang-orang kita dengan mudahnya langsung beranggapan, "Ah itu konspirasi Amerika." Atau, "Ah itu bikinan densus 88." Jadi pokoknya terorisme macam apa pun langsung dipercaya biang keroknya hanya konspirasi. Orang bisa begitu karena apa yang disebut dalam psikologi sosial sebagai *motivated reasoning*. Mencari alasan dan informasi hanya kepada informasi yang membenarkan anggapan dia saja, hanya informasi yang cocok dengan anggapan dia saja, hanya mau mendengarkan berita yang sesuai dengan kemauannya, sehingga akhirnya dia makin terkurung dalam satu kotak saja. Contoh yang mudah adalah kecenderungan massa pendukung Donald Trump.

Oleh karena itu, seseorang bisa mulai berhenti dari *motivated reasoning* karena *adanya credible voice*. Seseorang dapat mulai menarik jarak (tidak total percaya buta) pada konspirasi bila mulai lebih percaya pada *credible voice*. Misalnya, orang itu menjadi berubah dengan mengatakan, "Mungkin ISIS itu dibikin oleh orang-orang konspirasi. Tetapi jualan ISIS tetap saja tidak benar."

Peran Keluarga dalam Moderasi Beragama

Siti Nur Andini

Manajer Program Keluarga Kita

SEBELUM memasuki materi, artikel ini akan menyajikan hasil survei tentang perilaku orang tua di dunia digital. Survei ini kami lakukan terhadap 70 orang tua dengan anak usia 9-18 tahun. *Pertama*, 3 akun dalam media sosial yang paling banyak diikuti orang tua adalah akun anak, keluarga, dan teman. *Kedua*, media sosial yang paling banyak diikuti orangtua adalah Instagram, Facebook, dan WhatsApp. *Ketiga*, tiga fitur pengaturan media sosial yang sangat berguna (misalnya untuk menghindari nilai-nilai budaya yang tidak sesuai) tapi tidak banyak diketahui orangtua: 1) *mute post* dan *story* di Instagram; 2) membuat *story* di WhatsApp; dan 3) *save post* di Instagram. *Keempat*, 1 dari 10 orang tua ternyata tidak mengecek informasi yang diterima sebelum ikut menyebarkan ke orang lain. *Kelima*, 5 dari 7 orang tua masih sering melihat ujaran kebencian terhadap agama, suku, dan ras tertentu. Dan sayangnya, *keenam*, 4 dari 7 orang tua memilih untuk tidak menegur orang yang melakukan ujaran kebencian. *Ketujuh*, komunitas yang paling banyak diikuti orang tua adalah 1) alumni sekolah; 2) keagamaan, dan 3) olahraga. *Kedelapan*, 3 dari 7 orang tua tidak melakukan pertemuan rutin dengan anggota komunitasnya. Mereka mengikuti komunitas tapi tidak benar-benar atau tidak sepenuhnya rutin bertemu dengan anggota komunitasnya. *Kesembilan*, walaupun berbeda latar belakang, 6 dari 7 orangtua tidak masalah dalam berinteraksi dengan anggota komunitasnya.

■ Bersumber dari presentasi Siti Nur Andini dalam Webinar *Peran Keluarga dalam Moderasi Beragama*, Jumat, 8 Januari 2021.

Keluarga Kita



Berpikir Kritis dan Keterampilan Sosial

Survei kami ini dilakukan berkolaborasi dengan Indika Foundation dalam rangka mencegah sikap-sikap intoleransi dari lingkup terkecil, yaitu keluarga. Melalui survei ini kami mengkaji dan akhirnya sampai pada kesimpulan tentang apa sebenarnya yang penting diajarkan oleh keluarga agar anak-anak kita lebih toleran dan tidak terjerumus ke dalam radikalisme. Ternyata ada dua hal penting, yaitu kemampuan berpikir kritis dan keterampilan sosial.

Mungkin budaya kita belum sepenuhnya mendukung pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan keterampilan sosial itu akibat adanya beberapa salah kaprah. *Pertama*, salah kaprah terkait anak yang kritis, bahwa anak yang kritis itu sama dengan sulit dikontrol dan cenderung memberontak. Biasanya apabila kami bertemu dan berbincang-bincang dengan para orang tua, mereka ingin anaknya kritis. Tetapi begitu anak mereka kritis kepada mereka sendiri sebagai orang tua, biasanya orang tua menjadi kesulitan dengan sendirinya. Jadi mayoritas orang tua mengalami tantangan ketika anaknya banyak bertanya atau sering mengulang pertanyaan.

Kedua, salah kaprah terkait anggapan bahwa membicarakan isu yang sensitif dalam keluarga biasanya berujung konflik sehingga sebisa

mungkin harus dihindari. Salah kaprah *ketiga* adalah anggapan bahwa pengalaman orang tua adalah guru terbaik. Padahal perkembangan zaman menuntut orang tua untuk bersikap lebih terbuka terhadap tantangan yang anak hadapi di dunianya.

Tiga salah kaprah itu biasanya menghambat anak-anak kita untuk bisa berpikir kritis dan juga punya keterampilan sosial di keluarga. Alih-alih membekali anak untuk berpikir kritis dan punya keterampilan sosial, kita sendiri sebagai orang dewasa masih kesulitan untuk mempunyai dua kemampuan ini.

Rekomendasi

Oleh karena itu, rekomendasi kami kepada orang tua adalah agar orang tua memberi teladan beberapa sikap yang mendukung kemampuan berpikir kritis dan punya keterampilan sosial, dan pada saat yang sama agar mereka menghindari hal-hal yang menghambat dua kemampuan tersebut. Empat hal yang mendukung dua kemampuan tersebut adalah: *pertama*, menumbuhkan empati, *kedua*, kemampuan mendengarkan (biasanya kita sebut dengan “mendengarkan sepenuh hati dan sepenuh tubuh”). Apakah kita sebagai orang tua di rumah ketika anak kita cerita atau bahkan bertanya atau meminta pendapat kita sudah benar-benar mendengarkan mereka dengan seksama? Terlebih saat ini di dunia digital biasanya kita sibuk dengan pekerjaan atau *gadget* masing-masing, sehingga ketika anak kita ingin konsultasi atau bercerita mereka merasa tidak didengarkan.

Ketiga, berkomunikasi dengan efektif. Kami percaya nasehat itu tidak efektif, karena nasihat itu justru akan menimbulkan *blocking* bagi anak. Karena itu, biasanya yang kami rekomendasikan adalah cerita pengalaman. *Keempat*, yang kami anggap penting, adalah membangun interaksi menyenangkan, agar anak merasa nyaman dan berani berpendapat. Kami banyak bertemu orang tua. Ketika anak-anak mereka masih kecil mereka masih banyak bermain dengan anak-anak. Namun setelah anak-anak beranjak remaja, interaksi mereka yang menyenangkan dengan anak-anak justru jadi berkurang. Padahal di saat-saat remaja inilah anak-anak makin rentan terpapar hal-hal negatif dari dunia luar.

Selanjutnya, tiga hal yang menghambat anak dapat berpikir kritis maupun memiliki keterampilan sosial, dan karenanya harus dihindari orangtua, adalah: 1) melarang tanpa menjelaskan; 2) tidak menjadi panutan positif; dan 3) membebaskan tanpa membekali.

Inilah faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam berpikir kritis dan keterampilan sosial yang sangat berguna ketika anak-anak menghadapi beragam perbedaan. Dalam hal ini peran orang tua sangatlah sentral.

Saya merasa beruntung orang tua saya sangat terbuka dalam berkomunikasi dan juga memberikan pilihan-pilihan pada saya. Dulu ketika lulus SD saya ingin masuk pondok pesantren. Sebenarnya orang tua saya kaget, karena orang tua menganggap apakah saya siap masuk pondok pesantren. Tapi orang tua saya juga tidak menghalangi dan juga tidak membebaskan saya memilih pondok begitu saja. Orang tua saya melakukan survei dulu pondok pesantrennya seperti apa lalu berkonsultasi dan akhirnya saya *mondok* selama 6 tahun di Jombang Jawa Timur. *Alhamdulillah* ternyata saya masuk pondok yang juga mendukung berpikir kritis dan memiliki keterampilan sosial yang baik. Jadi begitulah sentralnya peran keluarga terhadap anak agar bisa beragama secara moderat.

***Homeschooling* dan Moderasi Beragama**

Arief Subhan

Koordinator Penelitian Homeschooling PPIM UIN Jakarta

KITA sepakat bahwa keluarga merupakan *environment* yang sangat sentral dalam penanaman nilai religius terhadap anak. Tidak ada perdebatan terkait soal ini. Tetapi, yang menjadi pertanyaan penting adalah bagaimana keluarga memilih dan memutuskan strategi (*how to*) penanaman nilai keagamaan.

Strategi apa yang dipilih keluarga dalam penanaman nilai religius berpengaruh pada pemilihan bentuk pendidikan anak-anaknya. Sebagian keluarga misalnya memilih mendidik anaknya melalui strategi *homeschooling* (istilah di Amerika) atau *home education* (istilah di Inggris) atau sekolahrumah (istilah di Indonesia, dua kata yang disatukan). Sehingga dasar pertimbangan mereka tidak hanya alasan praktis (misalnya agar anak tidak perlu banyak keluar rumah), tetapi juga substantif terutama didasarkan pada argumen keagamaan. Kasus di Amerika misalnya menunjukkan bahwa sebagian besar keluarga *homeschoolers* merupakan penganut konservatisme (fundamentalisme) (Kunzman, 2010).

Potret *Homeschooling* Indonesia

Lalu bagaimana *homeschooling* di Indonesia? Sebenarnya *homeschooling* di Indonesia bukan satu pilihan yang tidak legal, melainkan ada legalitasnya yaitu Permendikbud Nomor 129 Tahun 2014. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa *homeschooling* adalah proses layanan pendidikan yang secara sadar dan terencana dilakukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau di tempat-tempat lain dalam bentuk tunggal, majemuk, dan komunitas, di mana proses pembelajaran itu

■ Disarikan dari Webinar Peran Agama dalam Moderasi Beragama, Jumat, 8 Januari 2021.

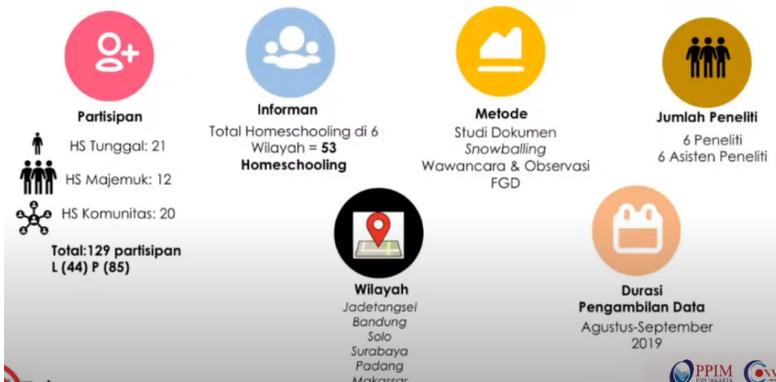
berlangsung dalam suasana yang kondusif dengan tujuan agar setiap potensi peserta didik yang unik dapat berkembang secara maksimal. Ini definisi *homeschooling* yang dipakai dalam penelitian kami.

Ada definisi lain dari beberapa sarjana. Reich (2005) misalnya mengatakan bahwa *homeschooling* adalah model pendidikan alternatif di mana anak belajar di rumah dengan orang tua mereka, seringkali ibu mereka, sebagai pendidik utama mereka. Sedangkan Dr. Brian D Ray (2011), seorang ahli *homeschooling* di Amerika, menyebutkan bahwa *homeschooling* adalah *family based, home based* dengan orang tua sebagai penanggungjawab utama dalam pendidikan anaknya.

Jadi, *homeschooling* atau sekolahrumah (istilah di Indonesia) merupakan kegiatan belajar informal yang memiliki legalitas di Indonesia. Sehingga persoalan sekolahrumah bukan terkait liar atau tidak liarnya, melainkan menyangkut asumsi-asumsi antara lain sebagai berikut:

- Pendidikan—apapun model dan bentuknya—merupakan lahan yang strategis dalam proses transmisi nilai-nilai, termasuk nilai keagamaan,
- Strategi pembelajaran yang bersifat fleksibel, menjadikan HS (*homeschooling*) memiliki ketahanan sekaligus kerentanan terhadap berlangsungnya proses transmisi dan kultivasi nilai-nilai keagamaan radikal,
- *Homeschooling* memiliki potensi untuk menciptakan “spiral pengucilan diri” (*spiral of encapsulations*) yang semakin menjauhkan anak dari nilai-nilai umum (*common values*) kewargaan.

Berikut adalah data hasil penelitian kami:



Alasan kami menggunakan metode *snow balling*, karena memang tidak ada data tentang *homeschooling* di Indonesia. Apabila kita datang ke Kemendikbud dan dinas pendidikan, tidak ada data yang lengkap tentang *homeschooling*. Oleh karena itu, kita melakukan pencarian data ini secara *snow ball* di Jadetangsels, Bandung, Solo, Surabaya, Padang, dan Makassar. Dari kota-kota tersebut kita mendapatkan 53 *homeschooling* dengan keragaman sesuai dengan Permendikbud yang kita kutip tadi, yaitu *homeschooling* tunggal sebanyak 21, *homeschooling* majemuk 12, *homeschooling* komunitas ada 20. Tetapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah seluruh *homeschoolers* di kota-kota itu.

Mungkin saja ada *homeschooling* yang tidak kita ketahui, tetapi melalui 53 *homeschooling* ini kita melakukan wawancara kepada pelakunya sekitar 129 partisipan, laki-laki sebanyak 44 orang dan perempuan 85 orang. Berikut adalah sebaran *homeschooling*: di Jabodetabek sebanyak 10, di Bandung 14, di Padang 6, di Solo 8, di Makassar 7, dan di Surabaya ada 11, dengan variasi tunggal, majemuk, dan komunitas.

Alasan Keagamaan

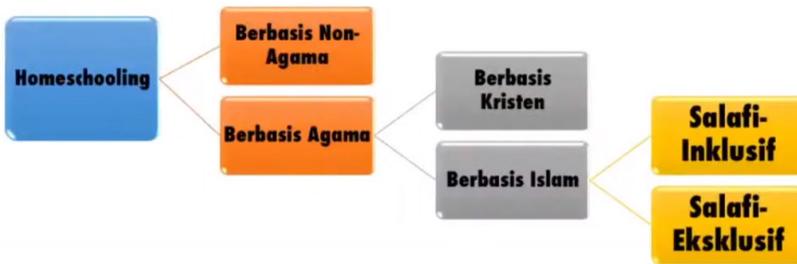
Hasil wawancara mengungkap alasan mengapa mereka memilih *homeschooling*. Ada alasan yang sifatnya non agama, misalnya alasan yang sangat spesifik yaitu supaya anak punya keleluasaan dalam mengembangkan bakatnya di bidang lain, sambil tetap memenuhi kewajiban untuk belajar sesuai dengan anak seusianya. Mungkin anak kita punya bakat olahraga tertentu atau punya *handicap* tertentu misalnya disabilitas.

Tetapi, kita juga menemukan para pelaku *homeschooling* yang punya alasan-alasan yang sifatnya religius. Kelompok non Muslim (Kristen) misalnya mengutarakan alasan keagamaan yang dikutip dari Efesus 6 ayat 4: *Dan kamu, bapa-bapa, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasehat Tuhan*. Jadi mereka merasa bahwa nilai-nilai agama yang mereka yakini itu harus tertanam pada anak-anak mereka, dan hal ini mereka lakukan sendiri.

Kelompok *homeschooling* yang Muslim juga memandang bahwa *homeschooling* itu sesuai dengan ajaran Islam, yang diungkapkan antara lain dalam pepatah ini: *al-umm madrasah al-ula, idza a'dadtahâ, a'dadta sya'ban thayib al-a'râq* (Ibu adalah sekolah pertama. Bila engkau mempersiapkannya berarti engkau mempersiapkan lahirnya generasi terbaik). *Homeschooling* juga diyakini sebagai model pendidikan *al-*

salaf al-shalih dan model pendidikan yang dipraktikkan pada masa Nabi saw dan para sahabat. Karena itu bagi sebagian mereka, *homeschooling* merupakan model pendidikan ideal bagi muslim untuk menanamkan *tauhid* dan baca tulis al-Quran serta *tahfidz* al-Quran. Jadi, penekanan mereka adalah pada *tauhid* dan baca tulis al-Quran terutama *tahfidz* (menghafal al-Quran) karena *tahfidz* memang menjadi bagian penting dalam pola pendidikan di masa-masa itu.

Homeschooling telah dimaknai secara berbeda oleh tiga kelompok, yakni kelompok “non-religius”, kelompok Kristen dan kelompok Islam. Berdasarkan data-data inilah kemudian kita membuat pembagian seperti berikut ini, yaitu ada *homeschooling* yang sifatnya non agama, ada juga yang berbasis agama, dan yang berbasis agama itu ada yang berbasis Kristen dan ada yang berbasis Islam. Berbasis Islam ada yang salafi-inklusif dan ada yang salafi-eksklusif.



Hampir semua pelaku *homeschooling* salafi, yang kita jumpai dari 53 *homeschooling* itu mengaku eksplisit bahwa saya penganut salafi, dan saya melakukan praktik ini untuk menanamkan nilai religiusitas yang menurut saya benar untuk anak saya sendiri. Jadi ada keterkaitan semacam itu.

Ketahanan dan Kerentanan *Homeschooling*

Apakah *homeschooling* memiliki ketahanan dan kerentanan terhadap paham-paham ideologi keagamaan bercorak radikal?

Kita tidak melakukan generalisasi. Tetapi ada ruang di mana misalnya 10 *homeschooling* salafi-eksklusif itu memiliki kerentanan mengalami pengucilan diri yang lebih besar, karena saluran untuk membangun *engagement* dengan komunitas lain itu rendah. Terlebih *homeschooling* tunggal yang salafi-eksklusif, karena mereka tidak memperkenalkan keragaman kepada anak-anaknya. Dalam konteks perkembangan seperti ini, *homeschooling* tersebut memiliki tingkat kerentanan yang

lebih besar terhadap ideologi keagamaan yang bercorak radikal.

Jadi kita tidak membuat semacam generalisasi bahwa semua *homeschooling* itu rentan. Tetapi dengan pola *homeschooling* yang eksklusif kerentanan itu semakin besar. Tetapi juga ada ketahanan yang berbasis non-agama yang sifatnya inklusif, karena mereka tetap menjaga *engagement* dengan komunitas dan mengajarkan komitmen kebangsaan. Semua ini dimungkinkan karena susunan kurikulum *homeschooling* sepenuhnya menjadi wewenang orang tuanya, dan karena itu kemudian menjadi sangat fleksibel dan sangat rentan. Orang tua sendiri yang menyusun mata pelajaran, mungkin mereka berkonsultasi dengan para ahli namun sepenuhnya ada dalam tanggung jawab mereka (keluarga). Inilah temuan kita terkait *homeschooling*.

Rekomendasi

- Membuat petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan sebagai turunan dari Permendikbud nomor 129/2014,
- Melakukan perbaikan mekanisme pendaftaran *homeschooling* tunggal dan majemuk dengan menggunakan mungkin *one single online submission* di Dinas Pendidikan kabupaten/kota sehingga pemerintah memiliki database,
- Harus ada bagian dalam Dinas Pendidikan kabupaten/kota yang melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pendidikan *homeschooling* (termasuk perijinan, kurikulum, guru, sarana dan prasarana, dan lingkungan),
- Perlunya penjaminan mutu pelaksanaan (UNPK5). Siswa *homeschooling* harus mengikuti ujian persamaan untuk SD, SMP, SMA, dan mutu dari proses-proses ujian ini perlu diawasi dan dijamin agar tidak terjadi pelanggaran,
- Mewajibkan dan memfasilitasi siswa-siswa *homeschooling* untuk bersosialisasi, bergaul, dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang yang berbeda untuk menyemaikan toleransi dan kebangsaan.

Moderasi Beragama, Tantangan Intoleransi, dan Peran Perempuan

Alissa Wahid

Kordinator Nasional Jaringan Gusdurian

ARTIKEL ini akan sedikit membahas bagaimana aktor perempuan menggerakkan masyarakat melakukan *control engineering* untuk gerakan moderasi beragama. Moderasi beragama, menurut Kemenag, dapat diibaratkan seumpama bangunan rumah yang atap atau payungnya adalah kemaslahatan bersama; dalam hal ini semangat *wathoniyah* itu berarti kemaslahatan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan pondasinya yang menopang semuanya itu tak lain adalah prinsip keadilan dan keseimbangan.

Dalam buku *Moderasi Beragama Kementerian Agama*, indikator-indikator moderasi beragama atau wujud luarnya adalah komitmen kebangsaan, toleransi antar kelompok, sikap damai dan anti kekerasan dan yang terakhir adalah penerimaan terhadap tradisi atau adat di Nusantara ini. Oleh karenanya, ini adalah wujud yang keluar dari prinsip adil dan berimbang yang bermuara pada kemaslahatan kehidupan bersama.

Tantangan Intoleransi

Dalam 15 tahun terakhir, Indonesia dihadapkan pada meningkatnya tren intoleransi dan kekerasan. Ini terlihat dari dua fenomena. *Pertama*, meningkatnya jumlah insiden kekerasan dan intoleransi. Dalam lintasan sejarah terlihat bahwa sejak 2005 terjadi titik kritis (*tipping point*) melonjaknya insiden ketegangan dan kekerasan antar kelompok. *Kedua*, meningkatnya jumlah legislasi yang rentan diskriminasi terhadap minoritas. Kita melihat ada penguatan prosedur demokrasi di Indonesia, tetapi di sisi lain prinsip demokrasi masih tetap lemah. Lemahnya prinsip

■ Disarikan dari Webinar Perempuan Bicara Moderasi Beragama, Jumat 14 Agustus 2020.

demokrasi itu kemudian mewujudkan populisme dan mayoritarianisme dan menguatnya pengaruh kelompok-kelompok pendukung kekerasan.

Sentimen antar kelompok agama sebetulnya sudah ada sejak zaman dahulu. Misalnya ketika masih kecil dan tinggal di Jombang, saya diberi informasi bahwa ada kelompok yang melakukan tindakan yang tidak semestinya. Tetapi sentimen itu tidak berubah dan tidak menjadi apa-apa selama tidak ada kontestasi kekuasaan. Begitu ada kontestasi kekuasaan maka sentimen ini kemudian dipelintir menjadi sentimen kebencian dalam mendiskreditkan kelompok-kelompok yang menjadi lawan politik.

Pada 2024, akan ada sekitar 270 pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di kabupaten/kota dan provinsi. Maka jaringan Gusdurian mengantisipasi adanya peningkatan insiden atau kasus yang berbau ketegangan dan kekerasan atas nama agama. Biasanya penegakan hukum juga melemah di tengah menguatnya eksklusivisme dan sikap intoleran. Menguatnya eksklusivisme dan sikap intoleran ini terjadi bahkan di kalangan arus utama masyarakat awam, bukan hanya di kelompok-kelompok kecil yang ekstrem. Artinya, telah terjadi pergeseran orientasi keagamaan di kalangan *public mainstream*.

Yang terjadi adalah praktik beragama yang substantif dan inklusif itu bersaing dengan praktek beragama yang eksklusif dan legal-formalistik. Praktik beragama yang substantif-inklusif itu landasan berpikirnya adalah bahwa meyakini agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar. Padahal, kelompok tersebut bukan satu-satunya makhluk ciptaan Allah; Allah menciptakan semesta penuh keragaman termasuk umat manusia lainnya yang perkembangan peradabannya sama-sama membesar. Karena itu hukum sejarah tidak hanya berlaku untuk suatu kelompok saja. Yang paling penting adalah bagaimana memahami substansi ajaran agama yang dianut, namun tetap akan ada ruang bersama dengan kelompok masyarakat lain.

Contoh yang paling mudah dari praktik beragama yang substantif itu adalah doktrin atau ajaran dari Kiai Haji Ahmad Siddiq tentang pentingnya menjaga 3 macam ukhuwah sebagai penegakan Islam *rahmatan lil alamin*, yaitu: 1) *ukhuwah Islamiyah*, 2) *ukhuwah wathoniyah*, dan 3) *ukhuwah basyariyah*. Inklusi Islam pada ikatan persaudaraan ini terletak pada *ukhuwah wathoniyah* dan *ukhuwah basyariyah*.

Pada saat bersamaan, kita melihat tumbuhnya praktek beragama yang eksklusif. Cara berpikir beragama eksklusif itu adalah bahwa agama yang dianutnya adalah agama yang paling benar dan kelompoknya

adalah umat yang terpilih. Lalu lanjutannya yang berbeda. Yaitu, jika dirinya ingin beragama secara utuh maka ia harus memformalkan agama; ia harus mendapatkan masyarakat atau negara yang secara formal menggunakan ajaran agamanya. Cara berpikir ini misalnya tercermin dalam doktrin *al-wala' wal-bara'* yang sering kita dengar, yang mengatakan bahwa kita harus berdekatan dengan kelompok kita tapi harus bermusuhan dan harus menjauh dari kelompok lawan kita.

Dengan paradigma yang eksklusif ini akan terasa sekali ajaran bahwa agamanya lah yang paling benar, sedangkan agama lain harus dijauhi. Kelompok beragama eksklusif seperti ini gencar menggunakan istilah kafir sebagai batas identitas yang menyekat kelompoknya dengan kelompok yang lain. Pada Munas NU tahun 2019, para ulama NU menyatakan bahwa kafir adalah terminologi untuk aqidah dan kehidupan beragama, tetapi tidak bisa digunakan dalam praktik bernegara dan berdemokrasi yang kewarganegaraannya setara. Maka istilah kafir tidak relevan untuk negara Indonesia.

Isu Global

Isu-isu eksklusivisme bukan hanya isu Islam dan isu Indonesia saja tetapi juga isu global. Dengan tingginya mobilitas manusia oleh karena globalisasi, membuat semua kelompok bercampur baur. Banyak ditemukan narasi eksklusivisme agama dan ekstrimisme agama, hanya beda pelaku dan korban saja.

Di Bangladesh misalnya, dapat disaksikan orang-orang muda berdemo memprotes pembunuhan umat Buddha. Sementara di Myanmar, kelompok ekstrem menargetkan kelompok minoritas Muslim. Di Myanmar ada kelompok Buddhis garis keras yang menghalalkan darah umat muslim. Di antara bunyi selebaran mereka: "muslim dilarang masuk, jangan membeli padi di toko orang Islam karena keuntungannya akan digunakan untuk membuat *Islamic Center* dan untuk mengislamkan Myanmar". Saya kemudian tertawa karena saya beberapa kali membaca selebaran yang narasinya sama tetapi pelakunya berbeda. Misalnya di Indonesia tuduhannya adalah Christian Center yang akan melakukan kristenisasi.

Sementara di India terdapat RSS. RSS adalah kelompok garis keras di India yang sering melakukan *swiping*. Ada 20 orang yang meninggal karena dipersekusi oleh RSS. Yang di-*swiping* adalah orang-orang Islam dan orang-orang Kristen yang memakan daging sapi atau menjual daging sapi. Menurut RSS yang memiliki ideologi Hindutva, orang-

orang yang menjual dan atau makan daging sapi walaupun di rumahnya masing-masing mendustakan agama Hindu yang merupakan agama orang India.

Oleh karena itu, kita bisa melihat bahwa eksklusivisme agama dan ekstrimisme agama itu ada di semua agama, dan di banyak negara. Faktor penyebabnya sebetulnya bukanlah ajaran agama tersebut melainkan mayoritarianisme, yakni kelompok mayoritas menekan kelompok minoritas. Oleh sebab itu, Gusdurian sering membela minoritas bukan serta merta hanya membela minoritas, melainkan ingin menegakkan keadilan.

Di Indonesia aspirasi mayoritarianisme muncul dari kelompok Islam yang mayoritas. Tapi di daerah lain di Indonesia, aspirasi mayoritarianisme datang dari kelompok lain. Di Minahasa, kelompok agama mayoritas adalah Kristen, sehingga yang mendapatkan kesulitan untuk mendirikan tempat ibadah adalah kelompok muslim yang minoritas.

Lalu bagaimana pertarungan praktik beragama substantif inklusif itu dengan praktik beragama yang formalistik eksklusif? Apakah kita mampu memenangkan nilai *ukhuwah Islamiyah* serta *ukhuwah wathaniyah* dan *basyariyah*? Apakah kita mampu memperkuat praktik moderasi beragama? Perempuan Indonesia memiliki beberapa peran sangat signifikan dalam konteks memenangkan pertarungan-pertarungan tersebut. Baik perempuan sebagai pribadi, istri maupun ibu.

Ada riset KPK terkait praktik pengasuhan dan penanaman nilai. Menurut seseorang ibu, ibu adalah pendidik dan pengasuh. Juga menurut anak, ibu adalah pendidik dan pengasuh. Maka perempuan memegang peran penting dalam pengasuhan dan penanaman nilai termasuk untuk penguatan moderasi beragama. Sejak dini anak dapat diajari persaudaraan *islamiyah*, *wathaniyah* maupun *basyariyah*.

Moderasi Beragama: Etika Publik untuk Kehidupan Berbangsa

Siti Ruhaini Dzuhayatin
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden RI

ADA satu perspektif terkait penghapusan tujuh kata dari sila pertama Pancasila. Para ulama yang merupakan bagian dari *founding fathers* Indonesia melihat bahwa sebetulnya tujuh kata itu tidak dihapus, melainkan secara implisit tercakup dalam sila pertama. Sebab, ketuhanan yang maha esa sebetulnya konsep tauhid, yang dengan sendirinya mencakup fikih. Sehingga, walau tujuh kata itu tidak dieksplicitkan, namun pengertiannya tidak dicabut dari sila pertama. Karena itu, formulasi Pancasila sebetulnya sudah final dan selesai. Sehingga umat Islam tidak perlu lagi mencari-mencari satu kesempatan politis untuk mengembalikan tujuh kata tersebut.

Secara sosiologis, Indonesia adalah negara yang didirikan di atas berbagai suku bangsa yang bersifat *ethni-religious centrism*. Misalnya, ada istilah "*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*" di Sumatera Barat. Sementara di Jawa, raja itu adalah *sayidin panotogomo*, yang artinya raja itu adalah pemimpin yang menata agama.

Dalam proses lahirnya Indonesia, ada transformasi suku bangsa yang bersifat *ethno-religious-centrisme* kemudian menjadi *nation-state* (negara-bangsa). Seringkali terlupakan oleh para sejarawan bahwa sebetulnya bangsa Indonesia mengalami dua kali proklamasi. Pertama adalah proklamasi kebangsaan tanggal 28 Oktober 1928, yakni proklamasi kebangsaan dari suku bangsa menjadi negara-bangsa dengan pengakuan adanya satu bahasa, satu bangsa, dan satu nusa. Di sini, satu kebangsaan itu hanya tiga. Mengapa tidak satu agama? Karena sebetulnya disadari betul pada waktu itu bahwa agama tidak bisa disatukan sebab agama merupakan bagian dari keyakinan yang

■ Disarikan dari Webinar Perempuan Bicara Moderasi Beragama, Jumat 14 Agustus 2020.

menjadi landasan *ethno-religious*.

Kedua adalah pada 17 Agustus 1945 dimana bangsa Indonesia memproklamkan kenegaraannya. Jadi, 28 Oktober 1928 adalah satu proses transformasi dari suku bangsa menjadi bangsa yang seharusnya menggeser etika-etika etnis menjadi etika publik. Sehingga, lahirlah etika kebangsaan yang membangun ruang publik bersama secara egaliter serta setara dan adil. Inilah sebetulnya tantangan besar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.

Tugas warga negara sipil adalah membangun etika publik. Moderasi beragama juga sebetulnya untuk membangun etika publik di dalam konsep *nation state* (negara-bangsa). Jika tugas warga sipil adalah membangun etika publik, tugas negara adalah memastikan ruang publik itu dapat diakses secara setara dan adil melalui kebijakan dan penegakan hukum.

Moderasi beragama dapat membangun etika publik dengan berprinsip pada *tawassuth, i'tidal, tasamuh*. Untuk keharmonisan ruang publik misalnya, moderasi beragama dapat mendorong beberapa hal. Pertama, tumbuhnya sikap menghargai persamaan-persamaan sebagai kekuatan milik bersama, baik itu persamaan agama, persamaan budaya, dan sebagainya. Semua agama mengajarkan kepada kita untuk menghargai sesama, menghargai hak hidup orang lain, menghargai hak-hak yang lain. Kedua, tumbuhnya sikap menghormati perbedaan-perbedaan sebagai kekayaan dan menjamin kesetaraan akses dan partisipasi dalam pengambilan keputusan dan keterjangkauan manfaatnya terhadap perbedaan agama, ras, suku, ekonomi, gender dan sebagainya.

Dalam penegakan sikap *tasamuh*, sebetulnya kita melakukan transformasi dari *mono-existence* menjadi *co-existence*. *Mono-existence* adalah kondisi di mana kita hidup di dalam sebuah kesamaan, misalnya dalam komunitas satu RT atau desa. Komunitas satu RT atau satu desa biasanya memiliki suku dan agama yang sama, sehingga sifatnya *mono-existence*. Selanjutnya, ketika kita menjadi bangsa maka kita harus melakukan transformasi dari *mono-existence* menjadi *co-existence* dengan inklusivitas tertentu. Tetapi, *co-existence* sebetulnya merupakan satu titik di mana kita bisa saling berdampingan hidup tetapi menghindar untuk tidak membicarakan perbedaan-perbedaan. Misalnya di masa Orde Baru, kita tidak boleh membicarakan SARA, sehingga kerukunan yang tercipta adalah kerukunan yang formal, kaku, berjarak, dan tidak saling menyapa.

Inilah yang kemudian masih menyisakan prasangka monokultur yang seringkali menyulut konflik jika ditunggangi oleh isu-isu tertentu. *Co-existence* masih menyimpan konsep tentang mayoritas dan minoritas, sehingga belum cukup kondusif untuk menciptakan satu kondisi hidup yang ideal untuk masyarakat multikultural dan plural. Maka *co-existence* sebaiknya didorong menjadi *pro-existence* sehingga dapat membentuk etika publik berdasar kewargaan. Oleh karena itu, tantangannya adalah bagaimana agama-agama mampu membuka diri di dalam *pro-existence*.

Tantangan lainnya adalah menjaga *wasathiyah diniyah* dari *forceful political engineering* yaitu rekayasa politik dengan paksaan. Sesungguhnya, ini merupakan sebuah residu dari *ethno-religious* di dalam merumuskan publik. Artinya, ada rekayasa politik yang menyatakan bahwa kelompok mayoritas itu sebetulnya mempunyai hak yang lebih.

Tantangan lainnya adalah *cultural backlash* atau kemunduran kultural di mana pemuda yang multikultural ditarik ke budaya yang monokultur. Oleh sebab itu, tugas yang perlu dilakukan adalah bahwa kita harus mampu mengubah sentiment *ethno-religious* menjadi *rational civic engagement*.

Moderasi Beragama dan Parenting yang Baik

Yunita Faela Nisa

Peneliti PPIM UIN Jakarta,

Wakil Dekan Fakultas Psikologi UIN Jakarta

BANYAK literatur mencatat, orang yang mengalami ekstremisme biasanya pernah atau sedang mengalami beragam pengalaman buruk, baik berupa pengucilan di masa kecil, remaja ataupun masa berikutnya. Ekstrimisme juga bisa disebabkan oleh ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang biasanya disuarakan misalnya di sosial media, juga oleh persepsi tentang parahnya kondisi ketidakadilan.

Anehnya, mereka yang terpapar radikalisme atau masuk ke dalam jaringan teroris seringkali bermula dari hal-hal baik yang kita semua sebenarnya setuju. Misalnya dalam kasus yang saya temukan, sejumlah orang biasanya merasa pemahaman keagamaannya kurang lalu mereka ingin meningkatkan pemahaman keagamaannya. Sayangnya, ketika dalam proses meningkatkan pemahaman keagamaan mereka malah mendapatkan guru yang mengajarkan sesuatu yang memang dekat dengan kekerasan dan setuju dengan ekstremisme.

Ada juga kasus terorisme karena tergerak oleh semacam “panggilan moral”. Sebagai contoh, kasus ASN yang kemudian menjadi radikal seperti seorang polisi bernama Sofyan Tsauri yang kemudian berubah menjadi teroris. Ada hal-hal yang membuat tergerak hatinya, yakni pandangan bahwa ada hal-hal yang tidak beres dan harus dibenahi. Namun sayangnya, lagi-lagi ia mendapatkan guru yang akhirnya membuat dia menjadi pro kekerasan.

Ada proses yang kurang “sehat” dalam tahap-tahap awal seseorang mulai tertarik pandangan radikal, yaitu penilaian yang terlalu cepat tentang kondisi atau orang lain. Misalnya orang yang baru belajar agama menjadi lebih cepat menilai bahwa orang lain itu tidak tepat. Orang semangat belajar agama sejatinya positif. Namun, karena memiliki

■ Disarikan dari Webinar Perempuan Bicara Moderasi Beragama, Jumat 14 Agustus 2020.

pemahaman keagamaan yang keliru, pemahamannya membuat dia sangat cepat menilai. Sebagai contoh, jika ia melarang tetangganya yang sering mentraktir teman-temannya dengan alasan bahwa seharusnya uang tersebut lebih baik diberikan ke fakir miskin atau anak-anak terlantar. Orang tersebut lupa bahwa bisa jadi orang yang suka mentraktir itu juga terbiasa memberi sedekah kepada fakir miskin.

Contoh lain adalah kasus gaya pakaian yang saya alami di sekolah anak saya. Waktu itu di acara *class mom* ada orang yang perubahannya sangat drastis dari belum mengenakan jilbab lalu memakai jilbab pendek kemudian jilbab sangat panjang, kemudian terakhir memakai burdah (cadar). Suatu ketika saya ditepuk dan dia mengatakan semoga saya mendapat hidayah dan segera hijrah. Padahal saya memakai jilbab dari kuliah semester 1, namun tidak dengan jilbab seperti yang ia pakai.

Jelas bahwa pintu masuk ke hal-hal ekstrem itu bermacam-macam, sehingga upaya antisipasi dan penangkalannya juga memerlukan pendekatan yang berbeda-beda. Bentuk upaya-upaya itu bergantung faktor apa yang paling penting menjerembabkan orang menjadi ekstrem.

Data BNPT menunjukkan napiter termuda itu usianya 15 tahun. Banyak studi juga menyebutkan bahwa usia awal seseorang terlibat dalam proses radikalisasi atau ekstrimisasi itu biasanya memang di usia muda, yaitu usia 17 sampai 22 tahun. Kita lihat memang pada masa masa remaja ini seseorang sangat rentan terpapar ekstremisme.

Apa implikasi dari uraian singkat tentang sebab-sebab ekstrimisme itu? Hal yang perlu digarisbawahi adalah bahwa betapa usia remaja itu sangat penting sebagai masa pencarian jati diri, sehingga perlu didekati dan dibimbing dengan intensif agar tumbuh kuat dan kebal terhadap ajaran-ajaran yang sifatnya pro-kekerasan. Dalam hal ini tentunya yang paling berperan adalah *parenting*. Pola asuh yang baik dapat membentuk pribadi tangguh dalam menghadapi banyak masalah.

Sementara ini di masyarakat kita terjadi pergeseran pola *parenting* orang tua yang tidak memberi kesempatan kepada putra-putrinya untuk bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Misalnya ada mahasiswa kedokteran yang sedang koas yang berarti sudah berusia sekitar 21 tahun masih dipikirkan orangtuanya bagaimana sarapan dan makan siangnya. Padahal anak seusia itu sebaiknya sudah dilepas agar bisa mandiri.

Parenting yang baik juga harus memastikan agar anak tidak mengalami kekerasan apalagi trauma, diskriminasi atau tekanan berat, sehingga *parenting* dapat membentengi anak dari hal-hal buruk termasuk ekstremisme.

Meneguhkan Islam Wasathiyah untuk Indonesia yang Majemuk

Oki Setiana Dewi

Kandidat Doktor SPs UIN Jakarta, Public Figure

ISU moderatisme Islam sering terdengar sejak munculnya berbagai peristiwa kekerasan atau terorisme yang dituduhkan kepada umat Islam. Benar atau tidaknya tuduhan itu menjadi urusan lain yang kadang-kadang menjurus kepada persoalan politik. Pembahasan tentang Islam moderat sebenarnya tidak lepas dari topik mengenai bagaimana sesungguhnya Allah memuliakan semua anak manusia tanpa membedakan suku bangsa dan ras karena keutamaan manusia sebenarnya ditentukan oleh tingkat ketakwaannya.

Namun, seperti dimaklumi, istilah Islam moderat selama ini cukup kontroversial. Beberapa sarjana Islam mendukung istilah Islam moderat, sementara yang lain tidak mendukungnya karena ia memiliki efek negatif terhadap Muslim dan Islam itu sendiri. Di zaman sekarang ini misalnya, ada persepsi jika aktivitas seperti pacaran, minuman keras atau zina seolah-olah menjadi hal yang biasa yang tidak perlu dikhawatirkan lagi, sementara sebagian umat Islam yang mematuhi aturan agama atau mendakwahnya justru disebut radikal. Sehingga wajar-wajar saja jika ada yang berprasangka bahwa moderasi agama ini tidak lain adalah upaya yang dilakukan untuk menghadang dakwah Islam dan kebangkitan umat Islam.

Namun, apapun istilahnya, seharusnya moderasi beragama mampu menjadikan umat Islam sebagai rahmatan lil alamin. Moderasi beragama, menurut KBBI, adalah pengurangan kekerasan dan penghindaran dari ekstrimisme sehingga cenderung kepada jalan tengah atau disebut *wasathiyah*. Istilah *wasathiyah* diambil dari Surah al-Baqarah ayat 143 mengenai umat Islam yang diberi sifat sebagai

■ Disarikan dari Webinar Perempuan Bicara Moderasi Beragama, Jumat 14 Agustus 2020.

umat pertengahan atau adil.

Walaupun demikian, ada pandangan yang mengatakan jika umat pertengahan atau moderat itu tidak tegas terhadap sesuatu, dan terlalu toleran sehingga sikapnya tidak jelas. Sebetulnya, *wasath* (sifat pertengahan umat Islam) itu selain berarti pertengahan juga berarti adil atau menempatkan sesuatu pada tempatnya. Sehingga sikap pertengahan itu harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi, bukan sekedar mengutip ayat-ayat tertentu untuk membenarkan sikap tertentu.

Dalam al-Quran terdapat ayat-ayat mengenai sikap tegas kepada non muslim atau orang munafik, namun ini tidak serta merta dipahami sebagai sifat kasar kepada semua non muslim. Semua kasus harus dilihat dari kondisi ketika ayat-ayat tersebut diturunkan. Kita bisa lihat bagaimana Rasulullah enggan menjatuhkan hukuman kepada seorang munafik bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Tokoh ini sangat masyhur di kalangan umat Islam kala itu karena ulahnya. Akan tetapi, Rasulullah saw tetap bersikap bijak dan adil ini kepadanya. Saat peristiwa Perang Uhud tahun 3 Hijriah, pasukan Islam yang berjumlah 1,000 orang melawan orang-orang kafir Quraisy yang berjumlah 3,000 orang. Lalu, tokoh munafik Abdullah bin Ubay bin Salul ini memprovokasi orang-orang Islam untuk tidak ikut berperang sehingga ada 300 orang yang mendengar kalimat munafik tersebut. Tidak hanya itu, tokoh ini juga menyiarkan berita fitnah yang menuduh Siti Aisyah berselingkuh dengan salah seorang sahabat. Sampai akhirnya Umar Bin Khattab mengatakan orang ini harus dihukum mati. Namun, Rasulullah urung melakukannya karena khawatir kelak orang akan berkata bahwa Muhammad membunuh sahabatnya. Dari kisah ini, Rasulullah meneladankan sikap bijak dan adil kepada Abdullah bin Ubay bin Salul walaupun ia telah berbuat keburukan.

Lahirnya NKRI Berkat Islam Moderat

Sikap moderasi beragama terlihat antara lain dalam berinteraksi dengan nonmuslim. Sejatinnya, Islam moderat ini adalah paham keislaman yang berkembang lebih awal dan dianut oleh masyarakat mayoritas Indonesia. Islam masuk Indonesia berbeda dengan masuknya Islam di tempat lain. Islam yang masuk ke bumi Nusantara dapat berakulturasi dengan budaya dan sistem sosial politik lokal. Mayoritas masyarakat Indonesia menganut paham Islam *wasathiyah* karena banyak tokoh Islam yang belajar di Timur Tengah maupun di Eropa

mampu menginterpretasikan Islam dalam konteks kekinian sebagai pengejawantahan Islam *rahmatan lil alamin*. Inilah pemahaman yang kemudian melahirkan NKRI.

Oleh karena itu, latar belakang lahirnya NKRI ini adalah karena pandangan Islam moderat. Beberapa puluh tahun silam, pemimpin Islam cukup berlapang hati dengan menghapus tujuh kata dalam Piagam Jakarta. Tujuannya adalah untuk menjaga keutuhan bangsa Indonesia yang sangat pluralistik. Dalam Piagam Jakarta termaktub sila pertama adalah ketuhanan yang maha esa dan kalimat pengiringnya, yaitu “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Namun pada akhirnya, dengan pertimbangan yang sangat luar biasa untuk menjaga keutuhan bangsa, kalimat tersebut dihapus.

Sebenarnya jika diteliti, proses pembentukan negara ini tidak jauh berbeda dengan apa yang terjadi di Madinah. Rasulullah berhijrah dari Mekkah ke Madinah. Saat itu jumlah umat Muslim di Madinah ada sekitar 1500 orang dari sekitar 10.000 penduduk Madinah. Ada Nasrani, Yahudi, Majusi, bahkan 60% penyembah berhala. Kemudian, Rasulullah Saw mengumpulkan semuanya untuk membuat sebuah kesepakatan yang dikenal sebagai piagam Madinah. Piagam ini berisi hak dan kewajiban yang sama bagi seluruh Penduduk Madinah apapun agamanya, termasuk hak perlindungan dan keadilan bagi semua warga dan kewajiban bertahan jika kota Madinah diserang.

Jadi sejatinya, negara Madinah dibangun atas dasar kesepakatan bersama dengan kelompok masyarakat lainnya. Hal ini jugalah yang mendasari bagaimana Indonesia dibangun atas dasar kesepakatan oleh para *founding fathers*. Pancasila dan UUD 45 sebagai landasan negara merupakan bagian dari ajaran Islam itu sendiri yang “moderat”, karena sila-silanya selaras dengan nilai-nilai Islam dan dapat diaktualisasikan menuju kehidupan yang dicita-citakan oleh umat Islam. Setiap silanya selaras dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan. Jadi, menjadi seorang muslim yang baik dapat diartikan dengan menjadi warga negara yang baik dan mencintai budaya nasional.

Islam moderat merupakan Islam pertengahan yang tidak membenarkan sikap ekstrem dan kekerasan namun tidak juga membenarkan sikap longgar dan paham liberalisme. Lalu bagaimana kaitan moderasi Islam dengan jihad dan terorisme? Jihad dan terorisme adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Banyak orang menyangka jihad itu hanya perang saja. Misalnya, ketika saya mendapat beasiswa ke Australia dan berdakwah untuk sebuah sekolah, murid-muridnya

ketakutan ketika mendengar kata jihad. Kemudian, saya menjelaskan bahwa Jihad bukan hanya di medan perang, melainkan segala upaya yang sungguh-sungguh dan berkelanjutan untuk menjaga kesejahteraan sosial dan pendidikan. Dengan demikian, menuntut ilmu dan melakukan kebaikan di jalan Allah (antara lain pendidikan dan kesejahteraan sosial) adalah bagian dari jihad. Ini berbeda dengan terorisme yang tidak diajarkan oleh agama manapun. Terorisme adalah tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban yang menimbulkan ancaman terhadap kedaulatan negara dan tentu saja merugikan kesejahteraan masyarakat.

Dalam al-Quran, kata kedamaian disebutkan sekitar 157 kata. Oleh karenanya, sangat kontradiktif jika ada orang merasa sangat beragama tapi meledakkan bom dan kemudian membunuh siapa pun yang tidak bersalah. Jihad dalam Islam memang tidak anti perang bila situasi dan kondisinya sebagai bentuk pertahanan untuk mempertahankan diri dari penindasan, penganiayaan, dan penyiksaan musuh, bukannya untuk menyerang membabi-butu.

Moderasi (sikap moderat) atau *wasathiyah* ini juga adalah sikap adil. Dalam konteks hubungan antar agama, Rasulullah adalah contoh terbaik dalam sikap menghadapi teman di luar agama Islam. Umat muslim diajarkan untuk toleran berdampingan dan menjaga perdamaian dan persaudaraan kemanusiaan.

Hadirnya Rasulullah tidak lain hanya untuk menjadi rahmat bagi semesta alam (Surah al-Anbiya 107). Karena itu, prinsip ajaran yang dibawa beliau adalah tidak ada paksaan dalam beragama, penegakkan keadilan dan perdamaian. Dengan prinsip-prinsip ini seharusnya tidak ada persoalan menyangkut agama mayoritas maupun agama minoritas.

Banyak teladan Rasulullah terkait sikap kepada nonmuslim. Rasulullah misalnya mendoakan kebaikan untuk nonmuslim. Suatu ketika, seorang pemuka kabilah Daud datang menemui Rasul dan mengatakan bahwa kaumnya tidak memeluk Islam. Ia mengira Rasulullah akan mendorong keburukan bagi dirinya dan kaumnya. Namun, Rasulullah justru mendoakan agar Kabilah Daud diberi petunjuk.

Sebagai penutup, Indonesia adalah negara yang sangat majemuk secara ras, suku, dan agama sehingga untuk mewujudkan negeri yang damai diperlukan toleransi antar anggota masyarakat. Untuk itu, pengembangan sikap *wasathiyah* yang mampu membentuk sikap Islam yang menjadi rahmat bagi seluruh alam sangat perlu untuk dilakukan.

Bagian 3

**Moderasi Beragama Indonesia:
Pandangan Dunia dan Diplomasi
Kebudayaan**

Islam, Moderatisme, dan Pendidikan

Tim Lindsey

Centre for Indonesian Law, Islam and Society, University of Melbourne

MASYARAKAT Indonesia adalah masyarakat Muslim, namun Indonesia bukanlah negara Islam. Perdebatan seputar asas Islam, khususnya apakah negara hendaknya menegakkan pemberlakuan syariah Islam terus berlangsung dan menjadi hal yang mengemuka dalam wacana politik sejak lama sebelum Republik Indonesia berdiri. Sementara itu tren kesalehan beragama terlihat terus tumbuh sejak tahun 70-an khususnya di kalangan Muslim kelas menengah yang berkembang di kota-kota besar di Indonesia. Tren ini dipandang oleh Presiden Soeharto sebagai ancaman politik sehingga rezim Soeharto mengeluarkan kebijakan yang merepresi identitas Islam di sepanjang 32 tahun masa pemerintahannya.

Pada masa Soeharto banyak pembatasan yang diberlakukan terhadap ekspresi identitas Islam secara publik. Hal ini segera dicabut setelah Soeharto mundur pada 1998. Sejak itu, banyak perhatian tertuju pada munculnya apa yang disebut sebagai kebangkitan Islam. Meningkatnya intoleransi agama dan ajakan untuk makin mengakui syariah merupakan ciri dari fenomena tersebut. Dan, hal ini menciptakan tantangan besar yang harus selalu dihadapi oleh pemerintahan demokratis yang berkuasa setelah jatuhnya Soeharto.

Pada era Reformasi muncul paradoks bahwa kebebasan beragama pada prinsipnya meningkat, namun kebebasan menjalankan praktik ibadah justru menurun. Kecil kemungkinan paradoks itu dapat diselesaikan. Pemerintahan pasca Soeharto mendapati dirinya berada pada posisi yang sulit saat berupaya merespon tekanan dari kaum Islamis garis keras. Membahayakan diri sekaligus memunculkan

■ Disarikan dari Webinar Indonesianis Bicara Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia, 17 Juli 2020.

kontradiksi terhadap diri mereka sendiri ketika mereka berupaya menghindar mengambil posisi resmi, baik dengan kalangan progresif ataupun kalangan konservatif.

Di bawah pemerintahan Soeharto, citra Islam Indonesia sebagai Islam yang toleran dan moderat atau Islam dengan wajah tersenyum ditanamkan dan diproyeksikan dengan cermat. Hal ini mendorong terbentuknya wacana dominan yang disokong oleh para tokoh Muslim, yang secara luas mendukung program-program pembangunan pemerintah. Wacana tersebut turut mengokohkan ideologi negara yaitu Pancasila, yang pada masa itu pada dasarnya bersifat sekuler. Wacana tersebut menjadi dukungan bagi kerukunan hubungan dengan serta kesetaraan hak bagi minoritas non-Muslim di Indonesia serta penolakan terhadap gagasan negara Islam yang dianggap tidak sesuai dengan Indonesia.

Namun demikian, era pasca Soeharto ditandai dengan naiknya konflik agama secara dramatis. Mulai dari serangan dari kelompok jihadis ekstremis yang berupaya menggulingkan pemerintah hingga serangan ganas oleh kelompok Muslim konservatif terhadap kalangan-kalangan minoritas sosial dan minoritas agama termasuk Kristen, Muslim, non-Ortodoks, dan yang disebut aliran sesat. Inilah yang disebut Martin van Bruinessen sebagai "*the conservative of turn*" atau "kembalinya konservatisme". Van Bruinessen menyampaikan argumentasinya bahwa perkembangan di Indonesia sejak lengsernya Soeharto pada 1998 telah banyak mengubah citra Islam Indonesia serta persepsi terhadap Muslim Indonesia sebagai kaum yang toleran dan cenderung bersedia berkompromi.

Prof. Dr. Azyumardi Azra menyatakan dengan cara yang berbeda, yaitu makin mencuatnya Muslim garis keras telah secara signifikan merusak citra Islam Indonesia. Pada kenyataannya, persepsi Indonesia terhadap *the conservative of turn* sangat tidak seragam. Sebagian kalangan tertentu melihatnya sebagai arah kembalinya tradisi keagamaan Indonesia sesuai persepsi mereka yang telah terpinggirkan selama berpuluh-puluh tahun. Sebagian mereka lainnya meyakini bahwa hal ini mengancam gagasan kaum pluralis yang telah berhasil dimasukkan dalam ide pembentukan negara Indonesia pada 1945. Sebagian mendukung arus meningkatnya kesalehan beragama namun menolak kekerasan yang berakar pada intoleransi. Sebagian lain melihat kekerasan sebagai suatu hal yang diperlukan dan bahkan bagian esensial dalam proses islamisasi. Umat di Indonesia makin berkotak-kotak dan terpolarisasi sejak jatuhnya Soeharto.

Segala ketegangan yang makin luas ini juga mengemuka di bidang pendidikan Islam, dan nyatanya sebagian pihak mengklaim bahwa sekolah dan perguruan tinggi Islam yang membentuk sepertiga bagian dari keseluruhan sektor pendidikan merupakan sumber signifikan bagi meningkatnya intoleransi. Memang benar sebagian sekolah Islam, bahkan ada lembaga pendidikan tinggi Islam yang terlibat dalam terorisme fundamentalis Islam, namun hal ini bukanlah gambaran akurat atas sektor pendidikan Islam secara luas.

Jelas bahwa banyak lembaga Indonesia bergulat untuk memenuhi tuntutan masyarakat modern. Pendidikan Islam tradisional di pesantren misalnya tidak mengikuti kurikulum tertentu, namun didasarkan pada kekuatan jalinan hubungan antara santri dengan kiai mereka yang mengajarkan teks fikih mana saja yang perlu dipelajari. Banyak di antaranya yang berasal dari abad pertengahan dan dikompilasi menjadi kitab kuning. Cara belajar hukum dan aturan Islam sudah berusia berabad-abad dan lazim dijumpai di dunia Muslim. Namun, penekanan pada tradisi membekali siswa dengan ilmu agama tapi tidak membekali mereka dengan kecakapan yang diperlukan untuk memperoleh pekerjaan di era globalisasi dan dalam pasar yang penuh persaingan.

Madrasah di Indonesia yang diakreditasi oleh negara lebih mudah diakses dan tersedia dalam jumlah yang jauh lebih besar dibanding jumlah pesantren yang terdaftar. Nyatanya, jumlah madrasah yang saat ini tercatat resmi ialah tiga kali lipat dibandingkan dengan pesantren. Dan, jumlah siswa yang bersekolah di madrasah mencapai kurang lebih 20% dari jumlah keseluruhan anak usia sekolah di Indonesia. Hal yang signifikan di sini ialah bahwa hanya seperempat kurikulum yang digunakan dalam pendidikan di madrasah merupakan pengajaran agama dan madrasah kerap lebih banyak menggunakan cara-cara pengajaran kontemporer. Akan tetapi, di sini pendidikan Islam yang sifatnya tradisional pun harus terus mempengaruhi capaian pembelajaran, membatasi kemampuan banyak lulusan madrasah untuk bersaing dengan lulusan sekolah umum dalam bursa tenaga kerja.

Masalah-masalah ini berkontribusi pada kondisi agak stagnannya kurikulum yang digunakan di beberapa lembaga pendidikan tinggi Islam yang menerima mahasiswa dari lulusan pesantren dan madrasah. Hal ini penting karena pendidikan tinggi dan perguruan tinggi Islam merupakan penghasil terbesar tenaga pengajar di sekolah-sekolah Islam sekaligus menciptakan para pejabat negara yang bertanggung jawab atas kebijakan agama.

Siklus ini merupakan lingkaran yang sifatnya simbiosis dan jangan sampai berubah menjadi lingkaran setan. Peran kiai dan pesantren berubah pesat. Signifikansi para ulama dan lembaga pendidikan yang sifatnya tradisional menghadapi tantangan besar ketika sebagian besar masyarakat muslim menempuh cara-cara alternatif untuk belajar tentang iman dan ekspresi atas Iman mereka dari sumber-sumber yang tidak terbayangkan sebelumnya pada beberapa puluh tahun lalu misalnya penceramah di acara televisi atau melalui situs web interaktif dan sebagainya. Ironis sekali di negara yang dengan bangga memproklamirkan diri sebagai negara dengan jumlah penduduk Islam terbesar dunia pendidikan Islam justru mengidap mentalitas minoritas. Dalam konteks sistem pendidikan nasional Indonesia pendidikan Islam memang merupakan minoritas karena dana yang disediakan selalu sedikit.

Dalam beberapa tahun belakangan, ada tekanan signifikan terhadap lembaga pendidikan tinggi untuk melakukan pembaruan kurikulum yang berasal dari tiga sumber utama. *Pertama*, perubahan kurikulum UIN yang dahulunya merupakan Institute Agama Islam Negeri (IAIN). *Kedua*, kenyataan bahwa bursa tenaga kerja di Indonesia menjadi semakin kompetitif. Di mana para pemberi kerja semakin mencari lulusan yang memiliki ilmu dan keterampilan yang luas dibanding dengan pendaftar sebelum-sebelumnya. *Ketiga*, seiring dengan kenyataan bahwa bidang pendidikan tinggi di Indonesia secara keseluruhan tumbuh berkembang semakin profesional. Para siswa dan orangtuanya mendesak agar mutu dan relevansi perkuliahan yang diajarkan dilembaga-lembaga pendidikan tinggi Islam dapat ditingkatkan. Berubahnya IAIN menjadi UIN yang terjadi belum lama ini mengharuskan lembaga-lembaga tersebut menyediakan perkuliahan yang bersifat nonkeagamaan. Misalnya, kedokteran, teknik, atau hukum konvensional. Sebagian besar menghadapi tantangan dari para ulama konservatif yang menolak perubahan tersebut. Masalah serupa juga membuat banyak perguruan tinggi Islam swasta menjadi terkekang. Jalan yang harus ditempuh oleh pemimpin dan pengajar di perguruan tinggi masih sangat panjang, namun sebagian lainnya telah mengambil langkah-langkah signifikan untuk memenuhi tuntutan tersebut.

Di lembaga-lembaga pendidikan yang paling progresif, kurikulum yang digunakan semakin padu dengan menggunakan disiplin ilmu konvensional. Hal ini memberikan pendidikan yang berimbang bagi mahasiswa yang pada akhirnya akan memberikan lebih banyak peluang profesi setelah mereka lulus. Menurut Prof. Azyumardi Azra, terdapat dua pengaruh utama dalam studi kajian Islam di pendidikan Islam

Indonesia yaitu perguruan tinggi Timur Tengah dan perguruan tinggi Barat. Pasti ada interaksi yang telah berjalan lama dan intens di antara ulama Indonesia yang berada di Timur Tengah. Khususnya yang ada di Mekkah, Madinah, dan Kairo. Dalam proses penyebaran Islam ke Indonesia dari Timur Tengah, Islam Indonesia mengembangkan tradisi intelektualnya sendiri yang berbeda, khususnya para kiai Jawa di awal abad ke-19 mengembangkan jaringan mereka sendiri pada rantai intelektual ilmu dan pembelajaran Islam.

Hasilnya adalah, pesantren di Jawa menjadi perwujudan tradisi pembelajaran Islam yang berbeda dan unik. Islam Nusantara adalah suatu istilah yang sering digunakan untuk mengacu pada aspek-aspek dalam tradisi Indonesia yang bersifat terbuka, toleran, dan moderat, serta memandang iman Islam sebagai bagian dari kehidupan demokratis paling utama.

Kesimpulannya adalah, perubahan-perubahan yang terjadi dalam Islam Indonesia, kontestasi yang terjadi sehubungan dengan arah ke depan bagi proses belajar mengajar di sekolah-sekolah Islam dan lembaga pendidikan Islam memiliki hubungan erat dan inheren dengan kontestasi sosial dan politik yang lebih luas di Indonesia antara Islam moderat dan Islam ekstremis.

Muhammadiyah dan Sikap Islam Moderat

Kim Hung Jun

Dept of Cultural Anthropology, Kangwon National University

SAYA akan berbicara tentang ormas Muhammadiyah. Apakah Muhammadiyah itu bisa menjadi organisasi moderat atau tidak? Jawaban saya, Muhammadiyah akan tetap menjadi ormas yang moderat. Pandangan publik terhadap Muhammadiyah banyak versi. Artinya, banyak yang bicara Muhammadiyah itu tidak moderat atau cukup ekstrem. Ada juga yang mengatakan di dalam Muhammadiyah itu terdapat unsur liberal.

Ada yang menyebutkan bahwa Muhammadiyah dekat dengan wahabisme, yang terlihat dari sikap Muhammadiyah terhadap Nasrani yang agak keras dan sentimen. Hal ini jika dilihat dari sudut pandang beberapa pemikir dari Muhammadiyah yang cukup liberal, seperti Ahmad Syafii Maarif, Dawam Rahardjo, Kuntowijoyo, dan seterusnya.

Kelompok yang menonjol dan menjadi mainstream dalam Muhammadiyah jelas adalah kelompok konservatisme. Ini terlihat dari kasus pembubaran JIMM (Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah) yang sama seperti kelompok JIL (Jaringan Islam Liberal) dalam NU. JIMM yang berdiri pada 2003 menyebarkan liberalisme di dalam Muhammadiyah. Banyak penolakan dari Muhammadiyah sendiri sehingga JIMM dibubarkan pada 2007.

Yang menjadi penelitian saya kemudian, bagaimana posisi anak-anak muda Muhammadiyah yang pernah tergabung di dalam JIMM. Ternyata, hampir semua yang pernah tergabung di dalam JIMM masih bekerja di Muhammadiyah dan memiliki posisi yang strategis di Muhammadiyah. Sebagai contoh, bahkan mantan anggota JIMM sendiri menjadi Ketua Pemuda Muhammadiyah di Jawa Tengah. Di satu sisi ada serangan keras

■ Disarikan dari Indonesianis Bicara Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia, 17 Juli 2020

terhadap liberalisme, tapi di sisi lain mereka yang pernah dianggap “virus” di dalam Muhammadiyah itu tetap berada di dalam organisasi Muhammadiyah itu sendiri. Saya pikir itu yang perlu dianalisis mengenai kemoderatan Muhammadiyah.

Terakhir, mengapa kelompok konservatisme sepertinya menonjol, namun tetap harus moderat di dalam Muhammadiyah. Ada tiga faktor yang menjadi alasannya. *Pertama*, di dalam ideologi Muhammadiyah tetap ada egalitarianisme, atau menganggap semua anggota sama walaupun kedudukan di dalam organisasi berbeda. *Kedua*, mengutamakan rasionalitas. Dan *ketiga*, Muhammadiyah tetap mau mengikuti perubahan yang baru. Dalam penelitian saya, organisasi Muhammadiyah cukup demokratis karena keputusan harus berdasarkan musyawarah. Dan di dalam Muhammadiyah, musyawarah berjalan dengan sebenar-benarnya karena pendapat semua anggota harus dihargai. Di dalam Muhammadiyah tidak ada keputusan yang ekstrem. Hasilnya selalu mengarah kepada kompromi.

Unsur yang lain yang ingin saya sampaikan, yaitu cara memilih pimpinan di dalam Muhammadiyah 100% melalui pemilihan umum, artinya tidak bisa muncul satu tokoh kharismatik yang bisa mendominasi opini Muhammadiyah. Walaupun ada beberapa tokoh yang dianggap lebih penting dibanding yang lain, namun secara keseluruhan di dalam Muhammadiyah, satu orang tidak dapat mendominasi kegiatan organisasi.

Hal terakhir yang ingin saya sampaikan, biasanya jika membahas Muhammadiyah, kita membahas ideologi. Tetapi menurut saya, waktu kita menganalisis Muhammadiyah, hal yang perlu diteliti adalah *actionnya* karena kita tahu bahwa Muhammadiyah memiliki banyak sekali sekolah dan rumah sakit. Sehingga menurut pemimpin Muhammadiyah dan anggotanya, yang lebih penting dari persoalan ideologi adalah kegiatan mengelola amal usaha yang dimiliki.

Kesimpulannya, walaupun Muhammadiyah dianggap sebagai organisasi yang di dalamnya ada paham liberal dan paham konservatif, tetapi Muhammadiyah tetap berada di jalan yang moderat.

Indonesianis dalam Perspektif Tokyo

Takeshi Kohno

Faculty of Political Science, Toyo Eiwa University

SAYA ingin menjelaskan ide saya dengan perspektif makro dari Tokyo. Pertama-tama saya ingin memosisikan Indonesia penting di mata dunia dan Asia Pasifik. Indonesia adalah negara yang penting dalam empat hal. *Pertama*, negara terbesar di kawasan Asia Tenggara. *Kedua*, negara dengan posisi strategis di kawasan Asia Pasifik. *Ketiga*, negara yang mendemonstrasikan multikulturalisme. *Keempat*, negara yang bisa menjadi contoh baik untuk dunia maupun masa depan umat manusia. Indonesia pasca kemerdekaan memang memiliki beberapa masalah, namun sampai sekarang bisa mendemonstrasikan multikulturalisme. Saya ingin memperhatikan dua aspek perkembangan Indonesia.

Pertama, apakah banyak masyarakat diperbolehkan mengikuti proses kegiatan ekonomi dan politik. Dalam proses ekonomi, misalnya, banyak orang mengikuti aktivitas ekonomi, banyak orang yang bisa memproduksi dan membeli barang. Jadi, pasar ekonomi semakin lama semakin luas. Ini salah satu indikator kemakmuran Indonesia dari segi ekonomi. Dan jika melihat politik, proses perkembangan politik di negara demokrasi dapat dilihat dari kegiatan mengikuti pemilihan umum dan dari respons DPR/MPR memenuhi keinginan masyarakat tertentu untuk diskusi demi mencapai keputusan publik. *Kedua*, apakah pernah ada ide dan bentuk komunitas atau dasar negara selain Pancasila dalam sejarah Indonesia hingga sekarang. Saya fokuskan aspek politik dalam diskusi ini.

Kalau kita melihat beberapa titik kritis dalam sejarah Indonesia, saya rasa kita bisa memahami lintasan politik. Pertama, titik kritis itu adalah lahirnya Indonesia. Kita semua tahu kontribusi Piagam Jakarta dan tujuh kata pada Piagam Jakarta akhirnya tidak dicantumkan dalam Pancasila.

■ Disarikan dari Indonesianis Bicara Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia, 17 Juli 2020.

Tujuh kata itu adalah “dengan kewajiban menjalankan syariah Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Pada 2002, Piagam Jakarta itu menjadi masalah politik karena kaum Islamis ingin mengembalikan tujuh kata ini sebagai salah satu dasar negara namun tidak terjadi.

Kedua, titik kritis terjadi pada Orde lama dan Orde Baru. Karena dua zaman itu mencari bentuk yang cocok dengan komunitas Indonesia. Saya kira sampai sekarang masih menjadi diskusi mengenai bentuk negara yang cocok dengan mengaitkan Pancasila.

Titik kritis *ketiga* adalah zaman reformasi dan era demokratisasi. Reaksi terhadap Orde Baru yang penuh kekerasan terhadap masyarakat adalah ingin mencabut Pancasila. Masyarakat tidak ingin membicarakan Pancasila karena dianggap salah satu produk Orde Baru. Namun, setelah zaman ekstremisme, reaksi terhadapnya adalah mayoritas masyarakat mengembalikan Pancasila sebagai dasar negara. Sampai sekarang belum ada dasar negara yang dapat menggantikan Pancasila.

Banyak tantangan bagi legitimasi dasar negara. Saya melihat dari dua segi. *Pertama*, dari dalam negeri. Dari dalam negeri korupsi mengikis legitimasi negara dan mengundang kekerasan negara terhadap masyarakat. Masalah korupsi adalah aspek yang sangat penting jika melihat masa depan Indonesia. *Kedua*, dari luar negeri, daya tarik masyarakat terhadap masyarakat ideal yang disebutkan dalam salafisme saya kira memang ada. Pada umumnya, kondisi ekstrem mengundang reaksi ekstrem dan lintasan keekstreman mulai dari masalah domestik. Misalnya korupsi yang terjadi di Indonesia mengundang reaksi masyarakat yang ekstrem karena korupsi mengikis legitimasi negara dan elite politik. Hal itu yang mengundang daya tarik salafisme.

Saya harap korupsi di Indonesia dapat berkurang dan legitimasi negara tetap kuat sehingga masyarakat tidak begitu bereaksi secara ekstrem dan tetap mengembalikan posisi Indonesia yang baik di dunia.

Indonesia dan Moderasi Beragama

Eva Fachrunnisa

School of Culture, History and Language, ANU College of Asia & the Pacific

Moderasi beragama sedang *hits*. Muslim dari berbagai *background* pasti memiliki definisi yang berbeda mengenai siapakah Muslim yang moderat. Kalau kita bicara tentang tendensi kemanusiaan, bisa jadi yang moderat adalah yang dianggap normal. Atau, kalau kita berafiliasi dengan kelompok tertentu, bisa jadi dia mengatakan yang moderat itu seseorang yang sama seperti kita. Kalau menurut Quraish Shihab, wasathiyah adalah keberagaman yang paling sulit. Dia menekankan bahwa ilmu dan pengendalian emosi menjadi penting karena jika kurang ilmu, emosi menjadi lebih tak terkendali.

Dalam konteks Malaysia, kalau kita berbicara mengenai tatanan politik atau negara yang memutuskan siapakah Muslim yang moderat, ini menjadi berkaitan dengan politik orang yang membuat penilaian tersebut. Beberapa pemerintah Muslim menggunakan kata moderat untuk merujuk kepada mereka yang tidak punya posisi pemahaman yang sama dengan pemerintah.

Kata wasathiyah mungkin lebih dulu dipopulerkan di Malaysia, terutama pada masa Najib Razak. Ia menyebutkan wasathiyah pada pidato-pidato kenegaraan. Tahun 2012, Najib mengumumkan lahirnya *Institute Washatiyyah of Malaysia*, juga *Global Movement for Accurate Foundation* (GMAF) untuk memberikan *institutional support* bagi proyek wasathiyah pemerintahannya. Pada masa berikut, Abdullah Ahmad Badawi memperkenalkan konsep Islam hadhari yang juga intinya sama dengan prinsip moderasi beragama. Pada masa pemerintahan Malaysia kini, konsep moderasi beragama dikenal dengan istilah *rahmatan lil'alam*. Banyak sekali tentunya yang mengkritisi model moderasi

■ Disarikan dari Webinar Indonesian Bicara Moderasi Beragama: Dari Indonesia untuk Dunia, 17 Juli 2020.

beragama yang dikelola oleh negara. Misalnya, argumen mengenai bagaimana nuansa politik wasathiyah. Bagaimana non-Muslim di Malaysia merasa skeptis terhadap prinsip wasathiyah yang dirumuskan pemerintah.

Beberapa negara Barat sering menempatkan variabel moderat yang berkaitan dengan isu-isu kebijakan *foreign policy*. Misalnya, untuk menakar apakah seseorang atau suatu grup tersebut moderat atau tidak. Dalam buku *Building Moderate Muslim Networks* (2007), penulisnya mengkritisi pemerintah Amerika yang memiliki pandangan tidak konsisten tentang siapa yang disebut moderat dan sering membuat kesalahan menganggap kelompok Islamis sebagai kaum moderat Muslim. Mereka meminta pemerintah untuk melihat Asia Tenggara termasuk Indonesia ketika ingin berkolaborasi dengan Muslim moderat. Ini adalah suatu yang harus dibanggakan karena Indonesia berimage negara Muslim yang moderat.

Kita tahu bahwa suara Universitas al-Azhar adalah suara moderatnya Islam. Suara al-Azhar semakin terdengar ketika kampus ini mulai direformasi dan dimodernisasi, puncaknya pada 1961. Ide ini juga untuk memastikan moderasi al-Azhar bisa mengungguli daya tarik Ikhwanul Muslimin dan juga salah satu konsep yang dipromosikan Saudi Arabia. Saya mengingat momen ketika Presiden Jokowi berdiskusi dengan Syaikh al-Azhari pada 2018 di Bogor, Jawa Barat, untuk merevisi wawasan wasathiyah Islam. Ini bisa dikatakan sebagai momen untuk memantapkan wajah Indonesia sebagai negara yang mempunyai pandangan Islam yang moderat.

Terakhir, tentang Syaikh al-Azhar yang dianggap sebagai ikon ulama dunia yang mempromosikan *The Middle Way*. Ia berpesan agar masyarakat Indonesia menyebarkan moderasi beragama mengikuti ajaran Ahli al-Sunnah wal Jamaah. Ketika kita berbicara tentang masalah moderasi beragama, kita juga berbicara tentang masalah bagaimana kita berinteraksi dengan yang berbeda. Saya rasa ini menarik juga untuk melihat bagaimana moderasi versi al-Azhar, dan kita lihat banyak kesamaannya. Salah satunya al-Azhar menentang intoleransi, yang tertuang dalam dokumen al-Azhar *Watsiqat al-Azhar Haula Mustaqbal Mushaf* yang dikeluarkan pada saat setelah revolusi 25 Januari. Al-Azhar menjunjung tinggi komitmen saling menghormati dan bersebelahan.

Indonesia dan Diplomasi Moderasi Beragama

Abdurrahman Mohammad Fachir

Wakil Menteri Luar Negeri periode 2014-2019

MODERASI beragama merupakan program unggulan Pemerintah Indonesia sekaligus juga Kementerian Luar Negeri RI. Sejak 2003 atau Pak Hassan Wirajuda menjadi Menteri Luar Negeri RI (Menlu), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) telah menjalankan program promosi dialog lintas agama dan kebudayaan. Jadi, Kemenlu sudah cukup lama mengimplementasikan moderasi beragama.

Pada program tersebut, Kemenlu menyodorkan topik memberdayakan moderasi (*empowering moderation*). Ini tidak lepas dari realitas kala itu dimana bermunculan gerakan-gerakan yang sangat eksklusif. Walaupun jumlahnya kecil dan tidak banyak jumlahnya, namun gerakan-gerakan tersebut sangat berisik (*noisy*) hingga terdengar kemana-mana.

Kemenlu menyadari bahwa suara-suara berisik ini bisa diimbangi dengan narasi moderasi yang lebih besar. Karena itu, Kemenlu sepakat untuk memberdayakan dan mengedepankan suara moderasi sehingga lebih besar, mengimbangi atau bahkan mengalahkan suara berisik tersebut. Program pemberdayaan ini selanjutnya kita sajikan dalam promosi dialog lintas iman.

Kemitraan Kemenlu dengan berbagai lembaga serupa berbagai negara memungkinkan pemberdayaan moderasi ini bisa menghasilkan suara lebih besar. Hal tersebut sudah dilakukan Kemenlu sejak 2003 hingga kini secara berkelanjutan.

Oleh sebab itu, Indonesia telah menjadi negara yang sangat aktif mempromosikan dialog lintas agama dan kebudayaan di pentas global. Satu hal penting dalam menumbuhkan tatanan kehidupan umat manusia yang rukun dan harmonis adalah dengan mengedepankan sikap saling memahami dan menghargai perbedaan.

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dan Diplomasi Kebudayaan (ke-10), Jumat 4 September 2020.

Libatkan Aktor Moderasi

Seperti disebutkan di atas, dialog lintas agama dan kebudayaan menjadi tema besar Kemenlu ketika berbicara moderasi beragama. Agar suara moderasinya lebih sesuai, maka aktor yang menyuarakannya bukanlah para diplomat sendiri. Kemenlu libatkan aktor yang lebih memahami dan berkapasitas dalam mempresentasikan moderasi.

Aktor-aktor tersebut adalah figur yang bersentuhan langsung dalam pengelolaan moderasi beragama. Kemenlu telah melibatkan para tokoh agama berbagai agama, akademisi, bahkan media dan lainnya untuk menyampaikan pentingnya moderasi beragama, termasuk moderasi beragama dari sudut pengalaman Indonesia.

Saya sendiri sudah beberapa kali diminta memimpin delegasi Indonesia yang terdiri dari para aktor pemberdaya moderasi beragama mengunjungi berbagai negara, melakukan dialog tentang signifikansi moderasi beragama. Para tokoh agama dan akademisi diajak untuk *sharing*, bukan *preaching*, berbagi pengalaman kita sekaligus juga mengambil pelajaran terbaik dari pengalaman mereka.

Tidak hanya itu, dialog yang kita selenggarakan juga turut melibatkan para aktor tokoh-tokoh muda agama. Sebagai calon-calon pemimpin Indonesia di masa depan, kita ajak mereka berdialog tentang pentingnya sikap hidup moderat dan bagaimana moderasi beragama bisa ditumbuhkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia yang majemuk.

Tidak hanya praktik moderasi beragama dalam pengalaman Indonesia, tokoh-tokoh muda juga kita ajak untuk berdialog dalam konteks lebih luas. Ini diperlukan untuk menambah wawasan bagaimana membangun dan merawat konflik dengan melihat pengalaman pengelolaan kehidupan beragama di luar Indonesia.

Setidaknya terdapat dua hal yang bisa kita capai melalui program-program dialog agama dan lintas budaya. *Pertama*, mempromosikan pengalaman Indonesia yang mungkin dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara lain dalam memperlakukan keragaman. Kita selalu mengklaim bahwa kita negara dengan aneka ragam suku, tradisi budaya, bahasa dan agama. Maka hal ini memberikan kita ruang untuk berbagi kebaikan tentang bagaimana sebuah negara dengan keragamannya dapat tetap survive hingga kini.

Kedua, program dialog lintas agama dan budaya juga memungkinkan kita mendapatkan pengalaman dan pandangan pihak lain yang dapat kita ambil sebagai pelajaran berharga. Kita tidak bisa hidup dengan

perspektif sendiri. Dengan memahami dan menggali perspektif yang lain memungkinkan kita memiliki kekayaan pendekatan dalam mengelola perbedaan. Jadi, ada proses berbagi dan belajar yang kita lakukan.

Berbagai forum dari program dialog telah Kemenlu gelar dalam mendukung tujuan mendorong kehidupan damai umat manusia. Berbagai tokoh yang jadi aktor moderasi beragama telah Kemenlu ajak serta. Berbagai negara juga telah jadi mitra dalam menyelenggarakan dialog ini.

Terakhir, setelah diskusi dengan beberapa akademisi tanah air seperti Profesor Komaruddin Hidayat, Kemenlu mencoba merumuskan sebuah *guideline* dalam menampilkan sisi moderasi beragama di Indonesia. Setelah diskusi panjang, kami menyepakati penerbitan sebuah buku yang diharapkan bisa menjadi sarana mempromosikan moderasi beragama ke dunia.

Buku itu kami terbitkan tahun 2014-15 dengan judul *Permata dari Surga: Potret Kehidupan Beragama di Indonesia*. Agar bisa dibaca kalangan luas, buku tersebut juga diterbitkan dalam edisi Bahasa Inggris dengan judul *Jewel From Heaven* dengan harapan bisa menginspirasi pengelolaan keragaman mereka. Buku ini memotret tiga hal terkait keragaman agama-agama di Indonesia.

Pertama, buku ini memotret kehadiran dan perkembangan agama-agama di Indonesia seperti Islam, Hindu, Buddha, dan lainnya. Selain mengurai sejarah kedatangan, potret aspek ini juga menampilkan sisi unik persebaran agama tanpa ada pemaksaan. Semua agama-agama datang membawa misi dakwah, tapi tidak ada pemaksaan.

Kedua, buku ini memotret bagaimana hubungan antara agama dengan negara. Berbeda dengan negara dan masyarakat luar, Indonesia memiliki Kementerian Agama yang memberi dukungan dan pelayanan kehidupan umat agama-agama di Indonesia. Di satu sisi, agama merupakan urusan pribadi. Namun dalam hal interaksi sosial, Kementerian Agama sebagai representasi negara memegang peran pengelolaan dan pelayanan.

Ketiga, buku juga menampilkan sisi-sisi unik kehidupan umat agama di Indonesia. Dalam hal ini, Kemenlu menampilkan bagaimana rumah-rumah ibadah sebagai salah satu aspek penting kehidupan umat agama didirikan dan terjaga dengan baik. Di antaranya seperti Vihara Bahtera Bakti Jakarta dan Sam Poo Kong Temple di Semarang, Bali, Bangka, dan Pontianak.

Di luar ketiga hal tersebut, buku ini juga memotret bagaimana kearifan lokal (*local wisdom*) juga tumbuh mendukung sikap toleransi

di kalangan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, lokasi Masjid Istiqlal dan Gereja Katolik Katedral berdiri berdampingan. Hal ini untuk menegaskan bahwa kebijaksanaan lokal turut menjadi instrumen efektif pemeliharaan hidup toleran di Indonesia.

Menampilkan Islam yang Moderat

Apa yang Kemenlu lakukan melalui program dialog agama dan lintas budaya sebetulnya memiliki manfaat signifikan bagi masyarakat Muslim Indonesia. Program dan forum penyelenggaraannya menjadi media penting dalam menampilkan wajah Islam yang moderat dan mengedepankan visi perdamaian, serta agama yang *rahmatan lil 'alamin*.

Betul bahwa Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakatnya mempraktekan ajaran agama Islam. Namun praktek keberagaman ini tidak menjadi penghalang bagi umat agama lain untuk hidup dan menjalankan ajaran agamanya dengan tenang. Umat Islam dan umat-umat agama lain sejak dahulu hingga kini telah bahu membahu menjadi satu bangsa Indonesia.

Sikap penghormatan dan toleransi Islam sebagai agama mayoritas terhadap ummat agama-agama lain sebetulnya sesuai dengan visi kehidupan masyarakat ideal kota Madinah seperti dicontohkan Nabi Muhammad. Seperti diketahui, Piagam Madinah tetap memberikan ruang kebebasan sekaligus menjamin umat agama lain menjalankan kewajiban agamanya. Karenanya saya selalu katakan bahwa Indonesia merupakan representasi Piagam Madinah pada masa kini.

Berbagai program dialog lintas agama dan budaya yang diinisiasi Kemenlu pada akhirnya tidak lepas dari keinginan kita untuk menunjukkan bahwa moderasi beragama merupakan karakter utama bangsa ini. Karakter inilah yang harus kita perkuat di dalam diri kita sekaligus juga kita bagikan pengalaman terbaiknya bagi masyarakat di kawasan lain sehingga bisa bersama-sama membangun kehidupan umat manusia yang rukun dan penuh penghargaan.

Pelajaran Moderasi Beragama dari Thailand

Mustari

Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI Bangkok, Thailand

THAILAND merupakan salah satu mitra penting Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Dalam sejarahnya, Thailand menampilkan diri sebagai negara yang layak dicontoh dalam peneguhan moderasi beragama.

Thailand merupakan negara monarki yang mendasarkan kehidupan masyarakatnya pada tiga pilar utama, yaitu agama, negara, dan *loyalty to the king*. Ketiga pilar ini mempengaruhi pandangan hidup masyarakat Thailand bahwa orientasi kehidupan mereka tidak lepas dari ketiganya. Ketiganya disimbolkan dalam bendera negara yang terdiri dari tiga warna, merah, putih, biru. Merah mencitrakan negara, putih melambangkan agama, dan biru mewakili raja.

Dalam konstitusi juga disebutkan bahwa raja adalah kepala semua agama. Semua agama memiliki hak yang sama untuk dapat membuat acara keagamaan sesuai dengan ajaran keagamaannya. Karenanya, setiap agama diakui oleh kerajaan, namun paham yang ekstrem sangat dilarang di negara Thailand.

Pengakuan terhadap agama-agama terefleksi dari sikap Kerajaan Thailand yang sangat menaruh hormat dan penuh perhatian kepada komunitas muslim Thailand, termasuk di wilayah selatan. Tahun lalu, Majelis Ulama Thailand diizinkan menyelenggarakan acara maulid secara meriah. Bahkan Raja berkenan hadir mengikuti acara Maulid. Dalam acara itu, Raja mengangkat tangan saat pembacaan sholawat seperti halnya para muslim sendiri.

Merujuk hal tersebut, dapat dikatakan bahwa kerajaan berperan penting menciptakan situasi tenang dan memperkuat sendi-sendi moderasi. Pada tahun 2014 misalnya, konstitusi Thailand tidak secara

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dan Diplomasi Kebudayaan (ke-10), Jumat 04 September 2020.

khusus membahas kebebasan beragama atau perlindungan dari diskriminasi berdasarkan agama, tetapi menyatakan semua martabat manusia, hak kebebasan, dan kesetaraan orang harus dilindungi.

Dalam konstitusi baru, Thailand kembali memberikan kebebasan beragama dan perlindungan yang sama bagi semua orang tanpa memandang keyakinan agama. Mengizinkan semua orang untuk menganut, mengamati, atau mempraktikkan agama apapun untuk pilihan mereka. Negara juga menegaskan komitmennya untuk melindungi rakyatnya seperti melindungi Buddha serta agama lain.

Pemerintah Thailand sendiri secara resmi mengakui lima kelompok agama, yaitu Buddha, Islam, Brahmana Hindu, Sikh, dan Kristen. Kendati demikian, di Thailand juga banyak masyarakat yang tidak beragama pada lima agama resmi, tapi mereka tetap aman mereka melaksanakan agamanya.

Menyangkut kehidupan beragama, ada hal menarik dari warga Thailand. Ini terlihat ketika diundang menghadiri seminar tentang isu-isu Islam kontemporer pada Fakultas Politik di sebuah universitas. Semua panitia penyelenggara seminar beragama Buddha, tetapi saat kegiatan dibuka panitia memberi kesempatan pengajian al-Quran dan doa Islam. Semua peserta seminar juga menyimaknya dengan baik.

Tentu saja ini menguatkan dugaan kita bahwa seperti halnya Indonesia, pemerintah dan masyarakat Thailand sebetulnya memiliki sisi kehidupan keagamaan penuh penghormatan satu sama lain.

Realitas penghargaan Thailand terhadap keragaman agama-agama begitu menarik terutama jika dilihat dari perspektif demografinya. Diketahui, Thailand merupakan negara dengan total jumlah penduduk sebanyak 68,2 juta (2016). Dari total jumlah tersebut, 93% beragama Buddha, 5% beragama Islam, dan sisanya terbagi ke dalam sejumlah umat agama seperti Kristen, Konghucu, Yahudi, Sikh, dan Tao, bahkan kepercayaan lokal.

Melihat komposisi umat agama seperti demikian, bisa dikatakan bahwa Thailand merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Buddha. Bahkan bisa dikatakan jika Thailand merupakan negeri Buddha. Kendati demikian, komitmen Raja melindungi warga berbeda keyakinan dan akomodasi atas pemeluk Islam menjadi bukti mayoritas agama juga bisa menghargai minoritas agama lainnya.

Islam dan masyarakat muslim sendiri hadir dan hidup nyaman di Thailand. Agama Islam merupakan agama yang dominan di empat provinsi, yaitu Pattani, Narathiwat, Yala, dan Satun. Keseluruhan kawasan

ini berdekatan dengan perbatasan Malaysia atau terkenal juga dengan sebutan Thailand Selatan. Dalam berbagai perjalanan dinas, kami bisa melihat bagaimana kehidupan beragama di sana sangat aman.

Dengan demikian, moderasi beragama di Thailand sebetulnya berjalan dengan baik. Bahkan pengalaman mereka mengelola moderasi beragama bisa menjadi teladan moderasi beragama bagi masyarakat negara-negara di dunia, termasuk Indonesia.

Diplomasi Budaya Indonesia di Thailand

Thailand bagi Indonesia merupakan salahsatu negara yang cukup penting hingga hari ini. Catatan sejarah mengungkapkan, relasi masyarakat dari kedua negara sudah berlangsung jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kedekatan hubungan Thailand-Indonesia sendiri terus terpelihara setelah Indonesia berdiri dan menjadi negara kesatuan. Jika dihitung berdasar hubungan dua negara pasca kemerdekaan Indonesia, hubungan kedua negara sudah menginjak usia ke-70 tahun.

Berbagai program kebudayaan dan pendidikan terus kita pupuk dalam memperkuat hubungan kedua negara. Sejak tahun 2018, kita sudah bersama-sama menyelenggarakan pameran batik skala internasional. Beberapa batik warisan seperti koleksi batik Raja Rama ke-V Thailand dipamerkan.

Pameran batik ini memiliki dua manfaat. Selain memperkuat hubungan berdasarkan kebudayaan yang hampir sama dalam membuat batik, pameran ini juga bermanfaat dalam mendorong sektor pariwisata kedua negara.

Program pendidikan menjadi sarana penting lain dalam melakukan diplomasi budaya. Mahasiswa Thailand banyak yang belajar di berbagai perguruan tinggi dan lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Jumlahnya tidak kurang dari 3500 orang mahasiswa yang kini belajar di Indonesia. Jumlah ini lebih besar dari jumlah pelajar Indonesia yang belajar di Thailand, yaitu sebanyak 500-an orang.

Pada pelajar Muslim Thailand yang belajar di berbagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia seperti pesantren, kita dapat mengetahui jika Indonesia merupakan salahsatu negara tujuan utama belajar Islam setelah Mesir dengan Universitas al-Azhar-nya. Selain pengetahuan Islam, sikap moderasi dan toleransi Islam Indonesia jadi alasan mereka belajar di Indonesia.

Diplomasi Moderasi Beragama di Belanda

Din Wahid

Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI Den Haag, Belanda

ISLAM datang ke Belanda, juga ke kawasan Eropa lainnya, berlangsung dalam dua gelombang. Gelombang pertama berlangsung ketika beberapa orang dan kelompok Muslim yang selama ini berkolaborasi dengan penguasa kolonial Eropa ikut bermigrasi ke Eropa. Mereka biasanya pindah ke Eropa setelah kemerdekaan dan munculnya gerakan nasionalisasi. Kepindahan mereka juga didasarkan pada motif mencari kehidupan yang lebih baik.

Gelombang kedua berlangsung pada dekade 1950-an saat kinerja industri di Eropa meningkat dan membutuhkan banyak tenaga kerja. Banyak tenaga kerja dari bekas negeri jajahan yang sebagian besar merupakan negeri-negeri Muslim diundang untuk bekerja di berbagai negara di Eropa seperti Pakistan, Algeria, Turki, dan lain lain.

Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sepanjang tahun 1960 hingga 1975, jumlah penduduk Suriname dalam jumlah besar bermigrasi dari negeri asalnya ke Belanda. Setelah menyatakan kemerdekaannya, Belanda yang sebelumnya menjajah Suriname, mempersilahkan warga Suriname untuk datang ke Belanda. Begitu juga dari Maroko, sekitar 250 ribu orang datang ke Belanda untuk bekerja di berbagai pabrik. Hal sama dilakukan oleh 300 ribuan orang dari Turki yang bermigrasi ke Belanda dengan tujuan sama

Idealnya setelah kontrak kerja mereka selesai atau kehidupan ekonomi sudah cukup, mereka akan kembali ke negara asal. Namun, banyak dari mereka yang tetap tinggal di Eropa. Hal ini berperan penting menciptakan komunitas muslim di Belanda maupun negara-negara Eropa lainnya.

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dan Diplomasi Kebudayaan (ke-10), Jumat 4 September 2020.

Belakangan ini, jumlah masyarakat muslim di Belanda sendiri terus bertambah. Hal ini sejalan dengan kebijakan reunifikasi keluarga, pemberian suaka politik, termasuk angka kelahiran dari keluarga muslim. Pada tahun 2006, jumlah umat Islam di Belanda telah mencapai kisaran 850 ribu jiwa.

Beberapa kota di Belanda menjadi kantong-kantong penting umat Islam di negeri Kincir Angin tersebut. Diantaranya Amsterdam, Rotterdam, dan Den Haag. Masjid-masjid megah juga banyak didirikan, terutama masjid komunitas muslim Turki dan Maroko.

Sejalan dengan hal itu, berbagai komunitas muslim juga berkembang dalam berbagai corak keislaman dan organisasi. Dari komunitas Muslim Indonesia, baik yang tinggal maupun mahasiswa mendirikan sejumlah organisasi seperti Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Belanda, Keluarga Muslim Delft (KMD), Euromuslim Belanda, dan lainnya. Mereka aktif melakukan kajian-kajian keislaman.

Citra Negatif

Kendati Islam dan komunitas muslim telah lama hadir di negeri Belanda dan menjadi bagian penduduknya, namun ada saja sikap tak ramah dilekatkan kepada Islam dan komunitas Muslim. Sebagian pihak masih melekatkan citra negatif pada Islam dan umat muslim sebagai agama yang menjunjung aksi kekerasan, terorisme, bahkan tidak ramah perempuan.

Citra negatif itu dilekatkan menyusul berbagai aksi kekerasan dan teror yang dilakukan sebagian individu dan kelompok muslim di belahan dunia lain. Beberapa diantaranya seperti serangan bunuh diri ke gedung World Trade Center AS pada 11 September 2001, aksi peledakan bom Madrid Spanyol pada 11 Maret 2004, dan peledakan bom di tengah-tengah kota London Inggris pada 7 Juli 2005.

Berbagai rentetan ini pada akhirnya menjadikan Islam dan komunitas muslim di Belanda, juga di beberapa negara Eropa, mendapatkan pencitraan negatif dari komunitas lain. Islam diasosiasikan sebagai agama kekerasan dan teror.

Citra negatif lain adalah Islam dan masyarakatnya sebagai agama dan kelompok yang tidak ramah pada perempuan. Penggunaan hijab atau *niqab* yang dilakukan seorang muslimah untuk menjaga aurat difahami sebagian masyarakat setempat sebagai bentuk pengekangan perempuan.

Citra negatif ini salahsatunya hadir dalam film *Fitna* yang dirilis tahun 2008. Film karya bersama dua politikus Partij voor de Vrijheid

Belanda, Geert Wilders dan Arnoud van Doorn, ini mengidentikan Islam sebagai agama yang mendukung kekerasan. Hal ini menjadi gambaran bagaimana citra negatif dilekatkan kepada Islam dan komunitas Muslim.

Diplomasi Moderasi Beragama di Belanda

Merujuk pada situasi di mana masih adanya citra negatif yang dilekatkan kepada Islam dan komunitas Muslim, maka diperlukan langkah yang bisa mengubah citra tersebut. Salah satu langkah yang sangat relevan adalah mendorong moderasi beragama bagi masyarakat Muslim di Belanda dan Eropa sendiri.

Moderasi beragama yang mendorong cara beragama 'jalan tengah', tidak terlalu ke kiri (liberal) atau pun terlalu ke kanan (fundamental) memungkinkan masyarakat muslim di Belanda hidup dalam kekhasan lokalitasnya. Nilai-nilai *tawasuth*, *tawazun*, *tasamuh*, dan *musawa* menjadi nilai yang sesuai untuk diterapkan.

Terkait itu, apa yang dilakukan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Den Haag, Belanda itu sendiri?

Berangkat dari realitas sosial demikian, KBRI sendiri memang menilai perlu untuk terlibat aktif dalam menyuarakan pentingnya moderasi beragama sehingga citra negatif dengan sendirinya hilang. Dalam hal ini KBRI berkeinginan untuk; *Pertama*, mendukung upaya masyarakat Indonesia menyiarkan Islam moderat. Ada banyak sekali komunitas Muslim yang menyiarkan Islam moderat di Belanda seperti PCNU dan sebagainya yang sudah disebutkan tadi.

Kedua, menampilkan wajah Islam Indonesia yang toleran. *Ketiga*, menegaskan bahwa Indonesia sangat beragam dari berbagai aspek seperti etnis, bahasa, golongan dan agama namun tetap bisa hidup rukun dan damai karena adanya sikap penghargaan keragaman itu sendiri.

Sejalan dengan hal itu, kita menggelar berbagai program implementasi moderasi beragama model Indonesia di Belanda. Tahun 2019 misalnya, KBRI Belanda menggelar pameran *The Faces of Islam in Indonesia*. Pameran ini memamerkan berbagai foto tentang Islam di Indonesia yang berbeda dari Islam di Timur Tengah, seperti keberadaan kubah masjid, bedug dan lainnya.

KBRI juga mendukung penyelenggaraan Konferensi Internasional *Wasathiyah Islam* yang dilakukan PCNU Belanda bekerjasama dengan laman Islam Alif.id. Konferensi ini mencoba memberikan gambaran bahwa Islam tidak selalu seperti dalam imajinasi mereka sebagai agama

intoleran, melainkan penuh penghargaan seperti yang berlaku di Indonesia.

Konferensi dengan topik yang sama juga KBRI Belanda fasilitasi, yaitu *International Conference "Seeking the Middle Path (al-wasatiyya); Articulation of Moderat Islam"* yang digelar PCNU Belanda. Pada kesempatan ini, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin hadir dan menyampaikan Islam moderat ke publik Belanda.

Berbagai program lain juga dilakukan seperti pentas musik Ki Ageng Ganjur, serta kegiatan *interfaith dialogue* dengan menghadirkan pembicara dari kalangan akademisi dan tokoh Islam Indonesia. Kami berharap berbagai program ini bisa memberikan gambaran bagi publik setempat bahwa Islam itu bukan agama intoleran, melainkan agama yang penuh penghargaan dan pemuliaan nilai-nilai kemanusiaan.

Moderasi Beragama dan Diplomasi di Filipina

Lili Nurlaili

Atase Pendidikan dan Kebudayaan, KBRI Manila, Philipina

INDONESIA dan Filipina memiliki karakteristik yang hampir sama. Seperti halnya Indonesia, Filipina merupakan negara kepulauan dengan 7641 pulau. Kesamaan lainnya adalah hampir sebagian besar masyarakatnya juga bercocok tanam padi.

Dari sisi religiusitas, seperti halnya Indonesia, Filipina merupakan negara dengan warganya yang cukup religius. Ini terlihat dari semboyan mereka "*maka-diyos, maka-tao, makalalikahan at makabansa*". sebuah semboyan yang melukiskan kedekatan mereka dengan Tuhan, sesama umat manusia, bahkan negara.

Masih seperti halnya Indonesia, Filipina juga mengalami masalah banyaknya urbanisasi penduduk dari kawasan perdesaan ke kawasan perkotaan. Alasan perbaikan ekonomi dengan ketersediaan lapangan kerja di kota daripada di desa membuat masyarakatnya banyak melakukan urbanisasi ke perkotaan.

Sebagai sebuah negara dengan warganya yang bersikap religius, lantas seperti apa sebetulnya kehidupan keagamaan masyarakat Filipina sendiri?

Penduduk Filipina mayoritas beragama Katolik (80%), disusul Protestan (12%) dan Islam (5,6%). 2,43% warga Filipina mengikuti agama-agama lain seperti Buddha, Khonghucu, dan lainnya. Mereka umumnya berada di pulau Mindanao, pulau yang berdekatan langsung dengan Manado.

Islam sendiri datang ke Filipina sekitar abad ke-14 Masehi melalui para pedagang Muslim dari Teluk Persia dan Pantai Malabar India Selatan. Mereka berhasil menarik sejumlah pengikut bahkan mampu mendirikan kesultanan Islam seperti Kerajaan Islam Mindanao. Daerah

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dan Diplomasi Kebudayaan (ke-10), Jumat 04 September 2020.

bekas kekuasaannya kemudian menjadi Daerah Otonomi Muslim Mindanao sekaligus kantong-kantong Muslim hingga kini.

Melihat jumlah penduduk berdasarkan agama, tentu bisa dikatakan Filipina merupakan negara dengan mayoritas beragama Katolik. Sedangkan lainnya seperti Islam, Kristen, Buddha, dan Konghucu merupakan agama minoritas.

Lantas, bagaimana Filipina mengelola keragaman umat agama ini? Kendati Katolik merupakan agama mayoritas, namun agama-agama minoritas lain di Filipina tetap dijamin keberadaannya. Di Filipina, saat seorang muslimah menggunakan kerudung atau hijab, ia tetap bisa beraktivitas dan tidak ada yang menghina dan sebagainya. Toleransi agama sebetulnya sangat tinggi di kalangan masyarakat Filipina.

Di Kota Manila, pusat negara Filipina, ada satu masjid besar bernama 'Blue Mosque'. Masjid ini menampung umat Islam untuk beribadah dan belajar agama Islam tanpa ada gangguan.

Selain itu, anak-anak masyarakat muslim juga dapat belajar dasar-dasar agama Islam seperti bahasa Arab dan pengetahuan dasar Islam lainnya di setiap akhir pekan Sabtu-Minggu. Pada hari Senin-Jumat mereka belajar pengetahuan umum di sekolah-sekolah. Sekali lagi ini menjadi gambaran betapa tolerannya Filipina.

Memang beberapa gangguan keamanan masih melingkupi beberapa daerah di Filipina. Cotabato City misalnya, masih merupakan daerah yang cukup rawan sehingga siapapun harus hati-hati saat berada di kawasan tersebut.

Memperkuat Hubungan Filipina-Indonesia

Filipina dan Indonesia merupakan dua negara bertetangga. Jalinan hubungan bertetangga ini sebetulnya sudah lama berlangsung. Sejarah, misalnya, mencatat bahwa Kerajaan Mindanao merupakan kerajaan Islam yang didirikan oleh keturunan Sumatera Barat.

Hubungan ini terus terjaga dengan baik hingga hari ini. Indonesia juga banyak terlibat membantu dalam mengupayakan dialog komunitas Islam dan pemerintahan negara Filipina dan mengupayakan berbagai program yang mendukung situasi damai Filipina.

Pada hari ini, hubungan Filipina-Indonesia terus kita pupuk, salah satunya melalui program pendidikan dan kebudayaan. Mengingat budaya masyarakat Filipina yang menyukai tarian dan nyanyian, kita menggelar pentas tari dan menyanyi grup mahasiswa Indonesia di berbagai universitas di Filipina.

Kita juga menyelenggarakan pentas musik-musik lokal dari masing-masing negara seperti dari Indonesia disajikan pentas Grup Musik Angklung dari Jawa Barat dan Wayang Kulit Jawa. Bahkan kita juga memperkenalkan cara membuat batik sebagai salah satu produk lokal Indonesia kepada mereka.

Terakhir kami juga menggelar berbagai pelatihan yang mengikutsertakan partisipan dari Filipina. Salah satu yang kita kenalkan dalam pelatihan itu adalah Pancasila sebagai ideologi bernegara dan berbangsa masyarakat Indonesia yang majemuk. Pengenalan ini membuat mereka penasaran dengan Pancasila bisa menyatukan kemajemukan kita.

Berbagai program kebudayaan kedua negara juga digelar. Harapannya pagelaran kebudayaan khas masing-masing negara makin merekatkan hubungan Filipina dan Indonesia.

Bagian 4

**Santri, Pendidikan Agama Islam,
dan Inovasi Pesantren**

Peran Santri dalam Moderasi Beragama

Dito Alif Pratama

Founder Santri Mengglobal Nusantara

"Agama mengajarkan pesan-pesan damai dan ekstrimis memutarbalikkannya! Kita butuh Islam ramah, bukan Islam marah!"

~K. H. Abdurrahman Wahid~

PADA kesempatan ini saya ingin berbagi apa yang bisa dilakukan santri dalam mendorong implementasi moderasi beragama di tengah-tengah kehidupan keragaman beragama di Indonesia. Saya kira ini penting karena santri merupakan komunitas yang cukup signifikan di tanah air sehingga mereka perlu dilibatkan dalam implementasi moderasi beragama ini.

Ragam Definisi Santri

Sebelum mengurai apa yang bisa dilakukan santri, saya kira kita perlu terlebih dulu mengurai pemahaman kita tentang siapa sosok yang disebut santri? Apa batasan seseorang bisa masuk dalam kategori santri?

Istilah santri tidak berdiri sendiri sebagai sebuah istilah. Ia merupakan turunan dari bahasa Sanskerta '*Shastri*' yang diartikan sebagai orang yang '*melek huruf*' atau '*bisa membaca*'. Dilihat dari bahasa India sebagai sumber utama bahasa Sanskerta, istilah *Shastri* diasosiasikan kepada "Orang yang mempelajari kitab-Kitab Suci Agama Hindu" (lihat M. Habib Mustopo, *Kebudayaan Islam di Jawa Timur*, 2001). Jadi pada prinsipnya orang yang mempelajari kitab suci agamanya kerap disebut *Shastri*.

Nurcholish Madjid dalam bukunya, *Bilik-Bilik Pesantren* (1999), mencatat bahwa kata santri bisa pula berasal dari Bahasa Jawa, yakni

■ Disarikan dari Webinar Series Moderasi Beragama (13): Santri Sebagai Pelopor Moderasi Beragama, Jumat, 23 Oktober 2020.

'*Cantrik*'. Kata ini dimaknai sebagai 'orang atau murid yang selalu mengikuti gurunya'.

Saat masih menjadi Rais 'Aam PBNU' K.H. Ma'ruf Amin, pernah menyatakan bahwa sebutan santri bukan hanya diperuntukkan bagi orang yang berada di pondok pesantren dan bisa mengaji kitab. Lebih dari itu, sebut beliau, santri juga diperuntukkan bagi mereka yang meneladani para *Kyai* (*Tirto.id, 2019*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata santri disebutkan mengandung dua makna. *Pertama*, orang yang mendalami agama Islam. *Kedua*, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh atau orang yang saleh.

Melihat berbagai definisi demikian, bisa difahami pengertian santri sebetulnya sangat luas. Tidak hanya belajar agama di pondok pesantren, selalu mengaji kitab, melainkan lebih luas dengan mencakup juga orang-orang yang selalu mau mendalami pengetahuan agama dan beribadah dengan sungguh-sungguh.

Namun saat difahami secara sempit, sosok santri merujuk pada komunitas yang tak bisa dianggap sebelah mata secara jumlah maupun kualitas. Secara jumlah saja, data Kementerian Agama RI 2019 misalnya mencatat bahwa total pesantren di Tanah Air mencapai 28.194 pesantren yang terdata, belum mencakup pesantren yang tidak terdata. Dari jumlah pesantren yang terdata saja, total jumlah orang yang belajar di dalamnya mencapai empat juta orang lebih. Tentu saja ini kekuatan yang tidak bisa dipandang sebelah mata.

Kebutuhan Moderasi Beragama

Dalam waktu terakhir, Kementerian Agama RI menggulirkan gagasan pentingnya menerapkan moderasi beragama di Indonesia. Alasannya, moderasi beragama dibutuhkan sebagai cara beragama di tengah-tengah kehidupan masyarakat kita yang begitu beragam, termasuk beragam dalam hal keyakinan dan keberagamaan.

Mengutip buku *Moderasi Beragama* yang diterbitkan Kementerian Agama RI sendiri disebutkan, inti moderasi beragama adalah proses memahami sekaligus mengamalkan ajaran agama secara adil dan seimbang. Konteks adil dan berimbang dalam hal ini ditujukan agar kita terhindar dari perilaku beragama yang ekstrem atau berlebih-lebihan. Dengan demikian, melalui moderasi beragama, seorang diharapkan akan menjadi pribadi yang tidak ekstrem dan berebih-lebihan dalam menjalankan ajaran agamanya.

Namun memang sering kali diskusi moderasi beragama dirancukan pemahaman masyarakat dengan menyamakan moderasi beragama dengan moderasi agama. Tentu saja dua hal ini berbeda sama sekali.

Agama jelas tidak perlu dimoderasi karena agama itu sendiri telah mengajarkan prinsip moderasi, keadilan dan keseimbangan. Jadi, bukan pada agama yang harus dimoderasi melainkan pada cara penganut agama dalam menjalankan agamanya yang harus dimoderasi. Tidak ada agama yang mengajarkan ekstremis. Akan tetapi tidak sedikit orang yang menjalankan ajaran agama berubah menjadi ekstrem.

Saya sendiri menyadari pentingnya implementasi moderasi beragama saat ini. Hal ini tidak lepas dari beberapa kecenderungan yang muncul belakangan ini. Saat ini suasana keberagamaan kita dipenuhi dengan sikap mudah mengkafirkan sesama muslim, berkata kasar, makian, penyebaran fitnah, bahkan memuji berlebihan atau fanatisme berlebihan.

Riset Wahid Foundation tentang kemerdekaan beragama tahun 2019 mencatat angka kekerasan mengatasnamakan agama menjadi catatan serius yang perlu diperhatikan dalam beberapa tahun terakhir. Pertanyaannya, mengapa bisa begitu?

Mengutip keterangan Profesor Quraish Shihab dalam bukunya *Wasathiyah Islam*, ada beberapa faktor yang melatarbelakangi hal tersebut. Diantaranya adalah keberagamaan sebagian diantara kita yang tidak berbekal pengetahuan mendalam.

Sikap keberagamaan tanpa didukung pengetahuan mendalam ditambah lagi dengan kehadiran faktor lain, gempuran dahsyat ideologi trans nasional seperti dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia. Organisasi ini memang sudah dibubarkan, namun apakah gagasan-gagasannya akan juga ikut hilang? Jangan-jangan ia malah tetap bertumbuh subur layaknya jamur dan menyebar di sekitar kita.

Sikap pengkafiran, fanatisme, dan berkembangnya ekstremisme juga bisa difahami oleh sejumlah faktor seperti disebutkan Charles Kimball dalam buku fenomenalnya *When Religion becomes Evil*. Menurut Kimball terdapat lima alasan mengapa ekstremisme dan juga mengapa moderasi agama sulit berkembang, di antaranya:

- a. Klaim bahwa kebenaran agamanya (paham ajaran agamanya) sebagai satu-satunya kebenaran yang final atau mutlak. Yang lain adalah salah, sedang yang benar hanya pandangan yang dianutnya (eksklusif – fanatik).
- b. Ketaatan buta kepada pemimpin keagamaan (*taqlid* buta).

- c. Penganut agama (paham keagamaan) mulai gandrung merindukan akan datangnya zaman ideal, lalu mereka dengan cara apa saja akan bertekad merealisasikan kemunculan zaman tersebut.
- d. Membenarkan dan membiarkan terjadinya tujuan yang membenarkan berbagai cara dengan mengatasnamakan agama.
- e. Menjadikan komponen keagamaan hanya sebagai sarana, bukan sebagai tujuan.

Peran Santri

Lalu, apa yang bisa dilakukan oleh santri untuk bisa menjadi pelopor moderasi beragama?

Terkait hal ini, rekomendasi yang bisa dilakukan santri dalam mendorong moderasi beragama adalah mengejawantahkan apa yang saya sebut sebagai "CARE". Rinciannya:

- C: *Continous Learning*. Seorang santri harus selalu belajar. Ia baru berhenti belajar saat meninggal. Ini sejalan dengan pesan Allah SWT dalam QS al-Ala'q 1-5 dan QS al-Mujadilah 11. Tradisi santri dan pesantren adalah selalu belajar di manapun dan kapanpun, tanpa membeda-bedakan pengetahuan *kauniah* dan *diniyah*.
- A: *Adaptive – Innovative*. Seorang santri harus bisa menyesuaikan diri dalam berbagai kondisi apapun. Santri dituntut adaptif dan inovatif, termasuk misalnya hidup di tengah-tengah negara minoritas muslim. Ini sejalan dengan pesan Allah SWT di QS Hud 37 dan QS al-Ra'd 11).
- R: *Respecting Others*. Seorang santri harus selalu belajar menghormati yang lain dan berbeda dari dirinya. Ini sesuai dengan pesan Allah SWT dalam QS al-Hujurat 10 dan al-Kafirun 1-6, bahwa kita semua adalah bersaudara dan tugas kita adalah saling menasihati dan membantu dalam kebaikan, termasuk menghormati perbedaan keyakinan keagamaan sekalipun.
- E: *Effective Communication*. Seorang santri harus mampu membangun komunikasi efektif dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Ini sesuai pesan Allah SWT dalam QS al-Ahzab 70-71 dan Thaha ayat 44. al-Quran sendiri banyak memberikan contoh pola komunikasi yang beragam dan digunakan sesuai konteksnya seperti diilustrasikan al-Quran pada ungkapan *qoulan karima*, *qoulan syadida*, dan *qoulan layina*.

Ekstremisme dan Daya Lenting Pesantren

Kamilia Hamidah

Peneliti Riset Ketahanan Pesantren terhadap Radikalisme—CONVEY

PADA tulisan ini saya ingin menceritakan secara ringkas bagaimana daya lenting pesantren dari persebaran sikap ekstremitas keagamaan. Cerita ini sebetulnya berangkat dari penelitian lapangan kami di sejumlah pesantren di delapan provinsi di tahun 2019. Terdapat berbagai tipologi pesantren yang menjadi objek penelitian kami. Penelitian sendiri bertujuan untuk menganalisa apakah pesantren mengajarkan kekerasan.

Diketahui, pesantren merupakan lembaga yang unik. Ia hadir jauh sebelum negara ini sendiri berdiri. Bahkan karenanya, almarhum Cak Nur Cholish Madjid dalam sebuah bukunya pernah berkata, seandainya Indonesia ini tidak dijajah, maka mungkin saja universitas-universitas yang berdiri di Indonesia hari ini adalah universitas-universitas berbasis pesantren.

Secara historis, keberadaan pesantren memang sudah cukup lama. Ia diperkirakan sudah ada sejak tahun 1200-an. Sepanjang sejarah kehadirannya, pesantren telah banyak mewarnai perkembangan bangsa ini, termasuk pembentukan Indonesia sebagai sebuah negara. Keberadaan Hari Santri menjadi bukti bahwa pesantren cukup berkontribusi bagi kemerdekaan Indonesia.

Dari kenyataan ini, sebetulnya kita bisa melihat bagaimana pesantren telah mampu beradaptasi dengan luar biasa. Lantas apa sebetulnya yang membuat pesantren ini kuat bertahan?

Kemampuan pesantren untuk bertahan sebetulnya tidak lepas dari fleksibilitas pesantren itu sendiri untuk terus menyesuaikan diri. Pesantren terus melakukan penyesuaian secara kreatif sehingga pesantren tidak hanya menjadi bagian dari identitas Islam, melainkan

■ Disarikan dari Webinar Series Moderasi Beragama (ke-13): Santri Sebagai Pelopor Moderasi Beragama, Jumat, 23 Oktober 2020.

juga bagian dari keaslian Indonesia.

Dengan demikian, bisa dikatakan jika pesantren lahir dari proses sosial yang berlangsung terus menerus dan dinamis. Bahkan dilihat dari perspektif gendernya, pesantren kini menunjukkan kecenderungan menarik, yaitu keseimbangan antara santri laki-laki dan santri perempuan. Artinya, pesantren pun sangat mengakomodir perempuan dan tidak membeda-bedakan berdasar perbedaan gender. Ini tentu jadi gambaran betapa menariknya perkembangan pesantren dari masa ke masa.

Pesantren Mengajarkan Faham Ekstremisme Kekerasan?

Pertanyaan utama penelitian yang kami lakukan adalah, apakah pesantren mengajarkan faham ekstremisme kekerasan? Hingga hari ini kita masih bisa menyaksikan bagaimana pemberitaan media massa menyebutkan banyaknya pelaku pengeboman merupakan alumni-alumni dari pesantren. Tetapi apakah demikian adanya?

Menuduh pesantren sebagai lembaga yang terindikasi mengajarkan faham ekstremisme kekerasan adalah pernyataan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kita harus berhati-hati, bahkan harus menelisik lebih jauh lagi jika berpendapat demikian.

Mengutip keterangan Nesterova, dkk (2017: 91-92), radikalisme dan ekstrimisme kekerasan sendiri dipengaruhi oleh dua faktor penting, yaitu faktor penarik dan faktor pendorong. Berikut penjelasannya:

Pertama, faktor penarik. Radikalisme dan ekstremisme biasanya terjadi karena adanya krisis identitas di kalangan pelaku, hadirnya perasaan dikucilkan dalam ekonomi dan politik, persepsi tentang ketiadaan keamanan dan kebutuhan dasar dari pemerintah, diskriminasi dan eksklusi di level masyarakat, persepsi tentang kegagalan leadership, persepsi tentang kezaliman dan penindasan oleh negara, dan persepsi tentang kegagalan *leadership* yang ada. Kehadiran salahsatu dari banyak gejala ini memunculkan kerentanan bagi munculnya radikalisme dan ekstremisme kekerasan.

Kedua, faktor pendorong. Kekerasan dan ekstremisme lahir karena adanya rasa memiliki yang dijanjikan oleh kaum ekstremis terhadap pelaku kekerasan (*sense of identity*), tawaran keuntungan ekonomi dan politik, tawaran keamanan dan kebutuhan dasar, jaringan, penerimaan dan kehangatan, harapan pemberdayaan, *heroism* dan kepemimpinan, dan kesempatan balas dendam.

Dari dua faktor tersebut, kita dapat melihat bahwa pesantren

sebetulnya berada dalam arena tarik ulur antara daya tahan/daya lenting (*resilience*) dan kerentanan (*vulnerability*). Pesantren selalu berada pada dua posisi ini, daya tahan dan kerentanan. Tarik ulur dua hal inilah yang kemudian menyebabkan kenapa pada akhirnya pesantren masih bisa bertahan sampai saat ini.

Daya tahan pesantren untuk bertahan di antara tarik ulur kedua hal itulah yang disebut juga sebagai daya lenting pesantren. Kemampuan ini disebut juga sebagai kekuatan untuk beradaptasi (*the power of adaptivity*) di tengah-tengah dinamika sosial. Bahasa lain daya lenting adalah resiliensi atau ketahanan.

Resiliensi sendiri pada umumnya memiliki tiga pengertian, yakni kelentingan atau fleksibel, tidak mudah sakit atau terpengaruh, dan cepat pulih. Terdapat empat bentuk cara bertahan atau resiliensi. Keempatnya yaitu, tidak melakukan apa-apa sebagai level pertahanan terendah; bertahan (*business as usual*) guna menjaga eksistensinya; beradaptasi (*adapting*) atau melakukan penyesuaian diri; dan, melakukan perubahan diri (*transformation*).

Berdasar empat pola bertahan ini, penelitian kami menunjukkan bahwa terdapat tipologi yang berbeda-beda antara tiap pesantren untuk membangun ketahanannya masing-masing. Ada yang cepat beradaptasi, ada yang tidak melakukan apa-apa, ada juga yang sekadar bertahan.

Sementara itu, kemampuan pesantren untuk selalu fleksibel di antara pola *resilience* (ketahanan) dan *vulnerability* (kerentanan), didukung oleh dua faktor. *Pertama*, faktor pelindung. Ini terdiri dari kiai dan kitab kuning, nilai-nilai pendidikan yang berorientasi kemasyarakatan, keterikatan dan keterhubungan sosial politik, pengalaman perbedaan dan keragaman, dan kegiatan ekstrakurikuler. Namun, kiai dan kitab kuning sendiri menempati posisi paling penting dalam menjaga ketahanan pesantren dari sisi ini.

Kedua, faktor risiko. Faktor ini misalnya mengambil bentuk dalam infiltrasi paham dan gerakan radikal ke dalam pesantren, sikap eksklusif pesantren seperti menutup diri dan tidak terbuka, pedagogi indoktrinatif yang dikembangkan di dalam pengajarannya, dan minimnya kesadaran bernegara.

Dari seluruh pesantren yang kami teliti, hampir semuanya memiliki faktor pelindung maupun faktor risiko sekaligus. Faktor pelindung menjadi daya dukung paling penting pesantren dalam menjaga diri dan menghindari masuknya paham-paham radikal. Sedangkan faktor risiko menjadi sisi yang perlu diperhatikan bersama dalam menjaga daya tahan pesantren.

Memahami Pesantren yang Telah Menerapkan Resiliensi

Riset yang kami lakukan mencatat, pesantren yang memiliki daya lenting dalam persebaran sikap ekstrim keagamaan ternyata dipengaruhi oleh sejumlah faktor. *Pertama*, identitas pesantren yang kuat (*social bonding*). Faktor ini terkait dengan identitas pesantren misalnya, apakah pesantren bagian dari pesantren NU atau pesantren Muhammadiyah atau organisasi-organisasi Islam lain yang tercatat menjadi penyumbang penting kehidupan keislaman masyarakat Muslim Indonesia sejauh ini.

Kedua, jembatan sosial pesantren dengan masyarakat sekitar sehingga mewujudkan toleransi antarumat beragama (*social bridging*). Faktor ini menjadi faktor penting dalam membangun resiliensi pesantren. *Ketiga*, jaringan yang terintegrasi dalam tujuan nasional (*social linking*). Faktor ini terkait dengan sejauhmana pesantren mengintegrasikan diri dengan kehidupan kebangsaan. Salah satu contoh yang diterapkan ialah memasukan sejauh mana pesantren mengintegrasikan Pendidikan Kewarganegaraan ke dalam kurikulum pendidikannya.

Berdasar riset kami di lapangan, kami merekomendasikan sejumlah hal yang perlu dilakukan pesantren dalam membangun resiliensi dari persebaran sikap ekstrem keagamaan. Di antaranya, menjauhkan pesantren melakukan kontak dengan ideologi radikal, mendeligitimasi ideologi radikal, menghilangkan prasangka kebencian, dan mengatasi isu ummat Islam terzalimi.

Empat hal ini harus betul-betul diperkuat di dalam setiap pesantren. Keharusan ini tidak lepas dari peran pesantren sendiri sebagai modal sosial strategis dalam membangun moderasi beragama di tengah-tengah keragaman Indonesia. Pesantren menjadi agen penting pembangun ideologi dalam wacana moderasi beragama.

Sebagai aset sosial dan kekayaan berharga milik bangsa ini, pesantren juga harus selalu dijaga. Oleh karenanya, aspek-aspek pertahanan pesantren perlu diperkuat dan ditopang dalam bentuk beragam dukungan dan kebijakan yang bisa meminimalisir kerentanan pesantren.

Selain itu, program pemberdayaan pesantren juga harus mengintegrasikan perspektif gender. Sebab, ketidakberdayaan perempuan dapat menjadi pintu masuk infiltrasi ideologi ekstremisme kekerasan melalui indoktrinasi mengatasnamakan agama.

Dari data kuantitatif yang berhasil kami kumpulkan, hampir 47% pesantren tidak memiliki program khusus yang mendiskusikan isu

kesetaraan gender di pesantren. Ini menunjukkan bahwa pesantren masih cenderung *male-oriented*. Bahkan diskursus kesetaraan gender belum menyentuh kultur pesantren dan cenderung sangat normatif. Tentu saja ini perlu menjadi perhatian bersama.

Moderasi Beragama: Warisan Masa Lalu dan Peran Santri

Oman Fathurahman
Staff Ahli Menteri Agama RI

KEMENTERIAN Agama RI (Kemenag) dalam beberapa waktu terakhir terus menyuarakan pentingnya implementasi moderasi beragama dalam konteks kehidupan keberagamaan dan kebangsaan Indonesia. Moderasi kemudian selanjutnya menjadi kebijakan negara yang cukup penting, di antaranya dengan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), termasuk menjadi bagian dari Rencana Strategis Kemenag sendiri.

Lantas mengapa moderasi beragama dan kenapa harus moderasi beragama? Dan bagaimana peran Kemenag sendiri?

Sebagai umat beragama, terutama dari sudut pandang kita sebagai Muslim, kita beragama tentu saja harus istiqomah dan *kaaffah*. Bahwa kita harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan ajaran agama. Tapi ketika keberagamaan kita letakkan dalam konteks kenegaraan, Indonesia bukan merupakan negara agama, melainkan negara Pancasila.

Moderasi beragama hadir untuk mensinkronisasi cara pandang beragama dan bernegara. Secara konseptual, moderasi beragama menempatkan menjalankan kewajiban beragama sama dengan menjalankan kewajiban negara. Sebaliknya, menjalankan kewajiban negara dinilai sama dengan menjalankan agama dan bernilai ibadah.

Kemenag sendiri ditugaskan untuk merumuskan usaha sinkronisasi tersebut. Moderasi beragama selanjutnya ditawarkan sebagai jalan dalam menselaraskan cara beragama sekaligus bernegara. Jadi, kita tidak boleh melawan kesepakatan bersama dalam UUD 1945 dan Pancasila 1945, merusak nilai-nilai kemanusiaan yang dilindungi UU, atau atas melanggar hukum atas nama agama.

■ Disarikan dari Webinar Series Moderasi Beragama (13): Santri Sebagai Pelopor Moderasi Beragama, Jumat, 23 Oktober 2020.

Kemenag telah menjadikan moderasi beragama sebagai arah kebijakan. Hal ini didasarkan *khittah* Kemenag sebagai kementerian yang bertugas menjaga kerukunan. Memang kita bukan negara agama, namun agama itu sendiri merupakan nomenklatur yang disebutkan dalam konstitusi. Hal tersebut meniscayakan area yang kini menjadi tanggungjawab Kemenag, menjaga dan memfasilitasi keberagaman sebagai sisi inheren dalam masyarakat Indonesia.

Warisan Bangsa

Meski moderasi beragama disampaikan oleh Kemenag dalam beberapa waktu terakhir, tapi sesungguhnya substansi moderasi beragama sendiri sudah sejak ratusan tahun lalu menjadi bagian bangsa ini. Dalam berbagai manuskrip kuno dari abad ke16-17 M yang saya kaji selaku filolog, banyak sekali terma-terma yang menjadi rumusan filosofis moderasi beragama.

Salah satunya disampaikan dalam *Itḥāf al-Dhakī*, sebuah karya sufi monumental karya Ibrāhīm al-Kūrānī (w. 1690). Diketahui Ibrāhīm al-Kūrānī merupakan salah satu ulama yang berpengaruh bagi tradisi keulamaan Islam di Nusantara, termasuk karyanya ini.

Pada kitab tersebut misalnya saya menemukan kutipan "*al jam'ū muqoddamun ala tarjih mahma amkan*", bahwa menghimpun dan mengapresiasi berbagai pendapat yang beragam itu sebaiknya lebih dikedepankan dibanding mengutamakan salah satu pendapat secara ekstrem sejauh itu memungkinkan. Kutipan ini menekankan sikap kompromi yang menjadi landasan salah satu nilai moderasi beragam, yaitu kemampuan untuk mendengarkan, saling mendengar yang beragam. Sebagaimana kita ketahui, kemampuan mendengar merupakan salah satu nilai moderasi beragam itu sendiri.

Melihat persebaran pengaruh al-Kurani, karya berpengaruhnya, dan terma-terma yang menjadi rumusan filosofis moderasi beragam, bisa kita katakan bahwa moderasi beragam sebetulnya sudah jadi bagian hidup masyarakat (muslim) Nusantara sejak ratusan tahun lalu. Artinya, nilai-nilai ini sebetulnya sudah kita lakukan sejak lampau.

Melekat dalam Sikap Santri

Salah satu kelompok sosial yang berperan penting dalam mempraktikkan nilai-nilai moderasi beragam sendiri sebetulnya adalah santri khususnya dan komunitas pesantren pada umumnya. Kehidupan keseharian mereka sebetulnya merupakan refleksi kultural bagaimana

nilai-nilai itu diimplementasikan dan dirawat sejak lama.

Diketahui, seorang santri merupakan figur yang selalu memfokuskan sebagian besar hidupnya untuk belajar (*tafaquh fiddin*). Di saat yang sama, mereka juga hidup dengan mengedepankan sikap toleransi, keguyuban, dan sikap saling menghormati.

Secara ringkas, seorang santri setidaknya memiliki lima karakter, di antaranya: kesahajaan dimana seorang santri terbiasa untuk hidup sederhana, kemandirian, guyub (kerja bersama) dalam kehidupan bersamanya, cinta tanah air dengan mengadaptasikan pengetahuan keislamannya dengan konteks lokal dimana ia hidup, dan kematangan pengetahuan dimana seorang santri selalu mengedepankan penggunaan sumber-sumber pengetahuan/informasi yang otoritatif.

Melihat figur santri dan sikap kultural yang selalu mereka rawat, maka peran santri dalam mensosialisasikan moderasi beragama tidak bisa dipandang sebelah mata. Santri memiliki semua modal yang dibutuhkan dalam mengampanyekan moderasi beragama. Seperti diketahui, syarat moderat itu memiliki ilmu, berbudi, selalu berhati-hati (tidak ekstrem). Tiga syarat yang sebetulnya melekat dalam diri seorang santri.

Terlebih, bila kita melihat jumlah santri dan lembaga pesantren dimana mereka bernaung. Data terakhir Kemenag mencatat, jumlah santri yang tinggal dan belajar di pondok pesantren tak kurang dari 4,6 juta orang santri. Sedang jumlah pesantrennya sendiri kini tak kurang dari 31.289 pesantren. Demikianlah kekuatan kaum santri.

Terakhir, secara pribadi saya ingin menghimbau kepada para santri, kiai, ibu nyai dan para penggerak pesantren, bahwa moderasi beragama bukan mengajak untuk menjadi liberal. Moderasi beragama bukan ingin mengajak mendangkalkan cara kita beragama. Lebih dari itu, moderasi beragama adalah jalan bagi kita untuk menjadi manusia yang paripurna dalam menunaikan kewajiban Allah dan juga kepada manusia secara seimbang.

Pentingnya Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Pendidikan

Ace Hasan Syadzily
Komisi VIII DPR RI

ISU moderasi beragama dalam dunia pendidikan menjadi sangat penting karena tumpuan moderasi beragama itu memang akarnya ada dalam pendidikan. Karena itu, moderasi sangat terkait erat dengan soal bagaimana proses pendidikan dilakukan anak-anak duduk mulai di bangku sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah.

Terkait perbincangan moderasi beragama, mari kita terlebih dulu melihatnya dari spektrum lebih luas, yakni konteks kerukunan umat beragama. Kerukunan umat beragama Indonesia selalu mengalami pasang surut. Ada banyak penyebab hal tersebut dapat terjadi. Salah satunya adalah pandangan agama yang sektarian.

Akar penyebab masalah kerukunan adalah munculnya politisasi agama yang memanfaatkan agama untuk kepentingan politik. Hal ini terkonfirmasi dari temuan berbagai riset. Misalnya, ketika ajang politik meningkat maka tingkat intoleransi juga tinggi. Sebaliknya, saat tidak ada agenda politik maka isu-isu agama yang sebelum mencuat di media kemudian mereda.

Selanjutnya, penyebab lain dalam masalah kerukunan adalah silang sengketa soal pendirian rumah ibadah. Hal ini menimbulkan berbagai macam problematika dalam hal kerukunan agama. Terakhir, penyebab masalah kerukunan beragama adalah kuatnya populisme agama akibat kepentingan politik.

Di saat yang sama, survei PPIM baru-baru ini mengeluarkan laporan riset yang perlu kita perhatikan. Riset ini menemukan bahwa 58% siswa memiliki pandangan radikal dan intoleran. Jadi ini bukan hoax tetapi memang faktual. Hal ini juga diperparah dengan penyebabnya,

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam, 25 September 2020.

yaitu soal gurunya yang memiliki pandangan cenderung intoleran dan radikal. Ada 56% guru yang memiliki opini intoleran dan 46.9% memiliki pandangan radikal.

Sementara itu, Sidney Jones, pengamat radikalisme, menyebutkan bahwa ada sekitar 40 perempuan Indonesia dan 100 anak di bawah 15 tahun yang bergabung ke ISIS di Suriah. Kondisi ini disebabkan dua faktor: pertama, karena mereka menjadi *victim* atau korban dari pemahaman dan terpengaruh ajakan untuk berjihad, dan kedua, karena sebagian memang berkesadaran penuh untuk menjadi bagian dari ISIS.

Demikian realitas kehidupan keagamaan yang hadir di sekeliling kita. Realitas yang menuntun kita untuk bersama-sama mendiskusikan moderasi beragama dan implementasinya.

Pengarusutamaan Moderasi Beragama

Berangkat dari berbagai realitas seperti disebutkan di awal, saya berpendapat bahwa solusi yang bisa ditawarkan untuk berbagai hal itu adalah pengarusutamaan (*mainstreaming*) moderasi beragama. Pengarusutamaan bisa menjadi jalan keluar yang baik dalam konteks bagaimana kita menyelesaikan persoalan kehidupan keagamaan yang intoleran dan radikal.

Moderasi beragama adalah cara pandang, sikap dan perilaku keagamaan yang mengambil posisi di jalan tengah, selalu adil dan objektif, tidak ekstrem kanan dan kiri. Dalam konteks kebangsaan, akan selalu ada pemahaman mayoritas dan minoritas yang semestinya tidak ada di dalam sistem kita. Semua agama seharusnya setara di muka hukum. Di dalam ajaran Islam jelas sekali disebutkan dalam surah al-Baqarah ayat 143 bahwa karakteristik umat Islam adalah *ummatan wasatha*, atau umat yang moderat.

Dalam membaca gejala radikalisme, saya pernah berbeda pandangan dengan Menteri Agama (Fachrul Razi) terkait istilah *good looking* dan hafidz al-Quran. Saya sampaikan kepada beliau bahwa bisa saja ada gejala semacam itu, tetapi tidak boleh melakukan generalisasi munculnya radikalisme hanya pada suatu gejala tertentu. Sebab, jika seorang menteri agama keliru mendeteksi suatu gejala pemahaman radikalisme pada masyarakat, maka dalam membuat kebijakan melawan radikalismenya dipastikan akan keliru juga.

Sementara itu, ada banyak argumentasi yang memperkokoh perlunya kita memiliki perilaku moderasi beragama. Di antaranya, negara dan konstitusi kita secara jelas mengatakan bahwa kita bukan

negara sekuler tetapi juga bukan negara agama; bahwa negara wajib memberi jaminan dan perlindungan kebebasan beragama; dan, secara *sunnatullah* kita merupakan negara yang memiliki kemajemukan, keragaman agama, budaya, dan ras.

Moderasi beragama menjadi kian penting di era disrupsi ini, karena seringnya kemunculan politisasi agama untuk agenda-agenda politik tertentu. Agama selalu menjadi suatu cara yang paling mudah untuk mempengaruhi seseorang. Pada Pilpres 2019 misalnya, mencuat isu agama, legalisasi zina, legalisasi LGBT, dan sebagainya. Di era *post truth* seperti sekarang ini, walaupun awalnya orang tidak percaya tetapi jika sudah dibombardir dengan berbagai macam isu yang diglorifikasi melalui media sosial, lambat laun dengan mudahnya ia jadi percaya.

Sementara itu, hal-hal yang harus kita lakukan untuk penguatan moderasi beragama adalah:

1. Memperkuat cara pandang, sikap dan praktek beragama yang di jalan tengah, serta memperkuat harmoni dan kerukunan umat beragama.
2. Mendorong penguatan relasi agama dan budaya dan jangan mengkafirkan seseorang karena mengadopsi praktek budaya yang dibungkus dengan semangat keagamaan.
3. Mengembangkan ekonomi dan sumber daya keagamaan untuk merespon persoalan yang sering muncul akibat ketidakadilan ekonomi.

Berangkat dari itu, saya sendiri berpendirian bahwa pendidikan masih merupakan instrumen penting dalam proses pengarusutamaan moderasi beragama di Indonesia. Dalam hal ini, saya berpandangan bahwa pendidikan merupakan hulu yang menentukan hilir. Sulit bagi kita menyelesaikan hilir tanpa terlebih dahulu membenahi hulunya. Begitu juga dalam konteks persoalan kehidupan beragama hari ini. Pangkal persoalannya adalah pendidikannya, maka satu hal penting bagi kita untuk terlebih dahulu membenahinya di aspek pendidikan.

Rekomendasi

Mengakhir pembicaraan ini, izinkan saya menyampaikan beberapa rekomendasi implementasi moderasi beragama di sekitar kita. Rekomendasi ini merupakan tawaran yang bisa saja dipertimbangkan sebagai jalan alternatif kita dalam mengokohkan moderasi beragama di Indonesia.

Pertama, kita perlu bersama-sama meningkatkan pengawasan terhadap potensi radikalisme di lingkungan sekolah dengan melibatkan guru dan orangtua murid. Salah satu hal yang sering saya sampaikan di rapat dengan Kemenag adalah penguatan moderasi beragama itu justru terletak pada guru-guru PAI. Proses penetrasi ideologi intoleran yang paling mudah untuk disemai adalah justru pada anak-anak, anak didik yang memang tidak memiliki dasar pemahaman keagamaan yang fundamental. Oleh karena itu penguatan pemahaman dan pengembangan kompetensi bagi guru PAI di sekolah-sekolah itu mutlak dilakukan.

Kedua, perlunya lebih banyak forum diskusi moderasi beragama dan memberikan siswa metode pertahanan dari pengaruh paham radikalisme dengan menghadirkan berbagai macam latar belakang spektrum keragaman dari forum-forum diskusi tersebut. Hal ini menjadi sangat penting agar proses interaksi antar mereka dengan berbagai macam latar belakang agama bisa menimbulkan kesepahaman di antara para guru dan para siswa. Banyak kasus ditemukan bahwa justru menguatnya identitas keagamaan itu muncul pada saat tidak ada proses mediasi yang terus-menerus dilakukan secara intensif. Forum diskusi, curah pendapat atau silaturahmi antar siswa perlu dilakukan agar anak didik lebih terbiasa menerima perbedaan-perbedaan.

Ketiga, perlunya memberikan pemahaman lebih mendalam tentang moderasi beragama dan cara menghadapi ancaman paham radikalisme terhadap orangtua siswa serta memberikan bantuan jika mereka merasa butuh pertolongan. Moderasi beragama itu bukan semata-mata ada di lingkungan sekolah, tetapi juga harus dibangun dalam lingkungan keluarga yang memiliki pemahaman yang moderat. Misalnya, perlu dibangun hidup bersama dalam satu lingkungan yang beragam dan penuh tolong-menolong.

Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam

Manhan Marbawi

Ketua Umum DPP Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia

PENDIDIKAN menjadi aspek penting dalam membangun kehidupan masyarakat, termasuk menumbuhkan toleransi. Namun perlu disadari bahwa ada beberapa elemen penting yang memengaruhi keberhasilan pendidikan itu sendiri. Elemen-elemen itu adalah sekolah, keluarga, masyarakat, lingkungan, media massa dan media sosial yang berpengaruh besar terhadap persoalan-persoalan pendidikan, dan legislatif dalam merancang dan mengawasi pendidikan termasuk pendidikan agama.

Pendidikan juga dipahami sebagai alat rekayasa sosial dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks Indonesia, pendidikan menjadi instrumen penting dalam melanjutkan ideologi Pancasila, membangun hidup bernegara, mencerdaskan kehidupan bangsa, menguatkan identitas nasional termasuk bagaimana menanamkan nilai-nilai moderasi.

Namun perlu diingat, sekolah juga merupakan area terbuka bagi siapapun untuk masuk di dalamnya. Dalam hal ini, sekolah merupakan bagian dari *structural opportunity* yang sangat terbuka bagi siapapun untuk dapat masuk. Sekolah juga tempat *marketing ideology* yang sangat efisien dan strategis. Maka akan jadi penting kebijakan negara dan kebijakan legislatif untuk membentengi sekolah dari kontestasi ideologis.

Realitas Tantangan

Sebagai area terbuka, siapapun bisa masuk dalam dunia pendidikan dengan berbagai motifnya, seperti melakukan kontestasi ideologi dan

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam, 25 September 2020.

perebutan pengaruh, termasuk ideologi yang cenderung intoleran. Persebaran kontestasi dilakukan dalam beberapa media seperti bahan ajar dan guru sebagai aktor utama proses pengajaran. Inilah tantangan yang tengah dihadapi sekolah kini.

Terkait kontestasi ideologi di sekolah, kelompok-kelompok tertentu melakukan persebaran ideologinya dengan cara mengintervensi kurikulum melalui berbagai macam cara, termasuk di dalamnya bahan ajar. Tujuannya agar para siswa termasuk guru, menjadi anggota, menjadi kelompoknya, menjadi *apparatus* ideologi keagamaan mereka. Pendidikan menjadi instrumen utama dalam membentuk kerangka berfikir siswa sehingga berperilaku sesuai ideologi yang mereka harapkan.

Problem lain adalah persepsi keragaman di lingkungan sekolah sendiri, termasuk di dalamnya guru-guru. Perspektif *out group* dan *in group* tumbuh beriringan dengan nalar kritis lingkungan sekolah. Hal ini terlihat dari bagaimana warga sekolah menerima sebuah informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya.

Selanjutnya adalah, relasi pembelajaran. Ruang relasi guru dengan siswa, relasi guru dengan orang tua, relasi siswa dengan orang tua, atau sebaliknya, dapat dikatakan masih memperlihatkan ketidakseimbangan. Masalah serupa juga ditemukan pada kasus relasi lingkungan sekolah dengan lingkungan luar seperti media sosial yang sulit dikontrol.

Demikian beberapa problematika yang kita temukan di lingkungan sekolah. Tentu saja problematika-problematika ini menjadi tantangan yang perlu kita antisipasi bersama, terutama menyangkut kepentingan mengimplementasikan moderasi beragama.

Peran Asosiasi

Menumbuhkan moderasi beragama sebagai cara beragama masyarakat di tengah-tengah kehidupan bangsa tidak bisa mengabaikan peran Guru Pendidikan Agama Islam. Mereka menjadi kelompok terdepan dalam memberikan pengajaran agama Islam kepada generasi bangsa.

Dalam catatan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam Indonesia (AGPAII), total jumlah guru agama Islam sendiri tak kurang dari 253.000 guru agama, baik berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Non-Pegawa Negeri Sipil (Non-PNS). Mereka tersebar di berbagai kecamatan di 34 provinsi dan 336 kabupaten/kota dan mengajar agama Islam di berbagai jenjang pendidikan seperti Taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas.

Jumlah ini tentu saja sangat banyak sekaligus menggambarkan betapa besarnya peran guru agama Islam dalam mengajarkan ajaran agama Islam kepada siswa-siswi di seluruh tanah air. Terkait moderasi beragama, AGPAII sendiri memiliki kewajiban yang sangat besar agar guru-guru agama menjadi aktor utama penanaman sekaligus keteladanan dalam moderasi beragama.

Terkait itu, ada beberapa idealitas penting seorang Guru Agama Islam sebagai modal penumbuhan moderasi beragama. Di antaranya:

1. Guru pendidikan agama harus bersifat terbuka atau inklusif.
2. Guru agama juga harus bisa menghadirkan keragaman dan perbedaan mazhab atau pemikiran keagamaan, misalnya perbedaan terkait *qunut* atau terkait keragaman kitab suci bagi para pemeluk agama.
3. Guru juga harus memiliki pengalaman perjumpaan yang kuat. Pengalaman perjumpaan menjadi sangat menentukan, sebab bagaimana guru mampu mengajarkan toleransi jika dia tidak pernah bersentuhan dengan orang yang berbeda agama.
4. Guru harus memiliki pendekatan personal (*personal approach*) yang baik.
5. Guru agama harus kreatif dan inovatif.

Tugas guru agama dalam konteks penanaman nilai tidak sebatas pemenuhan kewajiban kurikulum atau materi. Lebih jauh, seorang guru agama harus bisa menanamkan nilai-nilai tanggung jawab keberagamaan siswa-siswanya, yaitu:

1. Tanggung jawab kepada Allah
2. Tanggung jawab terhadap diri sendiri
3. Tanggung jawab terhadap orang tua dan masyarakat
4. Tanggung jawab terhadap lingkungannya, baik alam maupun sosial
5. Tanggung jawab terhadap negara atau cinta Tanah Air
6. Tanggung jawab menegakkan keadilan

Dalam melaksanakan tugas-tugas pengajarannya, seorang guru agama juga harus memahami tujuan penting Pendidikan Agama Islam. Diantaranya:

1. Mengasah kepekaan spiritual anak-anak didiknya
2. Mendorong kepekaan peserta didik terhadap lingkungan sosial
3. Meningkatkan kepekaan peserta didik terhadap persoalan-persoalan kebangsaan
4. Memperkuat kepekaan peserta didik terhadap lingkungan alam sekitar

Tawaran Asosiasi

Penguatan moderasi beragama meniscayakan intervensi program yang harus dipraktekan, bukan semata teoretik. Berikut tawaran intervensi program penguatan moderasi yang telah dilakukan di beberapa sekolah:

1. Budaya sekolah (*school culture*) dengan intervensi dari kepala sekolah. Dalam hal ini, sekolah dituntut mampu membangun budaya damai baik secara fisik maupun nonfisik. Secara fisik misalnya sekolah dapat membuat banyak pojok-pojok literasi damai dan sebagainya. Sedang dari segi non-fisiknya adalah bagaimana kebijakan sekolah dalam membangun budaya damai yang terintegrasi dalam kebiasaan sehari-hari dan program-program sekolah siswa.
2. Lingkungan kelas (*classroom culture*) dengan intervensi dari pihak guru. Dalam hal ini, guru-guru sekolah perlu memiliki pemahaman yang moderat dan inklusif untuk kemudian diimplementasikan di lingkungan mengajarnya. *Classroom culture* bisa bersifat fisik dan non-fisik.
3. Intervensi kegiatan siswa, dalam hal ini pengelolaan OSIS dan pengelolaan organisasi rohani Islam (rohis). Standarisasi mentor Rohis merupakan keharusan. Tidak semua orang bisa menjadi mentor. Karena kenyataan di lapangan, yang datang adalah alumni dari perguruan tinggi yang baik, tetapi kemudian mereka membawa sesuatu yang bertentangan dengan moderasi. Karena itu, standarisasi mentor penting dilakukan.

Terakhir, berikut adalah tawaran peta jalan (*road map*) penguatan moderasi beragama di Sekolah:

1. Perlunya penguatan wawasan keberagaman dan keberagamaan guru. Hal ini juga menjadi tugas Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) bagaimana mencetak mahasiswa calon guru PAI yang mempunyai wawasan yang moderat dan inklusif. Jadi penguatan ini merupakan tugas bersama, bukan hanya AGPAIL.
2. Menguatkan perjumpaan dan kerja bersama antar guru, guru agama, dan guru berbagai agama yang mempunyai paham yang bermacam-macam. AGPAIL memiliki pengalaman program mempertemukan guru agama Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah. Mempertemukan guru yang berbeda agama itu relatif lebih mudah, namun mempertemukan guru agama Sunni, Syiah, dan Ahmadiyah itu cukup sulit. Akan tetapi hal tersebut tetap perlu diupayakan.

3. Penguatan proyek moderasi melalui budaya sekolah (*school culture*), lingkungan kelas (*classroom culture*), dan kegiatan siswa. Misalnya dengan membuat program yang dekat dengan kehidupan kebangsaan mereka. Salah satu program yang AGPAII telah lakukan adalah pemilihan Duta Pelajar Pancasila. Ada sekitar 100 pelajar SMK dari seluruh Indonesia mewakili teman-teman mereka di 34 provinsi menjadi duta ini.
4. Menata ruang publik di lingkungan dalam dan luar sekolah. Ini dilakukan dengan membangun dan mengembangkan berbagai wacana positif di ruang publik dengan berbagai platform media *online* maupun *offline* dan melibatkan anak-anak milenial kreatif
5. Melahirkan guru dan siswa yang menjadi duta moderasi perdamaian di sekolah.

Pentingnya Pengarusutamaan Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam

Dyah Salsabil

Guru PAI Kementerian Agama Bandung Barat

SELAMA menjadi guru Pendidikan Agama Islam, yang saya rasakan adalah pendidikan agama ini memiliki tantangan. Tentunya bukan hanya sekedar memberikan pengetahuan agama saja tetapi juga bagaimana pengetahuan itu bisa melahirkan pengamalan di tengah masyarakat heterogen. Tantangan yang lain adalah bagaimana mendidik moderasi beragama.

Ada banyak tantangan dalam mendidik moderasi beragama, namun empat diantaranya yang saya kira cukup penting. Keempatnya yaitu berkaitan dengan segi kurikulum, sumber daya manusia dalam bentuk pendidik, metode atau model pembelajaran yang digunakan, dan tantangan lingkungan baik lingkungan masyarakat, keluarga, maupun sekolah.

Dari sisi kurikulum, banyak buku-buku sumber pembelajaran yang belum mengakomodir keragaman beragama. Misalnya, ketika saya mengajarkan satu paham ternyata ada satu siswa yang berbeda paham. Ditambah ternyata buku teksnya hanya mencantumkan satu paham (pendapat) mazhab dalam Islam. Karenanya, saya berharap buku teks itu memiliki keragaman yang bisa mengakomodir beberapa paham pemikiran sehingga siswa tidak merasa tersingkirkan ketika ada yang berbeda dengan yang lain.

Sebagai contoh, ketika saya mengajarkan doa *qunut* karena memang pelajaran tersebut ada di buku teksnya, suatu saat tiba-tiba orangtua datang ke sekolah dan protes dan mengatakan “Kenapa anak saya diajar seperti ini? Anak saya tidak *qunut*, kenapa Ibu mengajarkan hal seperti ini?” Hal tersebut membuktikan bahwa memang perlu ada revisi buku

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dalam Pendidikan Agama Islam, 25 September 2020.

teks dan juga peningkatan pengetahuan guru yang harus memahami bahwa peserta didik itu tidak sama.

Namun, perlu diakui bahwa ada sebagian guru yang bersikap eksklusif. Sikap tersebut membuat mereka mudah membid'ahkan dan mengkafirkan orang yang berbeda. Hal ini bukan hal yang rahasia lagi. Dari pengalaman saya, memang ditemukan guru yang seperti itu.

Kemudian dari sisi metode belajar, tantangannya adalah proses pembelajaran dimana kebanyakan guru mengajar hanya sebagai ritual dan dogmatis. Misalnya pada pelajaran salat, guru hanya mengajarkan rukun dan tata cara salat. Mereka tidak mengajarkan manfaat di balik salat dan bagaimana implementasinya (konsekwensinya) dalam hidup. Padahal, hal tersebut sangat penting dari pembelajarannya. Sejatinnya kurikulum 2013 menuntut untuk berpikir tingkat tinggi. Namun kenyataannya proses pembelajaran masih hanya sebatas kognitif, belum sampai berpikir tingkat tinggi.

Di samping itu, ada guru yang mengajarkannya hanya sekedar surga dan neraka, bersalah dan berdosa. Jika bersalah masuk neraka, jika banyak amalnya masuk surga. Namun, mereka tidak mengajarkan keharusan berhubungan baik dengan sesama dan hubungan baik dengan Allah. Oleh karena itu, perlu ada penguatan, dialog atau sharing yang berkelanjutan untuk guru.

Demikianlah realitas tantangan dalam penerapan moderasi beragama dalam Pendidikan Agama Islam. Lantas mengapa moderasi beragama itu begitu penting dalam pendidikan? Pertama, Indonesia berdiri bukan atas satu suku atau agama saja, melainkan sebagai rumah atas berbagai macam suku, etnis dan agama. Keragaman tersebut harus dapat diterima sebagai *sunnatullah* dan rahmat. Kedua, tidak semua konten berita apalagi media sosial yang begitu mudahnya diakses anak didik berdasar sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Yang dikhawatirkan adalah ketiga peserta didik yang tidak puas atas informasi di sekolah lalu mencari informasi di media, ia justru mengakses sumber-sumber yang belum tentu valid, sehingga akhirnya terpapar paham-paham radikal. Ketiga, pelajaran PAI & BP seyogyanya mengajarkan sikap ramah, toleran dan menghargai keragaman. Kita harus memahami bahwa Islam itu adalah *rahmatan lil alamin*. Namun kenyataannya belum semua guru memahami semangat ini.

Apa yang dapat dilakukan untuk mendukung moderasi beragama khususnya dalam pendidikan agama adalah sebagai berikut:

1. Sebarkan dan bentuk pemahaman bahwa guru mendidik bukan

hanya untuk membentuk individu yang saleh secara personal saja, tapi juga individu yang memahami agamanya sebagai ajaran yang menghormati keyakinan agama lain.

2. Mulai dari hal-hal kecil dan dari diri sendiri. Misalnya terkait metode pembelajaran yang tidak membosankan dan penambahan wawasan pengetahuan agama. Termasuk bagaimana memahami ayat ayat Allah itu sebagai sumber sejarah dan sumber ajaran dan bagaimana implementasinya dalam perilaku sehari-hari.
3. Menumbuhkan dan membiasakan sikap simpati dan empati agar peserta didik memiliki keseimbangan antara keyakinan dan toleransi seperti bagaimana kita memiliki keyakinan tertentu tetapi tetap mempunyai toleransi yang seimbang terhadap keyakinan yang lain. Dalam ungkapan lain, bersikap moderat, sikap simpati, dan empati itu bukan hanya kepada sesama Muslim tapi juga kepada yang berbeda agama.

Kesimpulannya, untuk mewujudkan pendidikan agama Islam yang moderat maka perlu kerjasama yang baik, berkesinambungan, dan berkelanjutan. Pembinaan mulai dari kurikulum yang di antaranya adalah materi pengajaran dan sumber belajar atau literatur, perekrutan guru sebagai SDM utama yang tidak hanya kompeten dalam pemahaman agama namun juga memiliki wawasan kebangsaan. Selain itu perlu adanya peningkatan wawasan metodologi pengajaran dan pembinaan tentang wawasan Islam yang moderat secara berkala dan kontinyu.

Mengajarkan Toleransi pada Santri

Fauziah Fauzan

Pengasuh Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang

MODERASI beragama menjadi isu menarik untuk kita bahas di tengah warna-warni kehidupan berbangsa kita. Pada kesempatan ini, saya menyampaikan pengalaman bagaimana nilai-nilai moderasi beragama dipraktekkan dan diwariskan pada santri-santri puteri di Pondok Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang, Sumatera Barat.

Menyangkut keberagamaan dalam hubungannya dengan moderasi beragama, ada dua hal yang kami perhatikan. Pertama, kami harus memperkuat dulu dasar atau akar keilmuannya (*basic*) anak-anak santri. Setelahnya, mempersiapkan anak-anak, generasi muda umat Islam, untuk bisa menghadapi kehidupan mereka yang multikultur, multietnis, dan multikeyakinan.

Khusus soal moderasi beragama, al-Quran memberikan banyak gambaran tentang hal itu. Dimulai dari pesan Allah SWT di Surat al-Zariyat ayat 56 bahwa salah satu tujuan diciptakan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah, Surat Ali al-Imran ayat 19 yang mengamanatkan pentingnya bagi kita memegang teguh keyakinan sendiri (Islam), dan Surat al-Baqarah ayat 2 yang menekankan pentingnya kepercayaan penuh terhadap al-Quran, pedoman atas keyakinan yang diyakini.

Beberapa nilai ini merupakan dasar yang harus terlebih dulu dikuatkan dalam diri santri-santri. Bahwa tugasnya sebagai manusia adalah beribadah, mengabdikan diri kepada Allah. Lalu berpegang kepada agama Islam secara *kaffah* serta tidak boleh meragukan kebenaran al-Quran sedikit pun. Lantas, bagaimana ketika mereka harus berinteraksi dengan pemeluk agama, suku, etnis lain?

■ Disarikan dari Webinar PPIM UIN Jakarta 'Kyai dan Nyai Muda Bicara Moderasi Beragama, umat, 10 Juli 2020 .

Dalam hal ini, Allah memberikan panduan pada Surat al-Hujurat ayat 13 bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa, bersuku-suku, dengan tujuan saling mengenal. Tidak boleh ada perbedaan yang memisahkan. Perbedaan hanya terletak pada ketakwaan mereka terhadap Allah SWT. Inilah beberapa landasan yang menurut kami perlunya memperkokoh diri mereka sebagai seorang Muslim/Muslimah dan pada saat yang sama memiliki sikap penghargaan dan toleransi terhadap orang lain yang berbeda etnis, kultur, bangsa, bahkan agama.

Dalam sejarah panjang Madrasah Diniyyah Puteri Padang Panjang, nilai-nilai moderasi beragama sudah dicontohkan sang pendiri, Rahmah El Yunusiah (l. 20 Desember 1900 - w. 26 Februari 1969). Diketahui, beliau pernah ditangkap dan dijebloskan ke dalam tahanan pemerintah kolonial Hindia Belanda karena dianggap menentang kebijakan pemerintah yang melarang pencatatan pernikahan secara Islam dan keharusan sekolah-sekolah rakyat menerapkan kurikulum yang Belanda terapkan.

Cukup lama ditahan hingga akhirnya beliau pun dibebaskan. Tak berselang lama dari kebebasannya, terjadi kecelakaan kereta api di Lembah Anai yang menewaskan ratusan jiwa penumpangnya. Tak kurang dari 200 penumpang juga luka-luka. Ia kemudian mengajak masyarakat di lingkungan pesantren untuk menolong dan mengobati para penumpang tersebut. Para korban yang terluka dibawa ke dalam asrama Diniyyah Puteri dan diobati di sana.

Seluruh korban ditolong dan diobati tanpa mempedulikan latar belakang mereka, penduduk pribumi atau nonpribumi, bahkan orang-orang Belanda yang menjajah dan menjebak Bunda Rahmah el-Yunusiah sekalipun. Beliau menyingkirkan status-status itu. Dari situ kita diajarkan secara tidak langsung oleh beliau untuk selalu menghargai dan menolong orang, terlebih dalam kecelakaan. Nilai-nilai kemanusiaan itu bersifat lintas agama, lintas keyakinan, dan lintas bangsa.

Lantas, bagaimana Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang saat ini bisa membangun pemahaman santri untuk bersikap menghormati keragaman dalam kebudayaan yang multikultur dan multikeyakinan?

Kami menyadari bahwa sulit untuk hanya mengajarkan mereka tentang nilai-nilai bahwa Islam itu agama *rahmatan lil alamin*. Anak-anak, santri di Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang, harus dibawa keluar lingkungan pesantren untuk menemukan pengalaman langsung bagaimana sebetulnya praktik toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan sosial dan berbagai nilai-nilai sosial positif lainnya.

Sekadar diketahui, santri Diniyyah Puteri sangat beragam. Hanya 35 persen santri berasal dari Sumatera Barat. Prosentase yang sama juga berasal dari berbagai daerah lain di luar Sumatera. Selebihnya, santri Diniyyah berasal dari beberapa negara tetangga, seperti Malaysia, Thailand, dan Filipina. Pemahaman dan pengalaman praktik toleransi dan penghargaan pun perlu diberikan.

Untuk itu, sejak 2012, Pesantren Diniyyah Puteri Padang Panjang merealisasikan program kunjungan ke berbagai kota di Indonesia hingga kunjungan ke luar negeri bagi para santrinya. Para santri kita bawa ke Makkah, Madinah, Dubai, Malaysia, Maroko, Jepang, dan berbagai kota lain di Eropa.

Dimulai dari kelas 8 atau setara kelas 2 Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama, para santri diajak berkeliling ke Jakarta, Bandung, Bogor, dan lainnya. Ini menjadi perjalanan awal mereka untuk melihat keragaman Indonesia.

Kita bawa agar mereka melihat dan menemukan keragaman di negaranya sendiri, termasuk kehidupan politik, industri, dan ekonomi negaranya. Mereka dibawa mengunjungi gedung-gedung pemerintahan RI, fraksi-fraksi di DPR-MPR, hingga pabrik-pabrik industri kosmetik, kendaraan bermotor, percetakan uang, pertambangan, dan pusat bisnis.

Lalu pada kelas 9, mereka diajak ke Singapura dan Malaysia. Ini merupakan program awal bagaimana mereka melihat keragaman di luar negaranya. Ketika mereka pertama kali mendarat, mereka sudah mendapat pembelajaran awal. Bagaimana mereka perlu belajar antri dan melihat 'hal-hal baru' yang tidak ditemukan di lingkungan pesantren seperti perempuan-perempuan dengan pakaian yang relatif terbuka.

Momen ini penting untuk menjelaskan kepada mereka bahwa Allah SWT itu menciptakan keragaman, termasuk keragaman dalam menggunakan pakaian. Bagi mereka barangkali pakaian yang dikenakan perempuan di bandara itu baru pakaian dalam, tapi itulah perbedaan yang harus mereka hargai. Dan, yang lebih penting dari pakaian adalah akhlak perilaku masing-masing.

Pada kelas 10, biasanya kita membawa anak-anak mengunjungi negeri dengan jarak lebih jauh dan kebudayaan lebih berbeda seperti Jepang. Di negara ini, kita ajak santri-santri mengunjungi pusat-pusat pertanian, teknologi, kebudayaan, sekolah dan perguruan tinggi di sana.

Di negara ini, mereka juga belajar kebudayaan bagaimana masyarakat setempat menghargai makanan, sumber daya alam, mengatur sampah,

dan aktivitas pertanian, termasuk menata rumah yang sederhana, indah, dan bersih. Lalu, mempelajari tata kota dan penanganan polusinya.

Selain berkunjung, kita mendorong mereka untuk berinteraksi langsung dengan siswa-siswi sekolah dan keluarga masyarakat Jepang sehingga bisa mengenal bagaimana apresiasi itu tumbuh. Untuk itu, pada saat yang sama biasanya kita membuat program *homestay*; santri tinggal di lingkungan keluarga Jepang.

Hasilnya luar biasa. Mereka melihat dan mengalami langsung bagaimana sikap respek dilakukan. Misalnya di sekolah tempat mereka berinteraksi, pihak sekolah dan siswa-siswinya bersama-sama mengosongkan satu ruangan sebagai tempat bagi anak-anak santri agar bisa salat dengan tenang pada waktunya.

Bahkan pengalaman santri selama tinggal lebih mengesankan lagi. Saat santri menjalankan salat Isya, seluruh radio dan televisi di dalam rumah harus dimatikan. Bahkan anggota keluarga dilarang bersuara yang bisa mengganggu kekhusuan para santri dalam menjalankan shalat. Padahal santri menjalankan shalatnya di kamar mereka, jauh dari jangkauan anggota keluarga lainnya.

Dari apa yang mereka lihat dan alami sendiri, santri bisa menyadari pentingnya sikap menghargai yang lain. Dan yang paling inti, para santri pada akhirnya menemukan makna-makna hadits secara nyata, penghargaan terhadap lingkungan dan sosial berbeda budaya itu sangat penting.

Jadi, saya menangkap kesimpulan, pembelajaran toleransi tidak cukup dengan hanya menjelaskan nilai-nilai luhur. Namun anak-anak perlu dibawa keluar untuk melihat seperti apa toleransi dan penghargaan di dunia yang lebih luas.

Implementasi Fikih Sosial bagi Moderasi Beragama

Tutik Nurul Jannah

Wakil Pengasuh Pesantren Puteri al-Badi'iyah Pati

Direktur Pusat Studi Pesantren dan Fikih Sosial, Institut Pesantren Mato'liul Falah

PESAN keberagaman di dalam sumber ajaran Islam itu sudah sangat kuat seperti disampaikan pada Surat al-Hujurat ayat 13. Ayat ini memberikan pesan bahwa manusia diciptakan secara bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, namun kemudian diminta untuk saling mengenal dan menghargai.

Mengenai keragaman keberagaman, kami teringat dengan fikih sosial yang disampaikan Kiai Sahal Mahfud, bahwa saat berbicara tentang keberagaman manusia, maka kita harus memulainya dari memahami keberadaan manusia sendiri. Diketahui, tujuan hidup manusia di dunia ini adalah meraih kebahagiaan dunia dan akhirat (*sa'adatudara'in*).

Kebahagiaan di dunia dan akhirat hanya bisa dicapai dengan dua fungsi utama manusia, yaitu fungsi *ibadatullah* dan fungsi *imaratul ardli*. Fungsi *ibadatullah* adalah ketika manusia diposisikan sebagai makhluk yang harus tunduk beribadah, menjalankan perintah dan menjauhi larangan-Nya. Sedangkan fungsi *imaratul ardli* adalah manusia sebagai pemimpin di bumi yang harus bertanggung jawab merawat bumi, menghadirkan kedamaian, dan rahmat bagi semesta.

Nah untuk mencapai kebahagiaan itu, fikih sosial yang digagas guru kami Kiai Sahal Mahfud, menegaskan bahwa kita tidak boleh memisahkan antara *ibadatullah* dan *imaratul ardli*. Kenapa? Karena saat kita hidup di dunia dan dalam suasana perbedaan, maka penghargaan terhadap keragaman itu merupakan bagian dari upaya kita menjalankan fungsi sebagai manusia.

Jadi, misalkan kami di pesantren yang hidup di tengah-tengah masyarakat pesisir, dengan tingkat keberagaman yang beragam,

■ Disarikan dari Webinar PPIM UIN Jakarta 'Kyai dan Nyai Muda Bicara Moderasi Beragama, Jumat, 10 Juli 2020.

pilihan politik berbeda-beda, kebiasaan yang warna-warni adalah realitas yang tetap harus kami hargai sebagai fungsi *ibadatullah* dan *imaratul ardli*. Bahwa berbagai perbedaan demikian tetap harus kita hormati dan hargai.

Visi fikih sosial seperti demikian tentu cukup relevan saat kita dihadapkan pada bagaimana sesungguhnya Islam bisa menjadi agama yang *wasathiyah* ketika berada di tengah perbedaan dan bagaimana menampilkan Islam sebagai rahmat. Fikih sosial menekankan kepada kita untuk bisa menunjukkan bahwa keyakinan kita terhadap Islam tidak malah mengganggu pemeluk agama dan tradisi lain. Sebab keberagaman merupakan bagian dari rahmat Allah. Lantas, sekarang bagaimana dengan pengalaman kami di pesantren?

Pesantren al-Badi'iyah yang kami kelola merupakan bagian dari Pesantren Maslakul Huda, Kajen, Pati. Diketahui Pesantren Maslakul Huda mengembangkan sejumlah lembaga pendidikan berjenjang. Mulai dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Sekolah Dasar Terpadu untuk usia 6-13 tahun, Pesantren lil Muftadiat untuk usia 13-16 tahun, Pesantren al-Badi'iyah dan Pesantren Maslakul Huda Putera untuk usia 17-19 tahun, dan Ma'had Aly Maslakul Huda untuk santri dengan usia di atas 19 tahun.

Dengan berbagai jenjang pendidikan tersebut, konsep-konsep fikih sosial itu kita turunkan dalam pembelajaran santri sesuai jenjang pendidikan masing-masing. Untuk anak-anak PAUD, misalnya, kita sangat menghindari ajaran 'Islam Yes dan Kafir No!'. Itu tidak boleh diajarkan.

Alasan kami tidak memperbolehkan pengajaran demikian, karena anak di usia ini merupakan fase paling penting dalam menyemai kepribadian toleran. Ajaran ini juga bertentangan dengan latar belakang santri yang multikultural dan multireligius. Misalnya, neneknya non-Muslim, ibunya Muslim, dan bapaknya mualaf. Artinya, kita tidak boleh membuat garis permusuhan dengan agama atau kultur lain. Itu contoh sederhana.

Seiring peningkatan jenjang pendidikan mereka, maka pengajaran penghargaan dan toleransi keragaman seperti digariskan dalam fikih sosial juga tetap kita berikan sesuai porsi kemampuan penalaran santri. Di tingkat Ma'had Aly, misalnya, diberikan pembelajaran dengan pendekatan teoretik ushul fikih-nya. Tidak hanya pembelajaran, santri juga diberikan pengalaman penghargaan dan toleransi melalui interaksi langsung mereka dengan lingkungan di sekitar pesantren yang cukup

beragam.

Di tingkat lebih tinggi, seperti Institut Pesantren Matoli'ul Falah, fikih sosial kemudian dikembangkan sebagai sebuah wacana yang bisa diterapkan dalam kehidupan masyarakat lebih luas. Publikasi buku dan jurnal hingga pelatihan dilakukan guna mengembangkan gagasan-gagasan penting dalam mendorong sikap moderasi beragama sesuai tradisi pesantren.

Pesantren Welas Asih: Inovasi Pesantren di Masa Kini

Irfan Amalee

Mudir Pondok Pesantren Welas Asih Garut

BERANGKAT dari keinginan memberikan pendidikan terbaik bagi anak sekaligus kepedulian terhadap pendidikan pesantren, saya merintis sebuah pesantren kecil. Namanya Pesantren Welas Asih di Garut, Jawa Barat. Didirikan setahun lalu (2019). Jadi ini belum apa-apa dibanding pesantren-pesantren lain yang telah berusia hampir 100 tahun dan dibangun kyai-kyai terkenal. Namun, insya Allah saya akan turut berjuang melalui pesantren ini.

Pesantren ini berangkat dari kegelisahan saya untuk pendidikan anak kedua. Anak pertama, alhamdulillah, sudah nyantri di sebuah pondok pesantren. Untuk anak kedua ini saya berpikir bahwa saya harus membuat eksperimen. Terlebih saya juga punya pengalaman membantu pesantren dan melatih guru-gurunya. Sepertinya kalau saya bikin sendiri, bakal agak berbeda. Jadi selain betul-betul dari tangan sendiri, motivasi membuat pesantren sebetulnya untuk anak saya saja, meski belakangan ada 29 santri lain yang ikut bergabung.

Nama pesantren ini banyak yang protes, *kok* pesantren namanya tidak Islami. Saya memilih tidak menanggapi. Sebab hemat saya, kita itu acapkali menyebutkan satu kata tapi sering kehilangan makna. Seperti takwa, sering disampaikan, tapi tak jarang malah kehilangan makna sebetulnya dari kata takwa itu sendiri.

Kalau boleh diurai, ungkapan Welas Asih itu terjemahan dari kata 'Rahmah'. Diketahui, 99 nama Allah (*al-asma al-husna*) itu terbagi dalam dua kategori, maskulin dan feminim, *jalaliyah* dan *jamaliyah*.

Allah dalam bismillah itu tampil dalam ungkapan *jamaliyah* sehingga bunyinya *bismillahi al-Rahmani al-Rahimi*, bukan *bismillahi al-Rahmani*

■ Disarikan dari Webinar PPIM UIN Jakarta 'Kyai dan Nyai Muda Bicara Moderasi Beragama', Jumat, 10 Juli 2020.

al-Aziz. Di ayat itu, Allah memilih sifat jamaliyah, *al-Rahman* dan *al-Rahim*.

Sementara itu, inti al-Quran itu adalah al-Fatihah, sedangkan inti al-Fatihah itu adalah basmallah, sedangkan inti basmallah itu adalah *bismillahi al-Rahmani al-Rahimi* yang intinya adalah *al-Rahman dan al-Rahim*. Ketika *al-Rahman al-Rahim* digabungkan, maka hasilnya adalah al-Rahmah, yaitu *Welas Asih* atau *Compassion*.

Inovasi Pesantren

Keberadaan pesantren ini juga tidak lepas dari kegelisahan pribadi mengapa pendidikan kita selalu menjadi pihak terakhir dalam melakukan inovasi. Ini berbeda dengan dunia lainnya seperti industri, teknologi, internet dan *game* yang begitu cepat melakukan inovasi. Pendidikan selalu jadi yang terakhir dalam berinovasi.

Untuk itu, ketika saya pertama kali membangun pesantren, saya mencoba membuat sentuhan berbeda pada interior gedung dan ruang kelasnya. Diharapkan, pesantren tampil sebagai sesuatu yang *fresh*. Saya tidak terlalu memikirkan kurikulum lebih dulu.

Saya ingat, salah satu gebrakan K.H. Ahmad Dahlan dalam melakukan reformasi pendidikan dimulai dari hal yang sangat kecil, yaitu membuat bangku sekolah. Itu perubahan revolusioner dan banyak dikritik karena bangku sekolah dianggap berbau Belanda. Namun, 100 tahun kemudian, bangku sekolah terus digunakan. Untuk itu, saya berpikir bahwa saya harus mereformasi terlebih dulu meja dan kursinya.

Sengaja saya mengkurasi meja dan kursinya sendiri. Harganya memang jadinya sangat mahal. Namun, tidak mengapa. Sebab coba kita bayangkan, anak-anak ini akan duduk selama di kursi yang sama selama 6 tahun di pesantren, dan kita menyediakan kursi yang ala kadarnya. Itu ironis jika membandingkan dengan kursi yang sangat bagus untuk kantor dan kafe. Ini artinya kita memberikan investasi terlalu kecil untuk pendidikan. Dengan desain kursi ini, saya ingin membuat perubahan.

Dari sisi pembelajaran Islam, saya ingin memberikan impresi terbaik tentang Islam. Pada masa saya di pesantren dulu, impresi tentang agama Islam selalu tidak jauh dari hafalan, lalu sejarah perang, dan biografi Nabi Muhammad yang bersifat kronologis.

Contohnya, saat kita mempelajari kitab *Nurul Yaqin* di pesantren, sejarah Islam selalu dipenuhi tentang sejarah peperangan. Tak kurang dari 27 perang di masa Nabi, mulai dari perang Badar, Perang Khandaq, dan perang-perang lainnya.

Lalu sejarah Nabi Muhammad sendiri digambarkan secara kronologis. Lahir sebagai anak yatim piatu, di usia 30-40 tahun melakukan *tahannuts* dan menerima wahyu pertama. Selanjutnya di usia 40-50, Nabi dikisahkan memulai dakwah Islam secara sembunyi-sembunyi, sebelum kemudian di atas usia 50 tahun berdakwah dengan terang-terangan, menyebarkan Islam, termasuk dengan berperang.

Padahal beberapa penulis sejarah belakangan seperti Afzalul Rahman, seorang penulis asal Pakistan dan tinggal di Inggris, mengelompokkan peran Nabi Muhammad menjadi 10 kelompok, tidak hanya berperang.

Haidar Bagir lebih rinci lagi. Ia menyebutkan, dari total 28 ribu hari kenabiannya, Nabi Muhammad hanya menggunakan 800 harinya untuk berperang. Artinya perang hanya mengisi 10% dari total periode kenabiannya, lalu 90%-nya lagi apa?

Setelah saya mengkalkulasi sendiri, ternyata peran politik Nabi itu hanya 10%, peran sosial 50%, dan selebihnya peran domestik. Artinya Nabi Muhammad itu lebih banyak mengisi tugas-tugas domestik, lalu tugas-tugas sosial, dan hanya sedikit disibukkan tugas kemiliteran.

Jadi, menurut saya, ada impresi yang salah ketika kita belajar agama. Sejarah dipenuhi kisah politik dan peperangan, bukan sejarah sosial.

Impresi lain yang cukup keliru adalah soal poligami Nabi. Padahal Nabi Muhammad juga monogami selama 15 tahun, sedangkan masa poligami itu sangat sedikit dan lebih banyak karena alasan sosial, politik, dan kekerabatan.

Begitu juga saat kita belajar fikih. Sangat ritual dan teknikal sekali. Padahal di dalam ritual terdapat moral (*wisdom*) yang menjelaskan mengapa dan apa manfaat ritual itu dilakukan.

Kita juga dulu belajar akidah Islam. Di madrasah tsanawiyah, saya sudah belajar ilmu kalam, mengenal tentang aliran Mu'tazilah, Khawarij, dan lain-lain. Islam penuh dengan kritik dan pertentangan. Padahal Islam sendiri sebenarnya memiliki banyak aspek, seperti tauhid dan tasawuf. Bahkan tasawufnya, kemudian belakangan saya tahu, tasawuf sangat dekat dengan orang-orang yang berbeda agama.

Menjawab Kebutuhan Abad 21

Berdasar berbagai latar belakang tersebut, saya membangun pesantren ini dengan pemikiran bahwa lembaga ini harus dikontekstualisasi dengan situasi kekinian. Ini sejalan dengan para pakar pendidikan dunia yang menyimpulkan tentang 21th Century Skills. Bahwa kalau mau sukses di abad 21, maka terdapat sejumlah *skill*

yang harus diperkuat. *Skill* ini dikenal dengan 4C yaitu *Critical Thinking, Creativity, Communicative, dan Colaborative*; 4C inilah yang ingin kita akomodir dalam Pesantren Welas Asih.

Kolaborasi menjadi sangat penting dalam membantu anak-anak kita. Kita sendiri sejak kecil sudah overdosis dengan kompetisi sehingga tak jarang stres ketika bagi rapor karena takut tidak mendapat ranking satu. Lalu, orang-orang juara selalu diagung-agungkan, sedangkan yang tidak juara seringkali dianggap kelas sekian.

Untuk itulah, saya melihat pendidikan Islam itu harus kontekstual, *shalihun li kulli zaman*. Dan itu terefleksi pada 4C yang dinilai menjadi penentu kesuksesan seseorang di abad 21. *Skill-skill* yang sebetulnya sudah jauh-jauh hari disebutkan dalam ajaran Islam. Nabi Muhammad sendiri adalah seorang problem solver, sangat kritis, atas berbagai persoalan sosial di sekelilingnya.

Terkait itu, kami merancang pembelajarannya seperti *games, game based learning*. Mengapa model *games*? Karena bahasa anak sekarang adalah bahasa games. Kita harus memberi pelajaran dengan *bilisani qaumihim*. Jadi, kalau anak belajar di Pesantren Welas Asih, dia memiliki *journey*-nya sendiri. Masing-masing *journey* ada misi-misinya yang bisa mereka gapai.

Searah situasi pandemi Covid 19, Pesantren Welas Asih juga menerapkan *blended learning*. Model ini kami terapkan agar santri tetap memiliki aktivitas pembelajaran berbasis aktivitas fisik. Pembelajaran dilakukan sedekat mungkin dengan kenyataan.

Nabi Muhammad mendidik orang sedekat mungkin dengan kenyataan. Kadang-kadang sekolah kita seperti terasing dari dunia nyata. Jadi kita harus melakukan pembelajaran sedekat mungkin dengan kenyataan sekitar. Untuk itu, pembelajaran di Pesantren Wulas Asih juga tidak terlalu banyak di kelas, melainkan di alam.

Kami juga menerapkan pilar-pilar pembinaan terkait moderasi beragama. Di antaranya pengembangan komunikasi interpersonal dan intrapersonal. Para santri Pesantren Welas Asih diharapkan bisa bersikap welas asih pada sesama temannya, sehingga setelah itu mereka juga bisa bersikap sama terhadap orang yang berbeda agama. Dengan begitu, ini juga bisa menghilangkan *prejudice* terhadap orang beda agama sejak usia dini.

Kita juga menerapkan *collaborative parenting*. Orang tua harus berkomitmen untuk turut menjadi mitra pendidik para guru di pesantren. Untuk itu, kita punya program Welas Asih Ayah Bunda

Akademik (WABA). Setiap orang tua yang menitipkan belajar anaknya di pesantren wajib ikut training selama tujuh hari penuh. Keberhasilan merupakan kerja bersama lembaga pendidikan dan para orang tua.

Demikian Pesantren Welas Asih yang setahun ini saya rintis. Semoga bisa menghasilkan para santri yang memiliki jiwa welas asih terhadap sesama. Dan, mudah-mudahan pesantren ini juga bisa berkiprah terus 100 tahun yang akan datang untuk berkembang lagi di 100 tahun kemudian.

Bagian 5

Masjid dan Organisasi Masa Islam

Masjid, Buletin Jumat, dan Persebaran Radikalisme

Kusmana

Koordinator Penelitian Buletin Masjid Indonesia - PPIM UIN Jakarta

Di era modern ini, fungsi masjid secara umum mengalami perubahan ke arah yang lebih luas. Masjid tidak hanya menjadi pusat aktivitas ibadah fundamental seperti shalat, belajar al-Quran dan keilmuan Islam lainnya, serta kegiatan dakwah Islamiyah. Lebih dari itu, masjid kemudian menjalankan fungsi lebih luas seperti menjadi lokasi akad pernikahan dan pusat penyelenggaraan hari-hari besar keagamaan Islam.

Dalam konteks persebaran paham dan tindakan radikalisme keagamaan, masjid sebetulnya tidak menduduki peran strategis sebagai wilayah persebaran. Ia berbeda dengan lembaga-lembaga lain seperti lembaga pendidikan formal, baik sekolah maupun perguruan tinggi, atau lanskap media internet yang massif digunakan sebagai sarana persebaran paham dan tindakan radikalisme keagamaan.

Namun, masjid dalam hal ini tetap tak bisa diabaikan mengingat posisinya yang sangat penting bagi komunitas muslim. Bukan tidak mungkin, masjid turut dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan lain, termasuk mendakwahkan paham radikalisme agama.

Berangkat dari latar belakang itu, kami di PPIM UIN Jakarta didukung UNDP melalui Proyek Convey melakukan penelitian tentang bagaimana perubahan fungsi masjid tersebut. Mulai dari fungsi dakwah Islamiyah hingga ke fungsi-fungsi lain, termasuk kemungkinan berfungsi sebagai sarana persebaran gagasan radikalisme agama. Terlebih, kendati misalnya terjadi penutupan organisasi keagamaan yang disinyalir berada di balik gerakan radikalisme, tidak berarti pula hilang aktifitas perluasan pengaruh mereka.

■ Disarikan dari Webinar Masjid dan Moderasi Beragama, PPIM UIN Jakarta, 5 Februari 2021.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengindikasikan adanya penguatan paham radikal agama di ruang publik, termasuk di masjid ini. Beberapa diantaranya diindikasikan oleh penelitian yang dilakukan penelitian Greg Feally (2005), Martin van Bruinessen (2002), Hudzaifah bin Usman Alkaf (2018), dan Budiman Syarif dan Firman (2013).

Salah satu medium penguatan paham tersebut melalui media buletin Jumat yang disebar di berbagai masjid, terutama pada hari Jumat dimana banyak masyarakat muslim berkumpul untuk berjamaah shalat Jumat. Hal demikian ini terkonfirmasi oleh sejumlah penelitian seperti Syafiq (2014), CSRC (2010), Sunaryo (2017), Sabari dan Hakiki (2017), dan Idris (2015).

Beberapa penelitian lain seperti CSRC (2010-2018), Infid dan PPM (2017 dan 2018), Sunaryo (2017), dan beberapa penelitian PPIM yang lain (2017-2018) juga mengkonfirmasi kembali fakta demikian. Buletin Jumat telah digunakan sebagai media dakwah dengan tujuan yang beragam. Selain menyampaikan pesan agama yang sejuk dan *rahmatan lil alamin*, ternyata buletin Jumat menjadi media penyampaian ideologi penulis dan golongan tertentu.

Berdasarkan latar belakang tersebut, PPIM UIN Jakarta melalui proyek Convey kembali melakukan penelitian. Pertanyaan utama penelitiannya sendiri adalah, apa isi teks buletin jumat yang tersebar di masjid masjid Indonesia? Bagaimana takmir masjid merespon penyebaran buletin tersebut? Apa makna fenomena tersebut dalam kaitannya dengan meningkatnya fenomena paham radikalisme agama?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita melakukan penelitian dengan unit analisis pada buletin jumat, takmir masjid, dan jamaah masjid. Terdapat 100 masjid yang dijadikan sampel yang terdiri dari beberapa kategori masjid, yaitu masjid agung, masjid kampus, masjid di komplek Tentara Nasional Indonesia, masjid di lingkungan Kepolisian RI, masjid di lingkungan perumahan, masjid di lingkungan perkampungan, masjid di lingkungan pemerintahan, masjid di pusat perbelanjaan, dan masjid di lingkungan organisasi masyarakat.

Untuk lokasi penelitiannya sendiri, kita mengambil wilayah penyangga (*provincial town*) di lima Kabupaten. Kelimanya yaitu Kabupaten Pandeglang yang menyangga Kota Serang, Kota Bogor yang menyangga Jakarta, Kabupaten Bandung yang menyangga Kota Bandung, Kabupaten Sukoharjo yang menyangga Kota Solo, dan Kabupaten Gresik yang menyangga Kota Surabaya. Alat ukur yang kita gunakan adalah kuesioner, formulir, analisis isi, wawancara terstruktur.

Analisis datanya sendiri adalah deskriptif analitik dan analisis konten.

Secara umum, kami temukan, pendanaan masjid untuk berlangganan buletin jum'at tidak besar. Namun temuan menunjukkan bahwa semua masjid diakses dan bersedia mendanai buletin jumat sebagai sumber bacaan Islami. Pengecualian di masjid-masjid Pandeglang dimana tidak ditemukan masjid-masjid yang menyediakan dana berlangganan buletin Jumat.

Sementara itu, dari 100 masjid di lima wilayah yang jadi lokasi penelitian, kami mencatat total 32 jenis buletin jumat. Buletin ini ditemukan secara fisik dalam penelitian lapangan yang dilakukan dari tanggal 8 hingga 18 Januari 2019. Dari total buletin tersebut, selanjutnya kami membagi ke dalam dua kategori, yaitu Buletin Kaffah dan buletin non-Kaffah.

Kategorisasi dua buletin tidak lepas dari keberadaan Buletin Kaffah sendiri yang disebarakan secara massif, sedang buletin non-Kaffah cenderung ireguler. Maka untuk memudahkan analisis kita pilah saja Buletin Kaffah dan buletin non-Kaffah berdasar 13 ukuran untuk menentukan apakah masing-masing buletin masuk radikal (RD) atau tidak radikal (TRD).

Salahsatu ukuran misalnya, radikal itu jika penerapan ajaran Islam dilakukan secara utuh, literal/tekstual sesuai dengan ajaran al-Quran, hadits dan sunah tertentu. Sedang dinilai tidak radikal jika penerapan ajaran Islam sesuai dengan al-Quran, hadis dan sunnah dan disesuaikan dengan konteks yang ada di masyarakat. Berdasar ukuran-ukuran ini kita memotret konten buletin Jumat yang dikumpulkan 44 buletin dan yang dianalisis 37 Buletin Kaffah.

No.	Radikal (RD)	Tidak Radikal (TRD)
1.	Penerapan ajaran-ajaran Islam secara utuh dan literal/tekstual sesuai dengan al-Quran, hadis, dan sunnah tertentu	Penerapan ajaran-ajaran Islam secara utuh dan literal/tekstual sesuai dengan al-Quran, hadis, dan sunnah dan disesuaikan dengan konteks yang ada di masyarakat.
2.	Kecenderungan tanpa kompromi dengan perbedaan pandangan sosial-keagamaan, baik yang berasal dari sesama Muslim maupun non-Muslim	Kecenderungan untuk membuka dialog dengan pandangan sosial-keagamaan yang berbeda, baik yang berasal dari sesama Muslim maupun non-Muslim.

3.	Reaktif/anti terhadap kekuatan-kekuatan, ide-ide, dan praktik-praktik dari Barat yang dianggap sekuler dan materialis	Berkoeksistensi dengan kekuatan-kekuatan, ide-ide, dan praktik-praktik dari Barat yang dianggap sekuler dan materialis, terutama yang dianggap membangun
4.	Reaktif/anti terhadap pemikiran, pandangan, dan tradisi sosial-keagamaan lokal	Berkoeksistensi dengan pemikiran, pandangan, dan tradisi sosial-keagamaan lokal
5.	Berhasrat membangun kembali negara dan masyarakat melalui dasar-dasar ajaran Islam tertentu	Berhasrat membangun kembali negara dan masyarakat melalui sinergi antara ajaran Islam dan faham-faham non-Islam yang membangun
6.	Berdakwah secara aktif kepada siapa saja dengan meyakini bahwa pandangannya yang lebih benar	Berdakwah secara parsial dengan target tertentu
7.	Menolak pluralisme keagamaan dan cenderung eksklusif	Mengakui pluralisme keagamaan dan cenderung inklusif
8.	Menolak kesetaraan gender dengan argumen-argumen keagamaan	Mengakui kesetaraan gender dengan argumen-argumen keagamaan dan non-keagamaan
9.	Menolak keberadaan kelompok-kelompok dan sekte-sekte minoritas dalam Islam	Mengakui keberadaan kelompok-kelompok dan sekte-sekte minoritas dalam Islam
10.	Kecenderungan tidak menolak kekerasan terhadap perbedaan pandangan sosial keagamaan baik yang berasal dari sesama Muslim maupun non-Muslim	Kecenderungan menolak kekerasan terhadap perbedaan pandangan sosial keagamaan baik yang berasal dari sesama muslim maupun non-Muslim
11.	Menolak <i>ijtihad</i> , <i>bid'ah</i> dan ide-ide serta praktik-praktik baru mengenai masalah-masalah sosial keagamaan	Terbuka pada <i>ijtihad</i> , <i>bid'ah</i> dan ide-ide serta praktik-praktik baru mengenai masalah-masalah sosial keagamaan
12.	Mendukung penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan sebagian mendukung pembentukan negara Islam/kekhalfahan Islam baik melalui jalan damai maupun kekerasan jika diperlukan	Mendukung penerapan hukum sekuler yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari dan mayoritas menolak pembentukan negara Islam/kekhalfahan Islam
13.	Kecenderungan menolak demokrasi dan penerapan HAM, tetapi seringkali terlibat aktif dalam proses politik	Menerima demokrasi dan penerapan HAM

Dari sisi konten buletin jumat ditemukan bahwa hasrat membangun kembali negara dan masyarakat melalui dasar-dasar ajaran Islam tertentu sangat dominan mengisi artikel di Buletin Kaffah. Sementara itu, reaksi atau anti terhadap pemikiran pandangan dan tradisi sosial keadaaan lokal paling sedikit porsi pembahasannya. Jadi konsep tentang negara cukup mendominasi pembahasan di Buletin Kaffah.

Potensi dari penyebaran paham radikal dan penerapan syariah Islam melalui selain Buletin Kaffah juga cukup terbuka. Pembahasan terkait penerapan ajaran-ajaran Islam secara utuh, literal/tekstual sesuai dengan al-Quran, hadis, dan sunnah tertentu sering muncul. Selanjutnya disusul dengan pembahasan membangun kembali negara dan masyarakat mulai dasar-dasar ajaran Islam tertentu. Sekitar 16 persen konten buletin non-Kaffah mengarah kepada paham radikalisme.

Secara umum, penelitian ini menemukan dua hal. Pertama, dari 100 masjid yang diobservasi, sebagian tidak ditemukan sebaran buletin. Di antara jumlah masjid yang di dalamnya ditemukan sebaran buletin, terdapat opini radikalisme yang mengkhawatirkan. Kedua, dari keseluruhan sampel wilayah yang ditemui, terdapat Buletin Kaffah yang disampaikan secara masif di berbagai masjid, dengan teknik-teknik yang tiba-tiba sudah tersebar di lingkungan masjid. Beberapa asisten peneliti kami di lapangan mencoba menangkap basah siapa penyebar buletin itu, namun tidak pernah berhasil menemukan.

Jika dibuat model analisis secara diametrik, maka penelitian juga menemukan data-data yang cukup mengkhawatirkan. Pertama, Buletin Kaffah lebih banyak disebar di masjid pada saat diselenggarakan kegiatan jumat; sedang secara konten Buletin Kaffah berisi pemahaman radikal dengan berbagai kategori. Kedua, sebagian kecil buletin non-Kaffah juga ternyata berisi konten radikalisme.

Catatan kami, diantara buletin jumat, Buletin Kaffah adalah yang paling masif. Selain didistribusikan secara langsung, ia juga disebar melalui internet dan bisa didownload gratis. Ini berbeda dengan penerbit buletin lain yang rata-rata tidak gratis. Sementara Buletin Kaffah mempersilahkan bahkan menyarankan untuk dicetak sebanyak-banyaknya sesuai kebutuhan jamaah.

Berangkat dari temuan penelitian yang dilakukan, kami merekomendasikan beberapa hal. Pertama, perlunya mengadakan dan memperbanyak program-program di masyarakat yang memberikan pemahaman isi isu keagamaan kontemporer yang moderat dan ramah terhadap perbedaan. Kedua, perlunya menyokong penerbitan Buletin Jumat yang mendukung terhadap isu-isu keislaman yang moderat. Ketiga, perlunya mengadakan asesmen atau penelitian lebih mendalam di kota-kota besar kota kota provinsi di Indonesia, tempat berkumpulnya segala permasalahan sosial ekonomi politik keagamaan.

Implementasi Moderasi Beragama di Masjid: Upaya Dewan Masjid Indonesia

Hj. Kustini

Pengurus PP Dewan Masjid Indonesia

PADA kesempatan ini, saya mewakili Dewan Masjid Indonesia (DMI) akan mencoba berbagi sedikit pengalaman bagaimana DMI turut mendorong moderasi beragama melalui masjid. Diketahui, masjid merupakan salah satu hal penting bagi masyarakat Muslim. Tidak hanya sebagai tempat ibadah shalat, masjid juga memiliki banyak peran sosial keislaman yang sangat penting bagi jamaahnya.

DMI sendiri adalah organisasi keagamaan-kemasyarakatan yang berkhidmat dalam memberdayakan masjid sebagai pusat kemaslahatan dan kesejahteraan umat-bangsa. Untuk itu, DMI memiliki visi memakmurkan dan dimakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai pusat ibadah, muamalah, tarbiyah, dakwah dan ukhuwah bagi terbentuknya *khairu ummah*. Dengan begitu, DMI sendiri berfungsi mengkoordinasi, membina, memberdayakan dan mengembangkan berbagai kegiatan kemasjidan di seluruh Indonesia.

Sebagai sebuah organisasi, DMI tentu memiliki sejumlah pengurus yang mengurus berbagai bidang terkait kemasjidan di Indonesia. Salah satunya, DMI memiliki Departemen Pemberdayaan Potensi Muslimah, Anak dan Keluarga (Departemen PPMK). Departemen PPMK bertugas mengkoordinir beberapa organisasi otonom terkait seperti Korps *mubalighah*, Badan Pembina TK Islam (BPTKI), Badan Kordinasi Majelis Taklim dan Masjid (BKMM). Melalui pengalaman dan program Departemen PPMK DMI, saya akan berbagi tentang bagaimana moderasi beragama diterapkan.

Diketahui, moderasi beragama dicetuskan dan disosialisasikan oleh Kementerian Agama saat Menteri Agamanya, Lukman Hakim Saifuddin. Meski

■ Disarikan dari Webinar Masjid dan Moderasi Beragama, PPIM UIN Jakarta, 5 Februari 2021 .

sebetulnya, nilai-nilai moderasi beragama itu sendiri sudah ada dan dipraktikkan sejak lama oleh bangsa Indonesia. Kurang lebih moderasi beragama difahami sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri (eksklusif) dan penghormatan kepada praktik agama orang lain yang berbeda keyakinan (inklusif).

Sebetulnya, banyak sekali prinsip-prinsip moderasi beragama. Diantaranya, 1) keseimbangan di antara dua hal yang berlawanan dan 2) keberpihakan pada keadilan, kemanusiaan, dan persamaan. Sedang indikatornya banyak sekali, diantaranya komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal.

Lantas, bagaimana filosofi dan prinsip-prinsip moderasi beragama sendiri diterapkan oleh DMI, terutama melalui Departemen PPMK? Jelasnya, bagaimana Departemen PPMK DMI sendiri menerapkan moderasi beragama?

Terkait moderasi beragama, kami membuat program dengan mempertimbangkan beberapa hal. Di antaranya keseimbangan dalam berbagai kepentingan, mengedepankan pihak-pihak yang selama ini kurang diperhitungkan, menerjemahkan indikator moderasi beragama dalam penyusunan program dan kegiatan. Program dimaksud beberapa diantaranya secara tekstual menyertakan terminologi “moderasi” dalam judul program dan kegiatan, tetap sebetulnya nilai-nilai dan indikator moderasi beragama menjadi ruh dari kegiatan dimaksud.

Saya akan sampaikan beberapa contoh saja. Pertama, penyusunan Modul Pelatihan Dakwah Berkeadilan dan Moderat bagi *Mubalighah* di lingkungan DMI, terutama Korps *Mubalighah*, BKMM dan BPTKI, pusat dan daerah. Tujuan modul ini adalah menjadikan masjid sebagai sumber pengetahuan agama Islam yang moderat dan berkeadilan gender, mampu menekan penyebaran dan internalisasi nilai-nilai radikalisme dan memengaruhi di masjid melalui *mubalighah* yang memiliki perspektif Islam *rahmatan lil alamin* dan perspektif keadilan gender. Jadi kami mencoba membuat alternatif dakwah yang lebih moderat.

Kegiatan lain yang kami lakukan adalah mengembangkan model Masjid Ramah Anak (MRA). MRA ini kami kembangkan agar masjid menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif dan rekreatif yang aman dan nyaman dengan dukungan orang tua dan DKM. Program ini juga kami maksudkan untuk memaksimalkan fungsi masjid sebagai tempat penting bagi tumbuh kembang anak. Masjid harus dengan sengaja didesain menjadi masjid ramah anak.

Mengapa kami membuat masjid ramah anak? Karena kita sebetulnya tahu, bahwa anak selama ini hampir diposisikan sebagai pihak yang tidak penting kehadirannya di masjid. Bahkan beberapa masjid, atau beberapa pengurus masjid, menganggap kedatangan anak ke masjid itu menjadi pengganggu kekhusyuan beribadah jamaahnya karena keributan mereka di masjid-masjid. Sebaliknya, kami melalui MRA ingin membuat anak-anak tertarik datang ke masjid dan bisa nyaman selama di masjid.

Apresiasi perlu kami berikan kepada banyak pihak yang telah mendukung program MRA ini. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI (KPPA) yang telah membantu mensosialisasikan program di 10 provinsi sekaligus me-*launching*nya bersama-sama dalam Peringatan Hari Anak Nasional. Lalu, Direktorat Urusan Agama Islam, Ditjen Bimas Islam, Kemenag RI dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI (Kemendikbud). Mudah-mudahan bantuan banyak pihak bisa merealisasikan bentuk ideal masjid yang memberikan ruang aman nyaman bagi anak-anak.

Kemudian Departemen PPMK DMI juga membuat Pedoman Pengelolaan Masjid Bersih Suci dan Sehat. Pedoman ini kami susun sebagai pembekalan bagi para DKM untuk membuat masjid tidak hanya ramah bagi jamaah laki-laki, tapi juga jamaah perempuan, terutama jamaah berkebutuhan khusus. Kami tuangkan dalam pedoman ini.

Terakhir, kami juga menyelenggarakan webinar pencegahan kekerasan seksual bagi para pengurus maupun mitra BMI di tingkat pusat dan daerah. Webinar ini adalah upaya kami mendorong kesadaran bersama dalam mencegah kekerasan seksual dan perlindungan korban. Ini dirasa penting mengingat upaya ini juga perlu melibatkan para tokoh agama yang cukup didengar masyarakat di lingkungannya.

Demikian beberapa pengalaman implementasi moderasi beragama yang kami lakukan di DMI, terutama melalui Departemen PPMK. Departemen PPMK DMI sendiri berkomitmen menerapkan moderasi beragama melalui program-program yang memberi manfaat dan ramah bagi elemen masyarakat di lingkungan masjid. Tentu bukan perkara mudah, untuk itu perlu sinergi dan dukungan banyak pihak dalam memaksimalkan kontribusi kami kepada masyarakat.

Merawat Fungsi Pusat Peradaban Masjid

Sudarnoto Abd. Hakim

*Ketua Majelis Ulama Indonesia Bidang Kerjasama Luar Negeri dan
Hubungan Internasional*

MASJID tidak hanya berfungsi sebagai sarana utama dalam melaksanakan kewajiban utama keagamaan seperti shalat dan mempelajari ajaran-ajaran Islam lainnya. Lebih dari itu, masjid merupakan pusat peradaban yang menjalankan pembinaan keagamaan sekaligus pembangunan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan sekaligus. Majelis Ulama Indonesia (MUI) berkomitmen merawat fungsi masjid sebagai pusat peradaban, termasuk menjaganya dari infiltrasi faham-paham menyimpang.

Terkait masjid ini saya memiliki dua cerita yang barangkali bisa memberikan refleksi bagi kita bagaimana seharusnya fungsi pusat peradaban tersebut bisa selalu dirawat dan jaga betul-betul. Cerita pertama saat saya masih menjabat Wakil Rektor (Warek) Bidang Kemahasiswaan UIN Jakarta. Sebagai warek yang membidangi aktivitas kemahasiswaan, maka saya harus selalu *blusukan* memantau aktivitas mahasiswa.

Satu waktu, bertepatan dengan hari Jumat dan biasanya shalat berjamaah dilakukan di Masjid al-Jami'ah Aula Student Center. Saat saya hendak masuk ke masjid, saya melihat setumpukan buletin yang diperuntukkan gratis bagi jamaah. Nama buletinnya 'al-Islam'. Langsung saya ambil seluruhnya.

Saat saya ambil, seorang mahasiswa tiba-tiba datang dan protes. Ia tak terima seluruh buletin saya ambil dan meminta tumpukkan buletin itu disimpan kembali setelah saya cukup mengambil beberapa eksemplar. Namun saya bersikukuh. Saya beralasan akan membagikan sendiri seluruh buletin itu ke mahasiswa lainnya. Meski tak cukup puas, ia sepertinya masih bisa menerima alasan saya.

■ Disarikan dari Webinar Masjid dan Moderasi Beragama, PPIM UIN Jakarta, 5 Februari 2021.

Lalu, buletin itu saya serahkan kepada pengurus al-Jami'ah Aula Student Center sambil berpesan agar buletin ini jangan diambil, diterima saja tidak boleh. Sebab saya tahu, buletin ini adalah buletin yang diterbitkan sebuah organisasi yang selalu berupaya memperjuangkan khilafah, menolak demokrasi, dan tentu saja makar terhadap negara. Belakangan, pemerintah kemudian membubarkan organisasi tersebut.

Tak berselang lama dari kejadian itu, enam orang mahasiswa mendatangi saya di Gedung Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan. Mereka memprotes saya yang telah mengambil satu bundel penuh buletin Jumatan tersebut. Namun pada momen pertemuan tersebut saya jelaskan bahwa lingkungan kampus harus bersih dari atribut yang jauh dari kehidupan luar kampus, apalagi terbitan dengan corak keislaman seperti di buletin mereka.

Saya turut menjelaskan bendera organisasi Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam yang lebih tua usia organisasinya di Indonesia juga tak diizinkan dikibarkan. Beberapa waktu sebelum 'penyitaan' buletin tersebut, beberapa mahasiswa simpatisan organisasi pengusung khilafah tersebut sempat mengibarkan bendera organisasi. Beruntung segera dicegah.

Kejadian lain terjadi di lingkungan masjid saya tinggal. Saat saya kebetulan tidak sedang tugas mengajar, saya lebih memilih tinggal di rumah. Kebetulan hari itu juga hari Jumat. Saya memutuskan shalat Jumat di masjid lingkungan saya tinggal.

Ada kejadian menarik, saat khatib yang bertugas saat itu menyampaikan khutbah berapi-api bahkan penuh cacian. Almarhum Nurcholish Madjid atau Cak Nur dicacimaki sang khatib sepanjang khutbahnya. Saya tidak tahan dengan isi khutbahnya. Namun memutuskan keluar masjid dan mencari masjid lain juga tak bisa sebab saya bisa ketinggalan salat Jumat kalau harus pindah masjid.

Akhirnya setelah cukup bersabar, selesailah khutbah sang khatib. Usai shalat, saya segera menyapanya dan bertanya, apa dia kenal siapa Nurcholish Madjid? Tidak, jawabnya. Lantas ustadz tahu darimana tentang Nurcholish Madjid? Dari guru saya, jawabnya. Saya tanya kembali, apa gurunya kenal dengan almarhum Nurcholish Madjid atau sempat membaca bukunya? Sang khatib hanya menggeleng kepala.

Saya tercengang, bagaimana bisa sang khatib berkhotbah dengan materi penuh cacimaki terhadap almarhum Nurcholish Madjid padahal sama sekali tak mengenal, apalagi membaca buku-bukunya. Saya menangkap kesimpulan, bahwa fitnah luar biasa juga berlangsung di

forum khutbah Jumat, di sebuah masjid.

Melalui dua cerita ini, saya ingin menegaskan bahwa pikiran-pikiran yang sangat kanan atau radikal dengan dampak sangat ekstrem sebetulnya muncul dalam berbagai cara. Salah satunya melalui buletin yang memuat gagasan-gagasan mereka dan disebarakan kepada para jamaah masjid, terutama pada saat mereka berkumpul lebih banyak dari biasanya (shalat Jumat).

Jauh sebelumnya, kita juga mengenal kelompok ini juga menggunakan *halaqah* di masjid sebagai cara untuk menarik simpati sekaligus menumbuhkan pemahaman keagamaan yang eksklusif. Sekali lagi masjid menjadi tempat cukup penting bagi mereka dalam menyebarkan pemikirannya.

Inilah realitas yang kita temui hari ini bagaimana masjid menjadi area persebaran pengaruh mereka. Barangkali kritik saya terkait ini, di masjid-masjid kampus sendiri, anak-anak muda dari kelompok organisasi keislaman moderat seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) sendiri enggan mengurus masjid, sehingga masjid dengan mudah disasar oleh kelompok-kelompok lain.

Selain itu, tidak sedikit kepengurusan masjid di berbagai lingkungan lain di luar kampus juga pun diambil oleh kelompok-kelompok radikal. Akibatnya, masjid menjadi corong persebaran pengaruh mereka.

Dua kisah ini melengkapi gambaran bagaimana massifnya gerakan ini memanfaatkan celah. Selain masjid, mereka juga memanfaatkan lembaga pendidikan seperti sekolah dan perguruan tinggi seperti pernah disebutkan almarhum Profesor Bambang Pranowo bahwa tidak sedikit pelajaran anak di sekolah dengan kegiatan ekstra keagamaannya disusupi kelompok radikal.

Jadi melihat bagaimana cara yang mereka lakukan, saya kemudian sependapat dengan banyak riset yang dilakukan. Bahwa meskipun sebuah organisasi radikal ekstrim dibubarkan dan secara kelembagaan tidak ada lagi, namun tidak berarti gagasan radikal ekstrim hilang begitu saja. Saya kira kelompok-kelompok seperti ini akan terus bergerak menyebarluaskan gagasan-gagasannya dalam berbagai cara.

Selain itu, pengerasan paham keagamaan radikal sendiri akan selalu menemukan konteksnya di tengah-tengah masyarakat. Setidaknya terdapat dua faktor yang menjadi konteksnya, ketidaktahuan pemahaman keagamaan dan kemarahan sosial sehingga turut memantik sikap-sikap radikal.

Langkah MUI

Menyikapi fenomena di atas, lantas apa yang dilakukan oleh MUI? Tentu saja MUI menempatkan fenomena di atas sebagai salahsatu *concern*-nya. MUI melihat perlunya implementasi moderasi beragama dengan menggulirkan *wasathiyatul* Islam untuk bisa ditumbuhkan di kalangan masyarakat (Muslim) Tanah Air.

Terdapat 10 prinsip *wasathiyatul* Islam yang terus digelorkan MUI. Prinsip-prinsip itu adalah *tawassuth* (moderasi), *tawazun* (seimbang), *i'tidal* (adil), *tasamuh* (toleransi), *ishlah* (reformis), *ta'awun* (saling tolong menolong), *syuro* (musyawarah), *muwathanah* (cinta tanah air), *musawah* (kesetaraan), dan *qudwah* (keteladanan).

Diketahui, MUI mempunyai dua peran kehidupan keagamaan masyarakat, yaitu *khadimul ummah* (pelayan masyarakat) dan *himayatul Ummah* (lembaga perlindungan umat). Melalui dua peran ini, MUI menerbitkan serangkaian pedoman kehidupan keislaman.

Tidak hanya pedoman di situasi normal, MUI juga menerbitkan sejumlah pedoman di situasi pandemi. Ini untuk mempedomani bagaimana kehidupan keagamaan tetap dijalankan dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan mereka.

Terkait tantangan radikalisme keagamaan secara langsung, MUI melalui Komisi Dakwah dan Bidang Dakwah telah membuat Pedoman Dakwah dan Keagamaan. Ini merupakan bagian dari banyak hal yang dilakukan MUI dalam melindungi pemahaman keagamaan masyarakat Indonesia agar terbebaskan dari pengaruh pikiran-pikiran radikal.

Bersamaan dengan itu, sebagai *khadimul ummah* dan *himayatul ummah* sekaligus, MUI mendorong fungsi ideal masjid untuk betul-betul dirawat. Selain sebagai tempat beribadah dan pusat menimba nilai-nilai luhur keagamaan, masjid harus dijadikan pusat perekat kehidupan ummah, penghormatan nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan. Aspek keagamaan dan kebangsaan menjadi satu kesatuan tak terpisah sehingga masjid betul-betul mampu berfungsi sebagai pusat peradaban.

Kebijakan Moderasi Beragama Pemerintah di Masjid

H. Juraidi

Direktur Penerangan Agama Islam, Kementerian Agama RI

KITA telah bersepakat bahwa moderasi beragama merupakan sikap beragama yang kita butuhkan dalam konteks kehidupan keagamaan sekaligus kebangsaan. Pemerintah melalui Kementerian Agama RI sendiri telah merumuskan definisi dan indikatornya. Namun pada kesempatan ini saya ingin membincang bagaimana moderasi beragama diimplementasikan pemerintah di masjid.

Diketahui, masjid merupakan sebuah tempat yang memiliki kedudukan penting bagi kehidupan keagamaan umat Islam. Selain sebagai tempat ibadah seperti shalat, masjid juga menjadi pusat kegiatan komunitas muslim apapun latar belakangnya. Sebutan masjid sebagai Baitullah, rumah Allah, memberikan pemahaman bahwa siapapun orang yang mengaku hamba Allah boleh masuk dan beribadah di dalamnya. Dengan demikian, masjid sebetulnya tempat yang berfungsi mempersatukan ummat. Maka dari itu masjid harus difahami sebagai *public area*, dimana masjid tidak boleh dikuasai kelompok-kelompok tertentu saja.

Oleh karena itu, bermacam-macam kelompok organisasi masyarakat Islam, seharusnya bersatu di dalam masjid. Jamaah dari kalangan Nahdlatul Ulama boleh salat di masjid yang dibangun jamaah Muhammadiyah. Begitu juga sebaliknya. Manakala ada yang mengkhususkan masjid untuk kelompok dia saja, sedangkan orang lain tidak boleh ikut salat berjamaah di dalamnya, itu sangat keliru karena sudah mengkotak-kotakkan masjid sebagai area privat. Pemahaman semacam ini perlu diluruskan.

■ Disarikan dari Webinar Masjid dan Moderasi Beragama, PPIM UIN Jakarta, 5 Februari 2021.

Implementasi Moderasi Beragama di Masjid

Dalam konteks kehidupan beragama sekaligus berbangsa, sekali lagi kita bersepakat pentingnya menerapkan moderasi beragama (*wasathiyah*). Dalam hal ini moderasi beragama difahami sebagai cara berfikir dan berperilaku dalam kehidupan individu dan masyarakat yang didasarkan pada sikap *tawazun* (seimbang) dalam menyikapi suatu keadaan atau perkembangan.

Harapannya, dengan mengetengahkan sikap *tawazun*, pandangan keagamaan yang dipilih tidak berbenturan dengan realitas diri dan masyarakat. Selain itu, pandangan keagamaan demikian juga tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran agama.

Merujuk ke al-Quran sendiri, terdapat banyak ayat di dalamnya yang menunjukkan pentingnya *wasathiyah*. Di antaranya QS al-Baqarah (2) ayat 143, QS al-'Adiyat (100) ayat 5, QS al-Maidah (5) ayat 89, QS al-Qalam (68) ayat 28, dan QS al-Baqarah (2) 238.

Lantas, kebijakan apa yang telah dilakukan pemerintah selama ini dalam mendorong moderasi beragama di lingkungan masjid?

Sejauh ini, pemerintah melalui Kementerian Agama RI telah menerbitkan sejumlah regulasi bidang kemasjidan yang mengatur pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan di dalamnya sejalan dengan visi moderasi beragama. Diantaranya:

- a. Keputusan Menteri Agama RI (KMA) Nomor 394 Tahun 2004 tentang Penetapan Status Masjid,
- b. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor DJ.II/802 Tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid,
- c. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang Standarisasi Imam Tetap Masjid,
- d. Instruksi Dirjen Bimas Islam Nomor KEP./D. 101.1978 Tahun 1978 tentang Tuntunan Penggunaan Pengeras Suara di Masjid, Langgar, dan Mushalla.

Inilah beberapa regulasi yang telah pemerintah terbitkan dalam mendorong moderasi beragama di lingkungan masjid. Pada KMA Nomor 394 Tahun 2004, pemerintah untuk kepentingan pembinaan masjid-masjid telah membuat kategorisasi masjid sendiri seperti masjid negara di ibukota negara, masjid raya di tingkat provinsi, masjid agung di kabupaten/kota, masjid besar di tingkat kecamatan, dan masjid jami' tingkat kelurahan/desa.

Begitu juga Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 802 tahun 2014 tentang Standar Pembinaan Manajemen Masjid. Regulasi ini mengatur tiga aspek manajemen masjid, yaitu *idarrah* (kepengurusan), *imarah* (kemakmuran sesuai fungsi masjid sebagai rumah ibadah dan kegiatan sosial keagamaan), dan *riayah* (bangunan fisik masjid).

Yang lebih penting lagi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 582 Tahun 2017 tentang Standarisasi Imam Tetap Masjid. Ini terkait penentuan imam masjid dimana seorang imam harus memiliki sejumlah kompetensi keagamaan sekaligus kebangsaan sekaligus.

Diantara kompetensi yang harus dimiliki seorang imam berdasar Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 582 yaitu seorang imam harus memiliki kemampuan membaca al-Quran dengan *tartil* dan *tahsin*; memiliki pemahaman fikih salat; memiliki kemampuan memimpin salat, zikir, dan doa; memiliki kemampuan berkhotbah. Selain itu, seorang imam juga harus memiliki kemampuan membimbing umat; memahami problematik umat; dan, memiliki wawasan kebangsaan.

Melihat berbagai kompetensi yang dipersyaratkan, jelas seorang imam sebuah masjid tidak hanya menguasai aspek keagamaan. Lebih dari itu, ia juga harus memiliki kemampuan dalam memahami problematika umat, termasuk yang paling penting memiliki wawasan kebangsaan.

Di luar berbagai aturan tersebut, Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin sendiri menerbitkan sembilan seruan tentang ceramah di rumah ibadah pada 28 April 2017. Seruan ini disampaikan agar ceramah di lingkungan rumah ibadah termasuk masjid juga sejalan dengan semangat menjaga persatuan dan meningkatkan produktivitas bangsa, merawat kerukunan umat beragama, dan memelihara kesucian tempat ibadah. Kesembilan seruan itu antara lain:

1. Disampaikan oleh penceramah yang memiliki pemahaman dan komitmen pada tujuan utama diturunkannya agama, yakni melindungi harkat dan martabat kemanusiaan, serta menjaga kelangsungan hidup dan perdamaian umat manusia,
2. Disampaikan berdasarkan pengetahuan keagamaan yang memadai dan bersumber dari ajaran pokok agama,
3. Disampaikan dalam kalimat yang baik dan santun dalam ukuran kepatutan dan kepantasan, terbebas dari umpatan, makian, maupun ujaran kebencian yang dilarang oleh agama mana pun,
4. Bernuansa mendidik dan berisi materi pencerahan yang meliputi pencerahan spiritual, intelektual, emosional, dan multikultural.

Materi diutamakan berupa nasihat, motivasi dan pengetahuan yang mengarah kepada kebaikan, peningkatan kapasitas diri, pemberdayaan umat, penyempurnaan akhlak, peningkatan kualitas ibadah, pelestarian lingkungan, persatuan bangsa, serta kesejahteraan dan keadilan sosial,

5. Materi yang disampaikan tidak bertentangan dengan empat konsensus Bangsa Indonesia, yaitu: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika,
6. Materi yang disampaikan tidak mempertentangkan unsur SARA (suku, agama, ras, antargolongan) yang dapat menimbulkan konflik, mengganggu kerukunan ataupun merusak ikatan bangsa,
7. Materi yang disampaikan tidak bermuatan penghinaan, penodaan, dan/atau pelecehan terhadap pandangan, keyakinan dan praktek ibadah antar/dalam umat beragama, serta tidak mengandung provokasi untuk melakukan tindakan diskriminatif, intimidatif, anarkis, dan destruktif,
8. Materi yang disampaikan tidak bermuatan kampanye politik praktis dan/atau promosi bisnis,
9. Tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku terkait dengan penyiaran keagamaan dan penggunaan rumah ibadah.

Sebagai seruan tentu saja ini tidak diikuti sanksi jika tidak terpenuhi. Namun jika dipatuhi, saya kira ini akan sangat mendukung usaha kita dalam menciptakan kerukunan dan ketentraman hidup berbangsa dan bernegara.

Demikian beberapa kebijakan yang telah pemerintah ambil dalam mewujudkan moderasi beragama di lingkungan masjid. Harapannya berbagai regulasi ini bisa diikuti dengan baik sehingga bisa menciptakan kehidupan keagamaan dan kebangsaan yang padu dan harmonis. Wassalam.

Moderasi Beragama, Muhammadiyah, dan Hak Perempuan

Alimatul Qibtiyah

Komisioner Komnas Perempuan dan Ketua Lembaga Litbang PP 'Aisyiyah

ARTIKEL ini akan memaparkan beberapa isu penting terkait ormas dan moderasi beragama, yaitu:

- Konsep moderasi beragama,
- Teori toleransi dan islamisme,
- Muhammadiyah dan moderasi beragama,
- Moderasi beragama dan pemenuhan hak perempuan.

Moderasi Beragama

Kata *moderation* berarti "tidak berlebihan" atau "sedang". Kata ini kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi moderasi. Dalam KBBI kata ini didefinisikan sebagai pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Dalam KBBI juga dijelaskan bahwa kata moderasi berasal dari bahasa Latin *moderatio*, yang berarti ke-sedangan-an (tidak kekurangan dan tidak berlebihan).

Sering dikatakan orang bahwa moderasi beragama itu seolah-olah tidak punya pendapat atau *plin-plan*, tidak punya komitmen dan seterusnya. Sebenarnya tidak begitu. Moderasi beragama seharusnya dipahami secara tepat dan komprehensif sebagai berikut. Moderasi beragama:

- Bukan berarti tidak memiliki komitmen
- Tidak mencampuradukkan atau menyamakan semuanya
- Tidak mempertentangkan yang ada dan kepentingan secara biner
- Moderasi lebih berarti komitmen yang kuat dengan keseimbangan (*tawazun*)
- Moderasi mengedepankan tercapainya tujuan bersama

■ Disarikan dari Webinar Ormas, Ulama, dan Moderasi Beragama, Jumat, 22 Januari 2021.

Moderasi beragama tidak mempertentangkan yang ada dan kepentingan secara biner hitam putih. Moderasi beragama seumpama pelangi yang lebih indah daripada *zebra cross*. Orang yang melihat pelangi akan mengalami kekaguman sedangkan orang yang melihat *zebra cross* ketika mau menyebrang bisa takut atau khawatir.

Tidak kalah penting, moderasi bukannya sikap tidak berkomitmen melainkan komitmen yang kuat terhadap keseimbangan (*tawazun*) dengan mengedepankan tercapainya tujuan bersama. Karena itu moderasi beragama memiliki kebijakan toleransi dan kerja sama dalam menyikapi perbedaan.

Teori Toleransi dan Islamisme

Toleransi mencakup tiga unsur sekaligus, mulai dari pemahaman, sikap, hingga perilaku terhadap perbedaan, baik perbedaan agama maupun perbedaan kelompok sosial. Jadi dasarnya adalah pemahaman, kemudian sikap, baru perilaku toleransi. Karena itu saya mengambil teori empat sikap terhadap perbedaan, yaitu:

Pertama adalah sikap anti terhadap perbedaan atau intoleran. Kedua adalah memahami adanya perbedaan tetapi tidak dapat menerima perbedaan (toleransi negatif atau pasif). Kemudian ketiga, memahami dan bisa menerima perbedaan tetapi tidak bersedia mengakomodir dan bekerjasama dengan mereka yang berbeda keyakinan (toleransi aktif). Toleransi aktif itu tidak cukup untuk menegakkan nilai-nilai moderasi beragama karena kita perlu sikap yang keempat, yaitu memahami, menerima, mengakomodasi, bekerjasama dan membantu mereka yang berbeda keyakinan. Sikap ini disebut pluralisme positif.

Moderasi beragama yang menjunjung tinggi toleransi dan kerja sama bertentangan dengan doktrin Islamisme yang karakternya dijelaskan dalam teori Bassam Tibi dan Prof. Noorhaidi sebagai berikut.

BASSAM TIBI (2012)	NOORHAIDI 2013
1. Purification,	1. conservatism,
2. Formalization of religious belief,	2. militant,
3. Anti-democracy,	3. extremism,
4. Anti-system,	4. terrorism.
5. Anti-other religious beliefs,	
6. Anti-western,	
7. Agreement that violent behaviour to achieve their goals.	

Muhammadiyah dan Moderasi Beragama

Berikut adalah poin-poin penting sikap moderasi beragama dari Muhammadiyah:

- Muhammadiyah senantiasa merujuk kepada al-Quran dan sunnah dengan pemahaman yang komprehensif dan mendalam sebagai *manhaj* dalam bidang *aqidah*, ibadah, muamalah, akhlak dan berbagai bidang kehidupan yang lainnya,
- Karena itu Muhammadiyah memandang bahwa kebenaran *manhaji* bersifat subjektif, terbuka untuk dikaji ulang dan bukan merupakan pemahaman tunggal,
- Muhammadiyah memahami dan menghormati perbedaan pemahaman agama baik dalam internal organisasi maupun di luar organisasi *manhaj* Muhammadiyah.

Manhaj Muhammadiyah, sebagaimana banyak disampaikan oleh para tokoh-tokoh Muhammadiyah:

- Sistem pemikiran atau jalan untuk memahami pandangan keislaman menurut Muhammadiyah
- Pemahaman terhadap al-Quran dan sunnah itu dilakukan secara komprehensif, integralistik, independen, tidak terikat dengan aliran teologi, mazhab fikih, dan tarekat sufi manapun.

Oleh karena itu, Muhammadiyah tidak menganut satu mazhab tertentu tetapi bukan berarti anti mazhab. Karena, tradisi Muhammadiyah mencoba untuk mencari landasan-landasan yang paling valid menurut Muhammadiyah. Karena itu:

- Identitas keislaman Muhammadiyah: Islam moderat berkemajuan.

Sedangkan sifat-sifat Islam *wasathiyah* di Muhammadiyah adalah sebagai berikut:

- Bersumber al-Quran dan sunnah *maqbulah*, kemudian menjadikan al-Quran dan sunnah sebagai sumber referensi. Mengembangkan *ijtihad*, pendekatan Bayani, Burhani, dan Irfani. Tajdidnya pemurnian dan dinamisasi. Juga toleransi dan terbuka,
- Paham *aqidah* dan ibadah: pemurnian bebas dari *syirik*, *khurafat* dan *bid'ah*,
- Akhlak mengikuti Rasulullah tetapi norma bisa kontekstual (dalam berpakaian tidak bercadar; tidak harus berjenggot). Menjaga silaturahmi dan *ukhuwah* seluruh kalangan dan menolak Takfiri (paham mengkafirkan).

Indonesia sebagai negara yang menjadikan Pancasila sebagai dasar negara itu dilihat sebagai *Darul Ahdi wa Syahadah*. Artinya Indonesia itu negara yang sudah Islami, karena semua sila Pancasila sejalan dengan ajaran Islam. Muhammadiyah tidak berpolitik praktis, tapi tidak anti partai. Mendorong partai agar tetap menjalankan misinya dengan baik. Tidak anti pemerintah tapi akan memberikan kritik jika dinilai kurang sesuai.

Yang penting dicatat adalah bahwa moderasi beragama dalam Muhammadiyah adalah menolak paham takfiri (mudah mengkafirkan kelompok muslim yang berbeda).

Moderasi Beragama dan Pemenuhan Hak Perempuan

Argumen terkait pentingnya topik ini adalah pemahaman dan keyakinan yang tidak moderat-progresif itu menghalangi pemenuhan hak konstitusional perempuan. Jadi kalau kita tidak menerapkan moderasi beragama, maka hak konstitusional perempuan bisa tercegas untuk dipenuhi.

Moderasi beragama juga penting untuk melindungi perempuan dari keterjebakan dalam kekerasan ekstrem. Berikut adalah data keterlibatan perempuan dalam kekerasan ekstrem di Indonesia:

- Tahun 2017 ada 420 returnees dari Syiria (ISIS), and 70% Perempuan dan anak (Ismail, 2018), paling tidak ada 45 TKW yang terlibat dalam ISIS (Harry Siswoyo, 2017).
- Ada 671 warga Indonesia yang bergabung ke ISIS dan 147 di antaranya perempuan (Setyo Wasisto, 2017).

Mengapa perempuan terlibat dalam kekerasan ekstrem? Menurut Clay Shirky (2009), kekuatan media visual yang menekankan aspek perasaan daripada rasional sangat mempengaruhi penonton. Penyebab lainnya adalah penggunaan dalih persaudaraan dan Muslim terdzolimi untuk menarasikan pengaruh provokasi tertentu.

Kesimpulan

- Keberagaman dari berbagai macam aspek adalah sebuah keniscayaan dan harus disikapi dengan sikap pluralis-positif,

- Membangun kerukunan intra dan antarumat beragama diperlukan pluralisme positif, bukan sekadar toleransi aktif,
- Upaya yang terus-menerus untuk mensosialisasikan nilai-nilai moderasi beragama perlu dikuatkan dan dimunculkan secara efektif dan intensif,
- Pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan akan dapat dipenuhi secara maksimal jika nilai-nilai moderasi beragama diimplementasikan.

Nahdlatul Ulama dan Moderasi Beragama

Maria Ulfah Anshor

Komisioner Komnas Perempuan dan Dosen di UNUSIA

ARTIKEL ini akan menggunakan perspektif NU serta pengalaman saya di NU dalam menyajikan topik terkait ormas, ulama, dan moderasi beragama. Saya sudah 10 tahun memimpin dan berkecimpung di NU.

Peran ulama dalam pembinaan moderasi beragama (Islam) sangat menonjol dalam tiga babak sejarah Islam Nusantara. *Pertama* pada masa bagaimana Islam itu disemai di bumi Nusantara di antaranya oleh Walisongo. Ketika itu, dengan media wayang yang terkenal metode dakwah mereka yang luar biasa berhasil mengubah masyarakat yang tadinya mayoritas Hindu kemudian menjadi mayoritas Muslim. Dakwah mereka menggunakan pendekatan dan metode yang penuh budaya, menggunakan kearifan lokal, penuh perdamaian dan moderat.

Kedua, babak ketika para ulama mentransformasi doktrin-doktrin Islam ke dalam berbagai praktek dan keyakinan masyarakat lokal serta kearifan lokal, sehingga Islam menjadi mudah diterima dan tersebar luas di tengah masyarakat. Ini terlihat misalnya dari transformasi padepokan menjadi pondok pesantren. Seperti dikatakan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), pondok pesantren itu jangan dikira berasal dari Arab atau bermula dari Islam. Kata pondok memang berasal dari kata *funduk* bahasa Arab yang berarti hotel. Tetapi pondok pesantren di Nusantara secara budaya semula berasal dari padepokannya ahli agama atau tokoh-tokoh agama Hindu. Para ulama bergaul dengan mereka, tinggal dan hidup bersama dalam satu padepokan. Kala itu mereka yang belajar di padepokan disebut *santri*, yang sekarang istilahnya menjadi santri di pondok pesantren.

■ Disarikan dari Webinar *Ormas, Ulama dan Moderasi Beragama*, Jumat, 22 Januari 2021.

Ketiga, babak masa pembentukan dasar negara yaitu Pancasila. Para ulama yang duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 berhasil ikut menyepakati Pancasila sebagai dasar negara. Babak ini menunjukkan betapa para ulama itu mempraktekkan Islam moderat dengan mengedepankan komitmen kebangsaan.

Satu benang merah yang menonjol dari tiga babak sejarah itu adalah pemahaman dan penguasaan para ulama terhadap teks-teks keagamaan sekaligus konteks budaya dan situasi masyarakat yang didakwahi. Penguasaan teks dan konteks itulah yang menjadi dasar keilmuan dan keluwesan akhlak mereka dalam membumikan Islam *rahmatan lil alamin* di bumi Nusantara.

Ulama-ulama demikian termasuk para ulama yang disebut sebagai pewaris para Nabi, yang mengedepankan Islam sebagai pelita akhlak mulia dan misi kemanusiaan. Mereka mewarisi ilmu dan akhlak mulia para Nabi dan selalu berupaya menghidupkannya dalam formula kearifan lokal yang menghargai keragaman budaya dan agama. Mereka menghayati keragaman sebagai sunatullah dan ujian hidup yang tak bisa dihindari, sesuai dengan tuntunan Al-Maidah ayat 48.

Nilai-Nilai *Wasathiyah* Islam

MUI telah mengeluarkan 10 prinsip nilai-nilai *wasathiyah* Islam yaitu: Pertama adalah nilai *tawasuth* (QS al-Baqarah (2) ayat 143) atau sikap tengah atau moderat yang tidak berlebih-lebihan dalam segala hal. Kemudian, yang kedua *tawazun* (QS al-Hadid (57) ayat 25) adalah sikap berimbang dalam melakukan pertimbangan dalam pertimbangan-pertimbangan apapun. Ketiga, *i'tidal* (QS al-Maidah (5) ayat 8) sikap tegak lurus atau *istiqomah* dalam menjalankan apa yang diperintahkan syariat agama dalam kehidupan keluarga maupun sosial dan juga tentu di dalamnya adalah dalam bernegara dan berbangsa. Keempat adalah *tasamuh*, sikap melihat keragaman bukan sebagai sumber konflik melainkan kekayaan dan rahmat. Kemudian yang kelima adalah *musawah* atau egaliter dalam relasi kemanusiaan dengan siapapun apapun agama dan golongannya tanpa diskriminasi. Kemudian nilai yang keenam adalah musyawarah atau proses demokratis dalam seluruh proses pengambilan keputusan. Kemudian yang ketujuh adalah *ashlah* atau reformasi. Nilai yang kedelapan adalah *aulawiyah* atau mendahulukan hal-hal prioritas. Nilai kesembilan adalah *tathawwur* atau dinamis dan inovatif, dan nilai yang kesepuluh adalah *tahadthur* atau berkeadaban.

Komitmen Kebangsaan NU

Kemudian saya memberikan contoh komitmen kebangsaan di ormas NU sebagai berikut:

Contoh Komitmen Kebangsaan Ormas (NU)

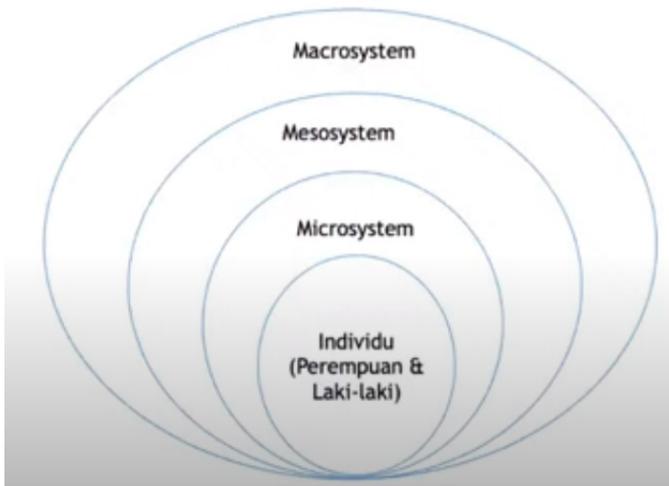
- Indonesia sebagai negara Islam (darul Islam), bukan negara damai (daar al sulh) dan negara perang (daar al harb) —>Keputusan Muktamar XI tahun 1938 di Banjarsin.
- Resolusi jihad (1945)
- Pancasila sebagai asas tunggal (Muktamar di Situbondo, tahun 1984)

Jauh-jauh hari sebelum kemerdekaan, NU telah memancarkan tonggak komitmen kebangsaan. Dalam Muktamar ke-11 tahun 1938 NU telah menyepakati Indonesia sebagai negara Islam atau Darul Islam, bukan negara damai atau negara perang. Kiai Wahid Hasyim kemudian menyetujui bahwa Pancasila sebagai dasar negara karena Pancasila memiliki semangat syariat.

Kemudian pada 1945 NU juga mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajah ketika setelah era kemerdekaan Indonesia, Belanda ingin merebut kembali Indonesia. Dalam resolusi jihad itu disebutkan bahwa bagi warga atau umat Islam yang radiusnya kurang dari 94 km maka jihad hukumnya adalah *fardu ain*. Sedangkan untuk umat Islam yang radiusnya di atas 94 km maka jihad merupakan *fardu kifayah*. Kemudian pada Muktamar 1984 NU juga termasuk ormas yang menyatakan Pancasila sebagai asas tunggal.

Penguatan Moderasi Beragama

Perlu upaya penguatan moderasi beragama secara sistemik, seperti digambarkan dalam grafik ini:



Infografik ini menunjukkan bahwa penguatan moderasi beragama mesti dimulai dari agensi semua individu yang bersikap *wasathiyah*. Yang kedua peningkatan akses dan kualitas layanan dengan mengarusutamakan *wasathiyah*. Kemudian yang ketiga dan keempat adalah peningkatan peran orang tua dan keluarga, guru dan anggota masyarakat, sekolah, pesantren dan dunia usaha untuk bersikap *wasathiyah*.

Ulama dan Pandangan Negara Bangsa

Najib Kailani

Peneliti Pusat Pengkajian Islam, Demokrasi dan Perdamaian, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ARTIKEL ini akan menyampaikan temuan riset tahun 2018 terkait persepsi ulama tentang negara bangsa. Tujuan riset ini adalah untuk memetakan pandangan ulama dari berbagai latar belakang sosial politik keagamaan yang berbeda terkait format negara bangsa. Jadi, konsep dari riset ini memang semacam ingin melihat apakah pandangan ulama mengenai negara bangsa itu masih seperti yang dibayangkan dalam diskursus akademik yang panjang, misalnya keterlibatan para ulama di dalam merumuskan pondasi kebangsaan. Atau juga bagaimana perubahan cara pandang para ulama yang dulu mungkin sebagian ingin mendirikan negara Islam, atau memilih Pancasila lalu belakangan ikut dalam upaya penerapan syariat Islam, dan seterusnya.

Profil Responden

Riset ini berskala nasional. Survei dilakukan di 15 kota di Indonesia dan kota dibagi dalam tiga kategori, Pertama, kota metropolitan termasuk Jakarta, Medan, Bandung, Makassar, dan Surakarta. Kedua, kota dengan dominasi populasi ulama atau kuatnya tradisi Islam, misalnya Banda Aceh, Padang, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Ketiga, kota dengan minoritas yang khas, misalnya Pontianak, Denpasar, Manado, Kupang, dan Ambon.

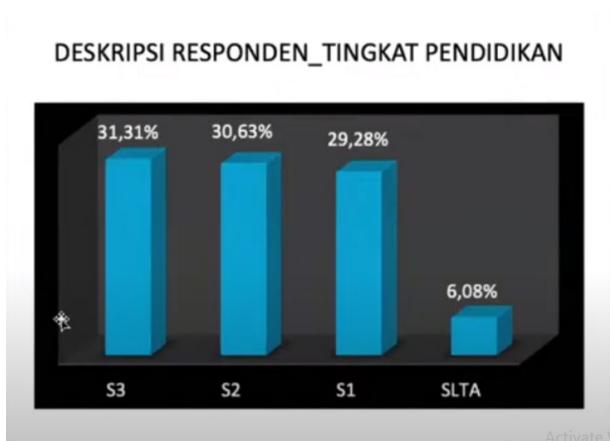
Di setiap kota kita melakukan survei kepada 30 orang ulama. Kita melakukan upaya *proportionate stratified random sampling*, jadi survei ini berbasis kelompok. Total responden adalah 450 ulama. Ulama perempuan sebanyak 23,78 persen, sedangkan ulama laki-laki sebanyak 76,22 persen.

■ Disarikan dari Webinar Ormas, Ulama, dan Moderasi Beragama, Jumat, 22 Januari 2021.

Responden yang berafiliasi ke NU sebanyak 22,22 persen, yang berafiliasi ke Muhammadiyah sebanyak 15,78 persen, yang berafiliasi ke Ahmadiyah dan Syiah sebanyak 5,33 persen, dan lain-lain:



Yang menarik adalah tingkat pendidikan. Sebanyak 31,31 persen adalah lulusan S3. Sebanyak 31,63 persen adalah lulusan S2, dan sebanyak 29,28 persen adalah lulusan S1. Hanya 6,08 persen saja yang lulusan SLTA. Jadi secara umum mereka *well-educated*.



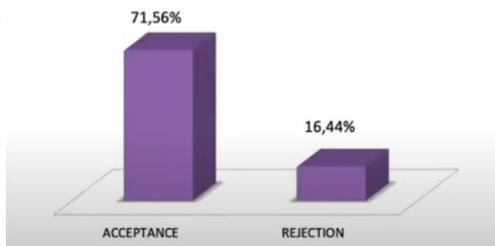
Kemudian kami mengambil 10 informan, jadi ada pendalaman lagi dari hasil survei. Yang kita lakukan dalam survei ini adalah pengukuran sikap ulama terhadap sejarah bangsa, dan kita mengembangkan riset ini dari 4 dimensi, yaitu pro sistem, antikekerasan, toleransi, dan pro kewargaan.

Kita mengukur sikap ulama itu dalam empat dimensi tadi. Jadi, ada karakteristik apakah para ulama itu menerima negara bangsa atau menolak. Lalu yang menerima kita karakteristikkan ke dalam empat kategori, yaitu progresif, inklusif, moderat, dan konservatif.

Temuan Survei

Penerimaan ulama terhadap negara bangsa itu tinggi, yaitu sebanyak 71,56 persen menerima negara bangsa. Sedangkan yang menolak sebanyak 16,44 persen. Meskipun terkesan sedikit, tetapi 16,44 persen itu signifikan. Nanti kita akan melihatnya secara detail, penolakannya itu dalam isu apa. Namun, yang paling krusial adalah penolakan terhadap pro kewargaan, yakni isu kesetaraan atau keadilan terhadap hak-hak agama minoritas dan juga kelompok minoritas.

HASIL SURVEI



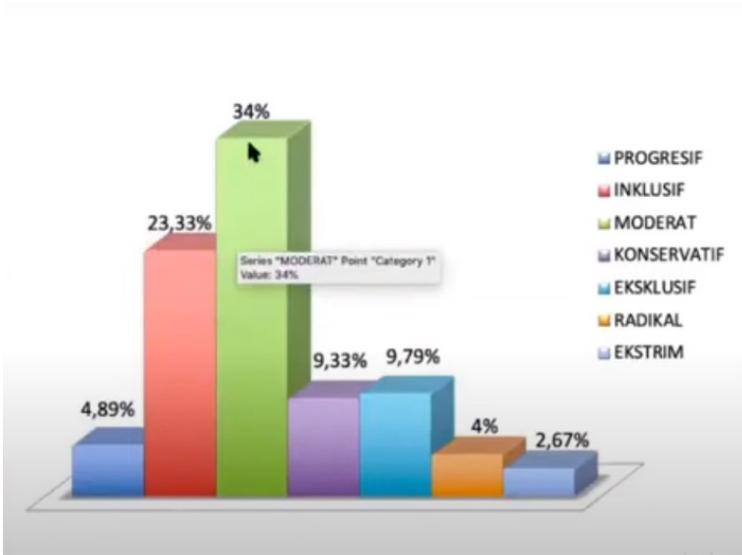
+ KARAKTERISTIK ULAMA

Karakteristik	Sub Karakteristik	DIMENSI			
		Anti Kekerasan	Pro Sistem	Toleransi	Pro Kewargaan
Acceptance	Progresif	✓	✓	✓	✓
	Inklusif	✓	✓	✓	✓
	Moderat	✓	✓	✓	✓
	Konservatif	✓	✓	✓	-
Rejection	Eksklusif	✓	✓	-	-
	Radikal	✓	-	-	-
	Ekstrim	-	-	-	-
Tidak Teridentifikasi	Tidak Teridentifikasi				

Apabila kita lihat tanda centangnya, sikap ulama yang progresif maupun yang inklusif sama terhadap pro kewargaan. Bedanya, yang progresif itu pro kewargaan dan juga aktif mempromosikan isu kewargaan, sedangkan ulama yang inklusif pro kewargaan tapi pasif.

Sedangkan yang moderat itu cenderung toleran atas isu-isu hubungan antar umat beragama tapi tidak menerima isu perbedaan intra agama.

Selanjutnya, ulama yang menolak negara bangsa dikategorikan ke dalam tiga karakteristik, yaitu eksklusif, radikal, dan ekstrim. Mereka antikekerasan dan pro sistem tetapi tidak toleran dan tidak pro kewargaan. Sementara, yang radikal itu anti kekerasan tapi tidak pro sistem, tidak toleran dan tidak pro kewargaan, dan seterusnya.



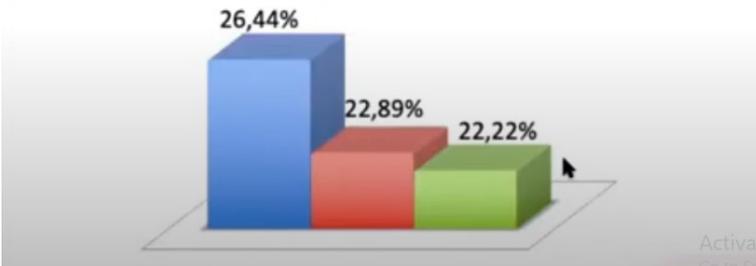
Grafik ini menunjukkan bahwa ulama yang dikategorikan progresif sebanyak 4,89 persen, ulama yang inklusif sebanyak 23,33 persen, ulama yang moderat tinggi yaitu 34 persen. Karakter moderat itu antikekerasan, pro sistem, toleran tetapi lemah dalam mempromosikan pro kewargaan. Sedangkan ulama yang konservatif sebanyak 9,33 persen, yang eksklusif sebanyak 9,79 persen, yang radikal itu 4 persen dan yang ekstrim 2,67 persen. Meskipun kelompok ulama yang ekstrim tidak terlalu banyak, tetapi tetap signifikan karena kita mengambil representasi dari 15 Kota.

Data menarik lainnya adalah data yang menunjukkan penerimaan ulama atas negara bangsa itu paling banyak terjadi di kota dengan minoritas muslim, yaitu sebanyak 26,44 persen. Sedangkan penerimaan ulama di kota metropolitan sebanyak 22,89 persen. Dan yang paling rendah adalah penerimaan ulama di kota dengan arus utama muslim, yaitu sebesar 22,22 persen. Berikut grafiknya:

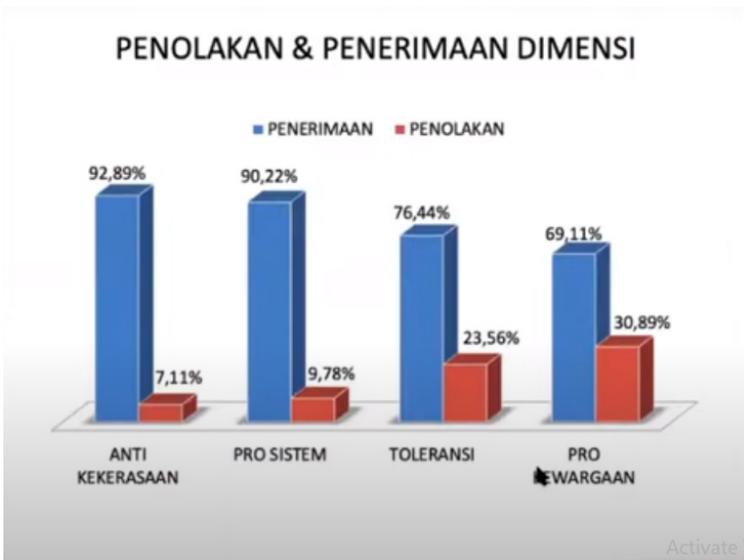


Tingkat Penerimaan terhadap Konsep Negara-negara

- Kota dengan minoritas Muslim
- Kota metropolitan
- Kota arus utama Muslim



Proporsi penolakan dan penerimaan terhadap empat dimensi adalah sebagai berikut:



Penerimaan paling tinggi adalah terhadap anti kekerasan yaitu 92,89 persen, lalu disusul terhadap pro sistem yaitu 90,22 persen. Penolakan

yang paling besar adalah terhadap pro kewargaan yaitu 30,89 persen, lalu terhadap toleransi yaitu 23,56 persen. Sedangkan yang patut *dihighlight* dari temuan ini adalah problem utama memang ada di isu pro kewargaan, yaitu menyangkut keadilan terhadap agama minoritas dan kelompok minoritas.

Hal ini juga terlihat dari sikap umum responden terhadap pertanyaan terkait prinsip kesetaraan politik warga negara:



Ketika pertanyaan tersebut ditanyakan, mayoritas atau sebanyak 37,56 persen responden tidak setuju jika dikatakan prinsip kesetaraan politik seluruh warga negara itu tidak sesuai atau bertentangan dengan konsep *dzimmi* dalam *fiqh* terkait pembedaan antara muslim dan non muslim. Dan mayoritas kedua (30,44 persen) juga tidak bersikap. Hanya 24,67 persen responden yang setuju.

Temuan Pendalaman Wawancara

Penerimaan terhadap negara bangsa itu menyangkut isu apa saja? Kita menemukan misalnya isu demokrasi atau Pancasila sebagai *the only game in town* terutama setelah pelarangan HTI. Di sini ditemukan dasar alasan kenapa menerima Pancasila dan menolak HTI:

"Kalau ada orang yang saat ini ngotot ingin Khilafah atau ganti Pancasila atau UUD itu orang tidak cerdas, seperti HTI itu bunuh diri dan mati betul kan? Menurut saya Pancasila saat ini tidak mungkin diganti."

“Islamisasi sistem kita menjadi pilihan yang realistis daripada menggantinya dengan sistem yang lain.” (Ini biasanya menonjol di Makassar, Jakarta, Medan, dan Bandung). Jadi, alih-alih berupaya untuk mengganti negara dengan negara Islam, para ulama ini mengajukan gagasan Islamisasi.

Dalam wawancara kami juga menemukan reservasi, yaitu sikap menerima tetapi dengan syarat. Reservasi itu misalnya terkait yang mereka sebut sebagai “keadilan proporsional.” Pemahaman mengenai keadilan yang proporsional (atau keadilan didasarkan pada komposisi jumlah) menyebabkan reservasi kewargaan dalam bingkai mayoritas-minoritas. Hal ini menjelaskan mengapa prosentase penerimaan terhadap pro kewargaan itu paling rendah. Misalnya:

“Secara konseptual pemimpin non-Muslim tidaklah menjadi penghalang bagi seseorang untuk menjadi pemimpin. Sekalipun demikian banyak ulama berpandangan seharusnya di daerah yang mayoritas penduduknya muslim, pemimpinnya harus muslim.”

Rekomendasi

1. Mendorong isu-isu kewargaan dan toleransi menjadi bagian integral dalam diskursus keagamaan ulama.
2. Memasukkan materi kewargaan dan toleransi dalam kurikulum pendidikan keulamaan baik pada lingkup pesantren maupun pendidikan tinggi.
3. Mendorong gagasan Islam sipil, yaitu artikulasi Islam yang terkait dengan nilai-nilai demokratis sebagai paradigma berpikir keulamaan di dalam institusi-institusi keulamaan seperti MUI, pesantren, perguruan tinggi Islam, dan organisasi sosial keagamaan Islam.

Bagian 6

**Politik Identitas dan Polarisasi
Keagamaan di Dunia Maya**

Politik Identitas dan Moderasi Beragama

Burhanuddin Muhtadi

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia

BEBERAPA temuan yang akan saya sampaikan menunjukkan politik identitas itu marak justru di provinsi atau kota yang lebih heterogen ketimbang yang homogen. Kalau selama ini misalnya ada asumsi atau temuan bahwa jaringan *social bridging* (yang terbuka dengan kelompok-kelompok luar yang berbeda) itu lebih memfasilitasi individu untuk lebih “pluralis” atau lebih “inklusif” ketimbang jaringan *social bonding* (yang tertutup), maka kita asumsikan di wilayah yang heterogen harusnya kemungkinan terjadi relasi *bridging* antarumat beragama itu lebih besar. Tetapi data yang saya miliki justru menunjukkan di wilayah di mana kemajemukan agama dan etnik itu berada, di situlah politik identitas semakin besar dalam pengertian politik elektoral. Mengapa terjadi begitu?

Definisi Politik Identitas

Saya mulai dari definisi politik identitas. Saya setuju bahwa istilah ini terlalu mudah untuk diperdebatkan. Tapi secara umum ada dua macam politik identitas. Ada politik identitas dalam pengertian inklusif, ada politik identitas dalam pengertiannya eksklusif. Politik identitas yang inklusif diperbolehkan bahkan disarankan menjadi satu mobilisasi politik yang didasarkan pada kesamaan identitas, baik primordial maupun kelas. Untuk kepentingan menaikkan partisipasi atau representasi dari kelompok yang secara politik atau ekonomi termarjinalkan, politik identitas justru diharuskan. Misalnya kelompok gender, feminis, atau kelompok buruh yang seringkali termarjinalkan di banyak tempat. Mobilisasi politik identitas untuk tujuan *inklusivitas* itu justru baik.

■ Disarikan dari Webinar 16: Politik Identitas dan Moderasi Beragama, Jumat 11 Desember 2020.

Tetapi kalau di suatu wilayah atau negara misalnya suatu kelompok sudah mayoritas dan syarat politik atau ekonominya pun sudah baik sesuai dengan proporsi mayoritasnya, maka pertanyaannya adalah seberapa etis atau seberapa bagus politik identitas itu dimobilisasi.

Di beberapa wilayah politik identitas terbukti berpengaruh terhadap perilaku politik. Lipset dan Rokkan dalam bukunya misalnya mengatakan ada korelasi signifikan antara afiliasi keagamaan dengan dukungan atas partai-partai konvensional di Eropa. Samuel Barnes juga menemukan bukti hubungan agama dengan perilaku pemilih di Italia. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan Indonesia?

Kapan Politik Identitas Bekerja?

Saya memiliki beberapa temuan hasil kompilasi dari data survei pilkada di banyak tempat yang sempat dipresentasikan di Oxford. Saya kumpulkan survei-survei pra pilkada dari wilayah-wilayah yang secara primordial terbelah atau setidaknya komposisi agama atau etniknya tidak terlalu timpang. Misalnya di Jakarta muslim itu mayoritas (85 persen), tapi secara etnik tidak ada satu pun etnik yang mayoritas. Etnik Jawa misalnya sekitar 30 persen Jawa dan Betawi sekitar 28 persen. Jadi secara etnik terbelah (imbang). Di Sumatera Utara, Muslim merupakan mayoritas (sekitar 63 persen), tetapi proporsi non-muslim juga cukup besar. Di sana dari sisi etnik juga tidak ada yang mayoritas. Demikian juga di Kalimantan Barat, Sulawesi Utara dan Maluku. Jadi saya temukan komposisi etnis dan agama yang relatif tidak terlalu timpang. Temuan utamanya seperti: ketika komposisi agama atau etnis itu terlalu timpang di mana satu agama tertentu begitu dominan, maka di situ politik identitas tidak bekerja. Tetapi di satu wilayah di mana komposisi agama atau etnik begitu terpolarisasi atau minimal tidak terlalu timpang, maka tanpa harus ada 212 pun pasti ada politik identitas. Begitulah data umumnya.

Di level nasional sebelum pemilu 2019, politik identitas secara umum tidak bekerja. Tetapi di tingkat lokal ternyata ada variasi. Mengapa politik identitas tidak bekerja di tingkat nasional? Di tingkat nasional dari sisi dimensi Jawa terlalu dominan. Ada 41 persen warga Indonesia yang terafiliasi dengan Jawa. Kemudian Sunda sebagai etnik terbesar nomor 2 ada sekitar 16 persen. Etnik lain kecil-kecil. Sementara etnik non Jawa tidak membentuk identitas yang bersifat tunggal. Pada Pilpres 2009 ada Jusuf Kalla-Wiranto yang mencoba mengobarkan semangat politik identitas ketika kampanye. Keduanya menyebut sebagai pasangan

Nusantara, karena Jusuf Kalla Bugis dan Wiranto Jawa, dan keduanya menyebut bahwa lawannya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono-Budiono sebagai pasangan “pilkada”, karena keduanya berasal dari Jawa Timur. Tetapi, apakah itu bekerja? Tidak. Di Tanah Datar, kampung istrinya Jusuf Kalla di Sumatera Barat, Pak Susilo Bambang Yudhoyono justru mendapat perolehan lebih dari proporsi nasional. Karena apa? Karena orang Sumatera Barat tidak melihat Bugis sebagai representasi non-Jawa, tetapi Bugis ya Bugis, Minang ya Minang, Madura ya Madura. Jadi ketika ada etnik yang terlalu dominan (Jawa), politik identitas (berdasar etnik) tidak bekerja.

Di tingkat nasional bila politik identitas dikaitkan dengan agama, kita tidak punya pengalaman di mana pilpres diikuti oleh calon presiden atau wakil presiden yang beda agama. Tapi kita punya pengalaman pilpres yang diikuti oleh capres dan cawapres yang diasosiasikan lebih saleh atau keberagamaannya lebih intens. Taruh intensitas keberagamaan capres atau cawapres itu berpengaruh. Maka kalau berpengaruh, seharusnya ketika pilpres 2004, yang masuk putaran kedua bukan Susilo Bambang Yudhoyono atau Megawati, karena keduanya dianggap dari segmen abangan, keduanya juga dianggap kurang saleh, tetapi setidaknya keduanya Islam. Beda misalnya dengan Amien Rais atau Hamzah Haz, keduanya dari partai Islam dan dari sisi keagamaan jauh lebih saleh. Tetapi di tahun 2004 justru dua orang santri ini gagal masuk putaran kedua. Jadi di pilpres, orang melihat agama bukan dari kesalehannya. Joko Widodo, misalnya, meskipun digempur dengan isu PKI, tapi setidaknya dia Islam. Dominasi Islam dan Jawa di tingkat nasional itu membuat efek politik identitas bisa dinetralisasi.

Tetapi itu tidak terjadi di tingkat lokal. Di Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, dan Maluku (di mana komposisi agama atau etnik itu terbelah secara cukup imbang alias tidak timpang), efek agama dan etnik sebagai bahan bakar politik identitas itu bekerja. Dan apabila dibandingkan antara etnik dan agama, agama jauh lebih kuat.

Jadi mengapa di wilayah yang lebih heterogen, justru dampak politik identitas lebih besar. Padahal seharusnya di tempat yang lebih heterogen, orang lebih terekspos untuk punya teman penganut agama lain (jaringan sosial *bridging*). Ini pertanyaan yang mungkin kita bisa ajukan untuk studi berikutnya.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana apabila sama-sama Islam? Politik identitas itu dinamis. Tahun 2007 dan 2012 di Jakarta tidak ada

calon gubernur yang beragama Kristen. Ada Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) maju sebagai calon wakil gubernur berpasangan dengan Joko Widodo di tahun 2012. Tetapi dia tidak maju sebagai calon gubernur saat itu. Kita tes dengan regresi. Hasilnya, agama tidak signifikan dalam menentukan siapa yang terpilih di Jakarta tahun 2007 dan 2012. Tapi etnik *significantly perfect*. Mengapa demikian? Karena ketika kedua calon gubernur itu agamanya sama, pemilih itu mencari identitas primordial yang lain di luar agama. Tahun 2017 berbeda. Ahok yang mengalami atau punya *label identity*, Kristen dan China, maju di suatu provinsi yang 85 persen Muslim. Dan saat yang sama tutur kata Ahok tidak bisa dikendalikan, muncullah insiden al-Maidah yang kemudian semua efek tenggelam oleh efek agama.

Agama Lebih Kuat Ketimbang Etnik

Secara umum, apabila ingin dibandingkan dari sekian banyak wilayah, agama itu lebih kuat dalam menentukan efek terhadap perilaku elektoral di tingkat lokal, terutama di wilayah yang komposisi agama atau etnisnya terbelah secara primordial. Misalnya di Kalimantan Tengah (Kalteng), kalau ada calon non-Muslim, sekitar 38 persen warga Kalteng tanpa harus ada mobilisasi semacam 212, mereka itu dengan sendirinya memilih calon yang Kristen. Sugianto misalnya, 5 tahun yang lalu dihantam serangan yang luar biasa karena rekam jejaknya juga buruk. Tapi ketika *head-to-head* melawan Willy yang non-Muslim, sebagian besar pemilih Muslim akan memilih Sugianto.

Kasus yang paling tragis adalah di Medan. Saya memiliki pengalaman langsung. Beberapa tahun lalu saya dikontak oleh Sofyan Tan. Ia ingin disurvei terkait peluangnya di putaran kedua. Waktu itu, apabila tidak ada calon yang mendapatkan 30 persen suara, maka harus masuk ke putaran kedua. Di putaran pertama, ada banyak calon. Di putaran kedua, hanya ada dua calon yang mendapat perolehan teratas pertama dan kedua, tetapi tidak mencapai 30 persen. Pertama adalah Rahudman, walikota PLT yang terkena kasus korupsi, melawan Sofyan Tan yang waktu itu kita kenal sebagai tokoh Bhinneka. Sofyan Tan sendiri adalah seorang Tionghoa. Ia punya sekolah Bhinneka di Medan, jadi investasi sosial politik yang luar biasa besar. Ketika meminta survei, saya langsung bilang ke Sofyan Tan, lebih baik tidak usah survei. Karena komposisi di Medan mayoritas muslim. Meskipun tidak terlalu berdominan. Dan betul, meskipun Sofyan Tan punya *track record* yang baik, Rahudman yang waktu itu tersangka korupsi dan keluarganya terkena beberapa hal

yang tidak baik terkait narkoba, Rahudman menang telak di kota Medan. Setelah menang, Rahudman kemudian masuk ke KPK, masyarakat Muslim memilih Rahudman, sedang masyarakat non-Muslim memilih Sofyan Tan.

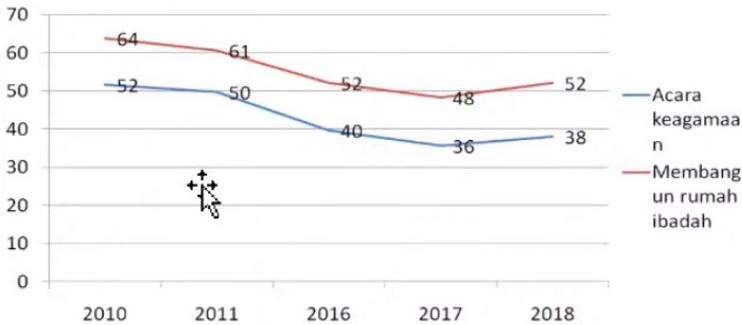
Bagaimana jikalau agama beberapa calon itu sama, etniknya juga sama? Apa yang mau dimainkan? Beberapa kasus menunjukkan hal yang menarik. Misalnya kasus pilkada Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Mereka sama-sama Kristen, sama-sama Minahasa. Kristennya juga sama. Tetapi itu tidak membuat calon gubernur kehilangan kreativitas untuk memobilisasi basis primordial. Apa yang mereka mobilisasi? Asal wilayah. Jadi Minahasa sebagai etnik itu ada Minahasa Utara, Minahasa Selatan. Jadi calon yang berasal dari wilayah tertentu akan memobilisasi basisnya. Karena tidak ada basis primordial yang dapat dimobilisasi. Bahkan ada cerita menarik, ada seorang calon gubernur yang menggandeng calon wakil gubernur perempuan muslim yang memakai jilbab. Ketika kampanye di Manado yang mayoritas Kristen, mereka diarak di atas mobil. Calon wakil gubernurnya mengenakan jilbab. Cawagub itu sudah sempat mengeluarkan kepalanya dari atas mobil, tapi beberapa saat kemudian dimasukkan kembali (kepalanya) ke dalam mobil. Karena khawatir agama si calon wakil gubernur itu akan diketahui oleh warga Manado yang mayoritas Kristen.

Politik Identitas dan Intoleransi

Kemudian apa kaitannya dengan moderasi beragama? Islam moderat itu Islam *wasathiyah*. *Wasathiyah* artinya *tawassuth* dan *tawazun* (sikap moderat dan berimbang). Ini pengertian secara etimologis. Secara maknawi Islam moderat adalah cara pandang, sikap perilaku (keberagamaan) yang selalu mengambil posisi tengah, dan indikatornya adalah nasionalisme, toleransi, dan anti kekerasan. Lalu pertanyaannya apa efek politik identitas yang biasanya berkaitan dengan populisme. Populisme di Indonesia, seperti dikatakan Azyumardi, satu sisi dalam mata uang yang sama dengan politik identitas karena populisme yang muncul di Indonesia umumnya berbasis politik identitas. Bagaimana efek politik identitas terhadap kondisi toleransi yang dijunjung tinggi oleh Islam moderat? Berikut data hasil surveinya:

Tren Intoleransi Religius-Kultural (%)

Apakah Ibu/Bapak keberatan atau tidak keberatan JIKA: Orang non-Muslim mengadakan acara keagamaan/kebakatian di daerah sekitar sini? Orang non-Muslim membangun tempat peribadatan di sekitar sini? ... (% yang menjawab "Keberatan") (Base: Responden Muslim)



Sumber: LSI (2010, 2011, 2017, 2018), Wahid Institute-LSI (2016)

Lembaga Survei Indonesia
AKURAT, TERPERCAYA, BERPENGARUH

12

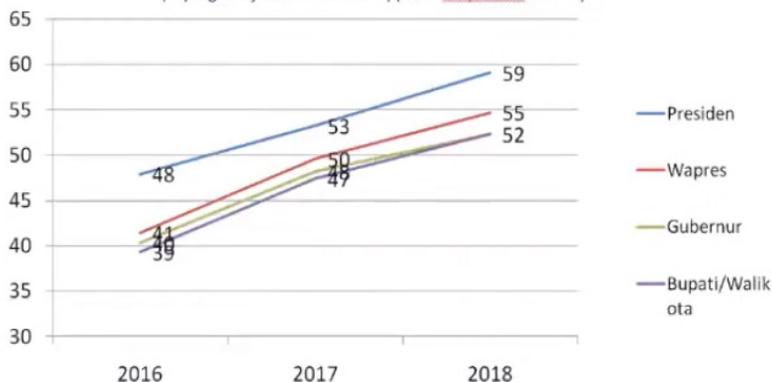
Activate
Go to Seti

Grafik ini menunjukkan tren intoleransi yang terus menurun sebelum pilkada DKI Jakarta, namun intoleransi kemudian meningkat setelah pilkada DKI 2017. Garis warna biru adalah keberatan orang Islam jika non muslim membangun rumah ibadah. Garis merah adalah keberatan orang Islam jika non-Muslim membuat acara keagamaan. Data 2016 adalah temuan survei 5 bulan sebelum aksi 212. Kesimpulannya, momentum elektoral pilkada DKI Jakarta yang memobilisasi politik identitas dan punya efek secara nasional, membuat tren intoleransi yang awalnya menurun jadi meningkat. Pertanyaannya, apakah efek ini lebih kuat dibandingkan jaringan sosial (pertemanan *bridging* atau *bonding*)? Ini yang harus diteliti lagi.

Lagi-lagi ada pola yang harus diwaspadai terkait dengan aksi 212, yang meningkatkan kembali pendulum intoleransi. Data hasil survei menunjukkan semakin banyaknya warga Indonesia yang intoleran atau keberatan terhadap calon pemimpin yang non-Muslim pasca terjadinya aksi 212 dan pilkada DKI 2017. Berikut grafiknya:

Tren Intoleransi Politik (%)

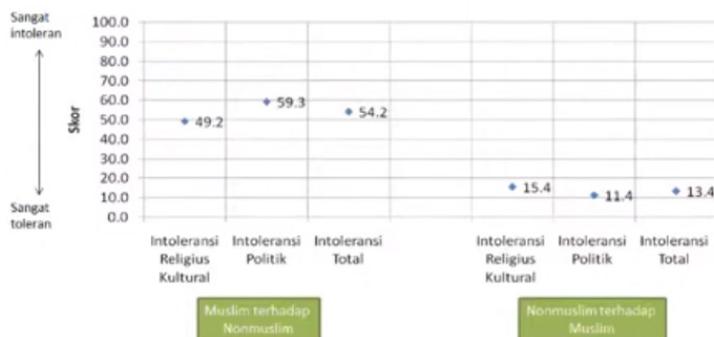
Apakah Ibu/Bapak keberatan atau tidak keberatan JIKA: Orang non-Muslim menjadi ...? ...
(% yang menjawab "Keberatan") (Base: Responden Muslim)



Sumber: LSI (2017, 2018), Wahid Institute-LSI (2016)

Bagaimana bila dibandingkan antara intoleransi Muslim terhadap non-Muslim dan sebaliknya? Data hasil survei menunjukkan, secara umum tingkat intoleransi non-Muslim terhadap Muslim lebih rendah ketimbang intoleransi Muslim terhadap non-Muslim:

Indeks Intoleransi Antara Umat Beragama (0-100)



Intoleransi Muslim terhadap Nonmuslim lebih tinggi dibanding intoleransi Nonmuslim terhadap Muslim.

Dalam skala 0-100, di mana 0=sangat toleran dan 100=sangat intoleran, total skor intoleransi Muslim terhadap non muslim sebesar 54.2, jauh lebih tinggi dibanding total skor intoleransi Nonmuslim terhadap Muslim 13.4.

“Mayoritarianisme”

Tetapi variabel itu tidak berdiri sendiri. Kita juga punya pertanyaan, apakah responden itu merasa kelompok agamanya mayoritas atau minoritas di kecamatan tempat mereka tinggal. Hasilnya adalah sebagai berikut:



Pertanyaannya, apakah ada perbedaan skor tingkat intoleransi antara responden yang merasa dirinya mayoritas dan responden yang merasa dirinya minoritas. Berikut hasil surveinya:



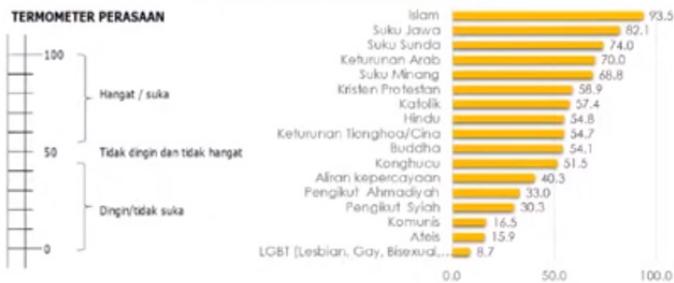
Grafik itu menunjukkan, kotak warna biru sebelah kiri adalah skor tingkat intoleransi muslim yang merasa dirinya mayoritas terhadap non-muslim. Kotak warna merah sebelah kiri adalah skor intoleransi Muslim yang merasa sebagai minoritas di tempat tinggal mereka. Sedangkan kotak warna biru sebelah kanan adalah skor intoleransi non-Muslim yang merasa sebagai mayoritas terhadap Muslim. Kotak merah sebelah kanan adalah skor intoleransi orang non-Islam yang merasa dirinya bukan mayoritas terhadap Muslim.

Data ini menarik. Muslim ataupun non-muslim jika dirinya merasa mayoritas cenderung lebih intoleran dibanding bila mereka merasa minoritas. Sederhananya, orang Kristen di Kupang atau orang Kristen di Manado itu lebih intoleran dibandingkan orang Kristen di Minang atau di Padang. Sebaliknya, orang Islam di Aceh itu lebih intoleran dibandingkan orang Islam di Papua. Jadi ada semacam *majority privilege* yang membuat intoleransi itu meningkat, bukan semata-mata persoalan dalil agama semata.

Selanjutnya, terdapat data survei tentang tingkat kesukaan yang memakai termometer feeling, semakin ke atas semakin hangat, semakin ke bawah semakin dingin atau tidak suka:

KEDISUKAAN TERHADAP SUATU KELOMPOK (Nilai Mean)

Nilai 0 derajat artinya Ibu/Bapak merasa sangat dingin atau sangat tidak suka (negatif) pada kelompok yang saya sebutkan. Nilai 100 derajat artinya Ibu/Bapak merasa hangat atau sangat suka (positif) pada kelompok yang saya sebutkan. Nilai 50 derajat artinya Ibu/Bapak tidak merasa suka, tetapi juga tidak merasa tidak suka terhadap kelompok tersebut. Jika terdapat nama kelompok yang Ibu/Bapak tidak pernah dengar, Ibu/Bapak tidak perlu menilai kelompok tersebut. Katakan saja pada saya bahwa Ibu/Bapak tidak tahu kelompok itu dan kita akan melanjutkan ke kelompok berikutnya? ... (%)

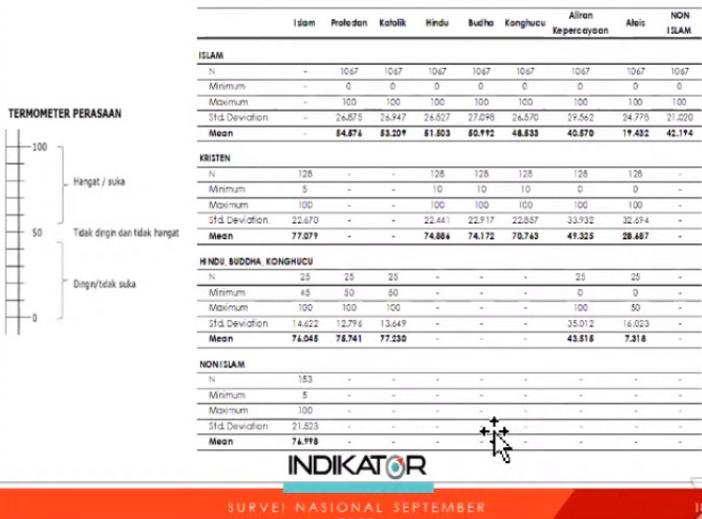


Dan apabila Anda priksa kembali, tingkat kehangatan atau ketidaksukaan paling tinggi itu terhadap Islam, kemudian terhadap suku Jawa dan suku Sunda. Kebetulan tiga kelompok ini adalah

kelompok mayoritas. Tetapi ada yang menarik, tingkat kehangatan atau kesukaan terhadap keturunan Arab itu tertinggi padahal orang Arab atau keturunan Arab itu minoritas. Ini yang menjelaskan bahwa Rizieq Shihab masih banyak pengikut. Minang juga minoritas, tapi tingkat kesukaannya cukup tinggi. Coba bandingkan dengan atheis, komunis, Syiah, Ahmadiyah, tingkat kehangatannya di bawah 50. Ini masalah serius juga.

Apabila kita cek, ada yang menarik juga. Kita buat pertanyaan kesukaan terhadap Islam, yang ditanyakan kepada orang Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan sebagainya. Juga sebaliknya, kesukaan terhadap Katolik, Hindu, Buddha dan sebagainya, yang ditanyakan kepada Muslim. Temuannya sebagai berikut:

SKOR KEDISUKAAN SUATU KELOMPOK TERHADAP KELOMPOK LAINNYA



Apabila Anda lihat mean kesukaan responden Muslim terhadap Protestan dan Katolik, rata-ratanya 54, 53, 51. Jadi orang Islam itu netral-netral saja jika melihat kelompok lain di luar agama mereka. Kecuali terhadap atheis. Tetapi coba apabila orang non-Muslim memandang Islam, rata-rata tingkat kesukaan non-Muslim terhadap Islam itu tinggi. Jadi problem ketidaksukaan dan problem intoleransi itu ada di kaum Muslim. Karena orang Islam ketika memandang kelompok lain cenderung tidak suka. Sementara non-Muslim kalau lihat Islam rata-rata kesukaannya lumayan, yaitu di atas 77.

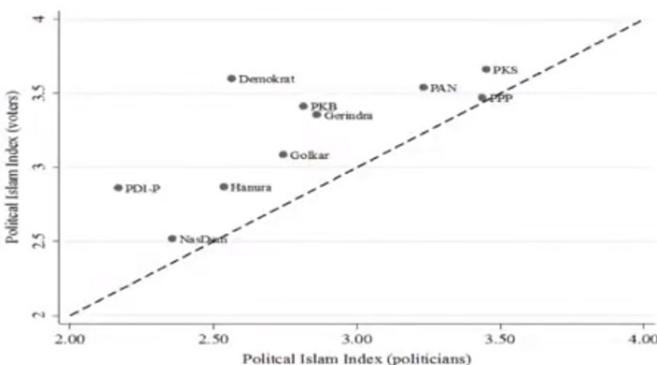
Mengapa pada tahun terakhir ada semacam peningkatan intoleransi? Karena sisi *demand*-nya tinggi (dari sisi masyarakat atau konstituen), kemudian faktor sisi *supply*-nya juga lumayan tinggi (dari sisi politisi). Ini ada tujuh *item* yang membentuk indeks Islam politik. Kita tanyakan ke basis konstituen partai dan kita tanyakan kepada masing-masing politisi dari partai mereka sendiri. Satu, “pemerintah harus memprioritaskan Islam di atas agama-agama lain”. Dua, “para pemimpin Islam harus lebih berpengaruh dalam kehidupan politik”. Inilah yang menjadi indeks Islam politik:

Persetujuan terhadap Indeks Islam Politik

Pertanyaan	% Sangat/Cukup Setuju	
	Pemilih	Politisi
1. Pemerintah harus memprioritaskan Islam di atas agama-agama lain	49	38
2. Para pemimpin Islam (ulama) harus lebih berpengaruh dalam kehidupan politik	37	47
3. Daerah-daerah di Indonesia harus diperbolehkan menerapkan hukum Islam/syariah pada tingkat lokal	41	32
4. Hukum Islam/syariah harus diterapkan di seluruh Indonesia	39	10
5. Penistaan terhadap Islam harus dihukum lebih berat	63	67
6. Ketika ikut pemilihan umum, sangat penting untuk memilih pemimpin Muslim	58	60
7. Islam harus menjadi satu-satunya agama resmi di Indonesia	36	7

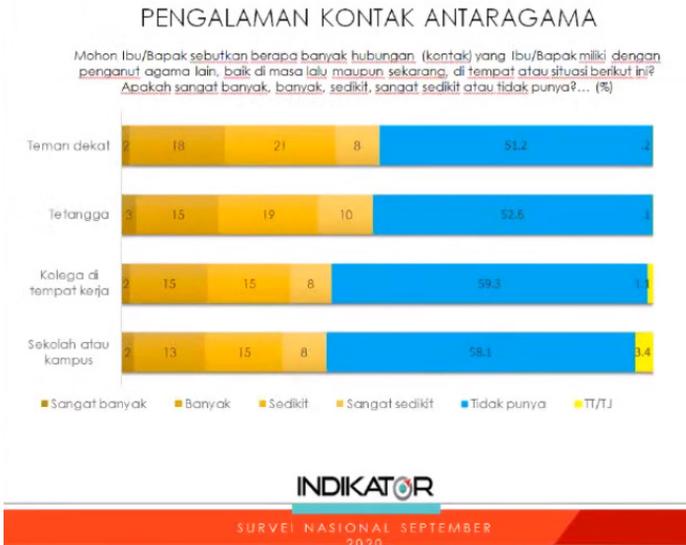
Berikut ini saya tampilkan titik temu antara indeks politik Islam dari sisi pemilih (konstituen) dan indeks politik Islam dari sisi politisi:

Kongruensi ideologis pemilih dan politisi dalam indeks politik Islam



Garis vertikal adalah indeks dukungan pemilih (konsituen) terhadap politik Islam. Sedangkan garis horizontal adalah indeks dukungan para politisi (partai politik) terhadap politik Islam. Tampak bahwa titik temu antara basis konstituen dan politisi disemua partai politik (yang ditunjukkan oleh titik-titik bulat) berada di atas garis diagonal (kecuali titik temu PPP yang menempel di garis diagonal). Artinya apa? Pemilih itu lebih konservatif ketimbang politisi, dan lagi-lagi kalau kita lihat mana yang paling kongruen, itu adalah tiga partai Islam, yaitu PKS, PAN, dan PPP. Jadi jika banyak partai yang mencoba bergerak ke kanan, karena mereka melihat ada perubahan sentimen di tingkat massa di mana massa cenderung lebih konservatif daripada elitnya. Ini misalnya PKB, pemilihnya sangat konservatif (indeks dukungan terhadap politik Islam sekitar 3,4), sementara indeks dukungan elitnya terhadap politik Islam tidak sampai 3.

Sebagai penutup, apa yang mesti dilakukan? Ini hasil survei yang baru saja selesai. Kita tanya, apakah responden mempunyai sangat banyak teman yang beda agama, atau banyak, sedikit, sangat sedikit, atau tidak memiliki sama sekali teman yang beda agama?



Batang warna orange tua paling kiri adalah yang sangat banyak punya teman yang beda agama. Yang berwarna lebih muda sebelah kanannya adalah yang banyak punya teman berbeda agama, dan yang lebih muda lagi adalah yang sedikit, dan yang lebih muda lagi adalah

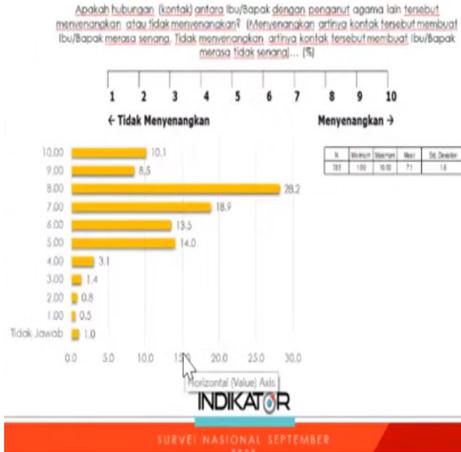
yang sangat sedikit, dan yang warna biru adalah yang tidak memiliki teman beda agama. Begitu juga apakah mereka punya tetangga, kolega atau teman sekolah yang beda agama.

Kemudian kita tanya mereka yang memiliki pengalaman kontak beda agama dan kita lihat, kita *cross* dengan pengalaman kerjasama apakah sering berbincang secara kekeluargaan dengan penganut agama lain. Pernah atau sering tidak transaksi jual beli dengan tetangga yang beda agama, membantu teman dan seterusnya.



Oleh karena itu, kita temukan satu *gap* yang cukup lebar. Prasangka mereka terhadap non-Muslim besar, tapi apabila ditanya, adakah teman, mereka menjawab punya. Lalu kita bertanya kembali, bagaimana pengalaman ketika mereka kontak dengan orang yang berbeda agama. Ini hasilnya:

PENGALAMAN KONTAK ANTARAGAMA



Angka satu artinya tidak menyenangkan. Jadi semakin dekat ke angka satu artinya semakin tidak menyenangkan dan semakin dekat ke angka 10 artinya semakin menyenangkan. Coba lihat *mean*-nya, 7,1. Jadi terdapat *gap* antara persepsi mereka terhadap non-muslim dengan pengalaman mereka yang punya pengalaman teman beda agama. Jadi kalau mereka punya teman beda agama, umumnya *mean*-nya di angka 7,1. Jadi seseorang apabila memiliki teman beda agama, pengalamannya cenderung menyenangkan ketimbang yang tidak menyenangkan.

Lalu kita tanya apakah mereka memiliki pengalaman kerja dengan orang beda agama, lalu pengalaman itu dalam bentuk persaingan atau kerja sama. Hasilnya *mean*-nya 7,3. Lagi-lagi umumnya orang yang memiliki pengalaman dengan orang beda agama itu cenderung kerja sama. Jadi saya sangat setuju dengan pemikiran atau saran perlunya ada pergeseran dari dialog agama yang mungkin bersifat teologis menjadi model interaksi sosial.

Terakhir, saya kaitkan dengan pertanyaan di awal. Mengapa ketika secara primordial mereka dimungkinkan terbuka dan berteman dengan penganut agama lain, tapi dalam konteks elektoral politik identitas bekerja secara lebih maksimal? Dugaan saya, adalah karena mobilisasi. Jadi sebelum pilkada, hubungan antar umat beragama itu baik-baik saja. Tetapi karena ada pilkada, maka sentimen mobilisasi itu diaktivasi sedemikian rupa sehingga ada persoalan yang membuat dukungan pemilih terhadap calon dalam pilkada disesuaikan dengan agama calon maupun pemilihnya.

Politik Identitas dan Pandangan Wakil Rakyat

Sirojuddin Arif

Peneliti Survei Pandangan Anggota DPR-RI tentang Pendidikan Agama

ARTIKEL ini akan membahas politik identitas di Indonesia dan secara lebih khusus bagaimana politik identitas dalam pandangan wakil rakyat di DPR. Lalu apa hubungan politik identitas itu dengan pendidikan agama dan akhirnya ke depan pendidikan agama perlu seperti apa.

Perlu dipahami bahwa istilah politik identitas itu bersifat *slippery* atau licin. Pengertian bisa berbeda-beda antar kelompok. Artinya juga bisa berentang mulai dari yang positif sampai yang negatif. Marx misalnya mengatakan politik identitas itu hal yang tidak baik. Menurutnya, kalau suatu kelompok mengartikulasikan kepentingan politik berdasar identitas seperti etnis agama, gender, dan hal-hal lain, maka itu akan menghambat perubahan sosial berdasar kelas. Tetapi orang lain mengatakan politik identitas itu tidak selalu buruk seperti dalam pandangan Marx.

Dalam sejarahnya, politik identitas sering muncul ketika gerakan-gerakan atau kelompok-kelompok tertentu yang terpinggirkan tidak bisa masuk ke dalam *mainstream*. Mereka berusaha bisa masuk dengan cara memobilisasi identitas kelompok feminis, atau kelompok etnis tertentu atau kelompok agama tertentu. Tujuannya untuk mengatasi ketidakadilan. Menurut pandangan ini, politik identitas itu memberi ruang manuver yang cukup leluasa. Jadi poinnya adalah politik identitas itu *slippery*.

Dalam konteks agama khususnya di Indonesia, perlu menjadi catatan bahwa politik identitas itu dilakukan oleh kelompok mayoritas. Apa artinya? Mayoritas itu dengan sendirinya sudah menjadi kelompok *mainstream*. Tetapi kenapa mayoritas yang sudah *mainstream* masih

■ Disarikan dari Webinar ke-16 Politik Identitas dan Moderasi Beragama, Jumat 11 Desember 2020.

menggunakan politik identitas? Ini yang kemudian menjadi satu sebab mengapa politik identitas itu dalam konteks Indonesia menjadi negatif terutama yang terkait agama.

Artikel ini menggunakan data Indonesia Family Live Survei (IFLS). Dari sisi *demand* atau sisi masyarakat, salah satu alat ukur yang bisa digunakan untuk melihat kemungkinan politik identitas itu bisa tumbuh subur adalah pertimbangan agama dalam memilih calon pejabat publik. Dalam survei IFLS ada pertanyaannya, apakah agama menjadi salah satu pertimbangan dalam memilih calon bupati. Hasil survei menunjukkan mayoritas responden atau hampir 80 persen mengatakan agama menjadi pertimbangan. Pertanyaannya lainnya, seberapa besar agama seorang calon mempengaruhi seseorang dalam memilihnya. Data 2014 menunjukkan jumlah jawaban responden yang mengatakan sangat berpengaruh lebih banyak daripada data 2007. Ini menunjukkan menguatnya politik identitas antara 2007-2014. Jadi dari sisi masyarakat atau sisi *demand*, politik identitas itu membesar.

Kenapa ada individu yang menggunakan agama sebagai pertimbangan penting? Saya mencoba menjelaskan hal ini dengan melihat pada proses-proses sosial, bukan pada proses pemahaman teologis, bukan pada institusi dan hal-hal lain. Tapi lebih kepada proses sosial yang ada dalam lingkungan sekitar kita atau apa yang disebut sebagai modal sosial. Sama dengan politik identitas, modal sosial juga perlu dipahami secara netral. Selama ini kita memahami modal sosial itu secara positif dalam membantu untuk mencapai hal-hal yang positif. Tetapi sebenarnya *social capital* itu adalah hal yang netral. *Social capital* merujuk pada jaringan sosial yang dimiliki seseorang yang punya dampak positif atau negatif.

Jaringan sosial dibedakan jadi dua macam, *bridging* dan *bonding*. *Bonding* berarti jaringan sosial yang dibentuk dengan kelompok yang sejenis. Bisa seagama, bisa seetnis. Sedangkan *bridging* berarti jaringan sosial yang dibentuk dengan kelompok yang lain. Kedua jenis jaringan ini punya dampak yang berbeda. Efek *bonding* adalah menguatkan solidaritas internal kelompok namun sikap kepada kelompok luar bisa jadi negatif atau malah memperkuat permusuhan. Sebaliknya, efek *bridging*, di samping memiliki kemungkinan memiliki efek negatifnya, adalah mempererat hubungan antar kelompok. Terkait dengan kecenderungan untuk memilih kandidat yang hanya seagama, kita bisa membuat hipotesa bahwa orang yang lingkup lingkarannya sosialnya itu lebih banyak bersifat *bonding*, maka dia akan lebih mungkin untuk

menjadikan agama sebagai pertimbangan utama. Sementara mereka yang mempunyai *bridging* sosial lebih besar, maka dia akan punya kemungkinan lebih kecil.

Selanjutnya adalah bagaimana kita melihat *bridging* dan *bonding* ini? Yang biasa orang lihat adalah pada jumlah teman yang berbeda agama. Jadi apabila orang memiliki teman seagama saja, hubungan sosialnya dianggap *bonding*, dan apabila orang memiliki teman yang lain agama, berarti hubungan sosialnya adalah *bridging*. IFLS itu menanyakan orang itu ikut kegiatan apa saja. Kalau di tingkat desa, apakah dia ikut kegiatan yang hanya seagama saja atau dia juga ikut kegiatan-kegiatan lain seperti ronda, PKK, pertemuan karang taruna, dan lain-lain. Penelitian kami juga menggunakan indikator kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial non keagamaan. Kita melihat apa dampak ketika seseorang hanya terlibat dalam kegiatan yang hanya satu agama saja, dan apa dampaknya bila seseorang terlibat dalam kegiatan sosial non keagamaan. Kita mengukur *social participation* dan *religious participation*. Hasil survei menunjukkan bahwa semakin sering seseorang ikut partisipasi dalam kegiatan *religious* semakin tinggi kemungkinan ia untuk memilih kandidat berdasarkan agama. Sebaliknya, kalau dia ikut kelompok kegiatan-kegiatan yang lebih bervariasi, maka semakin rendah ia untuk memilih kandidat berdasarkan agama.

Poin penting dari temuan tersebut adalah pentingnya mempromosikan kegiatan-kegiatan yang bersifat lintas kelompok keagamaan. Juga pentingnya menyadari ternyata kegiatan-kegiatan keagamaan itu ada sisi lainnya yang negatif, karena sifatnya yang *bonding*. *Bonding* memperkuat solidaritas internal namun menimbulkan sikap negatif kepada kelompok lain. Dalam konteks kehidupan demokrasi hal ini bisa berdampak negatif.

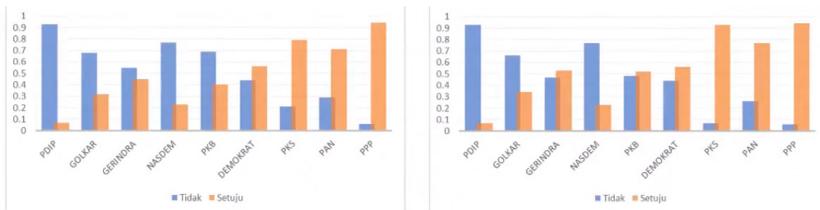
Demikian politik identitas dari sisi *demand* atau sisi masyarakat atau kondisi sosialnya. Bagaimana system politik kita merespon kondisi sosial keagamaan ini?

Temuan Survei Pandangan Anggota DPR

PPIM UIN Jakarta melakukan survei terhadap anggota DPR RI. Respondennya ada 64 persen. Menurut para ahli, untuk survei kepada orang elit seperti DPR maka ini tergolong sangat tinggi. Respondennya dipilih secara acak agar tidak bias terhadap golongan tertentu. Apa yang kita bisa pelajari dari hasil survei ini? Kalau kita perhatikan apa yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, kelihatannya sistem politik kita

tidak lagi dalam dijelaskan dengan adanya tiga aliran (abangan, santri, dan priyayi). Mungkin lebih tepat penjelasannya bukan kepada tiga aliran, tapi adalah *one dimension cleavage system*. Dalam ilmu politik, ada yang namanya “*cleavage*”, “*cleavage*” adalah perbedaan masyarakat berdasarkan hal-hal penting yang ada dalam masyarakat tertentu dan biasanya sejalan dengan perkembangan sosial ekonominya. Dalam masyarakat yang pernah mengalami industrialisasi besar-besaran, misalnya, muncul kelompok buruh besar, sehingga kelas itu menjadi dimensi yang sangat penting. Maka ada partai buruh dan partai non buruh. Dalam masyarakat yang mengalami pembelahan berdasarkan etnis, bisa jadi etnis akan muncul. Dalam masyarakat yang mengalami persoalan terkait isu agama, maka agama akan muncul. Dalam sistem kepartaian, negara-negara bisa punya beberapa dimensi. Jadi ada yang dua dimensi, mungkin tiga dimensi. Namun, ada juga yang hanya satu dimensi. Indonesia dalam beberapa hal, kelihatannya adalah mengarah pada satu dimensi. Atau mungkin sekarang sudah satu dimensi, yaitu adalah agama yang jadi penentu yang membelah atau membedakan beragam aliran partai politik.

Sekarang kita lihat bagaimana identitas politik itu berada di kalangan DPR secara individu. Kita tanya kepada anggota DPR dengan pernyataan: “Saya hanya akan memilih pemimpin daerah atau presiden yang seagama”. Dan inilah distribusinya:



Pernyataan: Dalam pilkada (pilpres), saya hanya akan memilih pemimpin daerah (presiden) yang seagama.

Grafik sebelah kiri adalah hasil jawaban untuk Pilkada, grafik sebelah kanan adalah jawaban untuk pilpres, dan hasilnya mirip. Batang biru itu menyatakan tidak setuju, dan batang yang berwarna krim menyatakan setuju. Tampak bahwa partai-partai politik terbelah ke dalam dua bagian. Sebelah kiri mulai dari PDI Perjuangan-PKB didominasi oleh batang biru yang menunjukkan lebih banyak yang tidak setuju, sedangkan sebelah kanan mulai Partai Demokrat-PPP didominasi oleh batang krim yang menunjukkan lebih banyak yang setuju.

Sekarang, apa yang kita temukan dari individu partai politik? Ini adalah regresi. Sama regresinya tapi bukan multilevel. Apa faktor-faktor individu yang membuat anggota DPR setuju menggunakan agama atau hanya memilih berdasarkan calon bupati atau walikota atau calon presiden yang seagama.

Hubungan baik dengan orang yang berbeda agama mengurangi politik identitas



	PILKADA	PILKADA	PILPRES	PILPRES
	(Odd Ratio)		(Odd Ratio)	
Jawa	-0.61* (0.25)	0.54	-0.52* (0.26)	0.59
Islam	2.76* (.54)	15.77	4.22* (0.86)	67.85
Org. Non-Agama	-0.45 (0.23)	0.64	-0.34 (0.31)	0.71
Persepsi Ancaman	1.41* (0.43)	4.10	1.59* (0.5)	4.89
Teman Beda Agama	-1.42* (.54)	0.24	-1.14* (.57)	0.32
Dukungan thd Demokrasi	0.72* (0.25)	2.06	0.86* (0.25)	2.36
Konstan	0.07* (1.04)	1.07	-1.59* (1.23)	0.20
N	370	370	370	370

* statistically different from 0. Controlling the effect of age, gender, religious heterogeneity, and ethnic heterogeneity

Apa yang ditunjukkan oleh angka-angka ini? Pertama adalah hubungan dengan kelompok agama lain ternyata benar berpengaruh negatif terhadap politik identitas. Jadi sama dengan kelompok sosial di tengah masyarakat. Seperti telah disebutkan, dari sisi *demand* atau sisi masyarakat, ditemukan bahwa semakin orang punya *bridging* sosial, *bridging activities*, maka semakin kecil kemungkinan menjadikan agama sebagai pertimbangan utama dalam memilih calon pemimpin. Di kalangan anggota DPR pun ternyata sama, semakin orang itu punya teman agama yang banyak, maka semakin kecil kemungkinan dia memilih hanya berdasarkan agama. Faktor-faktor lainnya kita temukan juga berpengaruh negatif (mengurangi) kecenderungan politik identitas, seperti sikap dukungan terhadap demokrasi.

Apa pengaruh partai politik terhadap politik identitas? Kalau kita regresi kembali dengan memasukkan identitas kepartaian dari elit partai politik kita. Partai politik mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap politik identitas.

Politik Identitas dan Moderasi Beragama

Identitas kepartaian memperkuat politik identitas?

	PILKADA	PILKADA (Odd Ratio)	PILPR (Odd Ratio)	(Odd Ratio)
PDIP	-1.40* (0.6)	0.25	-1.43* (0.61)	0.24
GERINDRA	0.20 (.49)	1.22	0.45 (0.50)	1.57
NASDEM	-0.67 (0.54)	0.51	-0.86 (0.56)	0.42
DEMOKRAT	0.61 (0.54)	1.85	0.48 (0.55)	1.61
PKB	0.27 (0.47)	1.32	0.63 (0.48)	1.87
PAN	1.14* (0.53)	3.12	1.37* (0.56)	3.94
PKS	1.93* (0.61)	6.88	3.07* (0.79)	21.56
PPP	2.65* (0.99)	14.17	2.57* (1.00)	13.02
Konstan	0.10 (1.20)	1.11	-1.66 (1.44)	0.19
N	370	370	370	370

* Statistically different from 0. GOLKAR is the reference group. Controlling the effect of Jawa, Islam, age, gender, religious heterogeneity, ethnic heterogeneity, non-religious organizations, friendship heterogeneity, threat perception and support for democracy.

39:25 / 2:11:20

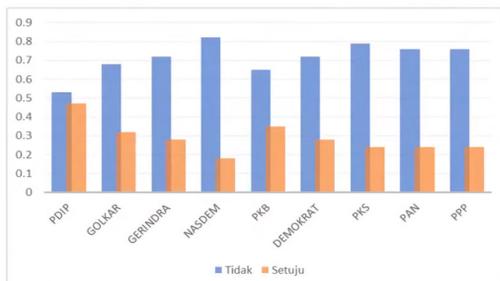
Scroll for details

Jadi apabila kita lihat di tabel tersebut, yang berwarna merah itu adalah yang menunjukkan angka signifikan, dan perlu kita ketahui ini basisnya adalah Partai Golkar. Jadi bagaimana apabila anggota DPR itu dibandingkan dengan Golkar. Kalau kita lihat Golkar adalah berada di tengah-tengah, jadi cenderung berada proporsinya antara ya (setuju) dan tidak (tidak setuju).

Pendidikan Agama dalam Pandangan Anggota DPR

Bagaimana perhatian anggota DPR terhadap kurikulum atau pendidikan agama ketika berhubungan dengan hal-hal terkait keragaman. Ada beberapa pertanyaan terkait hal ini. Misalnya, sejauh mana pendidikan agama itu menaruh perhatian kepada wawasan kebangsaan dan keragaman; pertanyaan tentang persoalan yang dihadapi oleh kelompok agama tertentu untuk mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan keyakinan mereka; persoalan memasukkan pandangan keagamaan mereka dalam pendidikan dan sejenisnya. Selanjutnya kita juga bertanya apakah mereka setuju dengan pernyataan bahwa selama ini pendidikan agama kurang memberikan perhatian kepada persoalan keragaman agama. Kita juga memeriksa kembali dan bertanya apakah tidak ada persoalan dalam pendidikan agama. Ini adalah distribusinya:

Pernyataan: Materi pendidikan agama kurang mendorong peningkatan wawasan kebangsaan



zoom

Oleh karena itu, partai yang paling kanan (PPP) adalah yang paling banyak tidak setuju; tidak setuju apabila pendidikan kita kurang memberi perhatian terhadap wawasan kebangsaan; Tidak setuju bila pendidikan kita kurang memperhatikan kelompok tertentu; Tidak setuju apabila pendidikan kita kurang memberikan pemahaman tentang keragaman agama. Mayoritas anggota DPR itu mengatakan tidak setuju. Serta hanya sedikit yang menyatakan: Ya ada, ada persoalan terkait wawasan kebangsaan dan pendidikan agama. Perlu perbaikan bagaimana pendidikan agama itu memperhatikan keragaman dan memperhatikan kelompok tertentu.

Sebagai penutup, ada beberapa hal yang kita temukan. *Pertama*, orang yang memiliki hubungan sosial lebih terbuka dengan kelompok lain memiliki kecenderungan politik identitas yang lebih kecil. Jadi kenapa politik identitas kita besar? Karena sebagian masyarakat kita punya hubungan yang tertutup dengan kelompok masing-masing.

Kedua, perlu ada pergeseran dari dialog antaragama yang lebih bersifat teologis ke model hubungan sosial yang lebih sederhana tetapi mungkin pengaruhnya besar, yaitu pertemanan atau kegiatan yang melibatkan kelompok agama berbeda. Jadi perlu ada perubahan dari model dialog antaragama kepada model hubungan sosial antarkelompok agama yang berbeda.

Terakhir, yakni perlunya ruang demokratis lebih besar bagi beragam elemen masyarakat untuk menyuarakan aspirasinya dalam pendidikan agama.

Konservatisme di Media Sosial

Azyumardi Azra

Cendekiawan Muslim Indonesia

GEJALA konservatisme di media sosial sebetulnya adalah bagian dari perkembangan *religious politics, socio-religious, dan socio-cultural*, baik dalam konteks lokal, nasional, dan global. Ini terkait misalnya dengan modernisasi yang dilakukan oleh pemerintah Orde Baru di Indonesia, yang ketika kemudian tahun 80-an ternyata tidak menghasilkan apa yang diprediksi oleh para ahli bahwa modernisasi akan menghasilkan sekularisasi.

Memang pada awalnya banyak para ahli yang mengatakan bahwa pembangunan dan modernisasi itu menghasilkan sekularisasi. Harvey Cox misalnya, seorang teolog dan profesor dari Harvard mengatakan bahwa agama itu tersingkir dari kota-kota sekuler, tidak lagi punya tempat. Tapi ternyata prediksi ini tidak terjadi. Sehingga tahun 80-an ia menulis lagi tentang *the Return of Religion to Secular City* atau kembalinya agama ke kota-kota sekuler. Tentu saja dia melihatnya dalam konteks Amerika. Tapi dalam konteks Indonesia juga benar. Dalam konteks Amerika tahun 80-an, kembalinya agama ke kota-kota sekuler itu meningkatkan apa yang sering disebut sebagai fundamentalisme Kristen (*christian fundamentalism*) yang beberapa tahun lalu ditunggangi dan berhasil memenangkan Donald Trump (2017).

Begitu juga di Indonesia. Pembangunan menghasilkan kemajuan pendidikan sehingga terjadi eksplosif kaum terpelajar. Kaum terpelajar itu mengisi berbagai sektor dan pendapatan mereka meningkat sehingga muncullah kelas menengah. Kelas menengah ini pelan tapi pasti membentuk apa yang disebut *affluent middle class*, kelas menengah yang makmur.

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dan Polarisasi di Dunia Maya, Jumat 27 November 2020.

Tentu saja orang mengkritik, pembangunan ekonomi itu pincang, hanya dikuasai oleh konglomerat. Ini betul. Tetapi pada saat yang sama, penerima manfaat terbesar pembangunan ekonomi itu adalah orang-orang Islam, karena terkait demografi. Jadi *greatest beneficiaries* (penerima manfaat terbesar) dari peningkatan ekonomi dan pendidikan itu adalah orang-orang Islam.

Akhir tahun 70-an, apabila ada orang-orang pintar, pasti itu bukan orang Islam (santri). Orang-orang IAIN itu tidak diperhitungkan. Orang hanya mengenal Harun Nasution. Jikalau bukan non-Muslim, orang Kristen atau Katolik (Katolik yang banyak), pasti (orang) sosialis. Itu saja. Tetapi tidak berlanjut begitu. Tahun 80-an, banyak (santri) yang kuliah ke luar negeri. Muncullah gelombang orang-orang pintar dari kalangan santri.

Jika dilihat sekarang, hampir tidak ada isu yang tidak ada santrinya. Bahkan orang sering mengatakan apabila bicara soal politik atau soal perkembangan (dinamika) agama tanya orang UIN (orang FISIP UIN). Orang FISIP UIN itu lebih pintar, lebih fasih dibanding misalnya dengan orang FISIP UI, dan orang UI itu mengakui. Belum lagi kalau bicara soal agama.

Jadi kemajuan pendidikan dan ekonomi memunculkan *affluent middle class*, yang kemudian mulai mencari pegangan. Itulah yang digambarkan oleh Ricklefs, bahwa kemajuan pendidikan menumbuhkan santri yang menjadi *affluent middle class*, yang kemudian dari kelebihan ekonominya mereka kembali kepada agama atau *attachment* mereka kepada agama meningkat.

Dulu ketika saya kuliah di IAIN belum ada mahasiswi mengenakan jilbab. Mahasiswi IAIN mulai mengenakan jilbab itu tahun 1983, 1984 atau mungkin di atas tahun 1985. Sekarang, jilbab sudah di mana-mana, bukan lagi hanya di IAIN atau perguruan tinggi umum tetapi juga di lembaga-lembaga yang sebelumnya tidak bisa dibayangkan ada orang berjilbab karena terkait dengan modernitas. Misalnya dulu akhir tahun 1990-an di City Bank Pondok Indah itu tidak satu pun karyawan mengenakan jilbab. Apalagi di kedutaan Amerika dan Jepang tidak ada pegawai yang memakai jilbab. Tetapi sekarang kondisinya sudah berbeda.

Saya pernah ditelpon Dubes Jepang namanya Imura. Suatu pagi dia menelpon saya dengan *nervous* karena pagi itu mendapati sekretarisnya tiba-tiba mengenakan jilbab. Saya bilang jangan *nervous*, itu tidak ada hubungannya dengan fundamentalisme agama atau radikalisme. Itu hanya karena *increased attachment* to Islam. Itu saja.

Tetapi perkembangannya tidak berhenti pada *increased attachment*. Bahkan pendulum yang bergerak lebih jauh itu memunculkan *born again Muslim*, Muslim yang merasa lahir kembali sebagai Muslim, mengalami *turning point* atau titik balik dalam keagamaannya. Hal tersebut yang sekarang-sekarang ini menjadi fenomena hijrah, meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang dianggap tidak halal.

Perkembangan ini berbarengan dengan perkembangan yang lain misalnya, terjadinya disrupsi karena globalisasi. Globalisasi memunculkan liberalisasi politik termasuk di Indonesia tahun 1998-1999, yang kemudian menghasilkan pemencaran otoritas termasuk otoritas keagamaan. Apabila dulu ulama atau organisasi keagamaan menjadi otoritas utama atau katakanlah satu-satunya otoritas, namun setelah itu tidak begitu lagi. Sekarang ulama masih menjadi otoritas, tapi otoritas sudah memencar.

Itulah yang kemudian membuat orang di media sosial ketika menulis sesuatu, dia tidak merasa perlu berkonsultasi misalnya dengan otoritas keagamaan tradisional (kiai, ulama atau ustadz). Mungkin dia lebih senang berkonsultasi secara sendiri saja misalnya ke Google. Di Google mungkin dia menemukan sumber yang bukan otoritatif, tapi sumber itu yang dia gunakan karena sesuai dengan kemauannya.

Sebetulnya sejak akhir 1990-an, beberapa aspek konservatisme itu sudah mulai muncul. Pertama, terjadinya konservatisme itu dalam kaitannya dengan kontestasi politik. Saya ingat di awal tahun 2000 (setelah era reformasi), istri saya datang dari pengajian. Istri saya mengabarkan pengajian itu diselenggarakan oleh ibu-ibu dari partai politik tertentu, partai Islam. Ustadznya mengatakan, apabila suami sudah punya kelebihan rezeki maka wajib bagi istri pertama untuk mencarikan istri kedua bagi suaminya. Saya bilang kepada istri, "Ya sudah carikan deh. Kan ini ada kelebihan, *ngga* usah ragu deh. Untuk tambah satu lagi atau dua lagi aman-aman aja lah." Saya bilang sambil bercanda. Tetapi itu konservatisme, seperti dilaporkan dalam survei ini, yang menganjurkan poligami, mengembalikan perempuan itu ke ranah domestik, dan ini disebarkan oleh satu partai Islam dan juga kelompok-kelompok Islamis non partai, misalnya HTI yang mengkampanyekan poligami, juga Jamaah Tablig.

Oleh karena itu, temuan-temuan survei ini tidak mengagetkan, walaupun kemudian terjadi eksplosif (*booming*) konservatisme. Kenapa kesannya *booming* karena tersiarinya melalui media sosial. HP itu walaupun belum menjangkau semua orang, tapi itulah sarana

efektif untuk menyampaikan pesan-pesan, baik pesan konservatisme atau moderasi. Karena itu terjadi wabah media sosial. Apabila dulu persebaran pesan konservatisme itu hanya melalui pengajian, belum ada media sosial.

Tidak kalah penting juga adalah soal konservatisme politik. Sebetulnya konservatisme perlu diidentifikasi tidak sesederhana polarisasi Joko Widodo (Jokowi) vs Prabowo. Mungkin konservatisme politik itu adalah lebih mengarah kepada paham tidak menerima Pancasila, tidak menerima NKRI, pro khilafah, dan Daulah Islamiyah. Karena pembelahan Jokowi vs Prabowo itu sendiri sebetulnya kemudian lebih cair, faktanya Prabowo menjadi Menteri Pertahanan di Kabinet Jokowi. Sehingga, mungkin harus lebih diperdalam sejauh mana media sosial digunakan untuk menyebarkan pesan-pesan kekerasan, terorisme dan juga pesan-pesan untuk pembentukan khilafah atau daulah islamiyah, bukan sekedar konservatisme. Jadi mungkin perlu identifikasi yang lebih jelas, konservatisme itu lebih dari sekedar polarisasi antara Jokowi dan Prabowo, tapi menjangkau kepada tujuan-tujuan politik yang lebih jauh terkait dengan NKRI dan Pancasila.

Narasi Keagamaan di Dunia Maya

lim Halimatusa'diyah

Koordinator Riset Media and Religious Conservatism – PPIM UIN Jakarta

ARTIKEL ini akan memaparkan temuan hasil riset kami mengenai narasi keagamaan di dunia maya: politisasi narasi keagamaan dan polarisasi di media sosial Indonesia. Latar belakang riset ini adalah peran penting media sosial di mana penetrasi media sosial secara global mencapai 60 persen dan di Indonesia 59 persen. Dalam konteks keagamaan, media sosial memiliki beberapa fungsi, di antaranya ekspresi keyakinan, sumber informasi terkait aktivitas, dan ritual keagamaan, bahkan sangat berperan dalam penyebaran diskursus agama dan paham keagamaan.

Sebelumnya, kami melihat studi-studi yang ada terkait media sosial dan paham keagamaan hanya fokus pada satu tokoh atau organisasi keagamaan tertentu saja. Dari sisi metodologi pun mereka belum menggunakan *big data* untuk analisis konten dan jaringan sosial. Mereka juga kurang mengeksplorasi hubungan antara konteks politik dan narasi keagamaan.

Dalam artikel ini kami akan menjawab pertanyaan:

1. Paham keagamaan apa saja yang berkembang di media sosial?
2. Sejauh mana konteks politik mempengaruhi narasi keagamaan di media sosial?
3. Bagaimana politisasi narasi keagamaan berdampak pada polarisasi di media sosial?

Kerangka Teoritis

Kerangka teoritisnya, kami banyak menggunakan berbagai *literature* terkait hubungan antara agama dengan politik. Studi-studi yang ada sering menyebutkan bahwa agamalah yang mempengaruhi politik.

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dan Polarisasi di Dunia Maya, Jumat 27 November 2020.

Jadi, nilai-nilai atau ideologi dari agama itu mempengaruhi politik. Akan tetapi, dalam beberapa studi-studi lainnya yang kami gunakan sebagai *frame work* riset kami justru kami melihat bahwa bukan agama yang sepenuhnya mempengaruhi politik melainkan politiklah yang mempengaruhi agama. Artinya, narasi keagamaan itu berubah atau dibentuk oleh kompetisi elit politik (Tabaar, 2019). Jadi, kami melihat bahwa aktor politik itu bukan seseorang yang pasif yang dipengaruhi oleh nilai-nilai agama tapi dia juga bisa menggunakan nilai-nilai agama itu untuk kepentingan politik.

Definisi dan Indikator

Kami melihat, secara umum spektrum paham keagamaan di media sosial ada tiga, yaitu:

1. Liberalisme,
2. Moderatisme,
3. Konservatisme (menekankan literalisme).

Terdapat dua cabang konservatisme secara umum, yaitu Islamis dan radikal/ekstrimis. Bedanya, Islamis mengedepankan Islam sebagai sistem politik untuk mewujudkan negara Islam, sedangkan ekstrimis menjadikan dan menyetujui kekerasan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita keagamaannya.

Singkatnya, dalam riset ini paham-paham keagamaan itu kami definisikan sebagai berikut:

1. Liberal: aliran keagamaan yang berusaha melampaui batas-batas akal, tradisi, norma dan nilai yang telah disepakati oleh komunitas muslim (jamaah),
2. Moderat: aliran keagamaan yang mengedepankan keseimbangan akal dan wahyu serta keseimbangan keragaman antar kelompok sebagai prinsip dasar untuk menjaga kemaslahatan bersama,
3. Konservatif: aliran keagamaan yang menjadikan tradisi Islam awal (nabi dan sahabat) sebagai acuan yang harus dipublikasi secara literal,
4. Islamis: aliran keagamaan konservatif yang mengedepankan Islam sebagai sistem politik untuk mewujudkan negara Islam,
5. Radikal/ekstrimis: aliran keagamaan konservatif yang menjadikan dan menyetujui kekerasan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita keagamaannya.

Indikator yang kami gunakan untuk mengidentifikasi narasi konservatif di media sosial:

1. Menolak modernisme, liberalisme, atau progresivisme dalam menjelaskan ajaran-ajaran agama,
2. Menjadikan hadis (kata-kata, perilaku, dan tarikh nabi) sebagai rujukan utama yang harus diduplikasi secara literal,
3. Mematuhi doktrin dan tatanan sosial yang telah diwariskan oleh Nabi tanpa perlu adanya konstektualisasi,
4. Menjaga otoritas ulama sebagai penjaga tradisi Islam awal yang tidak boleh direinterpretasikan lagi,
5. Menolak ide kesetaraan gender,
6. Menolak pendekatan hermenetik modern terhadap kitab suci,
7. Menyanggah tradisi lokal yang dianggap berbeda dengan tradisi Arab yang diterapkan pada zaman Nabi dan sahabat.

Selanjutnya, polarisasi itu banyak definisinya, tapi dalam riset ini yang dimaksud polarisasi adalah proses di mana berbagai perbedaan pandangan yang normal ada di masyarakat dipersempit ke dalam perbedaan yang hanya bersifat satu dimensi (kita versus mereka). Misalnya dalam konteks politik, hanya ada dua kubu yaitu Jokowi dan Prabowo. Kalau kita mengkritik Jokowi dianggap kita pro Prabowo. Kalau kita mengkritik Prabowo dianggap kita pro Jokowi. Padahal dimensinya tidak hanya itu. Karena mungkin ada orang-orang yang tidak suka Jokowi maupun Prabowo. Tapi dalam konteks polarisasi itu hanya pro dan kontranya saja: kita versus mereka.

Bagaimana mekanisme terjadinya polarisasi itu? Mekanismenya: aktor politik cenderung akan mengeksploitasi kekecewaan dan kebencian dengan menggunakan retorika yang mengidentifikasi seseorang (bukan sesuatu) untuk disalahkan. Retorika itu kemudian menciptakan dinamika kita versus mereka. Maka dalam hal ini, harus ada sosok yang harus disalahkan (McCoy, et al., 2018).

Kami juga melihat ada karakteristik dari polarisasi:

1. Volatilitas: tidak mudah diprediksi karena bisa dengan cepat berubah menjadi kemarahan dan agresi,
2. Kecurigaan: motifnya selalu (diawali dari) kecurigaan,
3. Oversimplifikasi: masalah yang multi-dimensi berubah menjadi dikotomi kita versus mereka.

Metode Penelitian

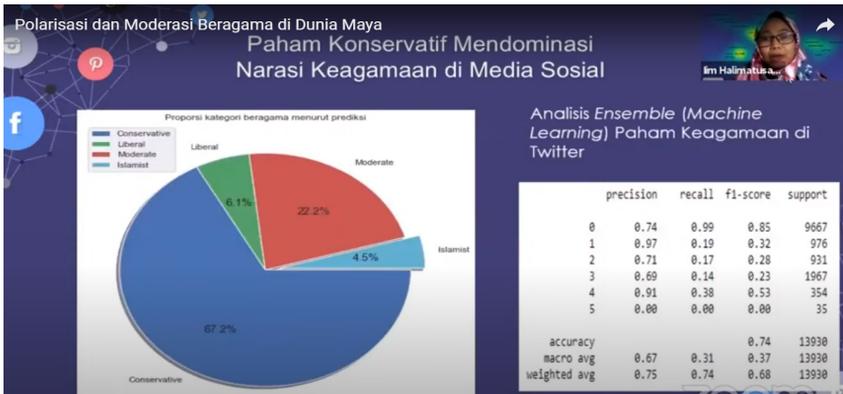
Telah kami singgung tiga pertanyaan dalam riset ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kami menggunakan data twitter sejak tahun 2009-2019 dan data kualitatif hasil interview dengan 13 orang:



Kami melakukan *sampling* dengan mencari kata-kata kunci keagamaan. Akhirnya sampelnya sekitar 2 juta tweet, 7,5 juta edge, dan 740 user. Setelah itu kami melakukan screening agar datanya akurat.

Paham dan Narasi Keagamaan

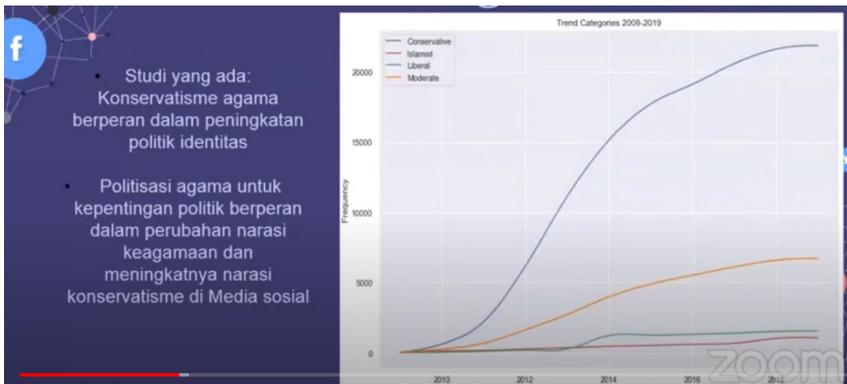
Apa saja paham keagamaan yang berkembang di media sosial? Kami menemukan proporsi paham-paham keagamaan sebagai berikut:



Jadi liberal sebanyak 6,1 persen, moderat: 22,2 persen, Islamis: 4,5 persen, dan konservatif: 67,2 persen

Lalu apakah perubahan narasi keagamaan dipengaruhi oeh kompetisi elit politik? Jawabannya adalah ya. Kami petakan perkembangan narasi keagamaan dari tahun ke tahun, tren narasi keagamaan di media sosial langsung meningkat tajam menjelang dan setelah tahun politik 2014.

Tren narasi keagamaan konservatif itu ditunjukkan oleh garis biru paling atas dalam grafik berikut ini:

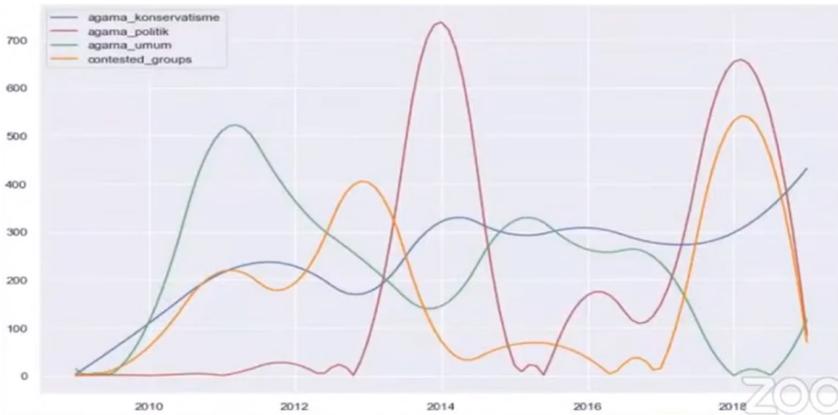


Ini membuktikan argumen kami bahwa politisasi agama untuk kepentingan politik ternyata berperan dalam mengubah narasi keagamaan dan meningkatkan paham konservatif dalam media sosial.

Kami juga mencermati tren narasi keagamaan dengan menganalisis perkembangan *hashtag*. Secara umum kami kelompokkan *hashtag* menjadi empat:

1. Keagamaan umum,
2. Keagamaan konservatif,
3. Agama dan politik,
4. Kelompok yang diperdebatkan (misalnya terkait pro kontra FPI dibubarkan).

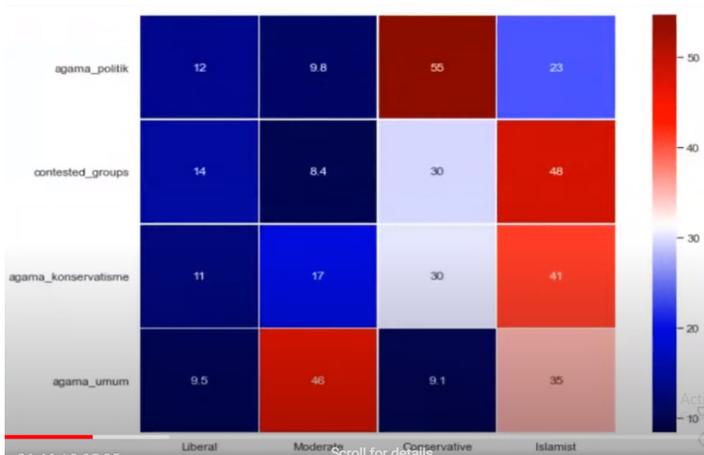
Setelah dipetakan, kami membuat plot tren keempat *hashtag* ini dari tahun ke tahun untuk melihat apakah konteks politik itu mempengaruhi narasi keagamaan. Berikut adalah grafiknya:



Grafik itu menunjukkan, garis biru (*hashtag* paham konservatisme) naik menjelang tahun politik 2014 dan kemudian naik lagi menjelang tahun politik 2019. Garis merah (*hashtag* agama dan politik) meningkat tajam menjelang tahun politik 2014 dan kembali meningkat tajam menjelang tahun politik 2019. Begitu juga garis kuning (*hashtag* kelompok yang diperdebatkan seperti pro kontra FPI), peningkatan tajamnya berbarengan dengan peningkatan tajam *hashtag* agama dan politik. Hal ini menunjukkan dekatnya korelasi antara *hashtag* agama dan politik dengan *hashtag* kelompok yang diperdebatkan.

Lalu bagaimana dampak politisasi narasi keagamaan terhadap polarisasi di media sosial?

Kami *cross* proporsi empat *hashtag* tersebut dengan paham liberal, islamis, konservatif dan moderat. Hasilnya adalah sebagai berikut:



Bisa dilihat bahwa *hashtag* narasi agama politik itu didominasi oleh paham konservatif, yakni sekitar 55 persen, lalu disusul oleh paham islamis 23 persen, lalu oleh liberal sebesar 12 persen dan oleh moderat sebesar 9.8 persen. Sedangkan *hashtag* “kelompok yang diperdebatkan” itu paling tinggi diusung oleh paham islamis sebanyak 48 persen, dan 30 persen oleh paham konservatif, dan hanya 8.4 persen oleh moderat, dan sisanya 14 persen oleh liberal. *Hashtag* “agama konservatif” hampir sama dengan *hashtag* “kelompok yang diperdebatkan” di mana narasi tertinggi nampak tentang islamis sebanyak 41 persen, disusul konservatif 30 persen, moderat 17 persen, dan liberal 11 persen. Kemudian terakhir, *hashtag* agama umum didominasi oleh paham moderat sebanyak 46 persen, disusul oleh islamis 35 persen, liberal 9.5 persen, dan konservatif 9.1 persen.

Kesimpulan

1. Narasi keagamaan di media sosial didominasi oleh narasi konservatisme,
2. Politisasi agama berkontribusi bagi peningkatan narasi konservatisme di media sosial,
3. Politisasi narasi keagamaan juga berdampak pada polarisasi di media sosial.

Rekomendasi

Strategi untuk menangani polarisasi, di antaranya:

1. Perbanyak ruang-ruang pertemuan dan forum untuk dialog,
2. Gunakan pedoman dan fasilitasi netral untuk memelihara interaksi yang saling menghormati,
3. Tingkatkan aktivitas-aktivitas untuk membangun tingkat kepercayaan.

Pertarungan Wacana di Media Sosial

Indra Dwi Prasetyo

Social Media Enthusiast & Managing Director ID Next Leader

BAGAIMANA kita bisa mengetahui dan mencegah terjadinya polarisasi di media sosial? Artikel ini akan menjelaskan pola-pola pertarungan wacana atau polarisasi di media sosial, mengapa hal ini terjadi dan terakhir apa yang bisa dilakukan.

Social Media as a New Normal

Saya mengambil sebuah studi kasus tentang Covid-19. Fenomena teknologi informasi yang sangat canggih telah membuat kita sebagai makhluk sosial menjadi sangat mudah untuk bersosialisasi. Apa yang terjadi di Wuhan pertama kali pada hari itu juga kita dapat melihatnya di media sosial. Kita *flashback* sedikit pada Januari 2019, ketika kita melihat pemberitaan di media sosial mengenai korban-korban Covid-19 yang berjatuh di Wuhan secara tidak langsung dengan viralnya pemberitaan tersebut.

Dengan adanya globalisasi kita nyaris menolak untuk dikungkung lagi karena sebagai manusia global kita memiliki satu keinginan yaitu keinginan untuk dapat terkoneksi. Meskipun sudah ada upaya penyaringan informasi baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga-lembaga, saya rasa tidak ada yang bisa memfilter informasi tersebut. Maka pola-pola yang harus dikembangkan bukannya memfilter melainkan mengedukasi informasi agar dapat dicerna dengan baik. Jadi bukan untuk menutup ruang informasinya tapi bagaimana informasi tersebut menjadi pengetahuan bagi masyarakat Indonesia, dengan cara masyarakat kita harus pandai mencerna informasi sesuai konteks awalnya.

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama dan Polarisasi di Dunia Maya, Jumat 27 November 2020.

Kita lihat contoh. Berikut ini adalah beberapa demo di Amerika ketika Covid-19 baru muncul dan masih dianggap sebagai sebuah konspirasi dan dianggap ada hubungannya dengan Bill Gates dan 5G.



Ketika hal ini berlangsung ternyata di Indonesia juga langsung terdistribusi narasi yang sama dengan konteks yang benar-benar sama. Padahal kita pikir jangankan 5G, internet saja di Indonesia belum merata. Tetapi narasi ini diterima orang Indonesia dengan konten yang persis sama. Ini adalah contoh bagaimana sosial media bekerja.

Viralnya narasi-narasi ini karena di-*amflikasi* oleh yang disebut influencer. Kenapa influencer itu dipandang pro kontra, karena influencer itu sejujurnya punya dua sisi. Ada influencer yang bisa mengimplikasi agar informasi tersebut dapat dikunyah dengan baik, namun ada juga infuencer yang mentah-mentah atau blak-blakan menyampaikan informasi apa adanya padahal konteksnya bisa jadi beda.

Contoh kasus, di Indonesia misalnya ada “pertarungan” wacana besar antara gerakan “Tolak Rapid” dari Bli Jerinx dengan IDI. Pertarungan ini sampai berakhir pada penjara. Artinya di lapangan praktek pertarungan itu bukan hanya sebatas narasi tapi sudah sampai pada pengadilan dan pemenjaraan.

Pertarungan wacana semacam ini terus berkembang dan tidak hanya menyangkut Covid-19. Dalam konteks keragaman dan wacana keagamaan di Indonesia juga persis terjadi pertarungan. Misal kasus tolak Ahok. Pertarungan wacananya tidak hanya di Jakarta tapi diamflikasi di seluruh Indonesia. Di Sumatera, di Papua, di Kalimantan, bahkan di Melbourne, yang ramai dibicarakan adalah isu Ahok. Ini

artinya apa? Pola pencernaan informasi di kita masih pada tahap bahwa informasi atau isu apa pun di depan mata bisa langsung ditelan.

Why This Happens?

Mengapa ini terjadi? Saya masih berpegang pada (teori) efek “*Echo Chamber*” dan “*Filter Bubble*”. *We construct our online profiles based on what we already know, what we’re interested in, and what we’re recommended, social networks are perfectly designed to reinforce our existing beliefs* (Girard Lotan, New York University). Mengapa polarisasi itu masih terus terjadi? karena kita sendiri yang masih menginginkan polarisasi itu terus terjadi. Misalnya Youtube dan Instagram (IG). Di IG ada fitur *suggested post*, yakni postingan-postingan yang sama dengan apa yang kita sukai dan kita *share* selama ini. Jadi kita di-*reinforce*, “diberi makan” terus menerus. Begitu juga Youtube juga sama. Nama fiturnya adalah auto play di mana Youtube akan memainkan (menyuguhkan) video-video yang kita sukai secara terus menerus. Jadi secara dasar algoritmanya, sosial media memang dikonseptkan seperti itu. Akan tetapi, *the problem is how to use social media*. Karena itu saya menyepakati perlunya dialog.

How to Deal?

1. *Space a new voice*. Kita harus mendengar suara orang lain. Kita tidak boleh ikut terkotak hanya dalam pihak yang kita sukai saja, tapi harus mendalami informasi dari kedua pihak. Ini efektif karena bisa bermanfaat kalau kita ingin berkontemplasi dengan *what happen in grass root*,
2. *Bias happens everywhere, including us*. Bias bisa terjadi di mana pun dan kapan pun termasuk dalam diri kita sendiri sebagai pengguna media sosial,
3. *Educate, don’t debate*. Anak muda itu paling tidak suka diajari. Tapi mereka suka dilibatkan,
4. *Well. It is social media, not an academic journal*. Karena memang sosial media bukan akademik jurnal.

Pada akhirnya, kita akan sampai pada sebuah pemahaman bahwa “*yes, we are connected, but fragmented*”. Jadi pada akhirnya kalau kita merasa sosial media mempertemukan kita itu memang benar, tapi pada kenyataannya kita akan menemukan masalah baru yaitu kita akan menjadi *fragmented*. Kita terkurung dalam kerangka masing-masing. Jadi cara terbaik untuk bisa keluar dari fragmentasi tersebut adalah

dengan membuka pintu lain dan mendengarkan suara-suara dari orang lain sehingga dapat lebih *open minded*. Bukan untuk mencari siapa yang benar dan siapa yang salah melainkan untuk membuka cakrawala berpikir kita.

Bagian 7

Moderasi Beragama dan Media

Mediatisasi Islam Moderat di Indonesia

Makroen Sanjaya

Wakil Pemimpin Redaksi RTV

DEWASA ini, apa yang muncul di media, baik televisi maupun radio, dan seterusnya, seringkali berbanding terbalik dengan kenyataan di masyarakat yang majemuk, baik secara etnis maupun agama. Seringkali masyarakat disuguhkan berita-berita menyeramkan, intoleransi, dan tidak sesuai dengan kenyataan kehidupan masyarakat.

Saat ini kita ingin mengetahui bagaimana perkembangan moderasi beragama yang ditayangkan di media Indonesia, sehingga mengimbangi berita-berita tidak baik tentang hubungan agama di Indonesia dan hubungan agama antar masyarakat. Di samping itu, *channel* TV nampaknya masih menjadi media yang layak dipertimbangkan dalam menyiarkan dakwah terutama moderasi beragama.

“Mediatisasi Islam Moderat di Indonesia” merupakan sebuah otokritik bagi media dalam konteks menjalankan moderasi agama. Media mainstream yang ada belum menjalankan atau menunaikan tugas mulia untuk mensosialisasikan moderasi beragama di Indonesia. Tetapi kami juga menawarkan sebuah solusi untuk bisa kita diskusikan.

Jika kita mengikuti perkembangan yang ada, realitasnya adalah pengisi acara-acara keagamaan dari sisi Islam lebih mengutamakan para penutur agama yang populis. Merekalah yang mendominasi layar kaca yang kanalnya adalah milik negara yang diserahkan kepada televisi swasta untuk dikelola “dibisniskan”.

Selain itu, Islam arus utama yang mestinya membawa Islam moderat di media saat ini masih sangat minim dan tidak adanya peran moderasi beragama secara intrinsik di media arus utama. Hal tersebut terjadi karena beberapa faktor antara lain;

■ Disarikan dari Webinar ke-6 Moderasi Beragama di Mata Media, 7 Agustus 2020.

1. Program tersebut tidak menghasilkan iklan, tidak mencapai nilai keekonomian, audiens tidak memenuhi, maka akhirnya program tersebut akan dihapus;
2. Konten keagamaan saat ini masih dianggap sebagai *cost-center*, *non provit-center* belum dianggap sebagai *provit-center*; dan
3. Perspektif ekonomi media lebih dominan, ketimbang perspektif fungsi ideal media sebagai informasi, pendidikan, dan kontrol sosial.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa fungsi-fungsi ekonomi dalam media harus lebih dominan. Kemudian bisa kita lihat dalam sebuah virtualitas Islam. Virtualitas Islam ini menghasilkan sebuah paradoks di jagat maya, hal ini dikarenakan:

1. Munculnya Islam di ranah-ranah virtual kalau menurut *Bunt dan Lampeter* (2005), adalah suatu kerawanan, karena berpotensi terjadinya perbedaan tafsir al-Qur'an. Akses konten Islam mudah, tapi cenderung tanpa "sensor".
2. Dijelaskan oleh *Holmes* (2012), bahwa demokratisasi dan penghindaran kontrol negara makin menjauhkan konteks moderasi beragama. Karena penutur agama tumbuh subur di media sosial. Bebas menyebarluaskan pemahaman masing-masing, sementara otoritas negara tak kuasa meregulasi.
3. Hasil penelitian Norton (2003), kalau media mampu mempromosikan pluralisme dan reformasi sosial, maka hal tersebut merupakan sebuah potensi.

Optimasi Media Publik dan Internet untuk Moderasi Beragama

Perlu diketahui, bahwa Islam moderat arus utama di dalam ranah virtual atau digital, kalah dibandingkan dengan non arus utama. Pada intinya Islam-islam yang non arus utama itu masih mendominasi. Kemudian, kita dapat melihat Islam arus utama atau Islam moderat yang diwakili oleh TV Mu (Muhammadiyah). TV-Mu yang lahir pada 2014 bulan November, jika dishare pada platform digital, maka *subscriber*-nya hanya 144 ribu. Hal ini menunjukkan betapa berat untuk bisa bersaing memperebutkan model.

Kemudian, beralih pada *NU-Channel*, yang menggambarkan interview dengan Quraish Shihab, *NU-Channel* muncul di tahun 2017 dengan jumlah subscribarnya 554 ribu. Akan tetapi, jika kita perhatikan kelompok non-arus utama, tanpa organisasi dan lebih pada partikelir. Kita lihat dan bayangkan, Khalid Basalamah seorang "*single fighter*" dengan timnya yang berjumlah delapan orang, sudah menghasilkan

subscriber sebanyak 1,46 juta dari tahun 2013.

Jika kita mengutip konsep mediatisasi moderasi beragama antara media dan agama dari *Stig Hjarvard* (2006) yang mengatakan, bahwa media berperan penting dalam sirkulasi publik dalam representasi agama, dan dalam membingkai kontroversi agama.

Kemudian, *Hojsgaard* dan *Warburg* (2005) mengatakan, bahwa internet menjadi platform yang menonjol untuk penyebaran dan diskusi ide-ide keagamaan, memungkinkan banyak gerakan agama baru memasuki ranah publik, dan berubahnya cara lembaga keagamaan berinteraksi dengan komunitas mereka.

Merujuk pada konsep tiga metafora dari Meyrowitz (1993) yaitu; *Pertama*, media sebagai saluran, artinya media itu sebagai penyampai pesan keagamaan atau representasi keagamaan. Bagaimana konten moderasi beragama bisa menjadi agenda media. Ini tantangan bagi kita semua. *Kedua*, media sebagai bahasa, artinya cara media memformat pesan dan membingkai hubungan pengirim, konten dan penerima. Tantangannya adalah bagaimana moderasi beragama dikemas dengan bahasa budaya populer (*down to earth*). *Ketiga*, media sebagai lingkungan, artinya sistem dan lembaga media memfasilitasi dan struktur interaksi komunikasi manusia. Tantangannya adalah optimasi media publik dan internet untuk moderasi beragama.

Jika kita melihat kembali terminologi dari Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 tahun 2002 maupun dari terminologi yang disampaikan tadi, maka dalam hal ini kepada TVRI kita berharap. TV publik milik negara ini yang harus kita manfaatkan sepenuhnya. Kenapa TVRI?, selain TV publik yang dibiayai oleh negara, TVRI memiliki sumberdaya *resources* yang luar biasa. Seluruh TV-TV LPS kalah oleh TVRI karena mereka memiliki transmisi 361 titik, sedangkan TV-TV LPS itu maksimal hanya 50 atau 60. Secara terestrial, TVRI menjangkau 65% populasi. Realitas program keagamaan Islam tayang 2 jam/hari yaitu setiap Senin dan Minggu dengan acara Jejak Islam dan Serambi Islami.

Terakhir, konsep mediatisasi agama menurut *Stig Hjarvard* (2006), adalah proses jangka panjang perubahan institusi sosial dan cara interaksi dalam budaya masyarakat, karena semakin pentingnya media di semua lapisan masyarakat. Mediatisasi merupakan perubahan sosial yang selalu mengikuti bidang sosial atau budaya, menjadi logika media.

Dalam kasus agama, media sebagai saluran, bahasa, dan lingkungan, memfasilitasi perubahan jumlah, isi dan arah pesan agama di masyarakat. Saat yang sama, media mengubah presentasi agama, menantang dan

menggantikan otoritas agama yang dilembagakan. Melalui proses ini, agama sebagai aktivitas sosial dan budaya menjadi termediasi.

Sampai pada kesimpulan bahwa moderasi beragama jika ingin terlibat dan populer di media perlu memahami logika media. Media sebagai saluran, sebagai lingkungan dan juga sebagai bahasa, perlu dipelajari agar organisasi mainstream bisa memanfaatkan TV publik untuk memaksimalkan moderasi beragama di Indonesia. Tapi sayangnya memang logika media lebih cenderung kepada populis daripada substansi.

Moderasi Beragama dan Media Online

Savic Ali

Direktur NU Online dan Islami.co

MEDIA sebagai saluran, lingkungan dan juga sebagai bahasa, perlu dipelajari agar organisasi mainstream bisa memanfaatkan TV publik untuk memaksimalkan moderasi beragama di Indonesia. Tapi sayangnya memang logika media lebih cenderung kepada populis daripada yang substansi.

Terlepas dari hal tersebut, kiranya perlu usaha dan strategi khusus agar media-media terutama media televisi dari Islam arus utama dapat bersaing dengan TV swasta lainnya, sehingga dapat menyuarakan Islam moderat lebih jauh lagi.

Sebagai gambaran agar kita memahami peta besar dalam konteks dunia *online* baik *website* atau sosial media, semua tahu bahwa pengguna sosial media di Indonesia sangat banyak, sekitar 175 juta, dan 170 juta lebih itu menggunakan *Facebook*. Jadi, *Facebook* itu memang platform yang paling banyak digunakan orang, tetapi jumlah kunjungan *view* itu *Youtube*. Sehingga *Youtube*, menjadi website yang paling banyak dikunjungi. *Youtube* tidak mensyaratkan *subscriber*-nya. Namun *Facebook* mensyaratkan *subscribarnya*.

Dengan pengguna 175 juta lebih tersebut, maka masa depan Indonesia akan dipengaruhi oleh apa yang berlangsung di dunia *online*. Akan dipengaruhi dan tidak selalu ditentukan.

Di Indonesia, agama itu sangat penting. Dalam penelitian *Pew Research* 2006-2017, sebesar 93% orang Indonesia menganggap agama sangat penting dalam hidup. Lebih tinggi dari Mesir, Malaysia, dan negara-negara Eropa.

■ Disarikan dari Webinar ke-6 Moderasi Beragama di Mata Media, 7 Agustus 2020.

Dengan 93% orang Indonesia menganggap agama sangat penting, maka transformasi lewat jalur keagamaan itu menjadi penting. Jadi jika kita ingin membangun Indonesia menjadi negara yang maju, demokratis, inklusif, dan toleran, maka kita harus bicara agama.

Kemudian, jika kita bicara mengenai dunia *online*, di Indonesia itu ada realitas menarik di mana media-media keislaman memiliki pembaca khususnya sendiri. Karena dari data yang diperoleh, umumnya pembaca media Islam atau portal-portal keislaman, mereka jarang membaca portal umum.

Dalam konteks pembicaraan mengenai moderasi bergama, senantiasa berusaha mengintrodusir nilai-nilai inklusif, nilai-nilai moderat, nilai-nilai toleran dari agama, harus melalui media-media Islam. Karena jika kita mengkampanyekannya lewat media umum, jamaahnya tidak berada di sana. Orang yang membaca media umum, seperti *Kompas*, *Tirto*, *Detik*, *Kumparan*, dan lain-lain secara umum mereka sudah moderat, secara umum mereka sudah moderat.

Sementara yang masih eksklusif atau tidak moderat, hanya membaca media-media keislaman. Hal ini kemudian menyebabkan mengapa media keislaman menjadi penting.

Ada tren yang mulai bergeser saat ini, yaitu hampir setiap hari banyak media mainstream yang bicara soal keislaman. Namun sekarang, media-media Islam yang konservatif, ultra-konservatif atau inteloran, itu juga mulai kalah secara trafik oleh media-media moderat seperti *NU online*, *Islam.co*, *Bincang Syariah*.

Tidak hanya itu, di *Youtube* juga telah terjadi pergeseran. Betul bahwa Ustadz Khalid Basalamah memiliki *subscriber* yang begitu banyak dan Ustadz Felix misalnya, belum ada ustadz moderat yang *follower* atau subscribarnya 4,7 juta di *Instagram* seperti dia. Artinya ustadz moderat kalah jauh. Kalau melihat perkembangan di pertelevisian, kita mengacu pada Ramadan tahun lalu, ada dua acara keagamaan yang paling banyak ditonton. *Pertama*, ada *Sahur Time* yang diorganisir oleh aswaja NU dan Kyai Misbah memiliki rating dan *share* tertinggi berbarengan dengan acara Ustadz Somad di *TV One*. Dan itu tidak terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Kami percaya bahwa ada fenomena baru yang bisa terus mengembangkan kemoderatan Islam lewat *channel-channel online*.

Dalam menjawab pertanyaan bagaimana kita bisa mulai mengalahkan media-media *online* lain, tentunya kita harus belajar dan memahami benar-benar bagaimana cara kerja sosial media, tidak cukup kita membuat konten lalu kita *publish*. Kita harus bisa belajar untuk

menjangkau *audiens*. Bagaimana membangun *network influencer* agar mau sama-sama menyebarkan konten. Itu penting, karena kami sudah beberapa kali menyebarkan film-film pendek, ada beberapa diantaranya ditonton 30 juta kali.

Film pendek itu dianggap menyentuh dan ditonton sebanyak 30 juta kali di *Facebook*. Artinya, ada banyak sekali publik yang pada dasarnya mendukung upaya-upaya moderasi beragama. Tinggal *content creator*-nya saja mampu atau tidak menyediakan materi yang bagus, Ustadz-ustadz yang bagus, dan relevan bagi jamaah.

Di dunia media *online*, terdapat beberapa prinsip sederhana, antara lain:

1. Konsistensi. Konsistensi bahwa bagaimana kita bisa membanjiri internet dengan konten positif. Kalau kita menganggap di *Youtube* masih banyak konten-konten yang intoleran, radikal dan provokatif, maka kita harus lebih banyak memasukkan konten positif. Internet ini seperti sungai besar arus informasi, airnya mengalir sesuai sumbernya. Jika banyak yang mengalir dari sumber-sumber hoax, ujaran kebencian, maka sungai informasi itu isinya akan hitam, pekat dan sampah. Kuncinya adalah bagaimana kita memperbanyak sumber mata air yang jernih yang bersih yang sehat. Dan itu harus dilakukan secara konsisten.
2. Buatlah konten-konten yang relevan dan positif, karena relevansi menjadi krusial terhadap kehidupan realitas masyarakat. Apa yang trending di *Google*, apa yang sedang hangat di masyarakat isilah dengan bahasan serupa namun yang positif. Relevansi menjadi penting dan menuntut kecepatan. Orang harus bisa cepat menyediakan konten tersebut. Kita seringkali bergerak terlalu lambat. Tetapi siapa yang bisa bergerak dengan cepat, akurat dan dapat mempertanggungjawabkan, dan itu akan menjadi kekuatan.

Masa depan pikiran muslim Indonesia akan sangat dipengaruhi media *online* dan kita tahu bahwa media itu *powerful*. Seperti ungkapan dari Malcolm X "*The media is the most powerful entity on earth. Because they control the minds of the masses*". Media itu salah satu entitas yang paling *powerful* di dunia, karena media mengontrol pikiran manusia atau masa atau publik.

Namun kemudian, muncul beberapa pertanyaan mengenai media *Online* antara lain; *Pertama*, munculnya anak-anak muda sebagai pendakwah baik di sosial media maupun di TV, seringkali membuat keraguan apakah mereka itu mempunyai otoritas yang cukup, tapi

mereka mempunyai kelebihan yang menarik. Bagaimana cara menyikapi hal tersebut? *Kedua*, maraknya jurnalis *online* lebih menggambarkan apa yang terjadi di akar rumput sering sekali dakwah-dakwah yang ditulis melalui media, tetapi karena banyaknya yang muncul di media sering kali muncul berita-berita *hoax* dan tidak benar. Bagaimana cara menyikapinya? *Ketiga*, bagaimana bisa mensinergi kekuatan arus utama ormas Islam di Indonesia yang besar seperti NU dan Muhammadiyah sehingga tidak bersaing sendiri-sendiri sehingga kekuatannya bisa terpecah dan sedikit?

Menjawab pertanyaan tentang ustadz atau anak muda yang keatif, itu tidak menjadi masalah selama semuanya memahami keterbatasannya. Karena sejatinya kita semua memang memiliki kewajiban untuk berdakwah. Tetapi, kita harus memahami keterbatasan kita jangan merasa jika kita adalah pemilik kebenaran. Kita menyampaikan dakwah dengan ilmu yang kita tahu dan tanpa paksaan. Terpenting adalah selama ustadz-ustadz muda tersebut menyadari bahwa dia bukan pemilik kebenaran. Namun memang realitasnya, banyak sekali ustadz, yang berdakwah seolah-olah dirinya pemilik kebenaran dan yang lain salah. Maka di situlah kesalahannya.

Kemudian, menyoal kolaborasi. Kami teman-teman NU dan Muhammadiyah dari kalangan muda sudah sering bertemu dan berkolaborasi. Di *Islami.co* misalnya banyak juga teman-teman Muhammadiyah yang sudah berkontribusi untuk menulis. Tetapi, kekalahan kita dalam tanda kutip adalah bukan karena NU dan Muhammadiyah bersaing, karena tidak ada kaitannya dengan itu. Banyak orang yang menganggap NU dan Muhammadiyah tidak akur dan tidak mau bekerja sama. Bukan karena itu, bekerja sama jika konten atau hasil *output* yang dikeluarkan tidak bagus juga tidak akan banyak yang menonton. Maka dari itu perlu strategi yang tepat untuk mengatasinya. Tidak ada keterkaitannya ketertinggalan kita dengan relasi antara NU dan Muhammadiyah dalam konteks dunia *online*. Hanya ada masalah di faktor kompetisinya saja seperti kualitas produk atau kontennya dan bagaimana marketingnya bekerja.

Terakhir, untuk memperkuat kampanye moderasi beragama, belajar Islam itu biasanya kalau orang kota memulai dari hal-hal *Ubudiyah*, misalnya mengenai tata cara salat id. Baru kemudian mereka membaca hal-hal terkait pandangan Islam mengenai relasi dengan umat agama lain atau hal-hal lain. Kalau kita ingin mempengaruhi orang, tulisan-tulisan mengenai *Ubudiyah* itu harus cukup banyak. Saya kira Ustadz-

ustadz Salafi disukai karena mereka banyak membahas mengenai hal-hal Ubudiyah karena memang menjadi sesuatu yang dibutuhkan masyarakat.

Baik *NU Online*, *Islami.co*, dan *Bincang Syariah*, pengunjung terbesarnya berasal dari *Google*, artinya adalah kalau tulisan kita semakin baik dan relevan dengan kehidupan sehari-hari maka ada potensi naik.

Moderasi Beragama Indonesia: Catatan Jurnalis Internasional

Ed Sepsha

Jurnalis Kyodo News, Kantor Berita Jepang

MODERASI beragama adalah suatu keharusan bagi bangsa Indonesia. Kita ditakdirkan hidup dalam bangsa yang majemuk, baik secara etnis maupun agama. Sayangnya, apa yang kadang dibaca oleh orang-orang yang muncul di berita media cetak, media elektronik seperti tivi dan radio, seringkali berbanding terbalik dengan kenyataan di masyarakat. Adagium media bahwa, "*bad news is good news*" nampaknya perlu ditinjau kembali dan diubah menjadi *good news is good news*. Jadi, kejadian baik di lapangan menjadi berita baik pula bagi media; begitu juga sebaliknya.

Terlepas dari hal tersebut, kita berharap bahwa Islam moderat tidak hanya dipublikasikan oleh media nasional, namun juga media internasional, serta bagaimana tumbuhnya moderasi beragama di Indonesia dan dunia. Tetapi, muncul pertanyaan tentang bagaimana media internasional ketika ingin mencari berita tentang agama dan negara, apakah kemudian mereka ini tertarik? Dan, apa yang paling banyak dicari? Apakah berita-berita moderasi beragama itu memiliki daya tarik di kancah internasional?

Moderasi beragama memiliki prinsip adil dan berimbang. Sama halnya dengan kode etik jurnalistik yaitu harus bersikap independen, menghasilkan berita akurat dan berimbang.

Berita-berita yang sering kita baca di media-media asing mengenai agama sering kali meliput peristiwa-peristiwa kekerasan. Misalnya pada 2019, ada teror *attack* di Surabaya dan peristiwa kerusuhan di Ambon pada 1999 yang melibatkan entitas dua agama.

■ Disarikan dari Webinar ke-6 Moderasi Beragama di Mata Media, 7 Agustus 2020.

Sebelum melakukan peliputan tentang *attack* Surabaya, tentu saya harus memahami kondisi lapangan, kemudian melakukan riset mengenai serangan tersebut. Di mana pun saya melakukan liputan, saya harus bisa menulis untuk semua agenda, untuk semua isu. Baik itu ekonomi, politik, terorisme, bencana, dan lain-lain. Itu tantangan tersendiri bagi kami sebagai jurnalis di media asing. Lalu, ketika saya datang di hari kedua peristiwa, serangan-serangan dari peristiwa tersebut tentu saja sudah banyak pemberitaannya di media-media asing dan bahkan sudah dipublikasikan oleh banyak media lokal.

Kontribusi saya di media asing, khususnya kantor berita Jepang, selain berita-berita peristiwa, tentu saya juga ingin menyuguhkan sisi lain setelah konflik itu terjadi. Bahwa dua kelompok agama tersebut sudah berdamai dan kami ingin menggali bagaimana konflik ini ternyata menyisakan masa-masa kelam bagi anak-anak yang terlibat konflik di Ambon khususnya.

Hal itu cukup menarik dan mendapat respon baik dari media-media asing mengenai tulisan yang saya tulis. Tentu sikap netral dan tidak berpihak yang digunakan jika menulis soal peliputan-peliputan agama. Kita harus memiliki sensitivitas ketika kita bertemu dengan narasumber. Selama saya menjadi jurnalis, ketika meliput tentang konflik, kekerasan atau yang terkait dengan agama, yang menjadi pegangan saat menulis adalah kekerasan apa pun yang mengatasnamakan agama, yang menjadi ancaman terbesar adalah tindakan pelaku, bukan agama.

Jadi, hal yang perlu ditekankan, kita jangan menulis berita lalu kemudian menyudutkan salah satu agama, sebagai contoh “serangan ini disebabkan dari agama A, agama B, dan seterusnya”. Karena itu justru akan memberikan *image* buruk terhadap agama.

Hal ini menjadi PR besar bagi Indonesia. Sebab, Islam yang dikenal oleh asing atau orang-orang luar baik di Barat ataupun di Timur adalah Islam yang berasal dari Timur Tengah. Di Jepang sendiri, mereka mengenalnya Islam Timur Tengah. Menjadi tugas insan jurnalis di Indonesia adalah ketika ingin meliput sesuatu, khususnya peristiwa keagamaan, mereka harus dan wajib untuk melakukan riset terlebih dahulu.

Saya mencoba menyajikan sisi lain mengenai Islam di Indonesia yang mungkin di Jepang belum banyak diketahui, karena konsep beragama di Jepang memang agak sedikit berbeda dan kurang dianggap penting. Lalu, saya mengambil contoh bahwa di Indonesia ada Muslim dari Jepang dan saya meliput bagaimana kehidupan sehari-harinya. Akhirnya berita tersebut berhasil mendapatkan respon positif.

Diakui, bahwa peliputan agama di Indonesia masih sebatas seremonial, masih hanya memasukkan peristiwa serangan, namun sisi humanis atau fitur-fitur mengenai keagamaan belum terlalu banyak diangkat untuk memberikan citra Islam yang selama ini dikenal orang Barat atau orang asing. Tantangan lain, jika di media asing, penulis di Indonesia harus bisa mengantarkan atau menjelaskan isu-isu agama yang hendak ditulis, karena editor terkadang di luar negeri yang juga tidak memegang wilayah yang sama.

Sekali lagi, media saat ini menduduki posisi sangat penting dan strategis; bagaimana media memberitakan dan menyejikan citra tentang Islam Indonesia. Banyak sekali orang yang membicarakan mengenai Islam di luar negeri, yang dituju adalah Islam Timur Tengah.

Sangat baik bila anak muda tentang agama. Anak muda memiliki kreativitas untuk membuat konten agama. Selama konten tersebut bagus dan memberikan sumber-sumber kredibel, justru sangat bagus. Tetapi, karena konten ini dibuat oleh anak muda, lebih bagus jika konten yang dibuat mengandung isi mengenai kehidupan anak muda Indonesia dan pastinya isu yang diangkat relevan.

Kemudian, komunitas yang dapat diajak berdiskusi pun sangat banyak, dan ini menjadi tanggung jawab lembaga-lembaga yang kredibel serta berada dalam arus utama Islam untuk lebih banyak mengadakan acara-acara diskusi. Adapun di komunitas jurnalis internasional mungkin bisa menghubungi *International Association of Religion Journalist*.

Terkait konten atau isu yang menarik untuk diangkat, media lokal mungkin dapat mengangkat isu-isu bagaimana tata cara berhaji, bagaimana cara salat Idul Fitri, dan lain sebagainya. Namun di media asing sendiri, tema-tema yang harus diangkat adalah pembahasan yang lebih humanis.

Terakhir, jangan sampai lagi kita mengikuti pola orang lain dengan apa yang tidak kita percayai. Bagaimana kita bisa terus menyuarakan berita baik agar kita relevan dengan pendengar, konsisten, membuat konten-konten kreatif, algoritma *friendly*, dan terakhir harus ada *timeless* topik.

Buletin dan Penyuaran Moderasi Beragama Indonesia

Muhammad Hanifuddin

Pemimpin Redaksi Buletin Jumat Muslim Muda Indonesia

MODERASI beragama sudah menjadi kebijakan negara dan masuk RPJMN sehingga semua kegiatan pemerintah dan masyarakat harus mempertimbangkan moderasi beragama. Moderasi beragama adalah suatu keharusan bagi bangsa Indonesia karena kita ditakdirkan hidup dalam bangsa yang majemuk, baik secara etnis maupun agama.

Kami banyak bersentuhan dengan akar rumput dalam arti bersentuhan dengan dunia *offline* yaitu di masjid-masjid. Di Jabodetabek ada sekitar 244 masjid yang menjadi mitra, yang setiap Jumat kami bagikan *Buletin Muslim Muda Indonesia* ke masjid-masjid tersebut.

Hal tersebut dapat menjadi alternatif buletin yang selama ini kita tahu bahwa sudah banyak di masjid-masjid yang memperjuangkan ide khilafah. Mungkin kita ingat bahwa pasca reformasi 1998 ketika kebebasan berpendapat di ruang publik mulai dibuka, di situlah kemudian muncul salah satu ormas Islam yang menawarkan ide khilafah melalui jangkar-jangkar yang bersentuhan dengan jamaah langsung.

Mereka memiliki buletin yang pada awalnya bernama *Al-Islam* dilengkapi dengan bendera Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang tercetak jelas. Namun pasca dikeluarkannya kebijakan pemerintah pada Juli 2017, HTI tidak boleh berkiprah di Indonesia.

Namun, nampaknya HTI tidak kurang cara dan strategi. Buletin *Al-Islam* kemudian diganti nama menjadi *Khaffah* yang isinya sama-sama mendakwahkan ide-ide khilafah dan mengutip ayat-ayat al-Quran serta hadis untuk menyerang kebijakan-kebijakan dari pemerintah.

Kehadiran *Buletin Muslim Muda Indonesia* menjadi alternatif yang kita edarkan di masjid-masjid. Kami fokus pada dua hal. Bagaimana konten

■ Disarikan dari Webinar Moderasi Beragama di Mata Media (ke-6), 7 Agustus 2020.

Buletin Muslim Muda Indonesia kami buat dan kami edarkan. Terkait dengan konten, kami fokus untuk mengutamakan tema moderasi beragama karena target kita adalah menyebarkan moderasi beragama dan kedamaian sehingga mempengaruhi narasi dan *framing* dari berita yang dikemas. Sumber-sumbernya kita menyinergikan antara kekayaan klasik di Islam, dan kemudian kita kemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh jamaah-jamaah di masjid.

Buletin tersebut juga menyampaikan pesan bagaimana perspektif al-Quran dan hadis dalam melihat setiap fenomena yang terjadi setiap pekan. Sebagai contoh, pada 16 Agustus 2019 dekat dengan momen perayaan kemerdekaan RI. Yang menarik adalah judul yang diangkat oleh *Kaffah*: “Syariah Islam menjadi Kemerdekaan yang Hakiki”. Nah kami juga menerbitkan buletin yang sama di momen tersebut dengan judul “Mari Mensyukuri Kebhinekaan Indonesia”.

Kita bisa membayangkan bagaimana narasi-narasi ini dikonsumsi oleh masyarakat. Kalau belum ada alternatif dari redaksi *Buletin Muslim Muda Indonesia*, jamaah-jamaah kita mungkin hanya mendapatkan satu versi saja di mana kemerdekaan itu ternyata selama ini masih belum hakiki dan yang hakiki adalah kemerdekaan yang *syariah*.

Pada buletin yang kami terbitkan di hari kemerdekaan itu, pesan yang disampaikan lebih membahas kepada bagaimana keragaman Indonesia itu bisa kita hargai, bisa kita syukuri bersama dan rayakan bersama untuk maju bersama. Kita mengemas berita Islam yang bersinergi dengan keindonesiaan dan kebhinekaan.

Kita perlu optimis dan konsistensi serta kolaborasi, sehingga apa yang kita lakukan menjadi upaya kita untuk bersinergi bagaimana masyarakat itu memiliki narasi moderasi beragama yang baik dan kokoh.

Buletin Muslim Muda Indonesia memberikan alternatif bacaan di masjid dengan merujuk dasar-dasar yang otoritatif sehingga jamaah masjid bisa mencari informasi yang lebih baik. Dalam menjalankan hal tersebut, dibutuhkan konsistensi dan kolaborasi agar kita bisa menyuguhkan pemahaman keagamaan di Indonesia.

Perlu dijelaskan, bahwa kami tidak menjadi kelompok moderat yang tertutup (anti terhadap ekstrem kanan dan kiri)—mereka dalam hal ini tetap saudara kita sebangsa dan setanah air, namun mungkin sekarang belum memiliki pemahaman yang tepat terkait keislaman dan keindonesiaan.

Ada dua hal yang ingin kami sampaikan. *Pertama*, setiap kita menyebarkan atau menempelkan buletin dan bertemu dengan buletin

milik kelompok *Kaffah*, senantiasa kita sandingkan agar jamaah dapat memilih dan membandingkannya.

Kedua, saudara-saudara kita di *Kaffah* juga sedang berproses bagaimana mensinergikan keislaman dan keindonesiaan. Mungkin ini salah satu nuansa kegairahan agama di masyarakat Indonesia yang tinggi dan harus kita kelola dengan baik dan salah satunya yaitu mau mendengar dan berdialog dengan keragaman yang ada sesuai dengan batasan yang harus dipahami.

Kemudian, terkait dengan relevansi, algoritma dan *timeless*, hampir sama antara media *online* dan *offline*. Misalnya tentang relevansi tema, tampilan, menjadi PR bersama untuk mengemas pesan moderasi Islam dengan bahasa kekinian dengan tampilan kekinian dan tema permingguan yang sedang hangat di masyarakat.

Media Sosial dan Polarisasi Sosial

Ismail Fahmi

Pencipta Aplikasi Drone Emprit

MEDIA sosial sudah menjadi menu keseharian anak-anak remaja. Anak-anak mulai SD sudah meramaikan *Tik Tok, YouTube, Instagram, Facebook* dan sebagainya. Mereka berinteraksi dan banyak berbincang di media sosial mulai bangun tidur hingga akan tidur. Aplikasi Drone Emprit dibuat untuk dapat memantau perkembangan obrolan atau perbincangan di media sosial termasuk obrolan anak-anak remaja.

Masalah yang kita hadapi sekarang ini adalah dilema sosial. Ada yang mengatakan media sosial itu dikontrol oleh algoritma yang membuat personalisasi dan polarisasi. Sebetulnya algoritma itu hanya teknologinya saja, sedangkan akarnya adalah kapitalisme. Kapitalisme menciptakan satu kebutuhan agar orang itu selalu ada di media sosial, agar *engagement*-nya selalu tinggi.

Salah satu cara yang digunakan dalam menciptakan ketergantungan adalah mobocratic algoritma. Mobocratic algoritma memancing *engagement* netizen dengan cara menyuguhkan postingan-postingan yang cocok dengan apa yang disukai mereka berdasar jejak rekam perilaku *like* dan *view*. Jika netizen tertentu senangnya berdebat dan komentar, maka oleh algoritma mereka akan diberi *timeline* yang isinya selalu kontradiktif dengan mereka.

Secara sosiologis, kondisi demikian menciptakan polarisasi yang semakin tajam di tengah masyarakat. Ini bisa kita lihat di Amerika Serikat tahun 2004, polarisasi sosialnya belum tinggi. Namun tahun 2017, polarisasinya sangat tinggi. Berbagai isu yang muncul dalam media sosial berperan besar memantik polarisasi tersebut.

■ Disarikan dari Webinar *Media Sosial untuk Moderasi Beragama*, Jumat 9 Oktober 2020.

Kondisi yang sama juga berlaku pada kita. Isu-isu tertentu memantik tajamnya polarisasi sosial kita, misalnya isu *khilafah*, bumi datar, anti vaksin dan sebagainya. Polarisasi yang cukup populer dan tajam adalah kemunculan grup bumi datar dan lawannya seiring isu-isu yang disajikan media sosial.

Saya pernah menganalisis perbincangan isu *khilafah* di media sosial pada 2019 Agustus. Isu ini paling banyak di *Twitter*. Mereka yang suka akan me-*retweet*, dan yang tidak suka akan komentar dan menyerang. Di Instagram isu ini juga tinggi, sekitar 9.400 *postingan* belum termasuk komentarnya. Sedangkan di *Twitter* sekitar 600 ribu *postingan*. Jadi, angka di *Twitter* dan Instagram itu sangat tinggi.

Apa yang mereka sampaikan? Kita bisa melihat percakapan individu tapi bisa juga kita lihat *hashtag*-nya, karena *hashtag* itu menggambarkan ide terkecil yang kemudian didukung oleh konten-konten yang lain. Misalnya *hashtag* #IslamYesKhilafahNo, atau #Ijtima ulama *khilafah* adalah ajaran Islam, dan sebagainya. Sehingga bisa dilihat perang *hashtag* tentang *khilafah*.

Jika kita lihat posisi narasi *khilafah* dengan narasi yang lain pada 26-28 September, ada berbagai macam topik seperti #WamenaBerduka, #ParadeTauhid, dan sebagainya. Lalu ada dokter yang meninggal di Wamena Papua saat isu *khilafah* sedang ramai. Dari *hashtag* itu kita bisa mengetahui siapa saja yang meramaikan medsos dan apakah banyak yang pro dan kontra. Ternyata ada oposisi, pro-*khilafah*, dan ada isu lain seperti berduka di Papua. Jika kita lihat peta media sosial pada saat itu, yang pro pemerintah pada saat ada dokter yang meninggal, dia tidak mengangkat tentang dokter melainkan isu anti *khilafah*-nya. Topik *khilafah* juga dibalas dengan *hashtag* #212carimuka.

Bagaimana cara supaya kita tidak terkena algoritma dan tentu saja terhindar dari polarisasi? Caranya adalah sebagai berikut:

1. Mematikan semua notifikasi, karena setiap kita *install* suatu aplikasi maka semua notifikasi akan muncul dan kita akan selalu melihat. Hal ini penting dilakukan agar perhatian kita tidak diambil sepenuhnya oleh algoritma. Ketika jika perhatian itu diambil ia bisa dimonetisasi. Semakin lama kita bisa masuk ke media sosial semakin lama kita juga bisa dimonetisasi.
2. Matikan personalisasi agar kita bisa menghabiskan waktu *for nothing*.
3. Jangan gunakan media sosial apabila kita tidak tahu apa yang mau kita lakukan saat itu. Apabila kita tidak punya tujuan maka waktu kita akan habis. Setiap memegang HP, tentukan tujuan kita. Jadi kita

yang mengontrol apa yang kita cari dan bukan algoritma itu yang merekomendasikan kita.

4. Jangan *hanya* share satu sisi. Lihat dari berbagai sisi, tapi jangan meladeni *troll*. *Don't fight the troll* karena mereka hanya mau berkomentar tanpa berdiskusi. Kita juga harus berpihak pada kebenaran yang berbasis data dan kepercayaan.

Kontestasi Paham Keagamaan di Media Sosial

Ilm Halimatusa'diyah

Koordinator Riset Media and Religious Conservatism – PPIM UIN Jakarta

MEDIA sosial berpengaruh besar terhadap corak dan sikap keagamaan. Ia sangat berperan dalam mengekspresikan sikap dan narasi keagamaan sekaligus menjadi sumber informasi terkait aktivitas dan ritual keagamaan. Banyak studi tentang media sosial dan paham atau narasi keagamaan.

Terkait itu, saya ingin berbagi cerita tentang riset yang kami lakukan sebagai bagian dari proyek penelitian *Religious and Conservatism*. Riset ini berbeda dengan riset-riset lain yang cenderung fokus menganalisis pada tokoh, organisasi keagamaan, atau paham keagamaan tertentu yang terkait radikalisme dan terorisme.

Penelitian yang kami lakukan untuk melihat lebih general dalam konteks yang lebih komprehensif dari penelitian-penelitian lainnya. Untuk itu, penelitian kami terfokus pada dua pertanyaan, yaitu paham keagamaan apa saja yang berkembang di media sosial dan bagaimana persebarannya? Bagaimana kaitannya dengan moderasi beragama di Indonesia?

Teori yang kami gunakan dalam penelitian itu adalah teori mediatisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa media sosial berperan penting sebagai alat untuk menginformasikan berbagai konsep dan nilai, termasuk nilai agama yang membentuk diskursus agama di ruang publik.

Kami juga menggunakan teori efek media, yang menyatakan bahwa media termasuk media sosial punya kemampuan *echo chamber*. Media sosial memfasilitasi penyebaran opini dan gaung pengaruhnya terhadap masyarakat luas. Sehingga alih-alih menjadi media tukar pikiran dan pandangan berbeda, media sosial malah menguatkan

■ Disarikan dari Webinar *Media Sosial untuk Moderasi Beragama*, Jumat 9 Oktober 2020.

paham keagamaan yang sudah dianut. Misalnya kita punya pemahaman konservatif dan kita bergaul dengan si konservatif dalam jaringan luas media sosial sehingga media sosial berperan menguatkan pemahaman ini.

Untuk spektrum paham keagamaan, kami mengkategorikannya ke dalam tiga kategori, yaitu liberalisme (kiri), konservatisme (kanan), dan moderatisme (tengah). Kami mem-*breakdown* kategori konservatisme ke dalam dua kategori turunan, yaitu islamisme dan radikalisme.

Islamisme adalah paham konservatif dengan cita-cita penegakan syariah Islam sebagai dasar negara, sehingga cita-cita politik Islamnya lebih dominan dan politiknya lebih kuat. Sedangkan radikalisme merupakan paham konservatif dengan penggunaan aspek kekerasan sebagai alat pencapaian cita-cita.

Penelitian ini menggunakan data *Twitter* yang cukup panjang, yaitu dari 2009 (tahun dimana *Twitter* berdiri) hingga 2019. Kami menggunakan cara *crawling* dan *scrapping* dalam pengambilan datanya, lalu kami menggunakan cara *sampling*. Kami melakukannya dengan cara mencari *tweet* di akun-akun media sosial dengan *keyword* seputar agama mulai dari yang paling umum seperti Islam, fikih, Quran-hadis, hingga term-term tertentu yang merujuk pada indikator-indikator untuk mengidentifikasi kategori paham liberal, moderat dan konservatif atau radikal.

Setelah data dikumpulkan, kami tidak langsung menganalisisnya melainkan terlebih dulu melakukan *filtering* dalam beberapa tahap. Ini untuk memastikan bahwa datanya bersih dan tidak ada *noise* atau data yang sebenarnya tidak relevan.

Akhirnya kami berhasil menghimpunkan dengan total sekitar 2 juta *tweet*. Kami menggunakan *text analytics*, *topic modelling*, *network analysis*, *spatial analysis* dan *supervised machine learning*. Pada 2009 masih sedikit sekali *tweet* yang terkait agama karena memang pada waktu itu *Twitter* baru saja berdiri sehingga belum banyak akun-akunnya. Data paling banyak dipakai dan dapat dikumpulkan adalah data tahun 2013 dan 2014, sejalan dengan puncak popularitas *twitter* itu sendiri.

Kontestasi Paham Keagamaan di Media Sosial

Lantas, paham keagamaan apa saja yang berkembang di media sosial? Setelah kami melakukan analisis menggunakan *machine learning*, kami menemukan bahwa paham keagamaan di *twitter* sejak 2009 sampai 2019 masih didominasi oleh narasi yang konservatif yaitu

sebanyak 67.2%. Sedangkan yang moderat 22,2%. Paham Islamis masih sangat kecil yaitu 4,5% dan paham liberal juga kecil hanya 6,1%.

Lalu bagaimana persebarannya? Menggunakan analisis spasial, kami melihat persebaran masing-masing narasi keagamaan itu. Namun kami melihat titik konsentrasinya adalah di pulau Jawa dan di kota-kota besar. Dari total kota di Jawa, kami menemukan Jakarta mencatatkan kontestasi sengit narasi keagamaan antar paham yang berbeda. Narasi liberal, moderat, konservatif saling berkompetisi. Melihat periodenya, kuat dugaan kompetisi narasi ini tidak lepas dari pengaruh Pilkada Jakarta.

Hal menarik lainnya, narasi yang cenderung liberal itu cenderung berada di Jawa Timur. Kami mendeteksi bahwa teman-teman NU yang progresif cenderung mengedepankan pandangan-pandangan yang cukup progresif sehingga Jawa Timur cenderung memiliki *tweet* paham liberal yang cukup tinggi.

Selanjutnya, saya ingin mencontohkan bagaimana kontestasi narasi keagamaan antar kategori. Misalnya, pada *ukhuwah islamiyah*. Paham keagamaan liberal melihat *ukhuwah islamiyah* itu bersifat universal di mana ia difahami sebagai persaudaraan sesama anak manusia. Kelompok moderat hampir sama dengan paham liberal yaitu melihat persaudaraan umat manusia, hanya saja kelompok ini menekankan bahwa *ukhuwah islamiyah* dan *ukhuwah wathaniyah* juga penting.

Berbeda dengan paham liberal dan paham moderat yang melihat lingkup *ukhuwah* yang lebih luas, paham konservatif melihat *ukhuwah Islamiyah* itu hanya spesifik sesama orang Islam. Begitu juga paham Islamisme yang menekankan persaudaraan sesama umat Islam untuk tujuan cita-cita mendirikan khilafah atau negara Islam Indonesia.

Kami melihat faktor penting *engagement* dalam persebaran narasi keagamaan. Kami melihat bahwa dari 1500 *tweet* yang viral, 315 paling tinggi itu adalah *tweet* viral milik Felix Siaw, lalu yang kedua 181 milik Gus Mus, dan seterusnya. Kami melihat bahwa aktor-aktor ini adalah aktor penting karena mendapat *engagement* yang tinggi.

Kami juga menemukan jaringan pertemanan aktor-aktor *Twitter* itu cenderung homogen dan tertutup. Misalnya Gus Mus di-follow dan atau mem-follow tokoh-tokoh *twitter* yang paham keagamaannya kurang lebih sama dengan Gus Mus. Begitu juga jaringan pertemanan Felix Siaw cenderung homogen atau tertutup. Akibatnya, *Twitter* menggaungkan paham keagamaan yang sudah dimiliki seseorang.

Bagaimana jaringan di level massa? *Pertama*, jaringan dan interaksi

cukup terbuka dengan kelompok konservatif dan liberal, meskipun masih sangat sedikit dengan sekelompok Islamis. *Kedua*, minimnya interaksi antara kelompok liberal dan kelompok Islamis, sehingga proses pertukaran pemahaman keagamaan dan harapan moderasi paham keagamaan akan sulit dicapai. *Ketiga*, harapannya di level massa, moderasi beragama itu masih bisa terwujud meskipun sulit bahwa kelompok yang paling ekstrim dan terpolarisasi dapat bertukar pikiran dan pandangan.

Berangkat dari itu, kami menarik sejumlah kesimpulan. *Pertama*, narasi keagamaan di media sosial didominasi oleh narasi konservatisme disusul oleh narasi moderatisme. *Kedua*, kontestasi narasi keagamaan media sosial terkonsentrasi di kota-kota besar terutama di Jawa yang memiliki penetrasi penggunaan media sosial yang lebih tinggi.

Ketiga, jaringan yang homogen dan tertutup di level tokoh sentral yang berperan dalam diseminasi narasi keagamaan mengakibatkan efek *echo chamber*. Efeknya bahkan kalangan liberal pun lebih konservatif dari kelompok lainnya. *Keempat*, jaringan pertemanan lebih heterogen dan terbuka di level massa terutama antara kelompok moderat dan konservatif. Sedangkan jaringan pertemanan di kalangan liberal dan Islamis masih cenderung tertutup, sehingga menyulitkan terwujudnya moderasi paham keagamaan.

Berdasar temuan penelitian yang dilakukan, kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai bagaimana media sosial menjadi instrumen penting penyuaan moderasi beragama. *Pertama*, transformasi di kalangan moderat untuk menjadi *noisy majority* penting dilakukan untuk mengimbangi narasi kelompok konservatif dan Islamis yang *noisy minority*. *Kedua*, selain melibatkan ustadz dan tokoh masyarakat, program-program moderasi keagamaan di media sosial juga perlu melibatkan individu-individu pegiat media sosial yang berperan sebagai media *influencer*. *Ketiga*, pentingnya membuat gerakan "*escape from echo-chamber*" dengan membuka jaringan pertemanan dan ruang perjumpaan dengan orang yang berbeda paham keagamaan.

Media Sosial untuk Moderasi Beragama

Abdul Karim Munthe
Ketua Sindikasi Media Islam

REVOLUSI industri dan *revolusi society* seperti kita temui hari ini turut mempengaruhi gaya hidup manusia, termasuk pemahaman keagamaan kita. Sekarang ini kita mulai masuk *super smart society 5.0* dimana polarisasi sosial juga semakin menguat. *Super smart society* ini bukan lagi dikendalikan oleh manusia tapi sudah berjalan sendirinya membentuk kondisi suatu masyarakat baru.

Ketika muncul revolusi temuan sepeda, misalnya, masyarakat tidak pernah ribut tentang kemunculan sepeda ini. Tetapi ketika penggunaan google dan media sosial merebak maka timbullah banyak konflik. Jadi ini merupakan tantangan tersendiri bagi pegiat media sosial dalam menggaungkan moderasi beragama di media sosial.

Saya akan bercerita bagaimana kita membentuk sindikasi media Islam. Sebelumnya kelompok-kelompok moderat berupaya menyuarakan moderasi beragama yang lebih inklusif dan terbuka. Setelah upaya ini berjalan cukup panjang namun ternyata hasilnya tidak begitu menggembirakan, mulailah dibentuk sindikasi-sindikasi antar kelompok yang sama dan akhirnya terbentuklah sindikasi media Islam.

Ada beberapa faktor mengapa kelompok moderat lebih tertinggal di media sosial. Misalnya masih kuatnya anggapan bahwa jika ingin menjadi muslim yang baik maka harus berguru kepada kiai di pondok pesantren. Sementara media dan IT terus berkembang pesat. Media belajar bukan lagi hanya pertemuan fisik tapi juga konten-konten media sosial dari para kiai dan ustadz. Namun para kiai dan ustadz yang moderat tidak lebih banyak dan tidak lebih aktif dibanding konten-

■ Disarikan dari Webinar Media Sosial untuk Moderasi Beragama, Jumat 9 Oktober 2020.

konten yang anti moderasi beragama. Para kiai dan ustadz moderat itu kalah populer.

Hal ini bisa dilihat dari peta hasil pencarian di Google. Google bisa menjadi pintu masuk wacana keislaman, sehingga Google menjadi gerbang utama untuk menunjukkan wajah keislaman. Kita lihat kata-kata kunci yang membentuk kata-kata terkait moderasi beragama masih perlu dimaksimalkan.

Banyak sekali pencarian mengenai khilafah, siapa pemimpin khilafah dan sebagainya. Pengalaman pribadi juga banyak dicari dan dibaca. Selain itu, ibadah-ibadah praktis menjadi kata kunci yang juga banyak dicari di media sosial.

Interaksi Media Sosial

Di media sosial banyak sekali interaksi antar netizen. Bisa-bisa dikatakan dari sekitar seratus 100 pengguna terdapat dua atau tiga pengguna yang memiliki bobot yang baik. Konten-konten dan komentar-komentar di media sosial menjadi pintu masuk bagi kami untuk membuat konten-konten yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Tantangannya adalah konten yang baik belum tentu dibaca. Misalnya artikel jurnal umumnya jarang dibaca, berbeda opini pendek di media sosial.

Lalu apa yang harus dilakukan? Ada dua hal yang dilakukan. *Pertama*, memperbanyak konten damai. Perlu dipahami bahwa di Indonesia tren pembaca website keislaman selama pandemi Covid-19 ini menurun 50% dari sebelum pandemi. Untuk itu, sangat penting untuk memperbanyak konten damai terutama di media sosial. Mungkin konten di website sudah cukup baik, tapi konten di media sosial masih belum maksimal terkait bagaimana kita menyampaikan narasi yang baik, terlebih di *YouTube* atau *Podcast*. Di *YouTube* tampaknya teman-teman moderat belum ada apa-apanya dibanding konten puritan. Tantangannya adalah bagaimana menebar konten yang menghibur sekaligus mendidik. Kedua, melakukan dialog. Saat ini ketika pandemi, banyak kajian online dilakukan. Harapannya adalah agar kajian yang bersifat sistematis dapat dilakukan terus menerus.

Bagian 8

**Moderasi Beragama:
Perspektif dan Peran Pemuda**

Menghadirkan Pesan Moderasi di Ruang Digital

Ramzi Ahmad

Asisten Staf Khusus Presiden RI

Wakil Ketua Umum Gerakan Nasional Literasi Digital Siberkreasi Kemenkominfo

MODERASI beragama merupakan cara beragama yang relevan bagi kita yang hidup di tengah-tengah keragaman. Berbagai nilai positif terkandung di dalam semangat moderasi, seperti penghargaan terhadap perbedaan. Lalu, bagaimana moderasi beragama bisa disampaikan kepada generasi yang lahir di era kemajuan digital sehingga turut menjadi kesadaran keberagamaan mereka?

Sebelum membahas bagaimana moderasi beragama bisa disampaikan kepada generasi yang lahir dan hidup di era digital, mari kita memahami profil generasi dimaksud. Dengan begitu bisa diketahui sejauhmana generasi ini memiliki kedekatan dengan media digital dan bagaimana mereka memandang agama.

Generasi yang lahir di era digital sebetulnya memiliki beberapa kategori. Berdasar periode lahirnya misalnya, generasi yang lahir di rentang 1965-1980 disebut Gen X, sedangkan generasi yang lahir di rentang 1980-1996 disebut sebagai generasi milenial. Adapun generasi yang lahir setelahnya, 1997-2012, disebut sebagai Gen Z, dan generasi setelahnya yang lahir 2013 hingga kini dikenal sebagai Post-Gen Z.

Di Gen X menempatkan teknologi sebagai hiburan (*entertainment*), sedangkan generasi milenial menjadikan teknologi sebagai alat untuk mempermudah hidupnya. Berbeda dengan generasi sebelumnya, Gen Z melangkah lebih jauh lagi dengan menjadikan teknologi sebagai bagian penting hidupnya. Pada generasi ini, manusia dan teknologi hidup berdampingan dan saling mempengaruhi.

Kedekatan Gen Z dengan teknologi digital memungkinkan mereka membangun komunikasi dan pergaulan lebih luas. Karenanya, generasi

■ Disarikan dari Webinar Perempuan Bicara Moderasi Beragama, Jumat 14 Agustus 2020.

ini dikenal juga sebagai homoglobis atau manusia yang sudah tidak lagi disekat berdasarkan waktu dan jarak.

Dilihat dari sisi keagamaan, merujuk berbagai literatur, generasi yang lekat dengan kehidupan digital di Indonesia dan luar negeri memiliki perbedaan lumayan signifikan. Di luar negeri seperti Eropa dan Amerika, generasi milenial dan generasi postmilenial cenderung tidak menyukai dua hal, yaitu bentuk agama yang dilembagakan (*organized religion*) dan semua hal berbau politik.

Sementara di Indonesia, mayoritas anak muda masih tergabung dalam *organized religion* dan menyadari *organized religion* sangat dekat politik. Unikny, ketertarikan mereka untuk bergabung dengan kelompok-kelompok keagamaan (moderat) juga sangat tinggi seperti dengan bergabung pada Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan lainnya.

Ketertarikan bergabung dalam organisasi kemahasiswaan berbasis keislaman seperti Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga masih sangat tinggi. Artinya, ketertarikan mereka dengan *organized religion* masih sangat tinggi.

Bahkan tidak sedikit anak-anak muda Indonesia juga bergabung dengan organisasi keagamaan Islam garis keras seperti Front Pembela Islam (FPI) dan bahkan tertarik gelombang kampanye media sosial Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Ini makin menegaskan perbedaan generasi muda di luar negeri yang tidak suka terikat dengan *organized religion* dan generasi muda Indonesia yang tetap berminat untuk berafiliasi pada *organized religion*.

Bahkan tidak hanya itu, generasi muda Indonesia juga menunjukkan kecenderungan berafiliasi pada kelompok hijrah. Kelompok ini cukup menarik minat banyak anak muda (Muslim) Indonesia untuk bergabung ke dalamnya.

Aspek lain yang membedakan generasi digital Indonesia dan luar negeri adalah soal pemaknaan keagamaan. Generasi digital luar negeri menampilkan kecenderungan penerimaan terhadap nilai-nilai universal (*universal values*) dan dianggap sebagai hal yang bersifat umum. Sedangkan generasi digital Indonesia cenderung masih berkuat pada penerimaan literasi keagamaan (*religious literacy*). Literasi keagamaan masih begitu kuat di kalangan anak-anak muda Indonesia dibanding nilai-nilai universal.

Perbedaan kecenderungan ini terlihat pada bagaimana anak-anak muda ini memperlakukan sampah, misalnya. Di generasi luar negeri, membuang sampah sembarangan tidak bisa diterima karena dinilai menyebabkan kerusakan lingkungan hingga pemanasan global. Sedangkan generasi muda Indonesia melihatnya sebagai perilaku yang bertentangan dengan hadis Nabi Muhammad tentang kebersihan.

Contoh perbedaan lainnya adalah berbuat baik terhadap orang tua. Di mayoritas kalangan muda Indonesia, berbuat baik terhadap orang tua dimaknai dalam konteks anjuran bahkan perintah agama. Sedangkan di luar negeri, berbuat baik kepada orang tua dipahami dalam konteks nilai-nilai universal lebih luas.

Demikian profil generasi yang lahir di era digital yang secara berjenjang memiliki perbedaan juga dalam menempatkan teknologi digital itu sendiri. Selain sikap mereka yang lebih maju dalam mempersepsi dan menempatkan teknologi, generasi ini juga memiliki karakter dan pandangan khas menyangkut aspek keberagamaan. Dan khusus Indonesia, generasi muda masih menempatkan agama sebagai bagian penting hidup mereka.

Lantas bagaimana menghubungkan generasi digital dengan gagasan moderasi beragama sebagai cara hidup beragama mereka dalam konteks keindonesiaan yang plural?

Terminologi 'moderasi beragama' sebetulnya terminologi yang tepat untuk menumbuhkan sikap penghargaan terhadap perbedaan dibanding terminologi lainnya. Namun saat dihubungkan ke ruang digital, perlu dipahami bagaimana ia bisa menjadi konten yang bisa diterima oleh generasi muda.

Dalam media sosial dikenal algoritma sejak beberapa tahun lalu yang awalnya dikembangkan dengan tujuan bisnis. Algoritma digunakan sebagai instrumen pengukuran kecenderungan postingan yang sering diakses masyarakat berdasarkan *chambers* dan interest masing-masing.

Jika algoritma sebelumnya menampilkan sebuah postingan yang banyak mengundang penanda setuju (*like*) di beranda media sosial kita, maka saat ini algoritma bergerak lebih sempit lagi. Kini, algoritma cenderung menampilkan jenis postingan apa yang kita sukai seperti banyak diakses di perangkat medsos kita.

Melalui pengukuran demikian, algoritma memungkinkan kita mengakses lebih banyak informasi yang kita sukai. Hal ini kemudian sering diungkapkan banyak orang, media sosial dengan berbagai fiturnya lebih memahami apa yang manusia inginkan. Ini dimungkinkan

karena mereka sudah mengukur postingan apa saja yang lebih banyak kita akses dan sukai.

Sebagai contoh di suatu tahun politik pemilihan capres-cawapres, jika kita banyak mengakses informasi seputar capres-cawapres A, maka kita laman media internet kita akan banyak menawarkan informasi capres-cawapres A, bukan capres-cawapres B atau lainnya. Sebaliknya saat kita banyak mengakses informasi seputar capres-cawapres B, maka algoritman media sosial akan lebih banyak menampilkan informasi capres-cawapres B di laman digital kita, bukan capres-cawapres A. Dengan demikian, algoritma bisa disimpulkan dapat mempengaruhi pilihan ideologi dan pilihan orang.

Hal sama berlaku pada moderasi beragama. Teknologi digital dengan pengukuran algoritma di dalamnya memungkinkan produksi konten-konten positif moderasi beragama kita bisa selalu ditampilkan dalam ruang digital pengguna secara reguler.

Saat algoritma media sosial membaca pengguna media memiliki sentimen positif terhadap kontennya, maka media sosial akan membaca terus konten-konten terkait itu. Dengan begitu diharapkan pesan-pesan moderasi beragama yang ditampilkan bisa menggeser pemahaman keagamaan dia untuk lebih moderat.

Hanya yang perlu diperhatikan, konten positif moderasi beragama harus ditampilkan sebagai narasi alternatif atau narasi penyeimbang. Konten sebaiknya didesain tidak secara langsung menjadi antitesis dan pernyataan reaktif sebab konten demikian akan dihindari oleh pengguna.

Di saat yang sama, kehadiran juru bicara moderasi beragama yang bisa menyampaikan pesan-pesan di dalamnya kepada pengguna media sosial amat penting. Prinsip dakwah dengan *bi-lisani qaumihi*, dakwah berdasarkan bahasa kaum tersebut, relevan untuk ikut dipertimbangkan.

Islam, Perempuan, dan Dialog dengan Realitas Sosial

Kalis Mardiasih

Penulis & Jaringan Nasional Gusdurian

BERBICARA moderasi beragama, saya kira hal-hal teoretis tentangnya sudah disampaikan para ahli. Saya hanya ingin bercerita tentang aktivitas menulis dan mengisi konten di berbagai platform media sosial. Tentu saja tidak hanya menceritakan itu, saya ingin menceritakan latar belakang di baliknya.

Sebagai seorang Muslimah, aktivitas sehari-hari, termasuk menulis bukan sebuah kecelakaan. Saya meniatkan aktivitas menulis dan lainnya sebagai jalan dakwah. Jadi begitulah saya adanya.

Saya berasal dari Blora. Satu daerah di Jawa Tengah. Bapak saya adalah seorang modin. Sebagai seorang modin, tugasnya cukup banyak. Kalau ada lahiran, maka bapak mengazani di telinga sang bayi dan memimpin pembacaan doa baginya.

Begitu juga kalau ada nikahan, bapak yang memimpin doa. Begitu juga kalau ada kerabat atau tetangga yang meninggal, bapak yang akan merawat dari mulai memandikan, mengkafani, bahkan memimpin salat jenazah dan penguburannya. Begitulah masa kecil, hidup dengan suasana kampung dan keluarga tidak jauh dari agama.

Setelah lulus SD, saya melanjutkan sekolah ke SMP. Selain belajar, saya ikut lembaga pengajian Islam di dalamnya. Berkegiatan di mushala, melalui lembaga itu saya mulai berkenalan dengan literatur keislaman populer.

Saya sekolah SMP sekitar tahun 2000-an. Saat itu lagi nge-*trend* film *Ayat-Ayat Cinta* dan sebagainya. Bahkan di masa itu, orang-orang mulai merasa keren menggunakan panggilan *akhi* dan *ukhti*. Dan hal itu betul-betul sangat populer dalam berbagai literatur Islam populer masa itu.

■ Disarikan dari Milenial Bicara Moderasi Beragama Series (3) Jumat, 3 Juli 2020.

Lulus SMP dan melanjutkan belajar di SMA, saya kembali ikut organisasi kerohanian Islam (rohis) di sekolah. Aktif di organisasi ini, saya kembali menjumpai buku-buku literatur keislaman. Bagi saya sebagai perempuan, buku-buku tersebut tidak hanya berbicara moral secara umum, tapi secara khusus membahas moral perempuan.

Di antaranya, larangan pacaran dan berbagai moral yang secara khusus berlaku bagi perempuan. Misalnya seorang perempuan harus menjaga dirinya dengan jilbab dan larangan banyak main. Alasannya, perempuan sumber fitnah, menggoda lawan jenis, dan lain sebagainya.

Nah pada saat itu, kendati masa kecil saya juga mengaji hal-hal lain, saya tumbuh menjadi *kagetan*. Saya misalnya mengubah gaya berpakaian dengan tampilan shalehah sekali. Memang hijrah belum begitu populer kala itu, namun saya sudah melakukannya.

Bacaan keislaman populer bagi saya kemudian menjadi penting untuk didiskusikan serius dan direnungkan kembali. Mengapa bisa demikian?

Saat sekolah, saya sebetulnya memiliki banyak teman satu angkatan yang sangat cerdas. Berbekal kecerdasannya, saya kira, bisa saja mereka menjadi dokter, arsitek, bahkan ilmuwan. Namun setelah membaca literatur keislaman soal perempuan, mereka seperti kehilangan imajinasi, kehilangan cita-cita di masa depannya.

Berbeda terhadap perempuan, literatur keislaman justru mendukung laki-laki berprestasi. Laki-laki disebutkan sebagai individu yang memiliki peran agensi, diproyeksikan menjadi kepala keluarga sekaligus penanggung nafkah keluarga. Laki-laki harus maju.

Literatur keislaman yang demikian lebih banyak menekankan perempuan untuk menjaga moral, mempersiapkan diri menjadi istri, ibu bagi anak-anak, *al-umm madrasatul ula*. Moralitas perempuan betul-betul diatur dan digembar-gemborkan.

Pada akhirnya, kondisi demikian membuat saya sedih. Saya kehilangan banyak teman perempuan yang sebetulnya cerdas dan punya potensi masa depan yang cerah. Sayangnya setelah membaca literatur-literatur penuh aturan moral perempuan, mereka kehilangan imajinasi tentang masa depannya.

Masa kecil yang sederhana, sekolah di SMP dan SMA, berganti-ganti organisasi mahasiswa, tempat mengaji dengan kehilangan banyak teman perempuan menjadi titik balik saya. Saya banyak merenungkan kembali apa yang telah saya lalui. Perenungan ini mendorong saya menulis banyak tentang hal-hal demikian.

Semangat saya semakin menjadi ketika di masa setelahnya saya juga masih mendapatkan pengalaman yang sama. Beberapa teman perempuan yang memiliki karir bagus di lembaga pemerintahan BUMN, dan perusahaan multi-nasional justru memilih berhenti di tengah karir bagusnya.

Sebetulnya saya tidak memperlmasalahkan pilihannya, mau bekerja atau tidak. Itu pilihan dia. Namun yang membuat saya yang membuat saya seolah memiliki masalah adalah setelah dia berhenti kerja, dia melakukan *campaign* di media sosialnya untuk menakut-nakuti perempuan yang bekerja di luar rumah. Nah, ini sangat menggelisahkan saya.

Beruntung dalam kegelisahan demikian, saya berhasil bertemu dengan beberapa teman yang memiliki kegelisahan hampir serupa. Saya mengenal teman-teman di jejaring sindikasi media damai, di Convey PPIM, Gus Romzi, Habib Husein, dan sebagainya. Kita sepakat berjuang bersama-sama di media sosial.

Agama: Sumber Nilai dan Yang Dinamis

Kita sepakat bahwa agama sumber nilai, sumber nasihat bagi kehidupan kita. Agama memberi kita pedoman dalam menata kehidupan pribadi dan sosial. Tak hanya itu, Islam sebagai keyakinan adalah juga sebagai ilmu, bahkan sebagai cinta.

Artinya, dalam agama itu ada yang tetap dan ada yang dinamis sifatnya. Yang tetap itu perannya sebagai sumber nilai, sumber nasihat bagi kehidupan kita. Sedangkan sisi agama yang dinamis itu adalah dimensi pengetahuannya. Ia selalu dinamis dan berkembang.

Dalam bidang ilmu-ilmu keagamaan Islam sebetulnya sudah ada metodologi yang menjadi penanda keharusan baginya untuk selalu dinamis dan berkembang. *Fiqh* ada *ushul fiqih*, *hadits* ada *ushul al-hadits*, dan lain sebagainya. Namun, kadang kita mengabaikan hal ini, atau kita hanya membicarakan teorinya tapi tak terlalu benar-bener diimplementasikan.

Tentang hal itu, saya ingat kisah Gus Ulil Abshar Abdalla. Ia bercerita, ayahnya yang seorang kyai pesantren salaf(iyah) di Pati (Jawa Tengah), pernah menulis sebuah kitab yang membahas khusus tentang kontrasepsi. Hal itu ditulisnya puluhan tahun lalu. Dari bilik pesantren salaf. Tapi anehnya sampai hari ini, kita masih berbicara status halal haram kontrasepsi.

Lalu, di mana kita sekarang? Apakah ada yang juga menggarap

persoalan-persoalan menantang lain untuk dicarikan jawabannya?

Saya kira, kalau kita berbicara tentang persoalan perempuan saja, banyak yang belum tergarap. Misalnya kita berbicara tentang jilbab. Kita sepakat perempuan wajib menutup aurat. Teman-teman lulusan pesantren dan pernah kuliah di UIN pasti tahu mengenai status hukumnya.

Namun, apakah kita sudah tuntas membahasnya? Bagaimana misalnya dengan perempuan-perempuan Muslimah di Labuan Bajo yang terbiasa hidup di laut, bekerja dan beraktivitas di laut? Mungkinkah mereka berenang mengenakan gamis atau baju syari? Tidak mungkin rasanya. Apalagi harganya yang tidak terjangkau terbeli, misalnya.

Lalu bagaimana juga perempuan-perempuan Muslim di Papua atau Maluku yang menjadi nelayan? Atau perempuan-perempuan di pegunungan Merbabu dan bertani kentang?

Lalu, bagaimana juga perempuan-perempuan yang turut bekerja memikul kebutuhan ekonomi keluarga dengan bekerja sebagai guru, arsitek, dan segala macam pekerjaan hingga perempuan-perempuan yang bekerja memanggul kayu jati?

Sudah sejauh mana pembicaraan kita tentang perempuan? Tentang aurat dan peran mereka dalam kehidupan hari ini?

Jadi saya kira, Islam sebagai sumber keyakinan, itu kita sudah sepakat. Namun sebagai sumber pengetahuan, Islam harus terus didialogkan dengan realita yang terus berkembang.

Termasuk bagaimana Islam juga berbicara tentang perempuan yang kondisinya mengharuskan dia memikul tanggung jawab kebutuhan ekonomi keluarga, perempuan di tengah kondisi sosialnya yang meniscayakan dia tak selalu berkutat dengan semata jilbab. Islam harus bisa ke situ. Jadi bukan sekadar halal haram.

Pendeknya, moderasi agama dalam pemahaman saya adalah bagaimana Islam menjadi bagian dari pengetahuan yang dinamis. Islam yang mampu berdialog dengan realitas sosial, termasuk Islam yang mampu menjawab tentang realitas dan pengalaman perempuan yang ada di sini dan saat ini.

Dakwah kepada Muslim Milenial

Habib Husein Jafar al-Hadar

Content Creator Dakwah & Aktifis Gerakan Islam Cinta

MODERASI beragama sebagai cara beragama di tengah-tengah keragaman Indonesia tidak lepas dari bagaimana pesan-pesan damai agama bisa disampaikan kepada masyarakat. Keberhasilan menyampaikan pesan sangat ditentukan oleh sejauhmana pesan-pesan damai itu bisa diterima dan dipraktikkan. Metode penyampaian pesan-pesan agama jadi aspek yang perlu diperhatikan.

Sepanjang beraktivitas dakwah ke tengah-tengah masyarakat sejak beberapa tahun terakhir, baik langsung maupun bertumpu pada fasilitas teknologi digital (internet), saya menemukan setidaknya profil dua komunitas Muslim milenial yang berkembang. Keduanya, generasi muda Muslim dengan kecenderungan sekuler dan generasi muda Muslim dengan kecenderungan puritan.

Dua profil ini saya temukan pada sebagian besar Muslim milenial kita dengan beberapa karakteristik penting. Di antaranya, rentang kisaran usia antara 18-35 tahun, berlatar belakang urban, kosmopolitan, bukan santri, dan tentu saja tidak memiliki pengetahuan agama (Islam) paling dasar. Dua kelompok muda Muslim inilah yang saya temukan sepanjang perjalanan dakwah saya, terutama melalui media sosial.

Kelompok muda Muslim pertama memiliki kecenderungan sikap sekuler karena beberapa alasan. Di antaranya, kecewa terhadap agama yang tidak menyentuh problematika mereka. Agama dinilai terlalu kaku, jumud, terbelakang dan tidak modern. Karenanya mereka memilih untuk menjaga jarak dengan agama.

Pada kelompok ini, ritual peribadatan sesekali dilakukan sebagai penghormatan terhadap lingkungan dan keluarga sekaligus tanpa

■ Disarikan dari Milenial Bicara Moderasi Beragama Series (3) Jumat, 3 Juli 2020.

penghayatan. Mereka biasanya lahir di lingkungan menengah perkotaan dengan anggapan agama bukan variabel penting bagi kehidupan. Karenanya, ketaatan beribadah dan kemaksiatan tak jarang beriringan dalam kehidupan kesehariannya.

Berbeda dengan kelompok pertama, generasi muda Muslim dengan kecenderungan puritan merupakan kelompok muda Muslim yang memiliki semangat dan keinginan kuat mempraktikkan agama. Kelompok ini biasanya tampil dalam kelompok muda yang mengusung hijrah, perubahan diri menjadi sikap lebih religius.

Analisis saya, kehadiran dua kelompok ini tidak lepas dari pangkal yang sama, yaitu kedangkalan dalam pengamalan dan penghayatan agama.

Kelompok yang sekuler tidak pernah disentuh oleh aspek-aspek agama yang rasional, modern, maju, terbuka, dan inklusif. Kedangkalan keberagamaan juga jadi pangkal masalah pada kelompok hijrah. Bahkan pada kelompok terakhir, keberagamaan mereka terbatas pada gaya hidup, Islam sebagai cara mereka menata tubuh, cara berpakaian, cara berbisnis, dan lainnya.

Sikap keberagamaan seperti ditampilkan oleh dua kelompok ini merupakan problem yang harus dihadapi. Strategi dan pendekatan dakwah yang sesuai perlu dilakukan sehingga mendorong keberagamaan yang memiliki kedalaman pengamalan dan penghayatan.

Pendekatan Tasawuf

Dengan dua sikap keberagamaan pada kelompok muda Muslim tersebut, saya mencoba mendekatinya dengan pendekatan tasawuf. Karakteristik tasawuf yang menekankan aspek kedalaman beragama menjadi kunci masuk kepada kedua generasi agar mereka bisa memaknai dan mengamalkan agama dengan kedalaman.

Melalui pendekatan tasawuf, penyampaian Islam relatif bisa diterima anak-anak muda dari kedua kelompok ini. Bagi kelompok berkecenderungan sekuler, mereka menemukan corak keislaman yang sesuai dengan pergulatan batin. Bagi kelompok berkecenderungan puritan, pendekatan ini memungkinkan mereka melanjutkan fase hijrah secara lebih mendalam.

Namun perlu digarisbawahi, tasawuf dalam konteks ini adalah sebagai sebuah pendekatan. Tasawuf tidak secara hitam putih diterapkan lazimnya dalam di kalangan tradisional. Kita hanya mengambil intisari tasawuf untuk kemudian dihadirkan dengan bahasa atau konsep yang

dekat dengan mereka.

Seperti diketahui, intisari tasawuf adalah cinta; satu hal yang bisa kita ungkapkan dengan pendekatan bahasa dan konseptual yang bisa lebih dipahami. Karena itu kemudian, hal ini saya populerkan dalam terminologi 'Islam Cinta'. Dan sejauh ini, pendekatan ini relatif tidak pernah menemukan penentangan dari kedua kelompok itu. Semua kelompok menyukainya.

Penyampaian pesan-pesan positif agama (Islam) kepada kaum muda Muslim saat ini harus memperhatikan sejumlah hal. Salah satunya, mengidentifikasi masalah dari setiap segmen dakwah. Kemampuan mengidentifikasi membuat pesan yang disampaikan dinilai relevan dengan kehidupan keagamaan mereka.

Penyampaian pesan-pesan positif agama juga perlu memperhatikan pendekatan yang digunakan. Pesan yang disampaikan harus memperhitungkan profil sasaran, apakah santri atau bukan, sehingga pesan betul-betul bersentuhan dengan problem mereka. Ketidaktepatan pendekatan menyebabkan pesan gagal tersampaikan kepada segmen tujuan.

Jarak antara kita sebagai penyampai pesan dengan kelompok sasaran juga perlu diperhatikan. Jangan membuat jarak, baik bahasa maupun keseharian, yang membuat kita berjarak dengan mereka. Sikap Nabi Muhammad SAW yang memosisikan para Muslimin yang sezaman dengannya sebagai sahabat layak dicontoh pendakwah untuk membangun relasi egaliter, dekat, dan tanpa jarak dengan umat.

Terakhir, hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada kaum muda muslim milenial kini adalah perlunya kolaborasi para penyampai pesan itu sendiri. Kolaborasi menjadi hal penting di era digital agar para pendakwah bisa saling mengisi satu dengan lainnya sehingga pesan-pesan positif agama sesuai spirit moderasi beragama bisa diterima dengan baik oleh umat.

Hindari Isu Keislaman Sensitif

Izza Farhatin Ilmi
Ustadzah & Penulis

SAYA ingin berbagi pengalaman saja sebagai orang yang secara kebetulan dipercaya untuk memberikan pengajian pada beberapa majelis taklim di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Tidak hanya kalangan muda, jamaah yang hadir di majelis-majelis taklim ini adalah ibu-ibu. Dengan begitu, terdapat perbedaan mencolok antara keduanya.

Pada jamaah kalangan muda, kecenderungannya adalah mereka tidak terlalu suka jika dakwah; yang kita sampaikan terlalu banyak diisi dengan berbagai dalil. Dalil memang diperlukan sebagai sebuah rujukan, namun isi ceramah dengan lebih banyak dalil membuat mereka kurang begitu menyukainya. Mereka lebih menyukai ceramah-ceramah yang menyentuh hati.

Berbeda dengan kalangan muda, ibu-ibu yang mayoritas berusia 40 tahunan ke atas memiliki kecenderungan lebih serius. Setiap menyangkut pembahasan ibadah, mereka ingin mendapatkan dalilnya, baik bersumber dari al-Quran maupun hadis Nabi.

Pada kasus hukum mengucapkan 'Selamat Natal', misalnya, mereka selalu menginginkan dalil sebagai rujukan apa pun itu keputusan hukum fikihnya. Ucapan dan sikap yang dilakukan Nabi baik di Makkah maupun Madinah tentang kasus tersebut merupakan rujukan penting yang sangat ingin mereka ketahui.

Pada dua kelompok jamaah pengajian ini tentu saja mengharuskan pendekatan yang tepat. Tujuannya agar pesan-pesan keislaman juga bisa mereka terima dan yang lebih penting semangat mereka belajar mendalami pengetahuan agama juga tidak putus begitu saja.

■ Disarikan dari Milenial Bicara Moderasi Beragama Series (3) Jumat, 3 Juli 2020.

Pada kelompok jamaah usia muda, pendekatannya tentu saja bagaimana kita bisa menyentuh. Sebagai pengajar agama, tentu kita dituntut bisa mengayomi mereka. Dengan begitu, penyampaian pesan-pesan agama juga bisa dilakukan dengan lebih baik.

Berbeda dengan kelompok muda, pendekatan yang dilakukan pada kelompok ibu-ibu memerlukan kehati-hatian. Kehati-hatian terutama menyangkut isu-isu keagamaan sensitif seperti hukum maulid Nabi, tahlilan, dan lainnya. Jika memungkinkan saya justru menghindari pembahasan isu-isu demikian.

Sebetulnya, isu-isu demikian seringkali ditanyakan oleh ibu-ibu jamaah pengajian berbagai majelis taklim yang saya isi. Hanya saja saya tidak serta merta memberikan jawaban tentang status hukum isu-isu tersebut. Mengapa itu dilakukan?

Sikap kehati-hatian, bahkan cenderung menghindari pembahasan hal-hal tersebut lebih didasarkan pada pertimbangan bagaimana kita membangun kedekatan terlebih dahulu dengan jamaah. Saat kedekatan antara kita dengan mereka telah terbangun, mereka akan dengan mudah menerima penjelasan atas isu-isu sensitif tersebut.

Kedekatan sendiri terbangun tidak dalam waktu sebentar. Itu juga tergantung pada kemauan kita untuk menyediakan waktu lebih bersama mereka seperti berbincang santai dan makan bersama usai pengajian. Pada momen-momen inilah biasanya kita baru bisa memberikan penjelasan tentang status hukum atas isu-isu yang mereka tanyakan. Kedekatan emosional menjadi cara efektif membukakan pemahaman mereka atas isu-isu sensitif.

Teladan Kyai Ali Mustafa Yaqub

Sebelum Kyai Ali Mustafa Yaqub berpulang ke rahmatullah pada 2016, saya acapkali diminta mendampingi beliau saat memberikan kajian. Sebagai santrinya, saya bertugas mengetik kembali catatan-catatan kajiannya.

Salah satu naskah yang cukup menarik yang saya ketik adalah naskah tulisan berjudul "Islam is not Only for Moeslim". Pada naskah ini, terdapat penjelasan beliau mengenai fase dakwah Nabi Muhammad yang sangat relevan untuk diteladani kita dalam menyampaikan pesan-pesan dakwah kepada umat, termasuk pesan-pesan moderasi beragama.

Nabi Muhammad, sebagaimana dicatat Kyai Ali, saat pertama kali dilakukannya di Madinah sebagai seorang Nabi dan pemimpin tidak lantas mengajarkan berbagai persoalan fikih. Sebaliknya, yang

dilakukannya terlebih dulu adalah mengumpulkan masyarakat Madinah, mengajak bermusyawarah bagaimana membangun tatanan kota Madinah yang rukun dan damai.

Kelak diskusi tersebut menghasilkan kesepakatan bersama antar penduduk Madinah, baik Muslim maupun bukan Muslim. Perjanjian damai ini masyhur dengan sebutan Piagam Madinah. Di dalamnya terdapat berbagai pasal yang mengikatkan hubungan persaudaraan warga Madinah sebagai satu ikatan dengan hak dan kewajiban yang sama tanpa melihat perbedaan suku dan agama yang dipeluknya.

Apa yang dilakukan Nabi Muhammad tersebut sejatinya merupakan teladan bagi kita, bagaimana kita (Muslim) menjadi teladan yang baik di lingkungan masing-masing. Sesuai spirit Piagam Madinah, salah satu bentuk teladan itu adalah toleransi-penghargaan terhadap perbedaan.

Milenial Katolik dan Moderasi Beragama

Fernanda Ambar Pratiwi
Milenial Katolik/Biarawati Katolik

DALAM beberapa waktu terakhir, ungkapan ‘moderasi beragama’ begitu populer di kalangan masyarakat. Ungkapan ini merujuk pada pentingnya memelihara kehidupan bersama secara rukun dalam berbagai keberbedaan. Dibanding istilah beragama yang sudah begitu dipahami, kita sepertinya perlu memahami apa itu moderasi? Kalau merujuk pada KBBI, moderasi diartikan dua hal, yaitu pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman.

Mengacu pada arti tersebut dan berbagai sumber, kami menarik pengertian bahwa moderasi beragama adalah sikap terbuka dan hidup pada keseimbangan, terbuka pada mereka yang berbeda dan bersikap tidak berlebihan atau ekstrem. Sikap ini terbangun dari keyakinan bahwa setiap pribadi adalah baik dan diciptakan dengan penuh cinta oleh Tuhan. Ini juga sejalan dengan tujuan kita untuk hidup damai dengan semua orang.

Dalam masyarakat Katolik, kata moderasi belum begitu familiar dan kami pun mendengar istilah moderasi baru-baru ini. Kami lebih menggunakan kata “terbuka” bagi teman-teman yang berbeda dengan mengacu pada sejumlah landasan yang kami yakini. Salah satunya ajaran Yesus yang mengatakan: “Hendaklah kamu mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”. Ajaran ini menegaskan bahwa hukum cinta kasih berada pada tataran kemanusiaan, bukan tataran kultus-ritual agama.

Ajaran Yesus itu diperbaharui dalam Konsili Vatikan II: Dokumen Nosta Aetate 1965. Pembaruan ini menjadi tonggak bagi kami, masyarakat gereja, untuk bersikap lebih terbuka dan moderat terhadap saudara-

■ Disarikan dari Bincang Milenial Lintas Iman, 24 Juli 2020.

saudara yang memilih keyakinan dan keagamaan di luar gereja Kristen.

Selanjutnya Dokumen Abu Dhabi yang disusun para pemimpin agama awal 2019. Dalam dokumen tersebut terdapat beberapa nilai yang bisa kita diskusikan dan implementasikan, yaitu perdamaian, kebebasan, keadilan, dialog, perlindungan tempat ibadah, serta perlindungan anak dan kaum perempuan. Dua dokumen terakhir sungguh luar biasa untuk saya sendiri.

Sebagai generasi muda Katolik Indonesia, kami juga banyak belajar dari Romo Y.B. Mangunwijaya. Romo Mangun mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan yang sangat kental dengan menghargai serta terlibat langsung mengatasi problematika hidup masyarakat. Hal ini selaras dengan ajaran Katolik yang mendorong kami untuk bisa menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat yang beragam dengan mengedepankan posisi dan sikap penghargaan dan dialog.

Memang dalam keragaman pasti ada perbedaan. Namun perbedaan juga tidak menafikan adanya satu titik temu yang menyatukan keragaman yang ada. Lalu, di manakah titik temu untuk hidup bersama itu? Tentu saja bukan di doktrin ajaran, melainkan dalam praksis hidup sebagai manusia, baik sebagai anggota masyarakat, sebagai warga negara Indonesia, bahkan sebagai umat manusia).

Sebagai umat manusia, agama apa pun mengajarkan hal sama bahwa kita merupakan makhluk ciptaan dari Tuhan Yang Maha Cinta yang mencintai semua sehingga dengan begitu kita perlu berdialog. Sebagai warga negara, apa pun agamanya, kita punya kewajiban yang sama, yaitu membela negara, melestarikan budaya, dan mengembangkan bangsa sebagai bangsa yang bermartabat dengan hidup adil, saling membantu, gotong royong, dan merawat nilai-nilai luhur budaya. Sebagai warga negara (*civil society*), kita merupakan masyarakat yang memiliki tradisi yang baik sesuai ajaran agama masing-masing untuk menjunjung tinggi satu sama lain dengan saling menyapa, saling tersenyum, saling mengunjungi, dan saling memberi selamat.

Lalu, kenapa harus berdialog? Sebab melalui dialog, kita bisa belajar mendengarkan, membagikan kekayaan pengalaman, membangun kedekatan pikir dan afeksi sebagai umat manusia. Dengan dialog juga kita bisa membangun keprihatinan dan kepedulian terhadap sesama tanpa harus menonjolkan perbedaan. Bahkan dengan dialog, kita juga bisa membuka diri, mendengarkan dan belajar dari yang lain untuk mengembangkan diri.

Pada akhirnya, perjumpaan dialogis membantu kita meningkatkan

kualitas iman. Seorang Katolik akan makin meningkat dan berkualitas imannya jika ikhlas berbagi, mau membuka diri dengan mendengarkan dan belajar dari orang lain. Perlu ditegaskan, dialog ini bukan untuk mengganti ajaran agama, melainkan untuk memahami posisi keberagaman sendiri sekaligus membangun sikap penghargaan terhadap sesama manusia dengan latar belakang berbeda-beda.

Pentingnya Dialog

Yerry Pattinasanary

Milenial Protestan/Pendeta Muda Kristen Protestan

PROKLAMASI Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945 bukan semata-mata pernyataan kedaulatan sebuah bangsa yang merdeka. Lebih dari itu, proklamasi saat itu juga merupakan momentum bersejarah bangsa ini untuk mendeklarasikan kebersamaan warganya yang hidup dan tinggal dengan keanekaragaman di dalamnya, suku, bahasa, budaya, dan agama serta kepercayaan.

Saya meyakini kita semua yang lahir di Indonesia kini juga melahirkan Indonesia di dalam hati masing-masing. Ikatan yang menyatukan kita bersama-sama kendati kita lahir dari suku berbeda, bahasa berbeda, keyakinan dan praktik keagamaan berbeda. Namun kita sama-sama Indonesia.

Keberbedaan merupakan kekayaan. Indonesia merupakan negara dengan beraneka suku bangsa dan berbagai keanekaragaman sosial lainnya. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang sangat kaya budaya. Kekayaan yang seharusnya membuat kita bangga. Sebab tidak semua warga negara memiliki kekayaan seperti Indonesia.

Sebagai Kristiani, saya meyakini ajaran Kristen yang di dalamnya diajarkan tentang Allah Tritunggal. Keyakinan akan Yang Ilahi menjadi hal penting bagi kita sebagai manusia, bahwa ada yang menciptakan dan mengatur alam semesta ini, termasuk kehidupan manusianya.

Pentingnya kita memiliki keyakinan akan Tuhan supaya kita bisa hidup bersama, sekalipun tidak sama. Jadi ringkasnya, kenapa kita membutuhkan Tuhan? Supaya kita tidak berpikir bahwa semua yang berbeda ini merupakan ancaman atau musuh yang harus disingkirkan.

■ Disarikan dari Bincang Milenial Lintas Iman, 24 Juli 2020.

Ada seorang tokoh Muslim yang mengundang kekaguman saya ketika berkata: “Kalau Tuhan yang mutlak mengizinkan ada perbedaan di antara kita, lalu siapalah kita memaksa sesuatu yang mutlak harus ada di sekitar kita?”

Saya bersyukur lahir dan hidup di tengah-tengah bangsa di sebuah negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan umat-umat agama lainnya juga hidup berdampingan. Bersyukur karena banyak dari kalangan Muslim sendiri menyadari pentingnya toleransi dan penghargaan atas perbedaan.

Hidup dalam keanekaragaman sendiri menyediakan tantangan bagi kita untuk selalu bersama-sama mengedepankan hidup rukun. Bahkan lebih dari itu, tantangannya adalah bagaimana kita menularkan semangat hidup rukun kepada yang lain, terutama generasi milenial sendiri. Untuk itu, para milenial perlu menyadari pentingnya menularkan semangat hidup rukun dalam keanekaragaman Indonesia.

Memang saya akui, kendala yang seringkali ditemukan adalah sulitnya menduplikasi pesan-pesan damai ini ke segmen milenial. Pesan yang sangat baik perlu didesain baik dengan argumentasi sehat guna menghasilkan dengan pemahaman yang baik juga.

Masalah milenial ini saya kira jadi hal serius. Setidaknya saat beberapa kali saya terlibat dalam pelatihan Satgas Anti-Narkoba dan Haul Gus Dur (Presiden RI KH Abdurrahman Wahid). kebetulan keduanya saya ikuti di UIN Jakarta. Lalu, di kalangan muda Protestan juga saya acapkali terlibat dalam penyelenggaraan sejumlah event pelatihan, seminar, dan forum dialog supaya umat Kristen ini tidak hidup eksklusif untuk kalangannya sendiri

Kesimpulan saya ikut dalam berbagai acara tersebut, baik sebagai peserta maupun panitia, adalah sangat sulitnya mengajak orang-orang yang sebenarnya paling membutuhkan pesan-pesan seperti ini. Perlu kerja keras semua, terutama para milenial yang telah lebih dulu menyadari pentingnya dialog untuk menyebarluaskan pesan pentingnya kedamaian hidup bersama.

Milenial dan Pesan Damai

Ida Ayu Prasasti
Milenial Hindu

NILAI-NILAI moderasi beragama sebetulnya merupakan hal yang telah diajarkan secara turun-temurun. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengidentifikasi moderat sebagai istilah yang kemudian digunakan pada ungkapan 'moderasi beragama' sebagai tindakan yang mengurangi kekerasan dan menghindari keekstreman. Selebihnya moderat atau moderasi mengetengahkan prinsip-prinsip seperti adil, berimbang, akomodatif, inklusif, dan toleran. Hal-hal ini bukan merupakan hal asing bagi kita.

Moderasi beragama sendiri hidup di tengah-tengah masyarakat kita hingga kini. Indonesia memiliki desa-desa yang menampilkan kehidupan seperti demikian. Desa Bukit Karangasem, Bali, misalnya. Masyarakat di desa ini terdiri dari komunitas Muslim dan komunitas Hindu yang hidup berdampingan sejak dulu hingga kini tanpa ada cerita konflik ketegangan. Untuk mengukuhkan kehidupan demikian, mereka membuat monumen prasasti tentang kehidupan harmonis mereka.

Masih di Bali, tepatnya di Desa Pegayaman, Buleleng. Masyarakat di desa ini mempraktikkan toleransi dengan sangat luar biasa. Keluarga Muslim di desa ini diperkenankan menggunakan nama-nama khas Bali untuk anak-anaknya dan itu tidak dianggap salah. Selain itu, sejak lama di desa ini juga dikembangkan sebuah tarian daerah Burba yang berangkat dari filosofi Islam untuk kemudian ditampilkan dalam kebudayaan Bali.

Hal lain yang sangat indah adalah pengalaman masyarakat di Desa Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung. Masyarakat Muslim biasa menjaga saudara-saudarinya yang beragama

■ Disarikan dari Bincang Milenial Lintas Iman, 24 Juli 2020.

Hindu saat melakukan perayaan Nyepi. Ini tentu hal yang luar biasa dan begitu indah maknanya bagi kita sebagai bangsa Indonesia.

Namun di sisi lain, riset yang saya lakukan menemukan kecenderungan berseberangan. Dalam lima tahun belakangan, muncul kecenderungan intoleransi beragama yang tinggi. Kecenderungan ini terpacu salah satunya oleh kebiasaan sebagian saudara kita untuk langsung mem-*forward* informasi bernada kebencian (*hate speech*) tanpa menyaring terlebih dulu. Jelas ini jauh dari pesan agama yang mendorong selalu mengecek kebenaran informasi dan menghindari kebencian terhadap sesama. Dalam konteks kehidupan berbangsa, ini juga menjadi ancaman berbahaya.

Kecenderungan ini perlu diantisipasi karena bisa saja menjadi bom waktu yang mengancam kedamaian hidup berbangsa. Ketiadaan antisipasi mungkin saja ini bisa menjadi ledakan serius. Untuk itu, generasi muda perlu menyadari ini dan secepatnya bergandeng tangan untuk meredakan intoleransi.

Kami sendiri dari generasi milenial Hindu berkomitmen untuk itu sambil berharap generasi milenial umat agama-agama di Indonesia juga melaksanakan hal sama. Kami yakin, kerja sama para milenial akan sangat berpengaruh dalam meredam ancaman intoleransi.

Dalam Hindu kita memiliki ajaran Tri Hita Karana yang mendorong umat manusia melakukan harmonisasi kehidupan guna meraih kebahagiaan hidup. Di dalamnya diajarkan tentang perlunya melakukan harmonisasi di tiga aspek, yaitu *parahyangan* atau spiritualitas, *pawongan* atau kemanusiaan, dan *palemahan* atau hubungan dengan alam.

Hindu juga mengajarkan *Tat Twam Asi*, 'aku adalah kamu, kamu adalah aku'. Ajaran ini mengajarkan bahwa semua makhluk hidup itu adalah sama. Jadi kalau kita dihina, apakah kemudian kita senang? Pasti tidak. Maka, jangan menghina. Melalui ajaran ini, masyarakat seluruh dunia adalah satu keluarga besar.

Lantas, apa yang bisa dilakukan generasi milenial dalam mewujudkan moderasi beragama lebih berkualitas di era digital ini? Merujuk riset, generasi milenial merupakan generasi yang lekat dengan internet. Melalui internet, generasi milenial bisa bersatu dalam menyebarkan pesan-pesan damai yang dibutuhkan kehidupan masyarakat.

Moderasi Beragama: Warisan Nusantara

Anes Dwi Prasetya

Milenial Buddha/Sekretaris Jenderal PP HIKMAHBUDHI 2016-2018

PARA leluhur kita di Nusantara sesungguhnya telah mengajarkan ajaran tentang nilai-nilai moderasi. Ajaran para leluhur yang hidup di berbagai kerajaan Nusantara klasik ini masih sangat relevan untuk kita renungkan dan aplikasikan dalam kehidupan masyarakat multikultural sekarang. Salah satu leluhur itu adalah Mpu Tantular, seorang bijak bestari, yang menuliskan pandangannya dalam karya agunginya *Kakawin Sutasoma*.

Berikut petikan kalimat yang mendeskripsikan ajarannya tentang moderasi:

“Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wisma, Bhinneki rakwa ring apan parwanosen, Mangka ng Jinatwa kalangan Siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma Mangrwa.”

Artinya:

“Konon Buddha dan Siwa adalah dua zat yang berbeda. Mereka memang berbeda, tetapi bagaimana bisa dikenali? Sebab kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah Tunggal. Terpecahbelahlah itu, tetapi satu jugalah itu, tidak ada kerancuan dalam kebenaran.”

Padabaitajaran yang disampaikan, Mpu Tantular menyebutkan bahwa Buddha dan Siwa merupakan dua zat yang berbeda. Tetapi kedua zat tersebut hakikatnya tetaplah satu, yakni kesatuan kebenaran universal yang menjadi sumbernya. Kebenaran universal ini merangkum realitas keberbedaan simbolik yang hadir dalam kehidupan manusia. Dengan

■ Disarikan dari Bincang Milenial Lintas Iman, 24 Juli 2020.

demikian, kebenaran universal merangkul dan menghimpun berbagai perbedaan yang hadir dalam kehidupan manusia, termasuk bangsa Indonesia. Bangsa yang besar dengan sejarah dan kebudayaannya.

Dengan demikian, kita bisa besar karena adanya perbedaan yang terjaga dengan baik. Untuk itu, kalau ingin besar, maka kita harus bisa menjaga dan merawat perbedaan ini. Tidak memandang superior bahwa saya Jawa, sedangkan kamu inferior karena hanya Tionghoa atau Sunda. Ini artinya, bangsa Indonesia akan besar ketika perbedaan ini benar-benar digenggam dengan ikatan persatuan.

Kami teringat pesan almarhum Gus Dur (Presiden RI/KH Abdurrahman Wahid, red.) pada saat menghadiri deklarasi Aliansi Nasional Bhinneka/Tunggal Ika di Surabaya pada 2006. Pada deklarasi itu, Gus Dur mengatakan bahwa keberagaman merupakan jati diri bangsa Indonesia sekaligus suatu keniscayaan yang luar biasa untuk kita. Dengan begitu, keberagaman bukan untuk dilemahkan, apalagi dihilangkan. Dalam konteks itu, kita bisa menemukan relevansi moderasi beragama sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan dalam kehidupan penuh perbedaan untuk selalu mengambil posisi di tengah-tengah.

Secara konseptual, moderasi beragama sudah terkandung dalam berbagai ajaran agama. Di dalam agama Islam, misalnya, diajarkan konsep wasathiyah. Begitu juga di agama-agama lain seperti Kristen yang mengenalkan konsep *golden mean*, Hindu yang mengenalkan konsep *madyhamika*, Konghucu mengenalkan *zang yong*, dan Buddha sendiri mengenalkan *majjhima patipada*. Berkaca dari itu, bisa dikatakan bahwa semua tradisi agama sebetulnya menyimpan konsep "jalan tengah".

Kami sendiri meyakini dan mempraktikkan agama Buddha dan memegang ajaran *majjhima patipada*. Ajaran *majjhima patipada* merupakan sikap keberagamaan jalan tengah dengan cara menghindari dua praktik ekstrem, yakni praktik mengejar kesenangan inderawi dan praktik penyiksaan diri. Jalan tengah merupakan jalan yang membebaskan seseorang dari segala bentuk penderitaan. Jalan ini disebut juga sebagai 'Jalan Mulia Berunsur Delapan' atau "*Hasta Arya Magga*".

Apa saja kedelapan unsur jalan mulia *Hasta Arya Magga* itu? Kedelapannya adalah dimulai dari pengertian benar (*samma-ditthi*), pikiran benar (*sama-sankappa*), ucapan benar (*samma-vaca*), perbuatan benar (*samma-kammanta*), mata pencaharian benar (*samma-ajiva*), daya upaya benar (*samma-vayama*), perhatian benar (*samma-sati*), dan

konsentrasi benar (*samma-samadhi*). Kalau kita melaksanakan semua ini, kita akan mencapai kebuddhaan. Itulah yang diajarkan guru Buddha. Artinya, kita tidak boleh melakukan dua ekstrem tadi dan diambil jalan tengah dengan menempuh jalan mulia berunsur delapan.

Menurut hemat kami, ada empat indikator moderasi beragama dalam kehidupan kita sebagai bangsa Indoensia. *Pertama*, komitmen kebangsaan; *kedua*, toleransi; *ketiga*, antikekerasan; *keempat*, akomodatif terhadap kebudayaan lokal. Pemenuhan keempat indikator moderasi beragama menjadi hal yang sangat relevan bagi kita untuk hidup harmonis sebagai bangsa yang memiliki kekayaan perbedaan.

Moderasi beragama sendiri sejatinya sudah disebutkan dalam ideologi bangsa Indonesia dan berbagai produk perundang-undangan. Pancasila memuat lima sila yang jika dijalankan bisa melahirkan sikap hidup moderasi beragama. Secara berurutan, jika kita sudah ber-Tuhan kita bisa memanusiakan manusia. Kalau sudah memanusiakan manusia, kita akan bersatu. Kalau kita sudah bersatu, kita akan musyawarah. Dan kalau kita sudah bermusyawarah, tinggal bagaimana kita memikirkan keadilan sosial bersama. Artinya, kalau kita sudah menjalankan lima sila ini, maka ini sudah selesai.

Begitu juga dalam berbagai perundang-undangan, negara sendiri telah menjaminnya. Salah satunya, Pasal 28E ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Ayat (1) "Setiap orang bebas untuk memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali". Ayat (2) "Setiap orang atas kebebasannya meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".

Di undang-undang yang sama, Pasal 29 secara tegas menyatakan moderasi beragama dengan cara menoleransi keberbedaan. Misalnya, Pasal 29 ayat 2 mengatakan: "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Begitu juga Pasal 22 Undang-Undang Hak Asasi Manusia: Ayat (1) "Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Ayat (2) "Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu".

Bagi milenial, moderasi beragama sebetulnya bukan hal sulit untuk dilakukan. Paling tidak generasi ini bisa melakukan dua hal. *Pertama*,

membanjiri media dengan pesan damai yang dilakukan oleh tokoh-tokoh agama kita. Dengan penguasaan dan kedekatan dengan berbagai platform media, generasi milenial bisa memposting berbagai pesan damai di dalamnya. *Kedua*, tidak diam diri dan bersikap cuek terhadap kondisi lingkungannya, melainkan menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari masyarakat yang harus ia perdulikan dengan kemampuan yang dimilikinya.

Sebagai penutup, izinkan kami mengutip pesan dari Sang Guru Agung Buddha: "*vayadhamma sankhara, appamadena sampadetha*" bahwa, segala hal yang terkondisi tidaklah kekal, berjuanglah dengan penuh kesadaran! Sekian dan terima kasih.

Keragaman adalah Nada-Nada Indah

Meilan Rahayu Putri

Milenial Khonghucu/Ketua Pemuda Khonghucu Cibinong, Bogor, Jawa Barat

AGAMA Khonghucu mengajarkan umatnya untuk menghormati setiap bentuk keragaman, terutama keragaman kemanusiaan dengan keragaman keyakinan dan praktik keagamaan yang mereka jalankan. Keharusan menghormati tentu saja mengandaikan perlunya sikap-sikap toleransi dan kemauan untuk berdialog dengan yang lain.

Secara simbolis, ajaran untuk menghormati keragaman terlihat pada lambang agama Khonghucu, yaitu Genta Rohani atau Mu Dou atau Bok Tok. Genta adalah alat yang digunakan untuk mengumumkan perintah dari seorang raja atau kaisar kepada rakyatnya. Setiap pengumuman sifatnya wajib diikuti dan ditaati oleh rakyatnya.

Di tengah-tengah gambar Genta Rohani terdapat tulisan berbunyi Zhong Shu. Tulisan ini mengandung arti *Satya* dan *Tepasarira* dan biasanya dipahami sebagai jalan suci satu yang bisa menembus semua. *Satya* menggambarkan hubungan vertikal manusia kepada Tuhan, sedangkan *Tepasarira* mendeskripsikan hubungan horizontal antarsesama manusia. Dengan begitu, selain beribadah menyembah kepada Tuhan, manusia di saat yang sama memiliki kewajiban untuk hidup secara berimbang dengan sesama.

Dalam *Tiong Yong*: Bab XII: 3 dijelaskan: “*Satya* dan *Tepasarira* itu tidak jauh dari jalan suci. Apa yang tidak diharapkan mengenai dirinya sendiri, janganlah diberikan kepada orang lain”. Artinya, kalau ingin dihargai dan dihormati orang lain, maka kita harus bisa menghargai dan menghormati orang lain, terutama menghargai dan menghormati keyakinannya.

■ Disarikan dari Bincang Milenial Lintas Iman, 24 Juli 2020.

Dengan demikian, jelas terlihat bahwa agama Konghucu sangat menekankan umatnya untuk mengedepankan sikap saling toleransi, saling menghormati, dan wajib hukumnya menghormati orang-orang besar dalam keyakinan agama lain seperti Yesus, Nabi Muhammad, Sang Buddha Siddharta Gautama, dan tokoh-tokoh besar lainnya. Dengan begitu, seorang Khonghucu juga bisa dihargai dan dihormati yang lain.

Tidak berhenti di situ, sikap saling menghargai dan menghormati juga akan lebih baik jika kita implementasikan dalam mengatasi problematika yang dihadapi oleh masyarakat. Umat Khonghucu dan umat agama-agama lain bisa bersama-sama meringankan beban masyarakat terdampak bencana alam, terutama bersama-sama saling membantu dalam situasi pandemi Covid 19 ini. Dengan begitu, moderasi beragama akan menjadi begitu nyata dalam kehidupan kita.

Terakhir, ingin kami katakan, perbedaan itu laksana alat-alat musik yang berbeda. Jika ditabuh secara bersama akan menghasilkan nada-nada indah nan merdu. Kita, bangsa Indonesia adalah warga masyarakat dengan keanekaragaman sosial budaya. Akan sangat indah jika perbedaan ini justru media untuk saling mengisi satu sama lain. Terima kasih.

Milenial Perlu Kerjasama

Fikri Fahrul Faiz

Milenial Muslim/Peneliti Muda PPIM UIN Jakarta

DISKUSI tentang moderasi beragama begitu populer akhir-akhir ini. Lalu, apa sebetulnya moderasi beragama itu? Dalam hemat kami, moderasi beragama merupakan sebuah proses dalam kehidupan beragama. Disebut proses karena di dalamnya terdapat keharusan untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan berimbang. Adil dan berimbang merupakan dua prinsip utama dalam moderasi beragama agar kita terhindar dari perilaku berlebih-lebihan (ekstrem) saat kita mengimplementasikan sikap keberagamaan.

Lantas, apa yang disebut ekstrem? Berangkat dari berbagai contoh yang dengan mudah kita temukan dalam berbagai kasus terindikasi ekstrem, bisa disimpulkan bahwa ekstrem (terutama dalam konteks keberagamaan) merupakan sikap gampang menyalahkan orang-orang yang berbeda dari dirinya, mudah mengkafirkan orang yang berbeda dari dirinya. Dua hal yang seharusnya kita hindari dalam kehidupan bermasyarakat dewasa ini.

Dengan demikian, moderasi beragama dalam konteks demikian, bisa dinyatakan sebagai sikap keberagamaan jalan tengah, tidak terlampau ekstrem ke kanan dan juga tidak ekstrem ke kiri. Dengan kata lain, moderasi beragama merupakan sikap keberagamaan yang menekankan kesalahan individu di satu sisi dan kesalahan sosial di sisi lain.

Sayangnya, moderasi beragama seringkali masih disalahpahami oleh masyarakat luas. Banyak masyarakat yang justru menilai orang yang moderat adalah orang yang tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan agamanya, setengah-setengah menjalankan ajaran agamanya. Sebuah penilaian yang terlampau berlebihan, bahkan keliru.

■ Disarikan dari Bincang Milenial Lintas Iman, 24 Juli 2020.

Bahkan orang moderat dipahami sebagai orang yang berkompromi pada keyakinan agama lain, mengabaikan teks-teks keagamaan, dan bahkan orang yang moderat adalah orang yang liberal. Padahal berbeda jauh dari pemahaman demikian, orang moderat adalah orang yang percaya dengan esensi agamanya namun tetap menghormati kepercayaan orang lain. Dengan kata lain, orang moderat adalah orang yang menghormati kepercayaan orang lain tanpa mengorbankan keyakinan dan ketaatannya akan esensi ajaran agamanya.

Berangkat dari kita, bisa kita pahami bahwa moderasi beragama merupakan sebuah jalan tengah keberagaman (*wasathiyah*). Ia bertujuan membawa orang-orang bersama-sama memanusiaikan manusia.

Lantas, apakah moderasi beragama bisa disamakan dengan sikap toleran? Toleran, menurut hemat kami, merupakan sikap diri hasil dari sikap moderasi beragama. Moderasi adalah proses, sedangkan toleransi adalah hasilnya. Orang yang moderat boleh saja tidak setuju dengan suatu tafsiran agama tertentu, tapi tidak lantas menyalahkan orang yang berbeda. Orang moderat mungkin saja bisa percaya pada satu tafsir keagamaan, tapi tidak lantas memaksakan orang-orang yang berbeda untuk sama seperti dirinya.

Berbicara mengenai moderasi beragama, saya ingin sampaikan sebuah pengalaman yang menyadarkan pentingnya nilai-nilai toleransi, pentingnya memanusiaikan manusia. Satu hal yang sebetulnya merupakan inti dari ajaran agama. Jadi, saya adalah anggota masyarakat yang sangat menikmati segala *privilege* sebagai umat mayoritas di Indonesia. Saya merupakan Muslim dan berlatar belakang Jawa. Hampir tidak pernah menemukan kesulitan dalam melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Namun, ketika berkesempatan kuliah di Australia, saya mulai memiliki kecemasan dengan menjadi minoritas di sana. Banyak pertanyaan yang kemudian muncul akan posisi saya selaku minoritas.

Namun, setelah beberapa saat tinggal dan mengenyam pendidikan di sana, saya mulai merasakan ketenangan dan keamanan karena ternyata saya hidup di tengah-tengah masyarakat yang menoleransi perbedaan. Masyarakat di tempat saya tinggal merupakan mayoritas yang sangat menghargai perbedaan yang ada. Bahkan dosen saya menyiapkan satu-satunya minuman nonalkohol untuk saya, karena dia tahu saya satu-satunya Muslim di kelas ini dan tidak bisa minum sesuatu yang mengandung alkohol.

Setelah lulus dan kembali ke Indonesia, saya diajak melakukan

riset kepada siswa-siswi Indonesia secara nasional pada 2017 melalui program Convey Indonesia, namun saya justru menemukan hal kontras. Riset mencatat bahwa hampir 34% siswa Muslim Indonesia yang disurvei menunjukkan sikap intoleran terhadap agama lain. Lebih mengejutkan lagi, 51% siswa Muslim Indonesia yang disurvei menunjukkan intoleransi terhadap sesama kelompok di Islam.

Persentase ini menggambarkan bahwa sebagai masyarakat mayoritas kita masih sangat intoleran, bahkan intoleransinya lebih tinggi lagi di lingkungan Muslim sendiri. Ini hal yang sangat mengecewakan dan menyedihkan sekaligus jadi tantangan besar bagi kita untuk berbuat sesuatu bagi Indonesia. Kita, generasi milenial harus berupaya keras agar prosentase intoleransi 34% dan 51% bisa ditekan lebih rendah, bahkan nol persen.

Tentu saja kita tidak bisa bekerja sendiri. Generasi milenial harus bekerjasama karena ini merupakan tantangan bersama. Jalan dialog seperti ini menjadi kunci penting dalam meruntuhkan tembok prasangka atas perbedaan sehingga bisa mewujudkan perdamaian.

Global Peace Foundation Menyuarakan Moderasi Beragama

Sintya Rahmi Utami
General Manager GPF Indonesia

MODERASI beragama merupakan hal penting bagi masyarakat Indonesia. Sebab dengannya, masyarakat di Indonesia bahkan dunia bisa memahami bahwa beragama itu tidak selalu berada di kanan maupun kiri melainkan bisa juga di tengah-tengah. Oleh karena itu, kami dari Global Peace Foundation (GPF) akhirnya ikut serta mensosialisasikan pemahaman tentang moderasi beragama sangatlah penting.

Upaya mensosialisasikan ini tidak bisa sendiri. Perlu kolaborasi dengan banyak pihak. GPF sangat bersyukur dapat bekerjasama dengan Convey Indonesia sejak tahun 2018. Sejak tahun itu, GPF Indonesia menjadi partner salah satu kegiatan Convey, yakni *Millennial Peace Festival*.

Kegiatan ini tidak lepas dari penelitian PPIM UIN Jakarta yang bekerja sama dengan Convey Indonesia tahun 2017 di mana ada beberapa daerah yang memiliki potensi radikalisme. Pada saat pelaksanaan kegiatan *Millennial Peace Festival*, kami mampu melibatkan 7.616 partisipan dari enam daerah.

Terkait penyuaran moderasi beragama, Global Peace Foundation sendiri memiliki visi membentuk jaringan pemimpin yang bermoral dan inovatif untuk perdamaian dan pembangunan. Selain itu, Global Peace Foundation juga memiliki empat nilai universal yang diajarkan, di antaranya:

1. *Living for greator god*. Di GPF, ketika berbicara tentang moderasi beragama maka yang dibicarakan bukan ritual agama tersebut tapi nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua manusia.
2. *Dream big*. Mimpi yang ingin diwujudkan dalam hal ini adalah keinginan untuk menciptakan rasa damai dan aman ketika berada di manapun

■ Disarikan dari Webinar Pemuda Pegiat Perdamaian Bicara Moderasi Beragama, Jumat 13 November 2020.

3. *Take ownership*. Mimpi yang dimaksud tersebut bukan hanya mimpi milik GPF namun juga mimpi kita Bersama untuk bersama-sama dapat mewujudkan perdamaian.
4. *Teamwork*. Untuk dapat mewujudkan keinginan tersebut maka dibutuhkan adanya teamwork karena sehebat apapun suatu organisasi atau individu tidak akan bisa secara maksimal mampu bekerja sendiri.

Keberhasil menyuarakan moderasi beragama tidak lepas dari pendekatan yang digunakan. Dalam melakukan moderasi beragama, pendekatan unik dilakukan oleh GPF adalah:

1. Membangun kerjasama antar agama dan kepercayaan. Sehingga, pencapaiannya tidak hanya berhenti di toleransi melainkan membangun kerjasama.
2. Penguatan nilai-nilai dalam keluarga.
3. Mempraktekan budaya gotong royong. Melalui gotong royong sebenarnya moderasi beragama bisa dilakukan. Di GPF, kami mengajak teman-teman dari semua agama.

Selanjutnya, kami juga menginisiasi sejumlah program nyata dalam melakukan penyuaran moderasi beragama. Program ini tidak terlepas dari dua hal berikut:

1. *Leadership development*. Kami akan menanamkan pengetahuan kepada orang-orang yang datang ke GPF dengan tujuan untuk berkembang seperti mengadakan seminar, diskusi di *whatsapp group*, dan lain-lain. Sehingga nantinya mereka bisa menjadi agen baru dalam menyuarakan perdamaian.
2. *Leadership network*. Berjejaring dengan orang lain dan organisasi lain agar menciptakan dampak yang lebih besar daripada kita hanya melakukannya sendiri. Indonesia bisa menjadi *role mode* untuk kegiatan moderasi beragama. Sebab Indonesia memang negara dengan mayoritas Islam namun kita bukan negara Islam. Hal itu cukup menunjukkan bahwa Indonesia merupakan negara yang moderat. Terlebih lagi Indonesia memiliki Pancasila yang merupakan bentuk moderasi beragama yang menurut negara lain itu sangat bisa ditiru. Misalnya di GPF, banyak orang yang bertanya mengenai pancasila. Sebab, mereka memandang bahwa keberadaan Pancasila ini sangat cocok untuk diterapkan dalam moderasi beragama untuk kegiatan-kegiatan yang ekstremisme. Saya menyukai sebuah

kutipan dari Bapak Jokowi yang mengatakan bahwa "Indonesia mengajak dunia mengedepankan persatuan dan toleransi beragama untuk membangun dunia yang lebih baik". Artinya dalam hal ini dengan adanya Pancasila sebenarnya Indonesia sudah memiliki modalnya, tinggal bagaimana masyarakat Indonesia, terutama anak-anak muda menggunakannya, apakah untuk disia-siakan atau untuk dimaksimalkan.

Akhir kata, kami mengajak para pemuda Indonesia untuk berperanserta menjadi agen-agen yang menyuarakan moderasi beragama. Keterlibatan mereka merupakan hal penting untuk masa depan lebih baik. Ini sesuai pesan powerful almarhum KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, "*Kalau kamu bisa melakukan yang baik untuk semua orang, maka orang tidak tanya apa agamamu.*"

Peran Gema Perdamaian dan Moderasi Beragama

I Kadek Adnyana

Ketua Komunitas Gema Perdamaian

GEMA Perdamaian diinisiasi karena adanya guncangan di Bali pada tahun 2002 saat Bali dibom. Ternyata dari kejadian tersebut kita menyadari bahwa kita telah mengalami degradasi perdamaian; ternyata memang ada anak bangsa yang belum tercerahkan. Sehingga pada saat itu dibentuklah sebuah kelompok yang diberi nama Gema Perdamaian.

Gema Perdamaian bertujuan untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya hidup penuh kedamaian dan bisa mengenal perbedaan. Sehingga, harapan dari adanya Gema Perdamaian ini adalah dapat membentuk karakter-karakter masyarakat di Bali dan sekitarnya untuk bisa mengenali perbedaan dan mencintai perdamaian. Gema Perdamaian mulai aktif sejak tahun 2003 hingga saat ini.

Beberapa gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Gema Perdamaian, di antaranya:

1. Gerakan gotong royong untuk membangkitkan kesadaran hidup damai
 2. Gema Perdamaian adalah milik masyarakat sebagai wahana edukasi membangun toleransi dan sikap saling menghargai
 3. Gema Perdamaian adalah panggung untuk menunjukkan keharmonisan dalam perbedaan
 4. Gema Perdamaian memberikan inspirasi cinta kasih dan budi pekerti
- Banyaknya orang yang memiliki kecemasan akan perbedaan terkadang membuat perbedaan itu menjadi semakin dipertajam. Oleh karenanya, Gema Perdamaian hadir untuk menyadarkan bahwa perbedaan tersebut adalah sebuah anugrah. Sebab, kita memang sudah terlahir berbeda. Justru dengan adanya perbedaan tersebut

■ Disarikan dari Webinar Pemuda Pegiat Perdamaian Bicara Moderasi Beragama, Jumat 13 November 2020.

dapat menjadi suatu keniscayaan atau keberuntungan. Harapan dari seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Gema Perdamaian adalah dapat menciptakan moderasi beragama.

Beberapa kegiatan-kegiatan Gema Perdamaian, di antaranya:

1. Sarasehan damai para tokoh masyarakat dari berbagai latar belakang.
2. Gerakan kemanusiaan, seperti donor darah, membantu korban bencana alam,
3. Gerakan peduli lingkungan. Harapannya moderasi beragama dapat terbentuk dari gotong royong ini.
4. Gerakan spiritual. Perbedaan itu indah ibarat dikatakan dalam sebuah pribahasa, bahwa "sebuah kebun apabila hanya diisi dengan warna putih tidak akan menarik. Namun, apabila diisi dengan berbagai macam warna maka akan menjadi indah." Sama halnya ketika kita berbicara tentang Indonesia yang beragam maka akan menjadi indah ketika banyak perbedaan di dalamnya yang memiliki kelebihannya masing-masing. Manusia diciptakan untuk saling menolong satu sama lain. Ketika orang menyadari akan kebutuhan ini maka proses terciptanya moderasi beragama akan semakin baik.
5. Regenerasi melalui ambassador Gema Perdamaian. Harapannya adalah generasi muda dapat menjadi agen kampanye perdamaian karena sejatinya damai itu indah. Maka, ketika kita tahu bahwa damai itu indah maka upaya untuk terus menciptakan kedamaian tersebut akan semakin tinggi.

Gema Perdamaian memiliki dua harapan, yaitu:

1. Gema Perdamaian dapat diadakan di berbagai provinsi di seluruh Indonesia
2. Terwujudnya perdamaian dunia sehingga dapat mengharumkan nama dan citra Indonesia yang akan dikenal sebagai negara yang penuh kedamaian.

Peace Leader Indonesia dalam Menyuarakan Moderasi Beragama

Redy Saputra

Koordinator Peace Leader Indonesia

PEACE Leader Indonesia (PLI) merupakan organisasi sebagai wadah anak muda lintas agama, suku, budaya yang beragam yang saling menguatkan satu dengan yang lain dan mempromosikan toleransi dan perdamaian di kalangan pemuda agar terbangun kohesi sosial. PLI berdiri tahun 2014.

Ada beberapa hal yang mendoong PLI untuk bergerak dalam bidang perdamaian. *Pertama*, kesadaran kami akan keberagaman bangsa Indonesia, baik suku, entis, dan agama, sebagai kekayaan yang patut untuk dijaga. Kami percaya bahwa keberagaman itu adalah *sunatullah* sehingga masyarakat Indonesia, khususnya anak muda wajib merayakannya. *Kedua*, meningkatnya kasus intoleransi dan pelanggaran kebebasan di Indonesia beragama menjadi keprihatinan yang perlu direspon. *Ketiga*, masih minimnya media yang memberitakan contoh-contoh baik tentang toleransi. Padahal, banyak praktik-pratik yang menggambarkan bahwa masyarakat Indonesia toleran dan saling menghargai. *Terakhir*, masih minimnya pengalaman anak muda berinteraksi dengan kelompok yang berbeda. Kami yakin, interaksi dengan yang berbeda dapat menumbuhkan sikap toleran yang penting untuk menjaga keberagaman bangsa Indonesia.

Namun demikian, ada tiga tantangan yang dihadapi PLI dalam mewujudkan cita-citanya. *Pertama*, minimnya pengalaman pemuda dalam kegiatan lintas agama yang masih kaku. Sebagian pemuda juga menganggap bahwa berdiskusi lintas agama adalah hal yang tabu. *Kedua*, kegiatan lintas agama masih belum banyak dilakukan oleh pemuda dan masih menjadi milik orang tua. *Ketiga*, belum ada

■ Disarikan dari Webinar Pemuda Pegiat Perdamaian Bicara Moderasi Beragama, Jumat 13 November 2020.

regulasi dan implementasi konvensi internasional PBB tentang pemuda, keamanan dan perdamaian UNSCR 2250 di kepemudaan lintas agama.

Terlepas dari tantangan tersebut, PLI juga telah berhasil melakukan inovasi guna mewujudkan perdamaian di Indonesia. Di antaranya adalah membuat modul online tentang *peace building*. Melalui kegiatan ini, PLI telah berhasil menghasilkan komunitas Anak Muda untuk Perdamaian, komunitas Jurnalisme Damai, lagu-lagu perdamaian, *virtual peace service*, dan buku-buku narasi damai.

Bagian 9

**Moderasi Beragama dalam
Filantropi dan Pandemi Covid 19**

Geliat Filantropi Islam

Hilman Latief

Ketua pengurus LazisMu, PP Muhammadiyah

SAYA ingin melihat gerakan filantropi dan kaitannya dengan moderasi beragama dari perspektif yang mungkin sedikit agak berbeda dari yang lain. Yang saya ingin angkat di sini adalah soal persepsi tentang filantropi.

Ada apa dengan filantropi Islam? Adakah dampak dari fenomena filantropi terhadap sikap sosial dan sikap keagamaan termasuk moderasi beragama?

Ada satu artikel yang menarik ditulis oleh Jonathan berjudul *Over Reaction Against Islamic Charity*. Ia menulis banyak buku tentang filantropi dan *charity*. Menurutnya, ada reaksi yang mungkin agak berlebihan terhadap kelahiran filantropi Islam dewasa ini, khususnya pasca peristiwa 9/11 di Amerika Serikat. Setelah peristiwa tersebut, perhatian terhadap filantropi Islam semakin kuat di berbagai kalangan, *policy maker*, CIS di Amerika, dan berbagai lembaga yang mengkaji filantropi Islam. Jadi titik balik gerakan filantropi di dunia dan di kalangan muslim itu adalah setelah peristiwa 11 September di Amerika. Ada persepsi baru yang muncul terhadap gerakan filantropi Islam yang kian semakin menguat di berbagai negara, baik secara domestik maupun internasional.

Ada beberapa pandangan umum tentang filantropi. Yang menarik pada saat ini sebenarnya bukan hanya filantropi domestik atau lokal saja, tetapi filantropi dengan misi kemanusiaan. Ketika di Aceh terjadi bencana, tanpa disadari terjadi perkembangan filantropi dari organisasi berbasis agama secara lebih profesional. Pada waktu itu, lembaga filantropi seperti Rumah Zakat, Dompot Dhuafa, dan Muhammadiyah

■ Disarikan dari Webinar Kedermawanan dan Filantropi dalam Kerangka Moderasi Beragama, 28 Agustus 2020.

masih kurang dikelola dengan baik. Tetapi hal ini membawa kesadaran baru bahwa kita agak tertinggal.

Sementara itu, di dunia Barat juga terjadi pergeseran persepsi yaitu dari *overreaction* ke *engagement* atau keterlibatan. Beberapa tahun ini saya diundang untuk bicara tentang filantropi ke forum internasional yang diinisiasi oleh lembaga seperti ICRC dan ASEAN . Yang menarik, mereka berbicara tentang bagaimana gerakan filantropi Islam mengalami proses moderasi. Apa yang dimoderasi? Tidak lain adalah kesadaran pelaku filantropi Islam supaya lebih responsif atas isu-isu kepentingan publik.

Sekarang telah terjadi pergeseran falsafah perspektif para pegiat filantropi, dari semula yang penuh kompetisi menjadi penuh kooperasi. Dan ini tidak hanya terjadi *within moslem organization*, tetapi juga *inter-religious organization*. Hal ini tampak misalnya dari munculnya *humanitarian forum*.

Kegiatan mereka tidak selalu memiliki basis fatwa yang kuat. Karena para anggotanya sudah melakukan aksi lebih dulu, sedangkan fatwa dibuat belakangan. Misalnya fatwa tentang bolehnya menyalurkan zakat untuk *clean water sanitation*. Padahal lembaga filantropi sudah lama membuat sanitasi. Lalu muncul juga diskursus dan kesadaran tentang *citizenship* (kewarganegaraan), hak minoritas, dan sebagainya.

Terkait isu moderasi, ada beberapa istilah yang muncul dalam filantropi, misalnya *financial inclusion* dan *islamic humanitarian funds*. *Financial inclusion* adalah terkait bagaimana lembaga filantropi itu bisa lebih inklusif dan lebih terbuka. *Islamic humanitarian funds* adalah terkait bagaimana UNDP yang melirik lembaga filantropi Islam sebagai *buffer*, karena ada potensi besar di kalangan masyarakat Muslim di Indonesia dan beberapa negara lain untuk memanfaatkan filantropi untuk kemanusiaan. Karena itu, proses moderasi organisasi seperti ICRC dapat dilihat dari upaya mereka merekonsiliasi syariah, humaniter dan hukum Islam.

Moderatisme beragama dalam filantropi dapat dilakukan dalam beberapa aspek. Lima di antaranya yaitu: reinterpretasi pemaknaan 8 *ashnaf* dalam zakat; kontekstualisasi tujuan pendistribusian dana filantropi; keluwesan membangun kemitraan; *NGO-nisasi* gerakan filantropi; dan, penguatan implementasi nilai apa yang bisa memoderasi seperti sifat kerelawanan, kedermawanan, kemanusiaan, dan dakwah sosial.

NGO-nisasi gerakan filantropi sampai tingkat tertentu menimbulkan pergeseran ke arah moderasi beragama. Karena dari sinilah kemudian

muncul isu tentang akuntabilitas, isu tentang keterbukaan terhadap publik, dan sebagainya. Proses *NGO-nisasi* adalah semacam birokratisasi filantropi menjadi organisasi yang modelnya bisa diawasi publik dan harus membuat laporan ke umum. Proses ini mendorong pergeseran ke arah moderasi.

Intensitas interaksi dengan dunia luar dapat mengubah cara berpikir. Itu tidak terjadi di dunia muslim saja tapi juga nonmuslim. Sebagai contoh, ada seorang nonmuslim yang mewaqafkan kapalnya kepada Muhammadiyah untuk disalurkan membantu orang menyeberang. Mengapa hal semacam ini dapat terjadi? Karena ada proses interaksi yang baik, yang menggeser sikap pelaku filantropi ke arah moderasi.

Para pegiat filantropi dalam aksinya sudah bisa masuk gereja dan interaksi dengan komunitas Kristiani. Ini terjadi di Jember, Palangkaraya, dan Lumajang. Dalam konteks filantropi Islam termasuk di kalangan LazisMU, wacana dan term filantropi masih terbatas. Bahkan mereka belum bisa membuat teori untuk menjelaskan aksi mereka. Tetapi praktek mereka di lapangan sudah lebih maju dari yang mereka pikirkan. Inilah dampak ketika gerakan filantropi Islam yang semakin intensif berinteraksi dan kemanusiaan. Maka, prinsip kemanusiaan yang dulu secara teoretis diperdebatkan oleh para ulama justru oleh lembaga filantropi mulai diadopsi.

Filantropi Islam: Pengalaman Nahdlatul Ulama

Abdur Rouf

Direktur Eksekutif NU Care-LazisNU

KONDISI filantropi khususnya zakat yang terlalu *fiqh minded*, sampai tingkat tertentu, dialami betul oleh lingkungan NU Care-LazisNU. Karena NU Care-LazisNU di dalam setiap program yang berada di hulu maupun di hilir, baik pengumpulan zakat ataupun pendistribusiannya, selalu mengikuti ketentuan dan regulasi induk organisasinya yaitu Nahdlatul Ulama (NU). Sehingga, soal zakat pun selalu merujuk pada hasil putusan *bahtsul masail* tentang zakat. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri.

Saya ingin menawarkan suatu pendekatan *maqashid syariah* untuk upaya gerakan filantropi Islam yang berkeadilan sosial. Namun sebelumnya saya akan *sharing* tradisi dan gerakan filantropi itu sendiri di lingkungan NU. Jika kita tengok ke belakang, sejak abad ke-17 pesantren sudah memiliki tradisi filantropi dengan semangat kemandirian dan sukarela. Sehingga banyak pesantren yang berdiri berangkat dari kesukarelawanan, dari filantropi yang digerakkan oleh kiai-kiai maupun tokoh-tokoh lokal. Meskipun tidak semua pesantren pada akhirnya tetap bertahan, tetapi paling tidak tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad.

Selain itu filantropi juga menjadi ruh dari NU itu sendiri, karena kita tahu eksistensi organisasi ini bukan dihidupi oleh pemerintah, atau bukan dihidupi oleh funding dari luar negeri misalnya. Namun, organisasi ini dihidupi oleh kedermawanan simpatisannya baik dari zakat, sedekah, infaq, waqaf, dan sebagainya. Hal ini jelas merupakan gerakan filantropi.

■ Disarikan dari Webinar Kedermawanan dan Filantropi dalam Kerangka Moderasi Beragama, 28 Agustus 2020.

Filantropi di lingkungan NU tidak lepas dari konteks prinsip Islam yang dijalankan NU, yaitu *tawasuth*, *tasamuh* dan keadilan sosial. Karena itu NU Care-LazisNU menggunakan nalar *maqashid syariah*. Suatu nalar syariah yang menjunjung tinggi pentingnya kemaslahatan dan keadilan sosial. Dengan nalar ini kita tidak keluar dari teks. Sebab, NU adalah peradaban teks. Artinya, semua aktivitas keagamaan itu semua harus ada rujukan teksnya.

Filantropi yang dasarnya *maqashid syariah* akan sejalan dengan moderasi beragama. Karena lima pilar dari *maqashid syariah* itu adalah 1) *hifdz al-din* (kebebasan beragama dan praktek keberagamaan), 2) *hifdz al-nafs* (pelayanan kesehatan dan keselamatan jiwa), 3) *hifdz al-aql* (akses pendidikan dan kebebasan berpendapat), 4) *hifdz al-nasl* (menjaga keturunan dan pemenuhan gizi anak), dan 5) *hifdz al-mal* (pemberdayaan ekonomi dan keadilan sosial).

NU Care-LazisNU menghadapi banyak tantangan. *Pertama*, tantangan terkait regulasi. Regulasi kita belum begitu mendukung untuk penguatan filantropi. *Kedua*, tantangan fikih filantropi yang konvensional. Fikih konvensional dalam *bahtsul masail* NU, pada muktamar pertama pada 1926 antara lain terkait zakat untuk infrastruktur. Kemudian keputusannya *khilafiyah* saja (terjadi perbedaan pendapat di antara ahli fikih). Pendapat yang lama tidak membolehkan. Dan pendapat yang membolehkan itu justru yang tidak direkomendasikan karena sangat lemah. *Bahtsul Masail* pada muktamar NU ke 30 tahun 1999 antara lain terkait zakat produktif. Kita tahu bahwa dalam pendistribusian zakat ada pendekatan *top-down* dan ada pula pendekatan *bottom-up*, dan ada pendekatan kombinasi. Dari keputusan muktamar ini kesimpulannya adalah ketika zakat produktif itu posisinya adalah *top-down*, maka zakat produktif tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah ketika pendekatannya *bottom-up*, yaitu aspirasi dari *mustahiq* yang kemudian dimusyawarahkan bersama.

Yang *ketiga*, tantangan sosial dan politik. Kondisi sosial politik dan literasi zakat di tengah masyarakat belum begitu kuat dan berpengaruh pada donatur dan pengelola. Hal ini menjadi PR bersama baik bagi pemerintah maupun lembaga-lembaga zakat termasuk NU Care-LazisNU.

Tantangan-tantangan itu tidak mengecilkan arti potensi besar gerakan filantropi. Karena dari tahun ke tahun gerakan filantropi semakin tumbuh dan semarak. Gerakan ini memantik kreatifitas sehingga bermunculan platform funding dengan berbagai program *fundraising*.

Menghadapi tantangan fikih, kita mencoba menggunakan

pendekatan *maqashid syariah*. Karena dengan *maqadish syariah*, kita dapat mencoba mengembangkan gerakan filantropi dengan lebih leluasa dan fleksibel dengan menangkap spirit dari tujuan syariah itu sendiri. Tujuan syariah itu adalah untuk mencapai kemaslahatan dan menghilangkan kemudhorotan. Jadi syariah itu tidak pernah lepas dari spirit kemaslahatan. Kemaslahatan itu diwujudkan dalam *hifdz al-din*, *hifdz al-nafs*, *hifdz al-aql*, *hifdz al-mal*, *hifdz al-nasl*.

Dalam pendistribusian, kita selalu mengacu pada 3 piramida kebutuhan, yaitu *dharuri* (mendesak), *hajati* ("primer"), *tahsini* (sekunder). *Dharuri* adalah ketika kondisi mendesak atau darurat kita bisa mendistribusikannya secara produktif. *Hajati* merupakan kondisi untuk memenuhi tingkat keterampilan mustahik melalui bantuan modal UMKM dan pelatihan dan bisa bertransformasi menjadi muzakki.

Program NU Care-LazisNU mempunyai empat pilar. Pilar pertama adalah pendidikan. Ada NU Care Scholarship untuk santri di dalam dan di luar negeri, seperti di al-Azhar (Mesir), Tunisia, Sudan, Maroko, China, Taiwan dan sebagainya. Selain itu, ada infrastruktur untuk pendidikan dan sekolah, masjid dan sebagainya. Ada juga program turunan pendidikan yang lebih spesifik.

Pilar kedua adalah program kesehatan. Misalnya ada layanan kesehatan gratis, ada klinik, ambulans, dan subsidi BPJS. Pilar ketiga adalah program ekonomi. Sebagai contoh ada pemberdayaan ekonomi berkelanjutan dan bantuan modal UMKM. Pilar keempat, selaras dengan agenda moderasi beragama, adalah program dakwah keagamaan, di mana kami secara reguler mengirim da'i di daerah terpencil, tertinggal, terbelakang, daerah pasca bencana, daerah pasca konflik yang tidak hanya di dalam negeri namun juga di luar negeri.

Ada empat tujuan dari *hifdz al-mal*. *Pertama* adalah *maqshud ta'abbudi*, yaitu tujuannya adalah melaksanakan kewajiban, mensucikan harta dan hati. *Kedua* *maqshud ijtima'i*, yaitu solidaritas sosial dan bagaimana menciptakan keadilan sosial. *Ketiga*, *maqshud iqtishadi* yaitu memberikan pemerataan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi. Terakhir *maqshud dakwah* yang juga untuk menjaga kebebasan beragama, berpendapat dan perdamaian.

Kesimpulannya, filantropi untuk moderasi beragama meliputi:

1. Edukasi dan sosialisasi pengarusutamaan gerakan filantropi oleh pemerintah dan organisasi kemasyarakatan keagamaan serta penguatan dan penataan pengelolaannya agar mencapai hasil yang diharapkan, yaitu berdampak terhadap masyarakat luas.

2. Penguatan regulasi dan peran serta manfaat badan atau lembaga yang bergerak di bidang filantropi, seperti Baznas, LAZ, dan sebagainya agar semakin dipercaya oleh masyarakat dan mudah dijangkau oleh kalangan dhuafa. Juga peningkatan SDM profesional dan adaptif terhadap teknologi informasi.
3. Kontekstualisasi teologi filantropi yang responsif terhadap perkembangan kegiatan ekonomi modern untuk optimalisasi penghimpunan dan pendayagunaan dana filantropi.
4. Memperluas pemanfaatan dana filantropi konsumtif karitatif kepada program yang bersifat jangka panjang dalam rangka memotong mata rantai kemiskinan dan *peace building* atau pencegahan intoleransi dan ekstremisme berbasis agama, seperti program beasiswa, pendidikan, layanan kesehatan, pemberdayaan ekonomi dan penyediaan tempat tinggal yang layak dan lain-lain.

Memperluas Sasaran Filantropi

Haidar Bagir

Pendiri & Direktur Mizan Group

SAYA akan menambahkan suatu pandangan tentang pentingnya sejak awal kita mengubah *mindset* terkait persoalan zakat, infaq, sedekah dalam ajaran Islam yang cenderung sangat fikih- *minded*. Saya tidak mengatakan bahwa fikih ini tidak penting, namun memang betul bahwa zakat ini adalah salah satu bagian dari rukun Islam. Karenanya, pengaturannya dalam ilmu fikih itu penting. Namun, masyarakat sekarang sudah jauh lebih kompleks. Kita selalu bicara tentang mendekati segala sesuatu secara multi-disiplin, dan sebetulnya ilmu fikih itu sangat terbuka terhadap *approach* dari sudut pandang yang berbeda.

Saya ingat beberapa puluh tahun yang lalu, saya pernah menulis di *Kompas* pada hari Ramadhan tentang bagaimana seharusnya zakat itu (termasuk infak dan sedekah) disalurkan. Saya berbicara tentang bagaimana menafsirkan zakat yang diatur dalam hukum-hukum fikih yang ketat secara lebih luas. Dalam tulisan itu saya membawa penafsiran Mahmud Syaltut. Ia berusaha memperluas penafsiran tentang apa yang disebut *fisabilillah*. *Fisabilillah* dulu diartikan sebagai memberi zakat kepada pejuang Islam yang seringkali diartikan sebagai serdadu perang yang miskin. Syaltut mengatakan bahwa kata pejuang Islam di jalan Allah dapat diartikan beragam, termasuk misalnya dapat meliputi orang yang sedang berusaha mengatasi kemiskinan di satu desa, atau proyek yang berusaha mengatasi kemiskinan di suatu desa.

Sebagai contoh, ada desa yang jalannya terputus dari infrastruktur sehingga masyarakat tidak bisa menjual hasil buminya ke kota, sehingga hasil buminya dibeli oleh lintah darat dengan harga murah. Dalam hal tersebut, zakat boleh disalurkan untuk pembangunan jalan.

■ Disarikan dari Webinar Kedermawanan dan Filantropi dalam Kerangka Moderasi Beragama, 28 Agustus 2020.

Orang yang membangun jalan di desa untuk kepentingan kemakmuran desa tersebut dapat di masuk dalam kategori *fisabilillah*. Ini adalah salah satu contoh bagaimana kategori-kategori 8 *ashnaf* (orang yang berhak menerima zakat) dalam zakat itu bisa diperluas.

Saya telah terlibat di lembaga filantropi Islam. Saya melihat fikih yang seharusnya begitu luas sering kali menjebak dalam beberapa hal. Bagi saya sebetulnya filosofi zakat itu adalah pengumpulan dana untuk kepentingan kebaikan masyarakat. Apa saja? al-Quran menyebutkan delapan. Sebetulnya, ini sudah cukup banyak memberi ruang bagi kita untuk bisa menafsirkannya dan menyesuaikannya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Jadi hampir tidak ada satu problem sosial, problem politik atau problem ekonomi yang tidak bisa dijangkau oleh 8 kategori *ashnaf* penerima zakat ini..

Sebagai contoh lain bagaimana kita memperluas makna *ashnaf* zakat, Syaltut menyebutkan bahwa pengelola zakat atau amil itu berhak atas zakat meskipun dia kaya. Yang berhak menerima zakat bukan amil yang miskin saja, yang kaya pun boleh. Sehingga dari penafsiran ini kita bisa mengatakan pengelola zakat itu dapat dicari dari manager-manager yang pintar, yang semahal apa pun dapat dibayar untuk kepentingan itu.

Saya ingin membahas tentang salah satu *ashnaf*, yaitu tentang mualaf, *al-muallafatu qulubuhum*. Saat ini mualaf seringkali diartikan atau terlanjur dimaknai sebagai orang yang baru masuk Islam. Padahal menurut pendapat para imam fikih, yang dimaksud *al-muallafatu qulubuhum* itu dapat meliputi muslim dan nonmuslim. Para imam fikih mengatakan ada paling sedikit tiga kategori orang yang bisa masuk ke dalam *al muallafatu qulubuhum*:

1. Orang muslim yang baru masuk Islam
2. Orang nonmuslim yang diharapkan kebaikannya atau siapapun yang diharapkan kebaikannya dan untuk keperluan itu dia harus dibayar atau disokong. Jadi orang yang diharapkan kebaikannya dan untuk itu perlu *funding* agar kita bisa memanfaatkan kebaikannya.
3. Kelompok orang yang kalau tidak kita bantu bisa menjadi sumber keburukan bagi masyarakat.

Jadi, kategorinya lebih luas, bukan hanya orang yang masuk Islam. Para ahli fikih itu juga menyebutkan bahwa *al-muallafatu qulubuhum* juga dapat meliputi nonmuslim yang masuk ke dalam kategori tersebut, yaitu nonmuslim yang diharapkan kebaikannya, atau nonmuslim yang dikhawatirkan keburukan timbul darinya jika tidak dibantu.

Dari kategori ini maka yang berhak menerima zakat atau penyaluran zakat itu sangat luas. Kita dapat menggunakan *funding* yang kita kumpulkan dari zakat, infaq, dan sedekah untuk kepentingan moderasi, misalnya untuk pembangunan masyarakat muslim yang moderat atau masyarakat umum yang moderat. Dalam hal ini, ada dua cara, yaitu:

1. Menyalurkan dana zakat, infak, sedekah dan wakaf (ziswaq) kepada lembaga yang bergerak di bidang pembangunan masyarakat moderat
2. Dengan ruang lingkup tafsir *al-muallafatu qulubuhum*, juga bisa diberikan kepada masyarakat yang jika kita tidak berikan dia bisa menjadi bagian dari masyarakat yang tidak moderat. Dari penelitian sering kita dapati bahwa ekstremisme itu datang dari kemiskinan. Banyak masyarakat marginal dari segi kemiskinan dan tidak terdidik yang direkrut untuk kegiatan-kegiatan ekstrem. Maka penting sekali kita memastikan *social justice* agar tidak terbentuk kantong-kantong masyarakat miskin atau marginal yang dapat melahirkan orang-orang yang justru akan memperkuat kecenderungan ekstrem di dalam masyarakat. Kita juga dapat memberikan dana-dana kepada kelompok-kelompok lain yang kita khawatirkan akan muncul sikap-sikap ekstrem.

Intinya, apa yang saya sampaikan ini merupakan sedikit sumbangan bagi diskusi kita adalah bahwa kita harus mulai dari tidak lagi melihat persoalan pengumpulan dana ini, khususnya dalam filantropi yang berbasis agama dengan sudut pandang fikih yang sempit. Bahkan, fikih itu sebetulnya membuka ruang yang sangat luas untuk reinterpretasi. Misalnya seperti apa yang disampaikan oleh Syaltut.

Namun, bila Syaltut yang seorang ulama al-Azhar itu mungkin masih dianggap cukup liberal, maka Yusuf Qardhawi adalah mantan orang Ikhwan yang memiliki pandangan yang luas tentang bagaimana zakat itu bisa digunakan, misalnya pandangan terhadap 3 kelompok *muallaf* tadi yang saya ambil dari Yusuf Qardhawi.

Saya kira kita harus mulai dari pandangan luas untuk mengembangkan lembaga-lembaga filantropi untuk moderasi beragama, dan untuk menyalurkan dana-dana yang dikumpulkan oleh lembaga filantropi untuk kepentingan moderasi beragama. Karena, filantropi di Indonesia banyak dihasilkan oleh filantropi keagamaan, menurut saya penting untuk melihat persoalan fikih zakat itu dengan perspektif yang lebih luas.

Berdasarkan pengalaman saya yang telah lama terlibat dalam filantropi Islam, biasanya terdapat dewan syariah yang seringkali kesulitan untuk meng-*approve* penggunaan dana ziswaf dan menjadikan fikih itu menjadi sesuatu yang akhirnya membuat lembaga itu sulit bergerak. Hal itu membuat saya khawatir akan timbulnya kesan betapa sempitnya Islam dan menjadikan dana-dana yang datang dari umat Islam hanya boleh diberikan kepada umat Islam. Hal lain yang lebih saya khawatirkan lagi, dan ini betul-betul terjadi, adalah orang yang diberi zakat itu pun hanya kelompok Islam tertentu, atau yang hanya dari kelompoknya sendiri. Lembaga-lembaga filantropi Islam yang seperti ini yang perlu dipertanyakan lebih jauh.

Jadi, ada satu akar filosofis ziswaf yang menurut saya harus dikembangkan terlebih dahulu dan harus ada upaya-upaya untuk meluaskan pemikiran terutama kaum muslim dalam melihat fikih, khususnya di dalam melihat fikih zakat. Sehingga jika sudah tidak lagi sempit cara pemahamannya, saya yakin lembaga filantropi untuk memperkuat moderasi itu akan jauh lebih mudah dikembangkan. Saya pikir lembaga seperti Convey dan juga lembaga lain, memiliki peran penting selain dalam mengembangkan dana *funding* untuk kepentingan moderasi, juga dalam melakukan upaya-upaya pendidikan kepada lembaga filantropi, khususnya lembaga filantropi keagamaan, agar dapat melihat fikih zakat ini dalam perspektif yang lebih luas. Terlebih, Indonesia tidak kekurangan ulama-ulama klasik yang otentik, yang diterima oleh masyarakat luas, yang memiliki pandangan perspektif luas tentang fikih zakat.

Jika ini bisa dikembangkan, saya percaya dampaknya akan luar biasa. Hal ini tidak hanya dapat membangun kesadaran baru, namun juga dapat mendorong lembaga filantropi keagamaan untuk meluaskan cara berpikirnya dan menjangkau masyarakat yang lebih luas, seperti kelompok marginal, ekonomi rendah, dan nonmuslim.

Filantropi Memperkuat Moderasi Beragama

Amelia Fauzia

Direktur Social Trust Fund (STF) UIN Jakarta

BAGAIMANA sesungguhnya budaya filantropi di Indonesia? Besarkah dukungan rakyat Indonesia terhadap filantropi? Lalu sejauhmana dan bagaimana memanfaatkan filantropi ini untuk mendukung moderasi beragama? Secara umum, kita memahami moderasi beragama sebagai sikap dan perilaku yang di tengah, yang tidak ekstrem, tidak liberal dan tidak radikal, yang menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan.

Berbicara soal kedermawanan dalam menguatkan moderasi beragama, saya akan lebih banyak bercerita dari perspektif pengalaman Social Trust Fund (STF) sebagai salah satu lembaga filantropi berbasis Islam di Indonesia. Ada enam poin yang akan saya sampaikan, yaitu (1) melihat kedermawanan, filantropi, dan moderasi beragama; (2) bagaimana pelaku filantropi dan sudah sejauhmana kesadaran moderasi beragama; (3) posisi sentral lembaga filantropi dalam menggaungkan moderasi beragama; (4) STF UIN Jakarta; (5) program-program dalam STF; dan (6) filantropi untuk penguatan civil society

Saya melihat ada praktek *charity* yang lebih *short term*, ada juga filantropi kelembagaan yang jangka panjang. STF mendukung mazhab filantropi berkeadilan sosial. Filantropi yang berkeadilan sosial memiliki peluang besar mendorong penguatan *civil society* dan moderasi beragama.

Saya melihat bahwa kedermawanan itu praktik *giving*, berderma, dan memberi. Ini yang sudah sangat universal. Sedangkan filantropi adalah praktek kedermawanan yang sudah terinstitusionalisasikan, *giving and volunteering*; jadi tidak hanya *giving* tapi ada *volunteering* yang dikelola oleh lembaga dan arahnya dimanfaatkan untuk jangka

■ Disarikan dari Webinar Kedermawanan dan Filantropi dalam Kerangka Moderasi Beragama, 28 Agustus 2020.

panjang. Biasanya *giving and volunteering* ini memang dari masyarakat dan dikelola untuk masyarakat. Dalam konsep studi filantropi itu tidak dikelola oleh negara.

Filantropi bermazhab keadilan sosial merupakan gerakan derma yang dikelola oleh lembaga yang intinya tidak saja untuk sekadar *charity* untuk membantu, tetapi juga untuk menghilangkan akar penyebab kemiskinan. Itulah poin utamanya. Selain itu, ada atensi pada jangka panjang dan penguatan kelembagaan yang bersifat universal non-diskriminatif. Ini adalah poin penting untuk diskursus tentang moderasi beragama dan menghargai perbedaan.

Fenomena filantropi berbasis keagamaan telah berkembang dengan pesat. Bahkan studi-studi menyatakan bahwa filantropi berbasis agama itu jauh lebih progresif, jauh lebih mampu menggalang banyak dana daripada filantropi sekuler.

Pertanyaannya, apakah lembaga filantropi berbasis agama bisa inklusif? Saya kira bisa. Dalam sejarah Indonesia sudah ada contoh-contohnya yang kuat. Juga di lembaga-lembaga filantropi berbasis Islam internasional misalnya yang ada di Eropa, yang memiliki unsur inklusif yang sangat kuat. Terdapat ayat dan hadis yang mengatakan bahwa zakat itu tidak hanya untuk muslim saja. Sejarah juga memperlihatkan banyak contoh tentang keberagaman moderat yang dilakukan dari gerakan filantropi.

Moderasi Beragama Pelaku Filantropi

Kita melihat banyak lembaga filantropi internasional yang sangat mengarah kepada universalitas, keberagaman, terutama menghormati agama yang lain, kemudian dalam berderma tidak membedakan siapa yang akan menerima manfaat. Namun di sisi lain, kesadaran moderasi beragama dalam praktik filantropi di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan.

Kendati penuh tantangan, saya tetap berkeyakinan bahwa lembaga filantropi itu memiliki peran besar untuk mengupayakan moderasi beragama dengan mendorong penguatan sisi kemanusiaan dan agama yang *rahmatan lil alamin* serta mendukung penguatan demokrasi dan *civil society*. Selama ini mungkin lembaga filantropi tidak jauh berpikir bahwa berderma itu sebenarnya sangat penting untuk penguatan *civil society*.

Di sinilah sebenarnya posisi sentral lembaga filantropi sebagai *intermediary* antara donatur dan penerima, sebagai lembaga *civil society*

yang dapat mengelola dana dan juga dapat memproduksi narasi. Memproduksi narasi tentu saja berdasarkan interpretasi yang dimiliki oleh lembaga. Memang secara umum banyak yang mengatakan bahwa lembaga ini adalah *donor driven*. Dalam beberapa hal, menurut saya hal demikian adalah benar. Sebab lembaga filantropi bisa mengedukasi donatur dan bisa mengedukasi penerima manfaat, hanya dibutuhkan pemerintah untuk mengawasi.

Dalam suatu wawancara, saya pernah bercerita tentang fenomena di mana lembaga-lembaga kecil itu masih banyak yang belum memiliki kesadaran terkait *impact* dari donasinya yang kadang malah memperuncing situasi yang mengarah ke konflik. Akhirnya, saya sampai pada satu proposisi yang perlu diriset lagi bahwa semakin besar satu lembaga, semakin punya potensi untuk inklusif dan menghormati keragaman. Itu yang saya lihat pada fenomena lembaga-lembaga filantropi di Indonesia.

Tentu saja tantangan lembaga filantropi dalam konteks moderasi itu sangat besar. Saya akan bercerita tentang STF. STF berawal pada tahun 2012, di mana Prof. Jamhari adalah salah satu pendiri utamanya, merespon persoalan banyak mahasiswa yang terancam *drop out*. Lembaga ini kemudian dibentuk dan fokus utamanya adalah beasiswa. Kami memiliki visi "*making philanthropy works for a better world for humanity*"; jadi kami ingin menggalakkan filantropi yang berkeadilan sosial untuk kemanusiaan di dunia.

Sejauh ini, STF UIN Jakarta telah menggulirkan sejumlah program. Di antaranya adalah menyelenggarakan program beasiswa dan pendidikan; mendorong bantuan kemanusiaan yang berjangka panjang, melaksanakan advokasi penguatan filantropi berkeadilan sosial, melakukan riset dan publikasi serta pelatihan metodologi riset, program *endowment*, pemberdayaan masyarakat melalui program Center for Rural Community Development and Social Entrepreneurship (CERCONDESOS), dan *charity store* sebagai media penjualan hibah barang untuk donasi.

Dalam program beasiswa, STF selalu berusaha untuk mendorong perdamaian. Karena beberapa studi menunjukkan jika suatu masyarakat berkonflik dan ada lembaga filantropi yang memihak, akhirnya konflik itu tidak akan selesai. Yang terjadi adalah bantuan *charity* itu membuat amunisi lebih jauh untuk konflik. Akhirnya kami berpikir untuk membuat beasiswa perdamaian di Poso dan di Papua, yang merupakan area *post* konflik atau potensi konflik. Dari beasiswa ini kami mencoba membuat

komunitas yang memiliki potensi konflik itu untuk saling menyapa. Selain itu, ada juga beasiswa Azyumardi Azra (Professor Azyumardi Azra Scholarship). Beasiswa ini tidak memiliki pembatasan pendaftar atau penerima berbasis latar belakang kelompok agama tertentu.

Kemudian ada Program Tabungan Kesehatan dan Asuransi Mikro BUNGKESMAS. Dari luar, orang mungkin melihatnya sebagai program tabungan kesehatan. Tetapi sebenarnya melalui program ini, kami membuat komunitas yang beragam itu saling menyapa, saling bertemu sehingga kemudian memunculkan pemahaman yang baik.

Sebagai penutup, dari pengalaman yang STF lakukan dan studi yang kami lakukan, kami melihat praktik filantropi berbasis agama memiliki potensi besar untuk moderasi beragama. Saya baru saja menerbitkan tulisan yang merespons 3 poin utama. Salah satunya adalah bahwa pandemi telah mendorong perubahan di mana ada potensi penguatan memberi ke siapa pun tanpa diskriminasi. Tentu saja ada peluang dan tantangan pada filantropi berbasis agama yang universal. Karena itu dibutuhkan dukungan untuk penguatan filantropi berbasis keadilan sosial untuk pengentasan kemiskinan, kesejahteraan, dan perdamaian, termasuk juga dukungan dari pemerintah untuk moderasi beragama dalam filantropi yang saya kira saat ini belum menjadi *concern*.

Religiusitas dan Pandemi Covid 19

Laifa A. Hendarmin

Koordinator Penelitian "Religion, Society and Pandemic" - PPIM UIN Jakarta

MASYARAKAT dunia, termasuk masyarakat Indonesia, tengah dihadapkan pada situasi Pandemi Covid 19. Sebetulnya, apa itu Covid 19? Covid 19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 atau jenis virus yang dideteksi dan diberi nama SARS-CoV-2. Sebenarnya Covid ini sama jenisnya dengan flu burung, namun ia merupakan varian virus berbeda karenanya disebut juga sebagai SARS-CoV-2. Terdeteksi pertama kali di Wuhan pada November 2019 karenanya virus ini populer disebut Covid 19.

Virus ini dikenal memiliki tingkat penularan yang sangat cepat dimana hanya butuh beberapa saat sudah menyebar cepat di berbagai negara di dunia. Dengan penyebarannya yang sangat cepat, Otoritas Kesehatan Dunia (World Health Organization atau WHO) mengumumkan status pandemik pada 11 Maret 2020 lalu. Karena cepatnya, Worldmeter mencatat, di dunia kini sudah 110 juta orang terinfeksi virus Covid 19 dengan 2 juta lebih kematian.

Kasus Covid 19 di Indonesia, pertama kali terjadi pada tanggal 2 Maret 2020. Namun dengan cepat segera menyebar hingga saat ini. Di Indonesia kasusnya sendiri telah menyentuh angka satu juta lebih warga terinfeksi dengan 33.000 lebih diantaranya kasus kematian yang disebabkan virus Covid 19. Angka ini bisa terus bertambah, baik secara lokal maupun nasional.

Khusus Indonesia, negara kita termasuk satu dari 20 negara dengan kasus Covid tertinggi dan pertama di ASEAN, kasus melampaui angka satu juta. Mengutip data @pandemictalks, Indonesia saat ini memimpin jumlah korban Covid dengan tingkat kematian harian Covid 19 tertinggi

■ Disarikan dari Webinar Penguatan Moderasi Beragama di Masa Pandemi ke-20, Jumat 19 Februari 2021

di Asia. Jumlahnya dua kali lipat dari Turki dan India. Sedangkan di negara Asia lain, angka terinfeksi virus Covid 19 dan tingkat kematian karenanya sudah relatif mengalami penurunan. Hal ini tentu perlu kita cermati, kenapa bisa demikian?

Antisipasi Pemerintah

Menghadapi persebaran virus Covid 19 ini, pemerintah Indonesia sendiri sebetulnya sudah banyak melakukan upaya menekan laju penyebarannya. Berbagai program kebijakan bertajuk protokol kesehatan telah banyak digulirkan. Yang paling awal, pemerintah mempopulerkan Gerakan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, menjaga jarak. Tidak berapa lama, pemerintah kembali mempopulerkan Gerakan 5M dengan menambah memakai masker, mencuci tangan dengan air mengalir, selain menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilisasi dan interaksi.

Di saat yang sama, pemerintah juga meluncurkan Program 3T, yaitu *testing, tracing, treatment* dengan memaksimalkan seluruh laboratorium kesehatan dan rumah sakit nasional. Lainnya, pemerintah juga menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Kebijakan ini diharapkan turut efektif membantu penurunan laju persebaran virus Covid 19.

Selanjutnya, pemerintah menerapkan kebijakan 'Bekerja dari Rumah' atau *Work from Home* bagi para pekerja yang biasanya bekerja di perkantoran, terutama instansi-instansi pemerintahan. Di saat yang sama, pemerintah juga menerapkan pembelajaran jarak jauh bagi siswa-siswi sekolah atau madrasah dan mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi sejak Maret 2020 lalu dan masih berlangsung hingga sekarang. Begitu juga pemerintah membatasi penyelenggaraan kegiatan keagamaan terutama di hari-hari besar keagamaan seperti penyelenggaraan shalat Jumat, tarawih, dan lain sebagainya.

Terakhir, pemerintah menggulirkan program vaksinasi yang diharapkan bisa menjadi solusi terdepan dalam menghentikan laju virus Covid 19. Dengan demikian, pemerintah sudah sangat banyak melakukan kebijakan atau upaya pencegahan penularan virus ini. Namun realita yang kita temukan hingga hari ini adalah laju infeksi penularan virus masih cukup tinggi.

Covid 19, Perilaku, dan Religiusitas Masyarakat

Mencermati sejumlah riset belakangan ini, persebaran virus Covid 19 di tanah air sejatinya tidak lepas dari perilaku atau pengetahuan masyarakat tentang Covid itu sendiri. Survei Badan Pusat Statistik (BPS) di DKI Jakarta pada tanggal 7-14 September 2020 tentang kepatuhan masyarakat terhadap program 3M misalnya bisa menggambarkan perilaku masyarakat dalam mentaati protokol kesehatan pencegahan Covid. Survey BPS mencatat tingkat kepatuhan masyarakat memakai masker mencapai 92 persen, kepatuhan mencuci tangan 81 persen, sedang kepatuhan menjaga jarak hanya 70 persen atau lebih rendah dibanding kedua lainnya. Menariknya, kelompok yang paling rendah tingkat kepatuhan adalah pada masyarakat kelompok usia 17-35 tahun.

Penelitian serupa juga dilakukan Fakultas Kesehatan Masyarakat UIN Jakarta di 13 kelurahan wilayah Tangerang Selatan pada bulan November 2020. Hasilnya ternyata tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah tidak lebih baik dari DKI Jakarta. Riset mencatat tingkat kepatuhan masyarakat menggunakan masker hanya 78 persen dan kepatuhan mencuci tangan 74 persen. Seperti halnya di DKI Jakarta, tingkat kepatuhan menjaga jarak juga menjadi paling rendah dibanding mematuhi dua hal lainnya. Dari sini kami menggarisbawahi *pattern* masyarakat Indonesia yang sulit untuk menjaga jarak sebagai salah satu upaya pencegahan penyebaran Covid 19 di masyarakat. Pertanyaannya, mengapa bisa demikian?

Riset kualitatif Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI Jakarta) menggarisbawahi kuatnya kultur dan keyakinan agama di kalangan masyarakat Indonesia. Mencium tangan para pemuka agama dan orang tua dinilai sebagai bentuk kesopanan dan dinilai tidak sopan jika tidak melakukannya. Melalui temuan IAKMI ini setidaknya kita bisa memahami mengapa perilaku untuk menjaga jarak sebagai salah satu protokol kesehatan sangat sulit ditaati.

Ukuran religiusitas tampaknya juga terkonfirmasi dari riset Ruhana & Burhani. Riset yang dilakukan pada 18.000 responden di 34 provinsi di Indonesia berfokus pada pengetahuan dan pengalaman masyarakat terkait beribadah di rumah ibadah. Temuan mereka menunjukkan bahwa 20 persen masyarakat selalu beribadah di rumah ibadah dengan 12 persen-nya mencatatkan frekuensi sering, kendati mereka tinggal di daerah zona merah. Ini menunjukkan betapa sulit bagi masyarakat Indonesia untuk tidak berkumpul karena masyarakatnya juga bukan masyarakat individual, terutama pada aktifitas keagamaan.

Fenomena sosial yang menunjukkan korelasi keagamaan dengan sikap terhadap pandemik juga ditunjukkan dengan beberapa kasus, seperti di Gowa, Sulawesi Selatan. Saat persebaran virus Covid 19 menanjak, komunitas Jamaah Tabligh Indonesia justru tetap menggelar konferensi *Ijtima'* Jamaah Tabligh di Gowa dengan dihadiri sekitar 25.000 orang peserta. Walaupun pada akhirnya berhasil dicegah dan dibubarkan, namun 8.000 orang peserta sudah datang dan sebagian besar diantaranya terkonfirmasi covid.

Kasus lain seperti disebutkan Ketua Umum Pusat Robithoh Ma'ahid Islamiyah NU Kiai Abdul Ghaffar Rozin di mana sebanyak 333 kiai meninggal selama pandemi. Menurutnya, jumlah kematian kiai ini meningkat setelah hari raya Idul Fitri dan merangkak naik hingga Idul Adha. Tentunya ini tidak bisa dilepaskan dari kuatnya budaya kita, tingginya penghormatan masyarakat terhadap kyai, sehingga tidak bisa menghindari kontak fisik atau kerumunan. Kasus lain adalah 47 orang jamaah Gereja Bethel Indonesia di Palangkaraya yang terinfeksi Covid 19 setelah melakukan misa natal sebelum akhirnya meluas hingga 60 orang. Jadi aktivitas ritual dan sosial keagamaan sepertinya perkara yang begitu lekat dalam masyarakat kita sekaligus menegaskan korelasi dengan fakta tingginya tingkat persebaran virus Covid 19.

Pengetahuan, Religiusitas, dan Kohesi Sosial

Terkait kasus-kasus di atas dan korelasinya dengan persebaran virus Covid 19, terdapat beberapa teori yang bisa menjelaskan perilaku kesehatan masyarakat di era pandemi ini. Teori pertama adalah teori Knowledge, Attitude, dan Practice yang disampaikan N.E. Schwartz 1976 (*Nutrition Knowledge, Attitudes and Practices of Canadian Public Health Nurses, Journal of Nutrition Education*, 8(2): 28-31.) Schwartz melihat pengetahuan seseorang berkorelasi dengan perilaku kesehatannya. Beberapa penelitian lain yang lahir belakangan turut membuktikan kesimpulan Schwartz bahwa pengetahuan seseorang sangat mempengaruhi perilaku kesehatannya. Pengetahuan yang cukup dan sikap yang baik dapat menghasilkan perilaku yang baik. Ini juga sejalan dengan kesimpulan Rosenstock (1974) bahwa pengetahuan dapat menjadi kekuatan pendorong atau pengubah untuk membentuk satu perilaku seseorang. Ini menjadi dasar teoretik bagi kita untuk memahami tingkat pengetahuan dan perilaku masyarakat terhadap isu kesehatan, terutama merespon virus Covid 19 sejauh ini.

Teori kedua adalah The Health Belief Model (HBM) yang melihat

sejauh mana kesadaran seseorang akan arti pentingnya kesehatan. Teori ini menjelaskan orang itu mau atau tidak untuk mematuhi perilaku kesehatan atau pencegahan suatu penyakit. Berdasar teori, setiap orang dimungkinkan untuk mendapatkan informasi yang sama baik kuantitas maupun kualitasnya, namun belum tentu seluruhnya menghasilkan perilaku yang juga sama. Jadi, penerimaan sebuah informasi yang sama tergantung juga pada kesadaran atau proses kognitif masing-masing. Sehingga kendati orang-orang mendapatkan informasi yang sama, tapi mungkin menghasilkan perilaku yang berbeda.

Dalam hal ini, ada beberapa aspek yang dapat dilihat sebagai faktornya seperti perasaan atau kerentanan yang dirasakan seseorang di dalam dirinya (*perceived susceptibility*). Kalau misalnya dia merasa dirinya rentan terhadap suatu penyakit tertentu, maka dia akan berusaha mencegah penyakit itu mengancam dirinya. Contoh, apabila seseorang mengetahui bahwa dirinya memiliki penyakit diabetes, maka dia lebih taat akan keparahan penyakitnya dengan mengakses informasi tentang penyakitnya sebagai upaya preventif terhadap keparahan penyakitnya. Ini juga bisa digunakan pada kasus bagaimana tindakan seseorang saat menyadari kerentanan dirinya akan paparan Covid 19.

Teori terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah bagaimana hubungan religiusitas dengan perilaku kesehatan. Berkaca pada berbagai kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, kami menangkap perilaku kesehatan sangat berkaitan dengan religiusitas seseorang. Mengapa demikian? Ternyata jawabannya, semakin religius seseorang maka dia akan sangat mengurangi stressnya sehingga kesehatannya lebih baik. Misalnya, saat seseorang tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan merokok karena mengikuti perintah agama, maka dengan sendirinya tindakan religius tersebut berdampak positif pada kesehatannya. Sebaliknya saat seseorang tidak mengindahkan larangan keagamaan dengan tetap meminum minuman beralkohol, merokok, dan melakukan aktifitas seks di luar pernikahan maka akan cukup beresiko terhadap kesehatannya. Namun bagaimana dengan aktifitas religius yang bersifat kolektif dengan dilakukan secara bersama-sama seperti shalat berjamaah dan dinilai rentan sebagai klaster penyebaran virus Covid 19? Hal ini juga sepertinya perlu untuk dilakukan kajian teoretik lebih mendalam.

Hal lain yang kami lihat terkait bagaimana masyarakat bersikap terhadap pandemi Covid 19 juga tidak lepas dari kondisi sosial ekonomi mereka. Kita tahu Covid 19 memiliki dampak yang sangat

tinggi terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat. Media massa sudah banyak melaporkan tentang penurunan perekonomian dan meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Hal yang perlu dilihat pada hal ini adalah kohesi sosial yang dilakukan masyarakat. Diketahui, kohesi sosial merupakan kemampuan suatu kelompok untuk menyatu dengan ditandai komunikasi dan interaksi individu dengan komunitas atau masyarakatnya. Motivasi bertahan hidup dan mencapai kesejahteraan seringkali menjadi alasan masyarakat membangun kerjasama atau kohesi sosial. Dengan adanya tantangan Pandemi Covid 19 perlu kita lihat bagaimana masyarakat membangun kohesi sosial dalam menghadapinya.

Terakhir, melihat respon sosial atas pandemi Covid 19 ini, ada tiga elemen yang harus dilihat sebagai tiga hal yang saling berhubungan (*connectedness*), yaitu keterhubungan seseorang dengan komunitasnya, relasi sosialnya, dan terakhir fokus pada kebaikan bersama. Ketiganya diperkenalkan Bertelsmann Stiftung yang menggunakannya untuk mengukur kohesi sosial di era pandemik di 37 negara, tidak termasuk Indonesia di dalamnya. Namun merujuk penelitian sejenis tahun 2009-2015, kami melihat bahwa ternyata orang Indonesia itu mempunyai karakter sama, yaitu fokus pada kebaikan bersama. Ini dibuktikan dengan tingginya solidaritas sosial mereka, kemauan untuk saling membantu, menghormati aturan sosial dan sangat aktif berpartisipasi dalam aktifitas sipil. Terkait pandemi Covid 19 ini, dan dengan situasi saat ini yang sudah terkoneksi melalui internet sehingga memungkinkan munculnya kohesi sosial digital, bagaimana respon yang dibangun masyarakat untuk bersama-sama menghadapi pandemi Covid 19.

Demikian beberapa hal menyangkut pandemi dan perilaku masyarakat Indonesia dalam meresponnya, termasuk sikap dan perilaku keagamaannya. Ringkasnya, keberagaman, pengetahuan, sikap, dan persepsi seseorang perlu dilihat secara utuh dalam memahami bagaimana masyarakat merespon pandemi Covid 19 dengan berbagai dampaknya.

Majelis Ulama Indonesia, Wasathiyah Islam, dan Fatwa-Fatwa Seputar Pandemi

Aminuddin Yakub
Pengurus IKNB Syariah MUI

MODERASI beragama merupakan gagasan relevan melihat situasi dan kondisi kita selaku bagian dari masyarakat Indonesia. Karena itu, saya sepakat jika moderasi beragama harus terus dilakukan penguatan dan menjadi gerakan berkelanjutan. Penguatan dan penyuaaran moderasi beragama tidak boleh berhenti karena tantangan kehidupan sosial di masa depan akan semakin kompleks dan pelik. Terlebih saat ini kita berada di masa pandemi, di mana kondisi sosial, ekonomi, dan politik kita dalam kondisi yang sangat kritis.

Sebagai sebuah gagasan relevan, perlu diakui, moderasi beragama dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan pertama dari sisi keagamaan. Agama memiliki ruang untuk diinterpretasikan oleh penganutnya, termasuk menerima interpretasi bercorak radikal-ekstrimis keagamaan. Tantangan selanjutnya, sosial budaya. Interpretasi tafsir keagamaan bercorak radikal-ekstremis juga tidak jarang mendapat dukungan dari sebagian aspek kebudayaan kita yang menyimpan watak intoleran.

Tantangan lainnya, politik identitas. Politik demikian beberapakali muncul pada momen-momen politik tanah air seperti pemilihan anggota legislatif, presiden dan kepala daerah. Politik demikian tidak jarang mempertajam polarisasi masyarakat sehingga menyuburkan sikap intoleran di tengah-tengah mereka. Faktor ekonomi menjadi tantangan lain bagi moderasi beragama. Krisis ekonomi menyebabkan perekonomian masyarakat semakin terpuruk sehingga berpeluang menjadi lahan subur tumbuhnya benih-benih radikal.

Perkembangan teknologi informasi juga menjadi tantangan signifikan

■ Disarikan dari Webinar Penguatan Moderasi Beragama di Masa Pandemi ke-20 Jumat 19 Februari 2021

bagi moderasi beragama. Selain menyediakan dampak positif dengan kemudahan akses informasi dan komunikasi secara langsung, kemajuan teknologi informasi juga menjadi lahan luas bagi kelompok-kelompok radikal mengkampanyekan gagasan-gagasan mereka. Terlebih dengan kehadiran platform media sosial yang memberikan keleluasaan bagi setiap orang dalam memproduksi konten yang tumbuh berdampingan dengan massifnya kecenderungan publik lebih banyak mengakses informasi melalui media ini.

Fenomena lain dari tantangan moderasi beragama yang tak bisa diabaikan adalah pudarnya afiliasi keagamaan. Jika dulu orang dengan bangga berafiliasi dengan organisasi massa Islam moderat seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lainnya. Namun saat ini, kebanggaan berafiliasi seperti demikian menjadi pudar. Tak hanya itu, afiliasi juga semakin pudar ketika di saat yang sama berlangsung pergeseran pengakuan atas otoritas keagamaan berdasarkan visi politik dan keagamaan yang sesuai.

Demikian beberapa tantangan yang dihadapi dalam mengimplementasikan moderasi beragama. Tantangan lain yang perlu dipertimbangkan saat ini adalah pandemi Covid 19.

MUI dan Wasathiyah Islam

Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan rumah besar umat Islam yang memayungi organisasi-organisasi massa Islam di Indonesia. MUI juga menjadi wadah musyawarah para ulama, zuama, dan cendekiawan muslim tanah air. MUI juga menjadi *melting pot* untuk gagasan dan khazanah pemikiran Islam. Sebagai rumah besar sekaligus *melting pot*-nya ormas Islam, dinamika di dalam MUI sendiri sangat kuat sekali. Perdebatan-perdebatan menyangkut persoalan-persoalan kehidupan berlangsung sangat keras. Tapi bersyukur, ormas-ormas Islam yang berhimpun di MUI merupakan ormas-ormas Islam yang menjadi lokomotif pemikiran atau pergerakan Islam yang moderat.

Tahun 2015, MUI telah menetapkan dengan tegas gerakan dan *fikroh* pemikiran Islam yang ingin dikembangkan oleh MUI, yaitu Islam *wasathiyah*. Ketika NU menggulirkan gagasan Islam Nusantara, Muhammadiyah menggelorakan gerakan Islam Berkeadaban dan Berkemajuan, maka MUI mengikrarkan diri sebagai lokomotif utama gerakan *wasathiyah* Islam.

Dalam pedoman organisasi, *wasathiyah* Islam menjadi asas, dasar dan landasan pergerakan fikrah atau pemikiran MUI. *Wasathiyah* Islam

juga *manhaj* yang harus dipilih seperti telah dengan sangat tegas disampaikan KH Ma'ruf Amin saat menjadi Ketua Umum MUI. Beliau mengibaratkan MUI dan *wasathiyah* Islam sebagai lokomotif dan rel yang harus dipilih organisasi masa Islam yang berada di bawah naungannya.

MUI sendiri menggariskan 10 karakteristik Islam *wasathiyah*. Diantaranya, *tawazzun* (keseimbangan), *tawasuth* (jalan tengah, tidak berada di ujung kiri dan tidak berada di ujung kanan), *tasamuh* (toleransi), dan *i'tidal* (proporsional, tegas lurus). Selanjutnya, Syuro (menyelesaikan masalah dengan musyawarah), *musawa* (bersikap egaliter bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum), *awlawiyah* (menyelesaikan hal-hal yang lebih prioritas daripada yang bersifat parsial), *ishlah* (pembaharuan dan juga perbaikan secara terus menerus). Kemudian, *tahadhur* (berkemajuan berkeadaban) dan *tathawwur wal ibtikar* (selalu berkembang dinamis dan inovatif dan kreatif). Inilah karakteristik-karakteristik Islam *wasathiyah* dan menjadi *manhaj* yang dikembangkan MUI.

Dalam ungkapan Kyai Ma'ruf, Islam *wasathiyah* merupakan cara berpikir yang tidak boleh tekstual dan rigid, tapi juga tidak boleh longgar. Prinsipnya, *bi la hududin wa la thowabit* atau dalam ungkapan yang seringkali beliau katakan "*la fundamentalian wa la liberalian*." Tidak fundamental dan radikal, tapi juga tidak liberal. Maka, sikap Islam *wasathiyah* menjadi penegas sikap moderat yang berada di tengah-tengah.

Merujuk pada kondisi belakangan ini, pengarusutamaan Islam *wasathiyah* merupakan kebutuhan mendesak. Hal ini seiring dengan menguatnya radikalisme di masyarakat, baik radikalisme kiri yaitu liberalisme dan sekularisme maupun radikalisme kanan yang intoleran dan penuh kekerasan berkedok agama.

Pandemi Covid 19 dan Respon MUI

Seperti disebutkan, tantangan lain yang kini dihadapi MUI adalah pandemi. Di luar risiko kesehatan, pandemi telah menghadirkan beragam tantangan bersifat keagamaan yang harus direspon oleh MUI. Secara keagamaan, pandemi telah mendorong lahirnya berbagai penafsiran keagamaan terkait pandemi dan isu-isu sosial keagamaan yang hadir di sekitarnya, termasuk kehidupan beribadah.

Sejak pandemi Covid 19 berlangsung, MUI telah berupaya meresponnya sesuai kapasitas MUI sendiri. Sekurangnya delapan fatwa diterbitkan MUI sebagai respon atas berbagai isu sosial keagamaan umat.

Fatwa pertama adalah Fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Covid. Fatwa ini memberi pedoman bagi masyarakat bagaimana mereka menjalankan kewajiban beribadah di masa pandemi didasarkan pada berbagai argumentasi (*hujjah*) yang digali dari berbagai sumber hukum Islam.

Di luar kelompok yang merespon positif, tidak sedikit masyarakat yang tidak menanggapinya. Kelompok terakhir biasanya merupakan masyarakat yang beranggapan bahwa Covid 19 merupakan penyakit hasil rekayasa atau konspirasi musuh-musuh Islam. Bahkan ada juga yang menganggap Covid 19 sebagai *hoax* dan menganggapnya enteng sebagai penyakit biasa.

Lebih dari itu, sebagian masyarakat juga berpendirian bahwa keberadaan Covid 19 tidak boleh mengendurkan ketaatan beribadah kolektif seperti shalat berjamaah. Jangan takut kepada Covid 19, tapi takutlah hanya kepada Allah! Begitulah kira-kira tanggapan mereka. Karenanya, shalat Jumat tetap dan shalat-shalat fardhu lainnya dilakukan secara berjamaah. Padahal fatwa sendiri telah menjelaskan kemudahan beribadah dengan alasan keamanan kesehatan.

Covid 19 juga menghadirkan pertanyaan bagi kalangan tenaga kesehatan dalam melaksanakan kewajiban beribadah sementara mereka tetap harus menjalankan protokol ketat kesehatan. Pertanyaan berkisar seputar tata cara (*kaifiyat*) bersuci dan shalat bagi mereka yang harus tetap menggunakan alat pelindung diri (APD). Untuk itu, MUI kemudian kembali menerbitkan fatwa yang mengaturnya.

Hal lebih penting adalah penanganan pasien, terutama pengurusan jenazah muslim terinfeksi virus Covid 19. MUI kemudian menerbitkan fatwa dan panduan yang diperlukan dalam pengurusan pasien dan jenazah terpapar virus. Ini menjadi penting guna menjawab pertanyaan-pertanyaan pengurusan pasien dan jenazah seperti banyak disampaikan masyarakat.

MUI juga mencoba memberikan terobosan isu sosial keagamaan dengan menerbitkan fatwa yang mendukung pemanfaatan harta zakat *infaq shodaqoh* dalam pembiayaan penanggulangan wabah Covid 19. MUI memutuskan bahwa penanganan Covid 19 bisa menjadi objek sasaran pemanfaatan dana filantropi selain objek-objek sasaran lainnya seperti disebutkan dalam berbagai literatur *fikih* Islam.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah membatasi kerumunan guna menekan persebaran virus Covid 19, MUI juga menerbitkan aturan yang mendukung. Selain pengaturan soal ibadah Idul Fitri, aturan yang sama

juga mendorong agar pelaksanaan kegiatan takbiran tidak dilakukan secara berkerumun guna menekan peluang persebaran virus.

Mengingat pentingnya pengaturan ibadah kolektif yang secara rutin dilakukan masyarakat seperti shalat berjamaah dan shalat Jumat, MUI juga menerbitkan keputusan yang mengaturnya. Keputusan MUI mempersilahkan umat yang tetap ingin menjalankan ibadah secara berjamaah, namun dengan penyesuaian protokol kesehatan seperti pengaturan *shaf* (barisan) shalatnya.

Begitu juga fatwa tentang pelaksanaan shalat Idul Adha dan penyembilan hewan kurban. Selain menjaga kesehatan dari peluang terpapar virus, hewan kurban juga perlu diatur karena ia merupakan salah satu media persebaran bakteri dan virus yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Terakhir, vaksin. Vaksin ini yang paling menarik sehingga MUI perlu meresponnya dari perspektif keagamaan. Menarik karena isu vaksin telah sejak lama menjadi bahan perdebatan masyarakat muslim. Perdebatan ini kembali hadir dengan kehadiran masyarakat yang menolak vaksin dengan berbagai alasan seperti vaksin sebagai bentuk konspirasi anti Islam, pembunuhan Islam secara tersembunyi, bahkan ada juga yang berkeyakinan virus ini bisa disembuhkan pengobatan ala Nabi (*thibunnabawi*). Bahkan lebih parah lagi, vaksin juga menghadapi penentangan masyarakat yang menolak karena dilatari kebencian etnis-ideologis pada negara-bangsa yang memproduksinya.

Demikian berbagai respon yang coba diberikan oleh MUI dalam situasi pandemi Covid 19. MUI merasa berkewajiban untuk selalu hadir dan memberikan respon yang umat butuhkan di bidang sosial keagamaan pada situasi saat ini.

Mengaktualkan Fungsi Moderasi Beragama

Martin Lukito Sinaga

Pendeta Kristen Protestan dan Tenaga Ahli Utama BPIP

BERBICARA keterkaitan antara pandemi Covid 19 dan moderasi beragama di Indonesia, saya terlebih dahulu ingin menyampaikan pengalaman moderasi beragama di kalangan masyarakat sejumlah pedesaan di Indonesia. Saya berharap kita bisa menarik pelajaran bagaimana praktek moderasi itu memiliki fungsinya bagi masyarakat dalam berbagai aspek sosial kehidupan masyarakat. Ini juga untuk menyoisir sejauh mana potensi besar moderasi beragama dapat kita gunakan dalam menghadapi pandemi Covid 19.

Pertama adalah moderasi beragama dalam kasus masyarakat Desa Nale, di bawah Gunung Merbabu, antara kawasan Salatiga dan Semarang. Menyusul ketegangan peristiwa politik tahun 1965, hampir setengah penduduknya kemudian menjadi Kristen. Ini menarik perhatian, misionaris dari Belanda menyumbang untuk pendirian gereja bagi jemaat baru. Namun oleh carik desa yang kebetulan memimpin wilayah setempat, dana sumbangan malah digunakan untuk membiayai pendirian sekolah, bukan gereja. Apa alasannya? Ia beralasan, pengalihan dana bantuan untuk pembangunan sekolah dilakukan agar yang menikmatinya tidak hanya warga beragama Kristen, melainkan juga anak-anak dari komunitas agama lain.

Masih di Desa Nale, masyarakat juga memiliki kebiasaan untuk saling berkunjung ke keluarga atau tetangga yang merayakan hari-hari besar keagamaannya. Saat ada keluarga atau tetangga yang beragama Islam merayakan hari raya Idul Fitri, maka keluarga dan tetangga yang Kristen ikut datang dan turut merayakan hari raya tersebut. Seperti halnya saudara-saudara mereka yang muslim berziarah dan membersihkan

■ Disarikan dari Webinar Penguatan Moderasi Beragama di Masa Pandemi (ke-20) Jumat, 19 Februari 2021

kuburan keluarga dan leluhur menjelang Ramadhan, maka saudara-saudara Kristen juga melakukan hal serupa dalam bentuk kegiatan Pajatan yaitu membersihkan kuburan leluhur seperti saudara muslimnya.

Sekilas dari masyarakat di Desa Nale, Jawa Tengah, saya menemukan proses kohesi sosial melalui praktik moderasi beragama masyarakatnya. Perayaan hari-hari besar agama dan ritual keagamaan lainnya menjadi media bagi mereka untuk berkomunikasi dengan saling sapa, saling senyum, dan saling berkunjung. Bisa dikatakan, ritual keagamaan justru menjadi peluang untuk merekatkan hubungan sosial masyarakat yang berbeda keyakinan.

Dari Jawa Timur, menarik kita mengikuti pengalaman masyarakat Desa Balun, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Masyarakatnya menyebut mereka sebagai warga Kampung Pancasila. Mewakili kacamata muslim, Kyai Abdul Madjid yang mengasuh pesantren dan mendirikan Universitas Billfath saat saya ditemui menuturkan bahwa keberadaan kampung terkait dengan pemahaman bahwa Islam bukan soal hitam-putih, tapi soal keleluasaan rohani.

Menyusul peristiwa politik 1965 yang berimbas kepada masyarakat di lapisan bawah, masyarakat di Desa Balun juga menghadapi masalah yang sama, ketegangan menghadapi pengaruh komunis. Kondisi ini selanjutnya melahirkan kesadaran para pemeluk Islam, Kristen dan Hindu untuk hidup bersama-sama sehingga perayaan keagamaan Islam, Kristen, Hindu bahkan tradisi keberagaman Abangan tetap dihormati.

Dengan demikian, keberagaman di desa Balun semakin kental pasca peristiwa politik 1965. Namun pengentalan demikian bukan ditarik ke bentuk radikal, melainkan sikap moderat dalam menghadapi perbedaan yang ada. Maka saat ini, di alu-alun Desa Balun berdiri tiga rumah ibadah, merepresentasikan ideal Desa Pancasila.

Sikap moderat juga tumbuh dan terawat dengan baik melalui kebiasaan warganya untuk saling mengunjungi saat keluarga-tetangga berbeda agama merayakan hari-hari raya agamanya. Mereka juga hidup dalam guyub dengan bergotong royong, termasuk membangun dan menjaga saluran air desa mereka sejauh 32 km ke sumbernya.

Pengalaman masyarakat Desa Balun menjelaskan kepada kita bahwa moderasi beragama telah tumbuh di tengah-tengah masyarakat, bahkan masyarakat pedesaan, melalui sikap penghargaan terhadap keragaman. Sikap ini selanjutnya diaktualkan dalam komunikasi-interaksi kehidupan keseharian mereka, termasuk menerapkan pola hidup guyub dalam mengatasi berbagai persoalan kehidupan masyarakatnya.

Kemaslahatan Moderasi Beragama

Cerita tentang kehidupan di dua desa di Jawa menegaskan pentingnya moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya membangun sikap saling menghargai, namun moderasi beragama juga memiliki fungsi aktual yang dirasakan langsung oleh masyarakat atas berbagai persoalan kehidupan mereka. Moderasi tidak hanya berarti sikap batin, melainkan juga bermakna nyata melalui bentuk kemaslahatan sosial yang dikandungnya.

Saya setuju terhadap pendapat yang menyatakan bahwa sikap moderasi beragama merupakan pengejawantahan esensi keagamaan masing-masing, baik esensi ke-Islaman, esensi ke-Kristenan, maupun lainnya. Namun lebih dari itu, moderasi beragama bisa menjadi sumber potensial dalam menggerakkan partisipasi semua pihak dalam mengatasi berbagai problem kehidupan masyarakat.

Pengalihan dana pembangunan gereja untuk sekolah yang bisa dinikmati anak-anak non-Kristiani seperti di desa Ngale merupakan perwujudan moderasi beragama. Pada akhirnya, moderasi ini menghasilkan dampak yang lebih luas dengan terbangunnya kohesi sosial masyarakatnya untuk terlibat dalam kehidupan yang penuh rukun. Bahkan di Desa Balun kita bisa melihat bagaimana sikap moderasi beragama bisa mewujudkan kebersamaan warganya dalam memenuhi kebutuhan primer mereka, sarana air.

Di situasi seperti saat ini, dimana masyarakat dunia dan Indonesia tengah dihadapkan pada situasi pandemi Covid 19, sikap moderasi beragama menjadi sangat relevan. Moderasi beragama menyimpan potensi terbaik masyarakat untuk menghadapi persoalan ini secara bersama-sama. Karenanya, moderasi perlu terus dirawat dan jangan sampai rusak.

Terakhir, selain moderasi beragama itu sendiri, hal lain yang cukup penting dalam mengoptimalkan moderasi beragama bagi kemaslahatan sosial adalah peran seorang pemimpin. Pemimpin dalam hal ini tidak hanya dituntut mampu mengkomunikasikan kebersamaan dan model beragama yang lebih moderat, melainkan juga mampu menganalisis masalah dan berstrategi mencari peluang penyelesaiannya.

Semoga pengalaman Desa Ngale dan Desa Balun juga bisa kita terapkan dalam memfungsikan moderasi beragama bagi kehidupan nyata, terutama dalam menghadapi pandemi Covid 19 ini. Semoga.

Indonesia memiliki anugerah yang tidak dimiliki oleh negara lain, yaitu keragaman etnis, bahasa, budaya, dan agama. Keragaman ini merupakan kekayaan yang dapat menjadi modal penting bagi bangsa Indonesia dalam mendorong kehidupan yang damai dan sejahtera. Guna merawat kekayaan keberagaman ini, moderasi beragama diyakini dapat menjadi salah satu jalan keluar. Buku ini berisi cara pandang dan kutipan penting dari berbagai macam tokoh bangsa yang diambil dari Seri Webinar Moderasi Beragama. Webinar ini dinisiasi oleh Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Jakarta melalui program CONVEY Indonesia. Buku ini membuktikan bahwa konsep moderasi beragama dapat menjadi solusi alternatif terhadap isu-isu kontemporer yang muncul di masyarakat Indonesia.

